



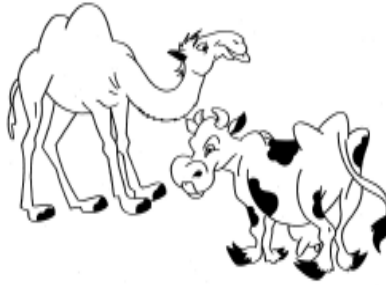
DAGING SEMBELIHAN ANTARA HALAL DAN HARAM

Binatang yang dipotong, bahkan makanan apa saja, kalau disediakan untuk “sesajen”, menjadi haram. Sebenarnya yang disebut Al-Quran, ... (*sembelihan*) apa saja yang untuk itu tidak disebutkan nama Allah (Q., 6: 121) maksudnya adalah sesajen, bukan sekadar menyembelih tanpa membaca *bismillâh*. Karena itu, membaca *bismillâh* kemudian menjadi perselisihan dalam fiqih; ada yang mengatakan perlu dan ada yang mengatakan tidak. Sebab, seorang Muslim yang menyembelih binatang pastilah untuk dimakan, karena itu halal. Bahkan, ayat terakhir yang turun kepada Nabi (Q., 5: 3) sebenarnya adalah mengenai hukum makanan yang intinya kehalalan makanan orang-orang Ahl Al-Kitab bagi kita. Karena itu, kalangan mazhab Hanbali tidak pernah mempersoalkan makanan orang Barat; orang Saudi kalau ke Amerika makan apa saja yang ada karena dipandang halal. Maka ketika di Amerika dan negara Barat

ada toko berlabel *halal meat* (daging halal), menurut mazhab Hanbali dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Sebab semua makanan yang ada di situ halal, karena disembelih oleh orang-orang Ahl Al-Kitab, dan menyembelihnya jelas tidak untuk maksud sesajen. Tetapi kalau sesajen, apa pun bentuknya, haram. Di sini umat Islam sering salah paham, mengharamkan makanan orang Kristen dan Yahudi tetapi menghalalkan sesajen di sawah-sawah. Maka menyembelih kerbau dengan niat kepalanya untuk jembatan, seluruh dagingnya menjadi haram. Tetapi menyembelih kerbau untuk selamatan orang meninggal, tidak apa-apa karena dalam rangka untuk mendoakan.

Sebagai orang yang masih hidup mestinya kita renungkan, sebab tidak ada yang bisa dilakukan untuk orang yang sudah meninggal kecuali mendoakan. Maka, sebisa mungkin dalam berdoa kita menyempatkan mendoakan mereka. Ini dianjurkan betul oleh agama, sehingga kita diajari untuk berdoa, “*Allâhumma’ghfir lanâ wa li al-mus-*

limîn wa al-muslimât al-abyâ'i minhum wa al-amwât' (Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang Muslim laki-laki maupun perempuan, yang masih hidup maupun yang sudah mati). Kalau untuk berdoa, dan supaya mempunyai efek lebih kuat dari segi emosi, kita diundang ke rumah orang yang ditinggal mati keluarganya, *why not, what's wrong with that!* Karena daging kerbau dimaksud bukan diperuntukkan bagi ruh yang telah meninggal. Jadi bukan sesajen.



DAJJAL PEMIMPIN PALSU

Dalam hadis ada gambaran mengenai Dajjal. Secara harfiah, *dajjâl* berarti penipu, pembohong. Kalau di Barat (karena berorientasi kepada Kristen), Dajjal ini diterjemahkan dengan berbau Kristen, yaitu anti-Kristus, orang yang melawan Mesias. Anti-Kristus artinya Kristus yang bohong. Karena itu, padanannya adalah *Al-Masih Al-Dajjâl*. Di kalangan NU ada sebuah doa yang intinya meminta perlindungan kepada Allah dari godaan *Al-Masih Al-Dajjâl*, Al-Masih Penipu.

Memang sekarang ini dalam teologi Kristen, Al-Masih menjadi juru selamat akibat dari dua perkembangan teologi Kristen, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi Kristus, lalu ada istilah anti-Christ. Tetapi, kalau dikembalikan ke aslinya dalam bahasa Ibrani, Al-Masih itu artinya orang yang diusapi kepalanya dengan air suci yang merujuk pada upacara pengangkatan seseorang menjadi pemimpin

agama. Jadi, Al-Masih itu artinya orang yang sudah diusapi, yaitu pemimpin agama. Konsep Islam tentang Isa Al-Masih berbeda dengan teologi Kristen. Sebetulnya Isa itu bukan satu-satunya Al-Masih. Al-Masih itu banyak sekali, semua pemimpin agama dalam agama Yahudi disebut *Masih* atau *Al-Masihyâh*. Anggapan bahwa Isa adalah Al-Masih yang terbesar, itu suatu kekeliruan. Sama kelirunya kalau orang menyebut nabi dengan asosiasi langsung kepada Nabi Muhammad, sebab nabi itu banyak. Disebut Al-Masih, artinya adalah orang yang sudah dinyatakan sebagai pemimpin agama melalui upacara penyucian dengan air

suci. Kalau dalam Kristen, Isa itu dibaptis oleh Yahya (John) di Sungai Jordan, atau yang kemudian terkenal dengan *John the Baptist* (Yahya Pembaptis).

Sebenarnya, Al-Masih itu artinya pemimpin agama. Karena itu, *Al-Masih Al-Dajjal* artinya pemimpin palsu. Dalam hadis-hadis diperingatkan bahwa pemimpin agama palsu ini akan muncul sebelum hari kiamat tiba. Dalam tafsiran-tafsiran “ulama tradisional”, Dajjal itu berbadan sangat besar, matanya cuma satu, dan membawa pikulan, satu surga dan satu neraka, tetapi surga dan nerakanya satu. Orang dibujuk untuk mengikuti dia agar nanti masuk surga, padahal nanti di akhirat masuk neraka, sebab surganya palsu. Sebaliknya, orang yang menentang akan diperingati bahwa nanti dia akan masuk neraka. Ilustrasi-ilustrasi itu bisa dipahami secara simbolik. Artinya, *Al-Masih Al-Dajjal* adalah tokoh-tokoh agama yang terlalu mudah menjanjikan keselamatan padahal tidak benar. Al-Quran sendiri penuh dengan peringatan mengenai hal itu. Misalnya, perkataan bahwa orang-orang beriman ialah orang-orang yang berbuat baik, tetapi hatinya masih malu kepada Tuhan kalau-kalau perbuatan baiknya tidak bakal diterima. *Dan mereka yang memberikan sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena tahu akan kembali kepada Tuhan, mereka*

itulah yang segera menyambut segala pekerjaan yang baik (kembali kepada Tuhan—NM) (Q., 23: 60). Dalam sebuah hadis, ‘A’isyah menanyakan tentang firman ini, “Hai Nabi, apakah orang itu berbuat baik yakni bersedekah tetapi pada saat yang sama dia mencuri, berzina dan sebagainya, sehingga dia tidak yakin bahwa nanti di akhirat diterima?” Jawab Nabi, “*Tidak, orang ini tetap berbuat baik dan memang hanya berbuat baik, tetapi dia tidak memastikan diri bahwa nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Swt.*”

Sebenarnya ini bersangkutan dengan ajaran agar orang bersikap rendah hati, tidak memastikan diri bahwa ia baik. Maka, misalnya, jika orang berargumen bahwa ia tidak perlu shalat asalkan baik, itu berarti apriori bahwa dia sudah mengaku sebagai orang baik. Itu sombong dan jelas sangat berbahaya. Justru orang harus selalu mengatakan bahwa ia terus-menerus memerlukan perbaikan, dan karenanya ibadah menjadi sangat penting.

Al-Masih Al-Dajjal merupakan bagian dari eskatologi Islam. Tentang apakah itu pengaruh dari Kristen atau dari mana pun, itu bukan masalah. Walaupun benar pengaruh dari Kristen, maka itu tidak merupakan suatu kesalahan karena Islam merupakan kelanjutan dari agama Kristen. Jadi tidak perlu menjadi stigma atau suatu cacat.

Memang, ada orang yang mengkritik bahwa hadis itu anti-Kristus. Kebetulan, dalam hadis-hadis itu juga dinyatakan bahwa menjelang kiamat, Nabi Isa akan turun lagi. Ada *the second coming* atau kedatangan kembali Nabi Isa yang antara lain tugasnya adalah untuk membunuh Dajjal. Lalu orang-orang Islam menambahkannya: membunuh babi, menghancurkan salib, dan sebagainya. Tetapi versi itu tidak jelas dari mana datangnya. Tetapi lagi-lagi itu adalah bahasa metafor. Bisa dijadikan bahasa metafor karena, *pertama*, Nabi Isa itu masih diperdebatkan apakah masih hidup atau tidak. Sebetulnya lebih “aman” untuk memercayai bahwa Nabi Isa itu sudah mati, karena Al-Quran mengatakan bahwa orang yang hidup itu pasti mati. *Kedua*, Al-Quran menyebut bahwa Nabi Isa diwafatkan oleh Allah. Ada dialog antara Nabi Isa dengan Tuhan yang mengharukan sekali dalam akhir surat Al-Mâ'idah. Al-Mâ'idah artinya hidangan, karena menceritakan tentang hidangan terakhir. Kalau orang Kristen menyebut tentang hidangan terakhir Nabi Isa, tapi kalau orang Islam menyebutnya hidangan saja, yaitu suatu mukjizat ketika Nabi Isa memberikan hidangan dari tidak ada kemudian tiba-tiba ada. Orang Kristen menyebutnya *the last naple*, yaitu hidangan terakhir sebelum

beliau disalib. Dalam Al-Quran dinyatakan, *Dan ingatlah ketika Allah berfirman, “Hai Isa putra Maryam, engkaulah yang berkata kepada orang: Sembahlah aku dan ibuku sebagai tuhan selain Allah?”* (Q., 5: 116). Tentu saja ini Kristen sebelum ada Protestan. Sebab, setelah ada Protestan, kedudukan Maryam menjadi turun. Padahal sebelum Protestan, salah satu objek kebaktian dalam Kristen adalah Maryam, sehingga disebut Mariologi. Allah menggugat Nabi Isa seperti itu. Jawab Nabi Isa, *“Mahasuci Engkau! Tidak sepatutnya aku mengatakan apa yang bukan menjadi hakku. Kalaupun aku mengatakannya, tentulah Engkau sudah mengetahuinya. Engkau sudah mengetahui apa isi hatiku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada-Mu. Engkaulah Mahatahu segala yang gaib. Apa yang kukatakan kepada mereka hanyalah yang Kauperintahkan kepadaku: Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku di tengah-tengah mereka. Tetapi setelah Kauwafatkan aku, maka Engkaulah Pengawas mereka. Dan Engkau adalah Saksi atas segalanya”* (Q., 5: 116-117).

Di sini jelas-jelas diisyaratkan bahwa Nabi Isa telah wafat. Cuma para ulama yang apriori mengatakan Nabi Isa masih hidup dan sekarang di langit. Ini mirip dengan keper-

cayaan orang Kristen bahwa sekarang Nabi Isa itu masih hidup dan sedang duduk di surga di sebelah kanan Bapaknya. Para ulama yang apriori menafsirkan penggalan ayat tadi bukan mewafatkan, tetapi *setelah Engkau penuhi janji-Mu kepadaku*. Janjinya apa? Janji Tuhan mengangkatnya ke langit. Jadi, ini masalah interpretasi lagi. Tafsir kita adalah percaya kepada Nabi Isa yang masih hidup meski jelas perkataan yang harfiah bahwa *Engkau mewafatkan aku*. Itu sesuai dengan konteks, *Sekarang Engkau yang tahu dan aku tidak tahu lagi*. Itu artinya mati.



DAJJAL YA'JUJ DAN MA'JUJ

Masalah Ya'juj dan Ma'juj memang menimbulkan tafsir yang bermacam-macam. Dulu ditafsirkan secara sangat fisik, yang digambarkan sebagai makhluk tertentu yang sekarang sedang ditahan dalam kurungan jeruji besi. Dengan giginya yang tajam sekali, jeruji itu selalu digigit oleh Ya'juj dan Ma'juj. Begitu dia hampir berhasil keluar, terdengar suara azan yang kemudian membuat besi-besi itu bersambung lagi. Itu tafsiran yang biasa kita dengar di pesantren-pesantren.

Sekarang mungkin sudah tidak ada tafsiran semacam itu. Semuanya

adalah metafora atau *majâz*, yaitu adanya kelompok manusia yang selalu berusaha untuk membuat kerusakan di bumi tetapi selalu gagal, karena dalam masyarakat masih ada orang yang menyerukan kebaikan. Jadi, metafora itu bisa diterjemahkan lebih lanjut; kalau dalam masyarakat sudah tidak lagi ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kejahatan betul-betul lepas dan akan menghancurkan umat manusia semua.

Apakah itu adalah orang Yahudi, mungkin saja. Sebab orang Yahudi sekarang ini memang menguasai berbagai peranti untuk berbuat apa saja, terutama peranti media massa, baik cetak maupun elektronik. Yang kedua adalah peranti modal, bahwa hampir semua bank di tangan Yahudi, dan kemudian industri yang juga hampir semuanya di tangan Yahudi. Tetapi, yang paling berpengaruh adalah keuangan atau bank. Kalau ini mereka arahkan kepada tindakan yang destruktif, maka bisa dengan mudah sekali merusak dunia.

Sejauh ini, tafsiran di sekitar itu masih bersifat spekulatif, tidak ada yang bisa memastikan. Tetapi, yang jelas adalah bahwa kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam surat Al-Kahfi itu merupakan peringatan kepada kita semua tentang adanya potensi-potensi dalam masyarakat untuk membuat kerusakan di bumi. Itu juga

merupakan peringatan agar dalam masyarakat selalu ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Sebab, potensi itu kalau dikembalikan kepada ayat yang lain, bisa digerakkan untuk merusak yang ada pada setiap orang, *Tidak, tetapi sungguh manusia melampaui batas. Karena melihat dirinya sudah serbacukup* (Q., 96: 6-7). Artinya, bahwa setiap orang bisa menjadi tiran (menjadi sumber kerusakan) apabila sudah merasa tidak perlu kepada orang lain.

Istaghna artinya merasa cukup sendiri, dan dalam bahasa populer berarti kehilangan wawasan sosial atau gaya hidup yang egoistis, tidak menghormati orang lain. *Istaghâ* adalah satu akar kata dengan *thâghû*, artinya kekuatan tiranik atau kekuatan yang membawa kepada kerusakan. Dan beriman kepada Allah Swt. itu dikontraskan dengan mengikuti *thâghû*; artinya, kalau orang itu beriman kepada Allah Swt., ia tidak boleh mengikuti *thâghû*. Seperti dinyatakan dalam firman, *Barangsiapa menolak setan (thâghû [atau tirani, termasuk tirani diri sendiri—NM]) dan beriman kepada Allah, ia telah berpegang te-*

Salah satu unsur penting takwa adalah zikir, yang merupakan wujud keinginan kembali kepada Allah Swt. Dengan zikir, kita menginsafi hadirnya Allah dalam hidup kita. Allah selalu hadir bersama kita. Allah adalah wujud yang tidak terikat oleh ruang dan waktu.

guh dengan genggam tangan (hidup—NM) yang tidak akan lepas (Q., 2: 256). Kemudian firman, *Dan pada setiap umat Kami sudah mengutus seorang rasul, (dengan perintah) “Sembahlah Allah dan jauhi setan (melawan tirani—NM)”* (Q., 16: 36). Jadi, beriman kepada Allah Swt. itu selalu dikontraskan dengan tirani. Karena itu, dalam bahasa sekarang,

beriman kepada Allah akan menghasilkan kebebasan. Kebebasan ialah pelepasan diri dari kungkungan *thâghû*. Dan *thâghû* itu, antara lain, ialah Dajjal, Ya’juj, dan Ma’juj.



DAKWAH

“*Da’wah* yang meriah, namun tetap penuh hikmah,” begitu barangkali gambaran dalam satu kalimat perkembangan *da’wah* Islam di tanah air sekarang ini. Meriah, karena pelaku *da’wah* itu merambah ke kelompok-kelompok yang beberapa tahun yang lalu tidak terbayang seperti para artis, seniman, cendekiawan, pejabat, militer, dan menteri. Dan tetap penuh hikmah,

karena meskipun para pelakunya, menurut seorang kiai beberapa waktu yang lalu, ada yang dari kalangan kaum “tontonan”, dan bukan kaum “tuntutan” seperti sang Kiai, namun nyatanya *da‘wah* kaum *celebrity* berhasil menarik perhatian besar masyarakat, dan dapat diharapkan bahwa pesan-pesan sucinya juga menembus sukma-sukma yang peka.

Dapatkah gejala menarik itu diterangkan dengan kerangka analisis tertentu? Seorang ilmuwan sosial yang bersemangat barangkali akan meloncat, dan mulailah ia, kadang-kadang disertai pretensi yang mengkhawatirkan, menerangkan gejala itu dari sudut disiplinnya. Tetapi, mereka yang lebih *tawaddlu‘* mungkin akan surut sedikit ke belakang, lalu segan menerangkan, atau menerangkan sedikit saja, karena tidak semua variabelnya dapat diketahui. Barangkali itulah sikap ilmiah yang realistik berkenaan dengan gejala yang menyangkut tingkah laku keagamaan, yang jelas dari sudut mana pun diakui kompleksitasnya. Para ilmuwan sosial Amerika ahli Iran seperti Marvin Zonis, misalnya, dibuat jera untuk membuat ramalan-ramalan lebih lanjut tentang negara Persia itu, karena Syah yang *Shahinshah* (Raja Diraja) dan *Aryamehr* (Cahaya Bangsa Arya) ternyata terjungkal hanya karena tudingan jari telunjuk seorang

mullah berjubah yang di negerinya sendiri tidak pernah merasa betah.

Lalu bagaimana? Jika kita, seperti biasanya, senang dengan unsur kejutan, maka ada beberapa pernyataan kejutan yang boleh kita rujuk di sini. Mendiang Dr. TB Simatupang, dalam makalahnya di sebuah pertemuan oleh Dewan Gereja-Gereja Sedunia di Kenya pada 1979, mengatakan bahwa sekitar 70 tahun yang lalu pemikiran di Barat, termasuk (dan terutama) di kalangan para pengikut Kristen, meramalkan bahwa Islam akan segera musnah dari muka bumi karena tidak cocok dengan zaman modern. Tapi, menurutnya lebih lanjut, gejala pemikiran di Barat akhir-akhir ini justru cenderung sebaliknya: “Islam diramalkan akan mengalami kemajuan luar biasa, dan menentukan nasib umat manusia.”

Rujukan Simatupang didukung oleh deretan para otoritas besar di berbagai bidang kajian ilmiah. Dulu, dan masih ada sampai sekarang, stereotip orang Barat tentang kaum Muslim ialah: “Pasukan serdadu Arab fanatik yang memegang Al-Quran di tangan kiri dan pedang terhunus di tangan kanan.” Tapi tidak kurang dari seorang orientalis Bernard Lewis yang membantahnya: “Stereotip itu tidak saja keliru, tapi juga mustahil. Keliru, karena kaum Muslim Arab tidak pernah memaksa

siapa pun, kecuali kaum musyrik, untuk masuk Islam. Mustahil, karena tabu bagi orang Islam mengangkat Kitab Sucinya dengan tangan kiri, sebab berarti menghina. Dan jika dibalik, tentu lebih mustahil lagi, karena berarti pasukan Islam dulu terdiri dari prajurit yang semuanya *left-handed* (kidal)”.

Sejarawan Eropa terkenal, Gibbon, menyebut Nabi Muhammad sebagai pemalsu. Dia menerangkan mengapa Islam bertahan dan tampil dengan begitu banyak prestasi dalam peradaban. Namun disangkal Thomas W. Lippman dalam bukunya, *Understanding Islam*: Gibbon gagal memahami bahwa Islam adalah agama yang lurus (*straightforward*) dan praktis, yang tidak dikacaukan dengan dan oleh sistem kependetaan dan sakramen, dan yang pesan *Ilabinya* jelas tentang bagaimana manusia hendaknya menempuh hidupnya. Menurutny lagi, mengutip Henry Treece, “Selama 3000 tahun Dunia Laut Tengah mengalami kekacauan spiritual: ada banyak dewa, para Fir’aun—dewa, maharaja, dewa-dewi yang menjadi daging (manusia), dan para pendeta yang mengaku sebagai juru bicara Tuhan, raja-raja yang mengaku diberkati Tuhan, dan penguasa-penguasa (seperti Konstantin) yang menafsirkan Kitab Suci untuk kepentingan duniawinya sendiri. Juga ada pengorbanan darah, ada tabu dan ritual yang tidak masuk akal,

nyanyian dan tarian para pelayan kuil, lalu mantra-mantra gelap. Sekarang, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Tuhan membuat pesan-Nya begitu jelas melalui lisan seorang manusia (Nabi Muhammad) yang berbicara terang, tanpa menuntun adanya kuil, tidak juga altar pengorbanan, tidak perlu terang bejana atau pakaian suci resmi, apalagi darah.” Menurut Lippman lebih lanjut, “Digerakkan bukan oleh pedang, tapi oleh kegairahan dan teladan, Islam berkembang mencapai gunung-gunung daratan Asia, menyebar ke sawah-sawah tanah tropis, dan menyusup ke semak-semak Afrika. Tidak ada kekuasaan pusat yang mengirim misionaris-misionaris; orang Islam begitu saja pergi menurut dorongan bisnis dan kecenderungan pribadinya, dan ke mana-mana dia membawa agamanya. Daerah terbaru bagi ekspansi Islam ialah Amerika Serikat ... sekarang dengan penganut sekitar 2.000.000 orang, 10 kali lipat lebih banyak daripada satu dasawarsa yang lalu.” Tarekat Ghisti pimpinan Pir Vilayat Inayat Khan yang berkantor pusat di Seattle, Amerika, meliputi mubalig dan mubaligah seperti Tasnim Hermila Fernandez, Atum O’Kane, dan Don Weiner. Dan tarekat Naqsyabandi di London mempunyai deretan juru-juru dakwah seperti Brigitte Dorst Liwellyn, Vaughan-Lee, dan Irina Tweedic.

Jadi, berkenaan dengan gejala di tanah air, apa salahnya kita melihatnya sebagai bagian dari gejala seluruh dunia: bangkitnya Islam, dengan harapan-harapan baru, dan tantangan-tantangan baru. Setiap orang berhak menyumbang: kiai atau menteri, seniman atau ilmuwan, santri atau penari, pejabat atau ustad. Mereka semua di hadapan Allah adalah sama saja. Yang paling mulia ialah yang paling bertakwa, dan hanya Allah yang tahu kadar takwa dalam dada.



DAKWAH DENGAN HIKMAH

Dakwah adalah ajaran agama yang ditujukan sebagai rahmat untuk semua, yang membawa nilai-nilai positif seperti *al-amn* (rasa aman, tenteram, sejuk). Allah berfirman, *Mereka yang beriman dan tidak menotori imannya dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan al-amn*—(Q., 6: 82).

Dakwah adalah ajakan atau seruan kepada yang baik, dan yang lebih baik. Dalam dakwah ada ide tentang progresivitas—sebuah proses terus-menerus menuju kepada yang baik dan yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan dakwah itu. Sehingga dalam dakwah terkandung suatu ide dinamis: sesuatu yang terus tumbuh dan berkem-

bang sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu.

Sekarang ini, kalau kita melihat secara sosiologis, dakwah dalam umat Islam lebih banyak mengarah kepada *nahy-i munkar*—tekanan-tekanan untuk melawan (*fight against*)—dan kurang dari segi *amar ma'rûf*-nya—mengajak kepada kebaikan, kebersamaan, suatu cita-cita (*fight for*). Barangkali ini sebabnya sikap proaktif masih menjadi tantangan besar kaum Muslim.

Ada dua segi dakwah yang meskipun tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan, yaitu menyangkut *isi* dan *bentuk*, *substansi* dan *forma*, *pesan* dan *cara penyampaian*, *esensi*, dan *metode*. Dakwah tentu menyangkut kedua-duanya sekaligus, dan sebenarnya tidak terpisahkan. Hanya perlu disadari bahwa *isi*, *substansi*, *pesan*, dan *esensi* senantiasa mempunyai dimensi universal, yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dalam hal ini substansi dakwah adalah pesan keagamaan itu sendiri—*al-dîn al-nashîhah*, agama adalah pesan. Agama semua nabi dan rasul dari segala zaman dan tempat adalah satu dan sama, seperti ditegaskan Rasulullah Saw. dalam sebuah hadis sahih, “Kami golongan para nabi, agama kami adalah satu, dan para nabi adalah bersaudara tunggal ibu. Di antara umat manusia akulah yang paling berhak atas [Nabi Isa] putra Maryam,

karena tidak ada seorang nabi pun antara aku dan dia.”

Dan agama itu ialah agama *al-islâm* yang Allah tidak menerima selain agama itu, baik dari kalangan orang terdahulu maupun terkemudian, sebab semua Nabi berada di atas agama *al-islâm*.

Agaknya dalam perkembangan dakwah sekarang ini yang cenderung melulu *fight against*, ada urgensi untuk mengemukakan kembali segi-segi ajaran agama yang merupakan bagian integral dari kesadaran keagamaan kaum *Salaf*

(juga kaum “Salafi,” yaitu mereka dari kalangan orang kemudian atau *Khalaf* yang mengikuti kaum *Salaf*). Ibn Taimiyah misalnya berkata, “Manusia berselisih pendapat mengenai orang-orang terdahulu dari umat [nabi-nabi] Musa dan Isa, apakah mereka itu *muslimûn* atau bukan? Ini adalah persengketaan kata-kata, sebab “Islam khusus” (*al-islâm al-khâshsh*) yang Allah telah mengutus Muhammad Saw. untuk membawakannya, dan yang mencakup syariat Al-Quran, tidak lain ialah umat Muhammad Saw. Pada saat sekarang, *al-islâm* digunakan dalam pengertian ini. Sedangkan “Islam umum” (*al-islâm al-‘amm*) yang mencakup setiap syariat yang

Allah mengutus seorang nabi untuk membawakannya, mencakup Islamnya setiap umat yang mengikuti salah satu dari para nabi. Pangkal *al-islâm* itu secara mutlak ialah persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah [Tuhan Yang Maha Esa], dan dengan persaksian itulah semua rasul diutus.”



Itulah sisi pertama, yaitu isi, substansi, pesan, dan esensi, sebagai sisi yang primer. Sisi yang kedua, meskipun tidak kurang pentingnya dalam dakwah, yaitu sisi

bentuk, forma, cara penyampaian, dan metode, disebutkan dalam Al-Quran sebagai *syir‘ah* dan *minhâj*, yang bisa berbeda-beda mengikuti tuntutan ruang dan waktu. Ini pun dijelaskan oleh para ‘*ulamâ*’, misalnya Ibn Taimiyah, “Sebenarnya, hakikat agama, yaitu agama Tuhan Seru sekalian alam, ialah yang menjadi titik kesepakatan para nabi dan rasul, meskipun untuk masing-masing itu ada *syir‘ah* dan *minhâj* (“jalan”, “metode”) tertentu. *Syir‘ah* adalah *syari‘ah*. Allah Taala berfirman, *Untuk masing-masing [golongan] dari antara kamu sekalian telah Kami buat syir‘ah dan minhâj* (Q., 5: 48). Dan Allah Taala berfirman:

Kemudian Kami buat engkau [Muhammad] berada di atas seluruh syariat berkenaan dengan urusan [agama] itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah mengikuti keinginan orang-orang yang tidak tahu (tidak berilmu). Mereka tidak akan membuat engkau lepas dari Allah sedikit pun juga. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu adalah pelindung satu sama lain, dan Allah adalah Pelindung orang-orang yang bertakwa (Q., 45: 18-19).

Dan *minhâj* itu adalah *tharîq* (jalan, metode); Allah Taala berfirman,

Kalau saja mereka itu teguh berada di atas tharîqah maka pasti Kami siram mereka dengan air yang melimpah untuk Kami uji mereka berkenaan dengan hal itu. Barangsiapa berpaling dari ingat (dzikir) kepada Tuhannya, maka Dia akan memasukkannya ke dalam azab yang senantiasa meningkat (Q., : 16-17).

Jadi *al-islâm* adalah ajaran untuk berserah diri dengan tulus kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa—yang maknanya jauh lebih mendalam dan luas daripada istilah “Islam” secara historis-sosiologis seperti yang dikenal dalam masyarakat sekarang ini, khususnya masyarakat bukan-Arab.

Al-Islâm inilah inti pesan universal kerasulan dan kenabian (*al-*

risâlah dan *al-nubûwah*). Dengan *al-islâm* akan diperoleh *salâm* dan *silm* (kedamaian, “kesejukan”) dan *salâmah* (kesejahteraan, kesentosaan), bahkan menurut sebagian ‘*ulamâ*’, juga akan dicapai *sullam* (tangga peningkatan kualitas hidup yang utuh, ruhani, dan jasmani ke arah yang lebih tinggi).

Pesan-pesan universal dari *risâlah* dan *nubûwah* itu sekarang harus kita tangkap kembali maknanya, dan dengan sendirinya menjadi inti dakwah. Sebagaimana pesan-pesan kerasulan dan kenabian dari Allah itu berlaku untuk segala zaman dan tempat, serta telah terbukti membawa rahmat bagi para pengikut nabi-nabi dan rasul-rasul di masa lalu, maka lebih-lebih lagi pada masa sekarang—oleh manusia zaman modern—semua pesan itu sangat diperlukan.

Para juru dakwah dan mubalig secara benar telah acap kali menekankan pentingnya melakukan dakwah dengan *hikmah*, nasihat yang baik, dan pertukaran pikiran (*mujâdalah*) yang lebih baik, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Suci.

Menurut Ibn Rusyd, dakwah dengan hikmah artinya dakwah dengan pendekatan substansi yang mengarah kepada falsafah, dengan “nasihat yang baik”, yang berarti retorika yang efektif dan populer, dan dengan *mujâdalah* yang lebih baik maksudnya ialah metode

dialektis yang unggul. Dan sesuai dengan ungkapan bijak dalam bahasa Arab bahwa “Bahasa kenyataan adalah lebih fasih daripada bahasa ucapan”, maka kesadaran tentang pentingnya dakwah dengan “bahasa kenyataan” dapat diterjemahkan sebagai dakwah dengan pendekatan esensi, tidak semata-mata pendekatan formalitas. Sebab, justru masyarakat yang cerdas dan maju umumnya lebih mementingkan esensi ini, bukan segi-segi formalnya, sekalipun segi-segi formal itu mustahil ditinggalkan sama sekali.



DAMPAK KEDATANGAN BARAT KE INDONESIA

Kedatangan orang-orang Barat ke Nusantara mempunyai dampak sendiri bagi agama Islam. *Pertama*, para ahli banyak yang mengatakan bahwa ditaklukkannya Malaka oleh Portugis menyebabkan banyak para cendekiawan, artisan, dan pedagangnya menyebar ke seluruh Asia Tenggara, sambil membawa dan menyiarkan Islam. *Kedua*, agama Islam itu sendiri telah melengkapi penduduk Nusantara dengan suatu senjata ideologis melawan orang-orang Barat yang datang menjajah. Secara politik dan ekonomi, perlawanan itu gagal (seluruh Asia Tenggara praktis akhirnya jatuh ke ta-

ngan kekuasaan kolonial Barat). Tetapi secara sosial dan budaya, boleh dikatakan perlawanan itu memperoleh keberhasilan yang luar biasa. Hal ini terbukti dari terbedungnya proses pengkristenan dan pembaratan Asia Tenggara, kecuali beberapa tempat tertentu seperti Pulau Luzon dan sekitarnya (kelak menjadi bagian dari gugusan kepulauan Filipina). Pulau Jawa kurang lebih secara total terislamkan, demikian pula sebagian besar Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi serta pulau-pulau di sekitarnya. Namun, terdapat perbedaan yang tajam dalam tingkat intensitas dan kedalaman pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam dari satu tempat ke tempat lain.

Dan seluruh Nusantara pun akhirnya jatuh ke dalam pelukan kolonialisme dan imperialisme Belanda. Masa penjajahan Belanda yang panjang itu melahirkan tambahan kondisi sosial-budaya baru yang juga harus kita perhitungkan. Kebijakan menjalankan pemerintahan (kolonial) secara tidak langsung (dengan menggunakan kelas *elite* tradisional setempat sebagai perantara) telah mengakibatkan susunan kemasyarakatan yang semakin diskriminatif. Pembagian kelas atas-bawah tradisional (antara lain sebagai sisa sistem kasta) semakin lebar oleh introduksi pendidikan dan keahlian modern kepada kelas

atas. Wilayah Nusantara dibagi menjadi beberapa kawasan, dan bagi setiap kawasan itu ditetapkan kerucut sosialnya yang terdiri dari suku atau kelompok sosial tertentu setempat. Mereka ini diberi prioritas dalam memperoleh pendidikan modern (Barat, Belanda), dan disiapkan untuk mengisi susunan piramidal pemerintahan kolonial.

Pendidikan modern itu sendiri, sekalipun dari Negeri Belanda bertitik tolak pada pertimbangan kemanusiaan (“Politik Etis” yang terkenal), dalam pelaksanaannya justru mempertajam dan memperburuk stratifikasi sosial masyarakat Nusantara. Sementara pemerintah kolonial berkehendak untuk berbagi budaya modern dengan penduduk Hindia Belanda, mereka tetap mempertahankan pertimbangan diskriminatif dalam melaksanakan “maksud baik” itu. Pertama-tama, mereka menyelamatkan hak istimewa mereka sendiri sebagai “kelas kulit putih” atau Eropa. Kemudian, mereka meneguhkan kedudukan yang diuntungkan dari golongan “timur asing”. Lalu mereka meneruskan dukungan kepada go-

longan *elite* tradisional, yang secara khusus disiapkan sebagai pendiri birokrasi kolonial yang menengahi antara penguasa Belanda dengan rakyat banyak. Sedangkan strata terendah susunan masyarakat kolonial adalah rakyat banyak, sebagai rakyat jelata. Di antara kaum pribumi, kaum elite tradisional adalah pihak yang memiliki afinitas kultural tertentu dengan pihak kaum kolonialis, yang dengan sendirinya merupakan kelompok yang paling diuntungkan dalam susunan masyarakat kolonial Hindia Belanda.



DAMPAK PENDIDIKAN KOLONIAL

Penggunaan istilah “intelektual”, celakanya, menimbulkan masalah. Di sini, istilah itu digunakan secara agak bebas, untuk menunjuk kepada kelas berpendidikan “modern” (Barat), tanpa bermaksud mengatakan bahwa mereka yang terdidik dalam sistem “tradisional” (Islam) bukan intelektual. Ada banyak implikasi dari munculnya intelektual “modern” Muslim. Arti gejala ini bisa lebih dinilai jika kita proyek-

sikan pada sejarah panjang Islam Indonesia di bawah pemerintahan kolonial (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*, atau Perusahaan India Timur). Sejarah kolonial bermula dengan berkuasanya VOC yang hampir tidak memerhatikan masalah pendidikan, dan sedikit kesempatan pendidikan yang diberikan terbuka hanya bagi orang-orang Kristen Eropa maupun pribumi. “Bukti pertama diperhatikannya pendidikan untuk orang-orang Muslim terdapat dalam suatu instruksi Gubernur Jenderal Deandels pada 1808. Namun, tidak ada bukti tentang dilaksanakannya instruksi itu ... Undang-Undang Pemerintah Hindia Belanda 1808 menandai suatu perubahan resmi sikap. Namun, rencana-rencana yang didasarkan pada undang-undang itu tidak pernah terwujud, sejauh menyangkut pendidikan pribumi.”

Perubahan nyata, baru terjadi pada zaman “Kebijaksanaan Etis” pada 1901. Inilah kebijaksanaan kolonial yang “bersumber terutama dari segi manusiawi, yang menyatakan bahwa Belanda berutang budi pada Indonesia atas keuntungan-keuntungan masa lalu yang telah diperolehnya dari Indonesia”. Kebijakan Etis itu, pada hakikatnya, merupakan “suatu program kesejahteraan yang berupaya memacu dan mengarahkan kemajuan eko-

nomi, politik, dan sosial”. Yang berkaitan dengan pembicaraan kita ialah perhatian besar yang diberikan kepada pendidikan gaya Barat, dan hal itu menyebabkan semakin banyak orang Indonesia memasuki sekolah umum. Namun, dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk Indonesia, jumlah itu masih kecil sekali. Bahkan, yang lebih kecil ialah jumlah pelajar dari kalangan Muslim santri. Hal ini sebagian disebabkan oleh sistem diskriminatif pendidikan, dan sebagian disebabkan oleh politik non-kooperatif para ulama terhadap pemerintah kolonial.

Dengan demikian, akibat puncak pendidikan kolonial ialah melebarnya jurang antara rakyat yang berorientasi Islam dan elite tradisional, priayi, yang kebanyakan terdiri atas orang-orang Indonesia berpendidikan Barat. “Interposisi elite tradisional dan Cina cenderung menyamarkan peranan Belanda sebagai pengisap tenaga pribumi.” Inilah sebabnya, sejak awal, “gerakan nasionalis di Indonesia bercorak antikolonial, anti-Cina, keislaman, dan sosialis”. Islam segera menjadi senjata ideologis dari berbagai gerakan melawan para penjajah “kafir”, dan gerakan keislaman untuk membantu dan memajukan kepentingan para santri—sebagaimana yang terjadi pada SDI (Sarikat Dagang Islam), 1905, sebagai ge-

rakan massa pertama yang besar dan diorganisasi secara politik—dengan mudah ditafsirkan sebagai nasionalisme yang kuat. Pertentangan antara nasionalisme keislaman dan ke-ningratan tradisional ditegaskan oleh penentangan kuat terhadap gerakan itu yang dilancarkan oleh para pejabat pemerintah dari kalangan orang-orang ningrat Indonesia. Kaum priyayi merasa bahwa gerakan nasionalis Islam menyerang *privilege* mereka. Penentangan itu dilakukan untuk melestarikan diri.

Perhatian yang kian besar dari pemerintah terhadap meningkatnya fundamentalisme Islam, dan tindakan intensif dari pihak berwenang Indonesia untuk menghentikan ekspresi Islam yang secara radikal, mengkritik pemerintah, telah muncul pada tahun-tahun belakangan ini. Isu-isu ini, tidaklah terlalu dramatis untuk dikatakan, kiranya bersifat sentral bagi kebangkitan politik Islam di Indonesia.



DAMPAK POLITIK MU'AWIYAH

Dari sejarah Islam, kita mengetahui para tokoh sahabat Nabi Saw. yang terlibat dalam pertikaian politik dan perpecahan sesama mereka. Yang paling seru, dan bekasnya masih amat berpengaruh sampai sekarang, ialah antara 'Ali dan Mu'awi-

yah. Sebenarnya, orang cukup mudah membuat penilaian untuk kemudian memihak kepada 'Ali atau membenarkannya—dan itulah pendapat yang dominan di seluruh dunia Islam hingga kini—namun kenyataannya, dari segi perpolitikan Islam, Mu'awiyah meninggalkan bekas lebih besar dan lebih awet kepada umat Islam. Mu'awiyah adalah orang yang dituduh, secara benar, mengubah sistem perpolitikan kaum Muslim dari yang semula bersifat terbuka, egaliter, dan partisipatif, menjadi bersifat tertutup, hierarkis, dan otoriter. Jelasnya, dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Hendaknya kita ketahui bahwa masa kekhalifahan yang sejati itu hanya berlangsung selama 30 tahun (dari Abu Bakar sampai 'Ali), dan sejak itu sampai sekarang, selama lebih kurang 14 abad, yang ada ialah sistem kerajaan, meskipun raja-raja itu mengklaim dan menamakan diri mereka sebagai khalifah, termasuk yang terakhir dan ditumbangkan oleh Kemal Attaturk di Turki Utsmani. Hanya di zaman modern ini, berkat pikiran-pikiran modern tentang negara dan politik, banyak negeri Muslim yang berbentuk bukan lagi kerajaan, tapi republik, seperti Aljazair, Tunis, Lybia, Mesir, Sudan, Somalia, Jibouti, Yaman, Suriah, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, Bangladesh, Maladewa, dan Indonesia. Sedangkan selebih-

nya, yaitu Maroko, Yordania, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Oman, dan Malaysia dapat disebut sebagai kelanjutan konsisten tradisi perpolitikan Islam sesudah masa kekhalifahan, yakni sejak masa Mu'awiyah. (Uni Emirat Arab adalah unik, karena merupakan uni dari sistem politik pimpinan seorang syaikh—disebut dalam bahasa Inggris *sheikhdom*—namun uni itu sendiri dipimpin oleh seorang Presiden).

Demikianlah pengaruh Mu'awiyah dan sistem politiknya. Dari segi keagamaan, khususnya berkat rintisan Khalifah 'Umar ibn Abdul Aziz, Dinasti Umayyah yang didirikan oleh Mu'awiyah mewariskan paham Sunni yang lebih terkonsolidasi. Bahkan kaum Abbasi pun, yang dalam revolusi mereka menumbangkan Dinasti Umayyah melakukan kekejaman luar biasa yang jelas sekali merupakan *genocide* atau *ethnic cleansing* terhadap dinasti yang ditumbangannya, akhirnya justru memeluk ideologi keagamaan Sunnisme warisan Umayyah, dengan menindas dan berusaha membasmi kaum Syi'ah dan Khawarij.

Permulaan dari perubahan yang dilakukan oleh Mu'awiyah yang membawa dampak permusuhan le-

bih parah dalam Islam itu tecermin dalam wasiatnya kepada Yazid, anaknya sendiri yang ia tetapkan untuk menggantikan dirinya:

Wasiat Mu'awiyah kepada anaknya,

Yazid: "... Aku tidak mengkhawatirkan kepada engkau akan ada yang menentangmu kecuali

dari empat tokoh kalangan Quraisy, Al-Husain ibn 'Ali, 'Abdullah ibn 'Umar, 'Abdullah ibn Al-Zubair, dan 'Abdurrahman ibn Abi Bakar.



Tentang ('Abdullah) ibn 'Umar, dia adalah tokoh yang sibuk beribadah, dan jika tidak ada seorang pun selain dia, dia akan membaiat engkau; tentang Al-Husain, penduduk Irak tidak akan mendukungnya kecuali dengan mendorongnya untuk memberontak. Maka jika ia memberontak kepadamu dan engkau menang, tunjukkan sikap yang lembut kepadanya, sebab dia itu memiliki rasa cinta yang memikat dan hak yang agung; tentang ('Abdurrahman) ibn Abi Bakar, dia adalah seorang lelaki yang jika melihat para sahabatnya berbuat sesuatu dia akan juga memperbuatnya seperti mereka,

namun ia tidak mempunyai perhatian kecuali kepada wanita dan kesenangan; tetapi yang bakal menerkam engkau bagaikan hari-mau dan mencakar engkau bagaikan serigala, dan yang jika ada kesempatan pasti akan meloncat, itulah (Abdullah) ibn Al-Zubair. Jika ia lakukan itu dan engkau dapat mengalahkannya, maka cincanglah ia sehabis-habisnya.

Adalah Mu'awiyah yang mampu menulis wasiat seperti itu yang juga telah bertindak sendiri, kemudian mewariskan berbagai praktik-praktik yang tidak terpuji dalam sejarah awal perpolitikan Islam. Dari sekian banyak peristiwa kekejaman Mu'awiyah, beberapa di antaranya menyangkut keluarga 'A'isyah, bekas istri Nabi yang digelar *Umm Al-Mu'minin* (Ibu Kaum Beriman), seperti bagaimana Mu'awiyah membunuh dengan kejam saudara 'A'isyah, Muhammad ibn Abu Bakar yang menjadi Gubernur Mesir dari pihak 'Ali. Juga peristiwa-peristiwa kekejaman Mu'awiyah yang mendorong 'A'isyah untuk melakukan oposisi kepadanya, seperti pembunuhan kejam terhadap Hujr ibn 'Addi dan kawan-kawan atas dasar kesalahan menginterupsi khutbah Jumat Ziyad ibn Abih, Gubernur Kufah dari pihak Mu'awiyah, yang berkhotbah terlalu panjang dan waktu shalat Jumat hampir habis. 'A'isyah me-

lindungi Abdurrahman ibn Abu Bakar, saudaranya, ketika yang terakhir ini menentang keputusan Mu'awiyah menunjuk anaknya sendiri Yazid, dan menuduh Mu'awiyah menganut "*Hirqaliyah*" ("Herakliusisme", yakni sistem penunjukan anak atau keluarga sendiri sebagai calon pengganti raja, atau sistem kerajaan yang diketahui orang Arab dipraktikkan oleh Romawi Timur atau Byzantium yang saat itu kaisarnya ialah Heraklius).



DANAU MICHIGAN

Waktu sekolah di Chicago, penulis suka merenung di tepi Danau Michigan. Danau Michigan adalah salah satu dari 4 danau yang ada di kawasan itu yang merupakan tempat air tawar cair 90 persen dari seluruh dunia. Sungai Nil tidak sebanding warnanya dengan danau-danau tersebut. Kenapa Tuhan memberikan air yang begitu penting dalam hidup 90 persen air tawar itu kepada orang Amerika dan Kanada, dan tidak kepada orang Saudi? Nah, lalu kita menarik satu firman dalam Al-Quran bahwa Tuhan itu akan mewariskan bumi ini kepada orang saleh. Dr. Imaduddin pernah meloncat kepada kesimpulan bahwa orang Amerika lebih saleh daripada orang Arab, buktinya bumi di-

kasih kepada orang Amerika dan tidak kepada orang Arab.

Ini sangat menggoda dan karena itu juga kita tidak boleh menganggap begitu saja keislaman kita sebagai jaminan. Kita harus mewujudkan. Semua janji Tuhan yang sering dikutip para ulama dan muhalig, semuanya tidak tergantung pada formalitas, tapi kepada esensi, sesuatu yang lebih bersifat maknawi.



DÂR AL-SALÂM

Patut direnungkan bahwa istilah *Dâr Al-Salâm* dalam Al-Quran sesungguhnya digunakan sebagai gambaran tentang kehidupan di surga, yaitu kehidupan penuh bahagia di sisi Tuhan. Di antara firman-firman Allah mengenai hal ini ialah:

Maka barangsiapa Allah menghendakinya untuk diberi hidayah, dibuatlah dadanya lapang untuk menerima al-islâm. Dan barangsiapa Dia kehendaki untuk disesatkan, maka dibuatlah dadanya sempit dan sesak seakan-akan naik ke langit. Demikianlah Allah menetapkan kekotoran atas mereka yang tidak mau beriman. Dan inilah jalan Tuhanmu, dalam keadaan tegak lurus. Sungguh Kami telah perincikan ber-

bagai bukti (ayat) untuk kaum yang bersedia merenungkan. Bagi mereka ini adalah Dâr Al-Salâm di sisi Tuhan mereka, dan Dia adalah Pelindung mereka berkenaan dengan segala sesuatu yang mereka kerjakan (Q., 6: 125-127).

Allah mengajak kepada Dâr Al-Salâm, dan membimbing siapa pun yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Q., 10: 25).

Sejalan dengan itu juga digambarkan bahwa dalam kehidupan surgawi tidak lagi terdengar ucapan kotor, melainkan “*Salâm, salâm*” atau “*Damai, damai*”. Mereka di sana tidak mendengar ucapan sia-sia, juga tidak ucapan penuh dosa, melainkan ucapan “*Damai, damai,*” (Q., 56: 25-26).

Oleh karena itu, diserukan agar kaum beriman masuk ke dalam perdamaian itu secara menyeluruh, tidak setengah-setengah, dan jangan sampai mereka mengikuti jejak setan untuk menumbuhkan rasa permusuhan antara sesama manusia. Diingatkan bahwa setan adalah musuh paling nyata bagi hamba Allah. *Wahai sekalian orang beriman, masuklah kamu semua dalam perdamaian secara menyeluruh, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu (Q., 2: 208).*

Karena Allah mengajak kepada perdamaian, maka semua orang

yang menerima ajaran-Nya, yaitu kaum beriman, juga harus selalu mengajak kepada perdamaian. Inilah salah satu segi amat penting keunggulan ajaran Islam, sehingga secara khusus dipesan agar mereka yang berjuang untuk perdamaian itu tidak merasa rendah diri atau hina. Sebaliknya

diingat-
kan bahwa mereka ini adalah kelompok manusia yang unggul, yang akan selalu

dilindungi Allah dan yang amal perbuatannya tidak akan sia-sia. *Janganlah kamu merasa rendah diri sedangkan kamu mengajak kepada perdamaian, padahal kamu adalah yang lebih unggul (lebih tinggi dalam kehormatan). Allah beserta kamu, dan Dia tidak akan menyia-nyikan amal perbuatanmu* (Q., 47: 35).

Tekanan kepada usaha menciptakan perdamaian ini demikian kuatnya, sehingga berkenaan dengan golongan yang terlibat dalam permusuhan dan peperangan dengan kaum beriman, namun kemudian mereka itu, sebagian atau seluruhnya, bermaksud dan mengajak berdamai, maka Nabi kita diperintahkan Allah untuk menerima ajakan damai itu dengan penuh tawakal kepada Allah, yaitu dengan keya-

kinan bahwa jika mereka, (bekas) musuh yang mengajak damai itu, ternyata menipu dan berkhianat, maka bagi Nabi Saw. (dan kaum beriman) cukuplah bersandar dan mempercayakan diri kepada Allah, sebab Dialah yang akhirnya membuat Nabi dan kaum beriman menang dan unggul:

Mengatakan bahwa setiap pribadi memiliki naluri religiusitas—baik dalam pengertian yang sejati maupun palsu—sebenarnya sama dengan mengatakan bahwa setiap pribadi memiliki naluri kepercayaan.

Jika mereka condong kepada perdamaian, maka engkau (Muhammad) pun harus condong kepada perdamaian itu, dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Dia itu Mahatahu dan Maha Mendengar. Kalau mereka hendak menipu engkau, maka cukuplah Allah bagimu. Dialah yang meneguhkan engkau dengan pertolongan-Nya dan dengan kaum yang beriman (Q., 8: 61).

Sejajar dengan itu adalah makna dua hadis pendek namun amat mendasar, Nabi saw. bersabda, “*Seorang Muslim ialah yang orang-orang Muslim lainnya selamat dari lidah dan tangannya,*” dan “*Islam yang paling utama ialah, engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan tidak kau kenal.*”



DÂR AL-ISLÂM DAN DÂR AL-HARB

Barangkali cukup menarik untuk diperhatikan bahwa secara harfiah istilah-istilah “*Dâr Al-Islâm*” dan “*Dâr Al-Harb*” tidak terdapat dalam Al-Quran. Sebagaimana telah diisyaratkan, istilah-istilah itu banyak terdapat dalam kitab-kitab fiqih. Seperti halnya dengan istilah “fiqih” (*fiqh*) itu sendiri, bersama dengan istilah-istilah “syariat” (*syari‘ah*), “kalam” (*kalâm*), tasawuf (*tashawwuf*), hikmah (*falsafah*), dan lain-lain—yang meskipun terdapat dalam Al-Quran, namun mempunyai makna semantik yang berbeda—istilah-istilah “*Dâr Al-Islâm*” dan “*Dâr Al-Harb*” juga tumbuh sebagai bagian dari pemikiran Islam yang tertuang dalam ilmu fiqih. Hal itu tidaklah berarti bahwa pandangan yang terkandung dalam kedua istilah itu tidak memiliki autentisitas dan keabsahan. Hanya saja untuk dapat menangkap pandangan-pandangan itu kita harus mencari dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang dinyatakan dalam ungkapan harfiah yang berbeda.

Berkenaan dengan istilah “*Dâr Al-Islâm*”, istilah yang dalam Al-Quran secara harfiah sangat mirip ialah istilah “*Dâr Al-Salâm*” (baca: “*Dârussalâm*”), yang bermakna “Negeri Damai”. Dalam makna seperti itu, *Dâr Al-Salâm* adalah sama artinya dengan *Al-Balad Al-Amîn*

yang merupakan nama lain untuk kota Makkah, juga sama artinya dengan *Yerusalîm* (“Yerusalem”) yang merupakan nama asli dari bahasa Suryani atau Arami untuk kota *Al-Quds* atau *Al-Bait Al-Maqdis* di Palestina di mana berdiri Masjid Aqsha. Perkataan *Dâr Al-Salâm* juga sama artinya dengan Shanti Niketan, yaitu nama tempat di mana Rabindranath Tagore melaksanakan program-program budaya dan pendidikannya yang terkenal di India. Kesemuanya mengacu kepada wawasan dan cita-cita kedamaian, dan dari situ dapat dipandang bahwa ungkapan-ungkapan itu merupakan simbolisasi tentang pola kehidupan masyarakat yang diidam-idamkan, yaitu masyarakat yang aman tenteram dan penuh kedamaian.

Dari sudut pendekatan etimologis sudah jelas bahwa perkataan *Dâr Al-Salâm* sangat kuat bersangkutan dengan ajaran tentang Islam. Sebagai mashdar (kata benda abstrak) dari kata kerja *aslama*, perkataan *islâm* memiliki artian “mencari *salâm*, yakni, kedamaian”, “berdamai”, dan dari semua itu menghasilkan pengertian “tunduk”, “menyerah”, dan “pasrah”. Maka agama yang benar disebut “*Islâm*” karena mengajarkan sikap berdamai dan mencari kedamaian melalui sikap menyerah, pasrah, dan tunduk patuh kepada Tuhan secara tulus. Sikap-sikap ini bukanlah hanya pi-

lihan hidup yang benar untuk manusia (makhluk dengan akal pikiran sehingga mempunyai kemampuan untuk memilih dalam arti menerima atau menolak), tetapi juga merupakan pola wujud (*mode of existence*) seluruh alam raya beserta isinya. Karena itu, jika manusia diseru untuk memilih sikap hidup tunduk, menyerah, dan pasrah kepada Tuhan, yaitu *berislâm*, maka tidak lain ialah seruan agar manusia mengikuti pola hidup yang sama dengan pola wujud alam raya. Yang dihasilkan oleh sikap itu tidak saja kedamaian dengan Tuhan, diri sendiri, dan sesama manusia, tetapi juga dengan sesama makhluk, sesama isi seluruh alam raya, dan jagat raya itu sendiri. Inilah yang dimaksud dengan firman Tuhan dalam Al-Quran yang amat banyak dikutip:

Apakah mereka menganut selain dîn (ketundukan) kepada Allah? Padahal telah pasrah (aslama, "berislâm") kepada-Nya makhluk yang ada di seluruh langit dan bumi, baik dengan taat atau secara terpaksa., dan kepada-Nya pula semuanya akan dikembalikan! Katakan (hai Muhammad), "Kami percaya (âmannâ, "ber-îmân") kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq dan Ya'qub serta suku-suku (Bani Israil), juga

apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta para nabi yang lain dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan antara seorang pun dari mereka itu, dan kami tunduk (muslimûn) kepada-Nya." Barangsiapa menganut selain al-islâm (sikap pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa) sebagai agama, maka tidak akan diterima dari dia, dan di akhirat dia akan termasuk mereka yang merugi (Q., 3: 83-85).



DARI BUKIT SINAI KE BUKIT ZAITUN

Hal mendasar yang tidak disadari oleh umat beragama sendiri di zaman akhir ini adalah masing-masing menjadi tawanan (*the captives*) dari kepentingan-kepentingan jangka pendek atau *expediency*, dan terlupa dari prinsip-prinsip. Kecenderungan apologetik mengatakan bahwa yang salah bukanlah agamanya, melainkan para pemeluknya. Dengan perkataan lain, para pemeluk agama telah mengalami alienasi dari agamanya sendiri atau agama menjadi terasa asing karena tidak cocok dengan harapan penuh nafsunya (nafsu memusuhi, membenci, menyerang, dan lain-lain akibat salah pengertian, kurangnya saling berkomunikasi, atau karena warisan-warisan masa lalu yang tidak terlalu jauh seperti zaman kolonial, dan seterusnya). Dalam Islam sendiri, me-

nurut sebuah sabda Nabi (hadis) juga ada peringatan bahwa agama itu datang sebagai “hal yang aneh” dan nanti akan kembali menjadi “hal yang aneh” lagi seperti semula. Maka para pemikir Islam seperti Muhammad Abduh mengatakan bahwa “Islam tertutup oleh kaum Muslim sendiri”, atau seperti dikatakan oleh Karen Armstrong, berkenaan dengan kedudukan kaum wanita dalam Islam sekarang, Islam, sama dengan agama Kristen, telah “dibajak” oleh para pemeluknya sendiri, yakni dengan memberi tafsiran dan penalaran yang sesungguhnya tidak dimaksudkan oleh Kitab Suci Al-Quran. Kalau itu semua betul, maka bagaimana dengan ide “memperkenalkan kembali” ajaran agama kepada para pemeluknya sendiri? Suatu kegiatan yang salah akan tampil sangat pretensius, namun tentu tidak ada jeleknya jika dicoba.

Menurut Ibn Taimiyah dan Ayatullah Khomeini—yang masing-masing mewakili secara berturut-turut dunia pemikiran Islam Sunni-Hanbali dari zaman klasik dan dunia pemikiran Islam Syi’i-Ja’fari dari zaman modern—beriman kepada para nabi berarti menerima dan mengikuti ajaran mereka (“yang masih

absah”, yakni, tidak terkena pembatalan atau abrogasi, *naskh*). Maka yang langsung terkait dengan persoalan etika sumber daya manusia ialah inti ajaran agama-agama, yang secara simbolik-representatif dicerminkan kepada kontinum inti ajaran tiga agama Semitik (atau



Abrahamik), yaitu: Yahudi, Kristen, dan Islam, dan secara prinsipil analog dengan inti ajaran agama-agama yang lain di k a l a n g a n umat manu-

sia. Inti ajaran agama Semitik itu, setidaknya demikian menurut banyak ahli tafsir Al-Quran, menjadi dasar bagi adanya sumpah Ilahi dengan pohon *tin* (Inggris: *fig*), pohon zaitun, Bukit Sinai dan negeri yang sangat aman, Makkah.

Pohon *tin* adalah pohon yang umum tumbuh di sekitar daerah Laut Tengah bagian timur, khususnya Palestina. Tuhan menyebutkan pohon itu sebagai isyarat kepada negeri ini, khususnya Kanaan, sebagai negeri tempat Ibrahim memantapkan dirinya dalam mengemban tugas membawa paham Ketuhanan Yang Maha Esa kepada umat manusia (yang oleh Ibrahim, dengan meminjam istilah masyarakat

setempat saat itu, Tuhan Yang Maha Esa itu disebut *El*—yakni Tuhan atau Sesembahan—atau *El Elyon*—yakni, Tuhan Yang Mahatinggi, *Al-Lâh Ta'âlâ*). Di negeri itu pula Ibrahim, dalam usianya yang lanjut, dianugerahi dua orang putra dari dua orang istri, yaitu Isma'il (*Ishma-El*, “Tuhan telah mendengar”) dan Ishaq (*Izaak*, “Ketawa”), dan dari Ishaq melalui Ya'qub (Israil, *Isra-El*, “hamba Tuhan”) tampil para nabi (*al-asbâth*). Dan masih di Palestina pula—tempat banyak tumbuh pohon Zaitun—Isa Al-Masih a.s. tampil, dengan sari ajaran yang disampaikannya dalam khutbah dari atas Bukit Zaitun. Inilah relevansi sumpah Allah dengan pohon atau Bukit Zaitun.

Bukit Sinai (Arab: *Thûr Sina*) adalah bukit atau gunung tempat Nabi Musa a.s. menerima Sepuluh Perintah (*The Ten Commandments*, *Al-Kalimât Al-'Asyr*) dari Tuhan yang merupakan perjanjian antara Tuhan dengan kaum Israil (anak keturunan Israil atau Ya'qub), dan menjadi inti Kitab Taurat. Inilah inti dari apa yang oleh orang Barat sering dinamakan pandangan hidup Judéo-Christian (Yahudi-Kristen), yang dinilai sebagai dasar pandangan etis dan moral peradaban Barat pada umumnya. Sedangkan, “negeri yang sangat aman”, yaitu Makkah, disebutkan sebagai acuan kepada kerasulan Nabi Muhammad

Saw. Agama yang diajarkannya, sepanjang pandangan Al-Quran sendiri, adalah kelanjutan agama-agama sebelumnya, dan berhubungan dengan semua agama Tuhan bagi seluruh umat manusia. Sebanding dengan “Sepuluh Perintah” Tuhan lewat Nabi Musa a.s. tersebut, Al-Quran memuat “Sepuluh Wasiat” (*Al-Washâyâ Al-'Asyr*) dari Tuhan kepada umat manusia.



DARI IKTIKAD BAIK KE AMAL SALEH

Iktikad baik pribadi tidaklah cukup untuk mewujudkan masyarakat berperadaban, karena ia harus diterjemahkan terlebih dahulu menjadi tindakan kebaikan yang nyata dalam masyarakat, berupa amal saleh, yang secara takrif adalah tindakan yang membawa kebaikan untuk sesama manusia. Tindakan kebaikan bukanlah untuk kepentingan Tuhan, sebab Tuhan adalah Mahakaya, tidak perlu apa pun dari manusia. Siapa pun yang melakukan tindakan kebaikan, dia sendirilah melalui hidup kemasyarakatannya, yang akan memetik dan merasakan kebaikan dan kebahagiaan. Begitu pula sebaliknya, siapa pun yang melakukan kejahatan, maka ia sendiri yang akan menanggung akibat kejahatan dan kerugiannya.

Jika kita perhatikan apa yang terjadi dalam kenyataan sehari-hari, jelaslah bahwa nilai-nilai kemasyarakatan yang terbaik sebagian besar dapat terwujud hanya dalam tuntunan hidup kolektif yang memberi peluang pada adanya pengawasan sosial. Tegaknya hukum dan keadilan mutlak memerlukan suatu bentuk interaksi sosial yang memberi peluang bagi adanya pengawasan itu. Pengawasan sosial adalah konsekuensi langsung dari iktikad baik yang diwujudkan dalam tindakan kebaikan. Dan pengawasan sosial tidak mungkin terselenggara dalam suatu tatanan sosial yang tertutup.

Amal saleh atau kegiatan “demi kebaikan” dengan sendirinya berdimensi kemanusiaan, karena berlangsung dalam suatu kerangka hubungan sosial dan menyangkut orang banyak. Suatu klaim berbuat baik untuk masyarakat, apalagi jika perbuatan atau tindakan itu dilakukan melalui penggunaan kekerasan, tidak dapat dibiarkan berlangsung karena mengabaikan masyarakat itu sendiri yang juga mempunyai pandangan, penilaian, dan pendapat.

Dengan demikian, masyarakat yang berperadaban bakal terwujud hanya jika terdapat cukup semangat keterbukaan dalam masyarakat. Keterbukaan adalah konsekuensi dari perikemanusiaan, suatu pandangan yang melihat sesama manusia secara positif dan optimistis, yaitu pandang-

an bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, sebelum terbukti sebaliknya. Kejahatan pribadi manusia bukanlah sesuatu yang secara alami berasal dari dalam kedirian. Kejahatan terjadi sebagai akibat pengaruh dari luar, dari pola budaya yang salah, yang diteruskan terutama oleh orangtua kepada anaknya. Setiap anak pada dasarnya dilahirkan dalam kesucian asal, namun orangtuanyalah yang membuatnya menyimpang dari kesucian asal itu.

Ajaran kemanusiaan yang suci itu membawa konsekuensi bahwa kita harus melihat sesama manusia secara optimal dan positif, dengan menerapkan prasangka baik (*husnu al-zhann*), bukan prasangka buruk (*sū’u al-zhann*) kecuali untuk keperluan kewaspadaan seperlunya dalam keadaan tertentu. Tali persaudaraan manusia akan terbina antara lain jika dalam masyarakat tidak terlalu banyak prasangka buruk akibat pandangan yang pesimistis dan negatif pada manusia.

Berdasarkan pandangan kemanusiaan yang optimal positif itu kita harus memandang bahwa setiap orang mempunyai potensi untuk benar dan baik. Karena itu, setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dan hak untuk didengar.

Dari pihak yang mendengar, kesediaan untuk mendengar itu sendiri memerlukan dasar moral yang

amat penting yaitu sikap rendah hati, berupa kesiapan mental untuk menyadari dan mengakui diri sendiri yang juga berpotensi untuk membuat kekeliruan. Kekeliruan atau kekhilafan terjadi karena manusia adalah makhluk yang lemah.

Keterbukaan adalah kerendahan hati untuk tidak merasa selalu benar, kesediaan mendengar pendapat orang lain dan mengikuti mana yang terbaik. Keterbukaan serupa itu dalam Kitab Suci disebut sebagai tanda adanya hidayah dari Allah Swt. dan membuat yang bersangkutan tergolong orang-orang yang berpikiran yang mendalam (*ûlû 'l-*albâb**), yang sangat beruntung.

Musyawahar pada hakikatnya tidak lain ialah interaksi positif individu dalam masyarakat yang saling memberi hak untuk menyatakan pendapat, dan saling mengakui adanya kewajiban mendengar pendapat. Dalam bahasa lain, musyawarah adalah hubungan interaktif untuk saling mengikatkan tentang kebenaran dan kebaikan serta ketabahan dalam mencari penyelesaian masalah bersama, dalam suasana persamaan hak dan kewajiban antarwarga masyarakat.

Itulah masyarakat demokratis, yang berpangkal dari keteguhan wawasan etis dan moral berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat demokratis tidak mungkin terwujud tanpa masyarakat berperadaban, masyarakat madani, *civil society*.

Berada di lubuk paling dalam dari masyarakat madani ialah jiwa *madanîyah*, *civility*, yaitu keadaban itu sendiri. Ini merupakan sikap kejiwaan pribadi dan sosial yang bersedia melihat diri sendiri tidak selamanya benar, dan tidak ada suatu jawaban yang selamanya benar atas suatu masalah.

Dari keadaban inilah, lahir sikap yang tulus untuk menghargai sesama manusia, betapapun seorang individu atau suatu kelompok berbeda dengan diri sendiri dan kelompok sendiri. Karena itu, keadaban atau *civility* menuntut setiap orang dan kelompok masyarakat menghindar dari kebiasaan merendahkan orang atau kelompok lain sebab, *Kalau-kalau mereka yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka yang merendahkan* (Q., 49: 11).



DARI LOGIKA ARISTOTELES KE EMPIRISISME

Pada umumnya, orang tidak begitu tepat memahami Ibn Rusyd berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Kalau Sutan Takdir Alisyahbana mengatakan bahwa Barat itu maju dari segi ilmu pengetahuan karena Ibn Rusyd, itu hanya separuhnya yang benar. Ibn Rusyd mengetuk Barat untuk menjadi rasional, tetapi setelah rasional justru mereka melihat bahwa Aristotelianisme,

yaitu pemikiran deduktif, tidak cocok untuk ilmu pengetahuan. Maka, tampillah orang-orang seperti Francis Bacon, Roger Bacon, untuk mengoreksinya. Mereka adalah orang-orang yang berpikir bahwa kenyataan tidak bisa dideduksi melalui otak atau intelek, atau intelektualisasi, tetapi harus dilakukan melalui apa adanya. Inilah yang disebut empirisisme.

Dengan kata lain, empirisisme sebetulnya anti-Aristoteles, dan logika Aristoteles pun ditinggalkan. Dulu, sebagai disiplin akademik universitas, logika Aristoteles itu sangat penting, tetapi setelah Bacon, tampil dan berbicara tentang empirisisme, maka logika Aristoteles berhenti. Justru dengan meninggalkan Aristotelianisme warisan Ibn Rusyd dan menganut empirisisme, Barat dapat maju dalam ilmu pengetahuan. Tetapi takdir tetap benar, sebab seandainya Ibn Rusyd tidak pernah memengaruhi Barat, orang Barat pun tidak akan terbimbing ke arah empirisisme.



DARI MAHABBAAH KE SAKÎNAH

Persahabatan antara dua orang sesama jenis adalah hal yang terpuji, namun mempunyai makna dan suasana yang jauh berbeda dengan rasa

tertarik yang tak ternoda antara dua manusia dari dua jenis, lelaki dan perempuan. Terdapat *mawaddah* (“katresnan”) dan *rahmah* (“cinta kasih”) yang amat khusus antara keduanya. Karena itu, kebahagiaan dan ketenteraman (“*sakînah*”) dalam hidup di dunia ini, serta perasaan aman dan sentosa, ditemukan dalam hubungan yang sejati dan wajar antara suami dan istri yang mungkin menjadi ayah dan ibu, yang hidup bersama dan membangun rumah tangga.

Secara alami, seseorang tertarik kepada lawan jenisnya mula-mula melalui pertimbangan kejasmanian. Suasana saling tertarik karena segi lahiriah ini membuat yang bersangkutan “jatuh cinta”, baik sepihak (“bertepuk sebelah tangan”) atau kedua belah pihak (“gayung bersambut”). Fase ini dalam bahasa Arab disebut *Mahabbah*, yang merupakan tingkat permulaan (maka juga dapat disebut paling rendah, alias “primitif”) dari proses hubungan pria-wanita, yang dalam psikologi Sigmund Freud berhubungan dengan libido, jadi banyak berurusan dengan hasrat pemenuhan kebutuhan biologis.

Tingkat yang lebih tinggi ialah ketika seseorang tertarik kepada lawan jenisnya tidak semata-mata karena segi kejasmanian, melainkan karena hal-hal yang lebih abstrak, misalnya segi kepribadian atau nilai-

nilai lainnya yang terdapat pada seseorang. Kecintaan antara jenis pada tingkat yang lebih tinggi ini disebut *mawaddah*. Sebagai tingkat yang lebih tinggi daripada *Mahabbah* di atas, *mawaddah* umumnya berpotensi untuk bertahan lebih kuat dan lama, karena memiliki unsur kesejatian yang lebih mendalam, sehingga juga dapat memberi rasa bahagia yang lebih tinggi daripada *Mahabbah*. Pada tingkat ini, segi lahiriah atau jasmani sasaran cinta tidak lagi terlalu banyak menjadi pertimbangan. Kualitas kepribadiannya adalah lebih penting baginya dan lebih utama daripada penampakan fisiknya.

Dari tingkat *mawaddah*, suatu hubungan tarik-menarik antara dua jenis manusia dapat mencapai jenjang yang lebih tinggi, yaitu *rahmah*. *Rahmah* adalah jenis kecintaan Ilahi, karena bersumber dan berpangkal dari sifat Tuhan Yang *Rahmân* dan *Rahîm*. Maka sama dengan pesan Nabi dalam sebuah hadis agar manusia berusaha meniru akhlak Allah, hubungan saling cinta antara dua orang manusia lain jenis dapat mencapai kualitas kecintaan yang tidak terbatas, yang serba meliputi,

murni dan sejati, sejalan dengan makna firman Allah, *rahmah-Ku meliputi segala sesuatu* (Q., 7: 156). Dan sebuah hadis sahih Nabi Saw. mengajarkan, “Orang-orang yang kasih sayang (*al-râhimûn*) akan dikasihsayangi oleh yang Mahakasih Sayang (*al-rahmân*). Karena itu kasih sayangilah manusia di bumi, maka Dia yang di langit akan kasih sayang kepadamu.”



Berangkat dari *rahmah* itulah rasa saling tertarik antarmanusia dari dua jenis

yang diikat dalam pernikahan yang sah dapat menciptakan suasana keluarga sakinah, yaitu keluarga bahagia yang diliputi oleh rasa tenang, tenteram, dan sentosa yang sempurna. Adalah berkat sakinah itu, maka kehidupan keluarga dapat berkembang menjadi sebuah pangkal keberanian, keuletan, dan ketabahan dalam hidup. Jenis sakinah itu pula yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya Saw. dan kepada kaum beriman yang menyertai beliau sehingga tetap memiliki ketabahan, keuletan, dan harapan kepada Allah, dan kemudian mencapai kemenangan dan sukses (Q., 9: 26 dan 40, serta Q., 28: 26).



DARI PESIMIS KE OPTIMIS MENJADI TEKAD

Kita, dalam hidup ini, tidak boleh *gemampang* kepada Allah, atau mempermudah Tuhan. Nabi Muhammad pernah menganjurkan para pengikutnya yang sudah keterlaluhan berbuat dosa, agar tidak berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan mengampuni segala dosa; Dia adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tetapi, kalau kita hanya menghayati Tuhan sebagai Yang Maha Pengampun, maka bahayanya adalah kita akan mempermudah hubungan dengan Tuhan, misalnya, kita dengan sengaja berbuat kesalahan, semau *gue, toh* nanti pasti diampuni. Ini yang tidak boleh dan berbahaya, dan akan melemahkan sendi-sendi moral kita.

Maka, selain kita menghayati Tuhan melalui sifat-sifat-Nya yang “halus”, kita secara bersamaan juga harus menghayati Tuhan sebagai *Al-Jabbâr, Al-Muntaqim, Al-Mutakabbir*, dan semacamnya. Sebab Tuhan berfirman, *Beritahukan kepada hamba-hamba-Ku bahwa Aku Maha Pengampun, Maha Pengasih. Dan bahwa azab-Ku sungguh azab yang berat sekali* (Q., 15: 49-50). Kita harus mengombinasikan keduanya; yang “halus” dan yang “keras”. Karena itu, di kalangan sufi ada istilah *al-khawf wa*

al-rajâ' (antara harap-harap cemas). Tetapi, yang terpenting dan harus diingat, bahwa kita tidak boleh kehilangan harapan kepada Allah, apalagi sampai berprasangka buruk kepada-Nya. Misalnya dengan mengatakan, “Tuhan tidak adil. Saya sudah berusaha menjadi orang baik, tetapi gagal juga. Sementara orang lain yang tidak begitu peduli terhadap kelakuannya, tetap berhasil.” Munculnya prasangka demikian sangat berbahaya. Oleh karena itu, agama Islam menganjurkan agar kita selalu membaca *subhânallâh* (Mahasuci Allah) dalam zikir kita. Sebetulnya ucapan itu lengkapnya berbunyi, *subhânallâh ‘amma ya-shifûn* (Mahasuci Allah dari sifat-sifat yang mereka deskripsikan). Ucapan ini ada kaitannya dengan kaum Yahudi Madinah yang memusuhi Nabi, yang sering mengatakan bahwa Tuhan itu kikir. Dengan ucapan itu, kita berharap dapat mengikis sikap pesimistis kita kepada Allah. Artinya, Mahasuci Allah dari apa yang sudah kita persepsikan kepada-Nya, seperti tidak adil dan sebagainya.

Setelah tidak ada prasangka buruk kepada Tuhan, kemudian kita bangun persepsi yang optimistis-positif kepada-Nya dengan membaca *alhamdulillah*, bahwa apa pun yang terjadi pasti ada maknanya yang positif. Sebuah hadis Qudsi mengatakan, “*Sesungguhnya Aku ini*

mengikuti prasangka hamba-Ku mengenai Diri-Ku.” Artinya, kalau kita berprasangka baik terhadap Allah, Dia pun akan baik terhadap kita. Demikian juga bila sebaliknya. Jadi dengan *alhamdulillah* kita bersikap optimistis: apa pun yang terjadi pasti ada hal yang positif. Mungkin sebelumnya kita tidak tahu, tetapi kelak kita akan melihatnya. Inilah hikmah dari kehendak Tuhan pada kita.

Dengan sikap optimistis, yang merupakan sumber daya atau energi, orang akan sanggup bekerja dengan baik. Tetapi kalau pesimistis, biasanya sulit sekali berkembang karena kurang motivasi. Allah mengatakan, *Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah Ia membukakan jalan keluar baginya. Dan Ia membukakan rezeki baginya dari (sumber) yang tak diduga-duga* (Q., 65: 2-3). Artinya, dalam bahasa manusia, dengan iman kepada Allah, yang terselip di dalamnya harapan dan optimisme, kita mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk mengatasi masalah kita.

Kemampuan kita untuk mengatasi masalah itu kemudian diper-tegas lagi dengan mengucapkan *Allâhu Akbar*. Hanya Allah Yang Mahabesar, yang lain kecil, termasuk persoalan hidup kita. Tidak ada halangan yang tidak bisa kita atasi. Jadi rangkaian zikir *subhânallâh*, *alhamdulillah*, dan *Allâhu akbar*

merupakan semacam ilustrasi atau simbol dari perkembangan jiwa kita sendiri: dari pesimistis, kepada optimistis, kemudian menjadi tekad. Itu hendaknya selalu kita kaitkan dengan Allah. Karena itulah, kita harus selalu berharap kepada Allah, tetapi jangan *gemampang*, supaya kita tidak menjadi lemah secara moral.



DARI WARISAN ISLAM KE REVOLUSI INDUSTRI

Kaum empirisis kebanyakan lahir di Inggris, sehingga menjadikan Inggris sebagai pelopor Revolusi Industri. Gejala ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari ilmu pengetahuan yang dikembangkan terutama oleh Oxford dan Cambridge. Sampai sekarang kita masih melihat persaingan antara dua lembaga itu, di mana salah satu gejalanya ialah perbedaan antara kamus Oxford dan Cambridge. Ini persis seperti persaingan antara Kufah dan Bashrah di zaman klasik Islam. Coba saja perhatikan teori tentang gramatika bahasa Arab yang diajarkan di pesantren-pesantren, selalu saja dikatakan, “menurut orang Kufah begini dan menurut orang Bashrah begini.”

Pertanyaannya kemudian, mengapa kaum empirisis lahir di Inggris, dan bukan di Spanyol, padahal

yang terakhir ini mewarisi banyak sekali ilmu pengetahuan Islam? Ketika Spanyol berhasil melakukan penaklukan kembali—atau sebetulnya lebih tepat pengusiran—orang Islam dari daratan Spanyol, mereka lalu melakukan pelayaran—dengan menggunakan sisa-sisa teknologi Islam dalam pe-

layaran—sampai berhasil menemukan sebuah dunia baru, yaitu Amerika. Dari dunia baru itu mereka membawa banyak sekali kekayaan Amerika ke Spanyol, terutama emas, yang dirampas dari orang-orang Inka. Dengan emas itu mereka menjadi sangat kaya. Tetapi, mungkin karena orang Spanyol masih punya kenangan kepada orang Islam sebagai musuh, maka mereka membuat suatu kesalahan yang fatal, yaitu tidak meneruskan ilmu pengetahuan warisan Islam. Bahkan, mereka kemudian membiarkannya pindah ke mana-mana.

Emas yang dirampas Spanyol dari Amerika kemudian dijual kepada Inggris. Uang yang diperolehnya digunakan untuk mendirikan gereja dan katedral-katedral yang megah. Sebaliknya Inggris dengan modal emas yang diperoleh dari Spanyol itu mendirikan Universitas Oxford dan Cambridge, dan kemudian mengembangkan ilmu penge-

tahuan. (Kita tahu bahwa negeri kita sendiri juga pernah menjadi korban percekocokan yang sengit antara Spanyol dan Inggris). Sampai sekarang Spanyol boleh berbangga dengan gereja-gerejanya yang megah, tetapi secara ekonomi mereka sebenarnya masih merupakan negara

miskin. Bahkan ada kelakar bahwa Spanyol adalah “negeri copet”, karena para pencoleng dan rampok jalanan

banyak berkeliaran di sana, suatu gejala yang merebak karena kemiskinan. Sementara itu, Inggris dengan ilmu pengetahuannya mengembangkan etos riset dan inovasi, termasuk mengembangkan empirisme, dan akhirnya mereka melangkah ke zaman industri.



DASAR HIDUP

Masyarakat madani atau *civil society* adalah suatu masyarakat dengan *civility* (keadaban) sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi dengan proyek mendirikan negara kota Madinah. Model itu kemudian menjadi dasar bagi suatu imperium yang nanti terbentang dari lautan Atlantik sampai Gurun Ghobi oleh para sahabat beliau. Sampai seka-

rang, ia masih merupakan model masyarakat yang terbaik, kalau diukur dari nilai-nilai keadaban. Maka perlu ditegaskan bahwa dasar hidup yang benar adalah takwa. Dalam hal ini, para bapak pendiri (*founding-fathers*) negara kita mengikuti suatu kebijakan yang luar biasa dengan memasang klausul, “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Al-Quran, perkataan asas terdapat dalam ayat, *Manakah yang terbaik? Mereka yang mendirikan bangunannya atas dasar takwa dan keridlaan Allah, atautkah yang mendirikan bangunannya di atas tanah pasir di tepi jurang lalu runtuh bersamanya ke dalam api neraka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka yang zalim* (Q., 9: 109).

Jadi, dasar hidup itu hanya dua. Yang satu benar dan yang lain salah. Yang benar ialah, takwa kepada Allah dan semangat mencari ridla-Nya. Dan yang salah ialah semua dasar hidup selain itu. Inilah salah satu segi lagi dari takwa yang sangat penting diperhatikan dalam memahami ajaran agama kita. Kalau kita betul-betul bertakwa seperti ini, maka janji Allah mengatakan, ... *barangsiapa bertakwa kepada Allah Ia membukakan jalan ke luar baginya. Dan Ia membukakan rezeki baginya dari (sumber) yang tak diduga-duga...* (Q., 65: 2-3).



DASAR MANUSIA BAIK

Pembicaraan tentang manusia sebenarnya banyak sekali dibahas dalam Al-Quran, tetapi tidak banyak muncul dalam kitab-kitab pemikiran Islam klasik. Keadaan demikian menyebabkan umat Islam pada umumnya tidak begitu menyadari betapa konsep Al-Quran mengenai manusia sangat tinggi, sangat penting, bahkan sangat moderat. Barangkali kita akan menyadari hal itu kalau mengetahui bahwa lahirnya humanisme di Barat lantaran perkenalan mereka dengan Islam.

Pandangan Islam bahwa manusia merupakan puncak ciptaan Tuhan tidak berbeda dengan pandangan Kristen dan Yahudi dalam bahasanya masing-masing. Di dalam Bibel disebutkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Tuhan, *man created founding image of God*. Ini cukup menjadi alasan bahwa manusia merupakan puncak ciptaan Tuhan. Tetapi seberapa jauh pandangan tersebut mempunyai efek di dalam kehidupan? Di dalam Kristen tidak ada efeknya, bahkan sebagaimana kita ketahui, konsep Kristen mengenai manusia sangat pesimistis.

Russel, seorang failasuf Inggris yang sengit terhadap agama, membuat buku berjudul *Why I not a Christian*, kenapa saya tidak menjadi

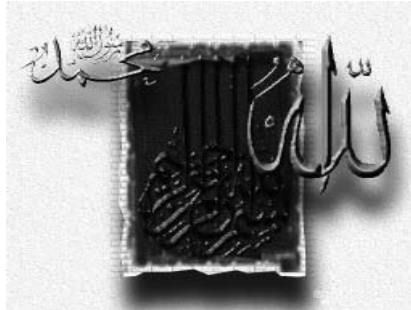
orang Kristen. Oleh penerbitnya, desain sampul buku tersebut digambari salib retak, karena dalam argumen Russel, salib dipandang sebagai lambang pesimisme kepada manusia. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa salib merupakan lambang penebusan, yaitu ketika wafatnya Isa Al-Masih, anak Tuhan, di tiang salib. Penyaliban Isa sendiri didasarkan kepada pandangan bahwa manusia membawa dosa sejak lahir, dosa yang diwarisi dari Adam dan Hawa. Inilah yang menyebabkan pandangan tentang manusia di dalam Kristen begitu pesimis; semua orang dipandang jahat, dan menjadi baik setelah melalui kepercayaan tertentu. Sedangkan Islam merupakan agama yang sempat dipuji Russel, terutama dalam toleransinya, keterbukaannya, dan pandangannya kepada manusia yang optimis, memandang manusia berdasarkan pada yang baik.



DASAR MANUSIA LEMAH

Islam memandang manusia pada dasarnya baik dan diciptakan sebagai

makhluk yang *hanif*, tetapi dia adalah makhluk yang lemah, ...*manusia diciptakan dalam kodrat yang lemah* (Q., 4: 28). Di antara sekian banyak kelemahan manusia yang disebutkan dalam Al-Quran adalah *jazû'*, gelisah. *Sungguh, manusia diciptakan serba gelisah. Bila ditimpa bahaya berkeluh-kesah.*



Dan bila kekayaan yang diterimanya kikir. Kecuali orang yang tekun mengerjakan shalat (Q., 70: 19-22). Hanya orang yang shalatnya stabil, yang ka-

lau ditimpa kemalangan tidak akan gundah-gulana (karena ia percaya dengan takdir), dan kalau memperoleh kebaikan akan mengucapkan *alhamdulillah*, memberikan kredit kepada Tuhan, sehingga ia tidak sombong dan tetap rendah hati. Karena pada dasarnya, *Setiap ada musibah di bumi dan dalam dirimu, sudah tercatat sebelum Kami mewujudkannya, sungguh itu bagi Allah mudah sekali. Agar kamu tidak berduka cita atas apa yang sudah hilang, dan merasa bangga atas apa yang diberikan* (Q., 57: 22-23).

Sifat lemah manusia yang juga banyak disebut dalam Al-Quran adalah *minioptik*, pandangan yang pendek. Hal ini karena manusia

tidak menyadari akibat jangka panjang dari perbuatannya sendiri sehingga ia mudah tergoda untuk berburuk sangka. Tergoda sendiri merupakan sikap menerima dan melakukan sesuatu yang secara jangka pendek tampaknya baik, tetapi jangka panjangnya justru membawa kemungkaran. Peringatan mengenai hal demikian banyak terdapat dalam Al-Quran, misalnya, *Sungguh, mereka menyukai hidup yang fana, dan meninggalkan hari yang berat* (Q., 76: 27). Artinya, bahwa manusia lebih suka yang segera dan lupa pada yang jangka panjang, senang kepada yang cepat dan lupa kepada yang di belakang hari. Padahal, ... *sungguh, yang kemudian akan lebih baik bagimu daripada yang sekarang* (Q., 93: 4). Sebab, pada umumnya, yang jangka panjang lebih baik daripada yang jangka pendek.



DASAR PERANG DALAM ISLAM

Kalau jihad harus didefinisikan, maka definisi yang tepat ialah kerja keras untuk membela kebenaran. Perkataan “membela” di sini perlu ditekankan sebab pada dasarnya jihad itu dilakukan sebagai pertahanan dan pembelaan diri, bukan untuk agresi atau menyerang. Di zaman Nabi sendiri sudah terjadi berbagai kasus jihad

di mana beliau ikut terlibat sebagai komandan dalam berbagai peperangan. Kalau kita baca sejarah, jelas sekali bahwa Nabi Muhammad melakukan semuanya sebagai pertahanan diri, bukan agresi. Misalnya, orang-orang kafir Makkah datang menyerbu ke Madinah, dan tidak pernah Nabi yang menyerang Makkah. Memang benar bahwa Makkah kemudian diserbu oleh Nabi yang kemudian dikenal dengan *fath Makkah* (pembebasan Makkah). Tetapi itu terjadi karena permusuhan yang sudah lama, tatkala selama ini orang Makkah selalu menyerang Madinah. Seandainya ketika Nabi pindah ke Madinah itu sukarela, bukan diusir, kemudian Nabi dan agama Islam berkembang di Madinah dan orang Makkah tidak apa-apa, barangkali akan berdiri dua kota: Madinah yang Islam dan Makkah yang masih tetap musyrik. Tetapi karena orang Makkah selalu menyerang Madinah, maka akhirnya dibalas juga, dan ternyata Makkah jatuh.

Begitu juga ekspedisi ke Khaibar, dilakukan karena orang-orang Khaibar lebih dulu berbuat sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Nabi, yaitu pengkhianatan. Wujud jihad sebagai perang—yang kemudian melekat sekali kepada istilah tersebut—dimulai dengan pernyataan dari Tuhan bahwa orang-orang Islam sekarang diizinkan untuk perang. Pernyataan itulah yang harus kita kaji

dalam rangka memahami apa itu jihad. Firman Allah itu berbunyi, *Sungguh, Allah akan membela mereka yang beriman; sungguh, Allah tidak menyukai siapa pun yang berkhianat dan tidak berterima kasih. Kepada mereka yang diperangi, diizinkan (berperang, sebab mereka teraniaya); dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka* (Q., 22: 38-39). Dalam ayat ini sudah ada sinyalemen kepada kelompok-kelompok yang berkhianat dan agresi. Jadi pernyataan “diizinkan”-nya Nabi berperang itu dimulai dengan *mindset* (sikap mental yang dibentuk oleh pengalaman, peny.) seperti ini. Ini adalah ayat Madinah. Di Makkah tidak ada ayat seperti itu, bahkan di Makkah sama sekali Nabi dilarang untuk berperang. Tetapi kemudian ada pernyataan “diizinkan” berperang (Q., 22: 39). Inilah pernyataan Tuhan bahwa orang Islam boleh perang. Sebelum itu, Nabi selalu berusaha untuk menahan para pengikutnya, yaitu para sahabat agar tidak berperang.

Apa wujud bahwa mereka itu diperlakukan secara tidak adil sehingga boleh berperang? Ini dapat dilihat dari firman Allah, *Mereka yang diusir dari tempat-tempat tinggal mereka*

(Q., 22: 40). Dalam kasus Nabi dan para sahabatnya, mereka diusir dari Makkah tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka membuat pernyataan bahwa “Tuhan kami adalah Allah”. Artinya, hal ini hanya karena masalah kepercayaan, bukan masalah rebutan harta, rebutan kekuasaan, dan sebagainya.



DASAR TAUHID

Jika menginginkan adanya konsistensi, maka dalam membahas segala sesuatu yang

menyangkut masyarakat Islam, kita tidak mungkin melakukannya tanpa melihat hubungannya dengan *tawhîd* atau paham Ketuhanan Yang

Maha Esa. Sebab *tawhîd* itulah fondasi bagi semua bangunan Islam, bahkan seharusnya fondasi bagi semua bangunan kemanusiaan. Karena *tawhîd* adalah bagian paling inti ajaran semua nabi dan rasul (Q., 21: 7) maka dengan sendirinya juga bagian paling inti ajaran Islam.

Karena itu, semua pandangan tentang masyarakat yang “modern” berpangkal dari pandangan hidup

tawhîd. Berkenaan dengan itu, salah satu implikasi pokok *tawhîd* ialah pemusatan kesucian hanya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan pencopotan kesucian itu dari segala sesuatu selain Allah. Dalam konteks bangsa Arab di zaman Nabi Saw. pandangan ini berakibat dilepaskannya nilai kesucian dari pandangan kesukuan dan kepemimpinan kesukuan. Maka dengan pandangan dasar *tawhîd* itu manusia dibebaskan dari mitologi-mitologi, sehingga segala sesuatu selain Allah, termasuk kepemimpinan dalam masyarakat, menjadi sasaran sikap, telaah, dan kajian terbuka. Karena itu, seluruh jagat raya adalah “ayat” untuk orang yang berpikir (Q., 3: 190-191). Demikian pula umat manusia dengan segala keadaannya, termasuk sejarahnya—yaitu pola-pola hidup hubungan sesamanya, baik sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain, dalam ruang dan waktu—adalah “ayat” dan “*Sunnatullâh*” atau Hukum Allah yang harus diperhatikan, dikaji, dan dipedomani (Q., 3: 137). Secara singkat, Islam mengetengahkan pandangan hidup terbuka sebagai konsekuensi *tawhîd*. Sebab, seperti dikatakan Ibn Taimiyah, *tawhîd* memang berakibat pembebasan manusia dari segala macam kepercayaan palsu seperti mitologi. Kepercayaan palsu atau mitologi itu, di kalangan umat manusia mana pun juga, biasanya

berkisar sekitar praktik pemujaan kepada selain Allah sehingga tercipta pujaan-pujaan (*âlihah*, jamak *ilâh*) yang palsu, bahkan juga sekitar praktik pemujaan kepada kecenderungan (*hawâ*) diri sendiri. Keterbukaan kepemimpinan Islam klasik itu banyak dibuktikan dalam berbagai kejadian anekdotal yang menyangkut para khalifah ketika mereka menghadapi peringatan, bantahan, atau “oposisi” pihak-pihak rakyat kebanyakan. Agaknya disebabkan oleh keterbukaan yang sangat egaliter itu, maka banyak terjadi peristiwa-peristiwa tragis, berupa pembunuhan para pemimpin, yang sepintas lalu tampak menyimpang dari ide-ide Islam. Berkenaan dengan ini patut diingat bahwa Islam, justru konsisten dengan pandangannya bahwa segala sesuatu selain Allah tidak boleh dipandang suci (yakni, sikap penyucian dalam makna dan semangat *tasbîh*), maka Islam tidak memandang adanya manusia suci yang lepas dari kesalahan, dan bahwa menurut Al-Quran sendiri, sejarah manusia dikuasai atau berjalan menurut hukum-hukum objektif yang tidak akan berubah, yaitu *Sunnatullâh*. Karena itu, segala kejadian tragis yang menimpa umat Islam dalam sejarah tidak merupakan gangguan terhadap kebenaran itu sendiri. Maka sejalan dengan ini Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa

Nabi Saw. sendiri pun, sebagai manusia, dapat mengalami peristiwa tragis, seperti terbunuh, namun hal itu tidak perlu, dan tidak dibenarkan, untuk disangkutkan dengan masalah kebenaran ajaran yang dibawanya. Suatu ajaran yang benar tetap benar, walaupun suatu nasib menyedihkan menimpa tokoh yang membawa dan menyerukannya.



DASAR-DASAR HUMANISME ISLAM

Sekarang, dalam tatanan dunia yang didominasi oleh Barat, khususnya Amerika, orang banyak mengagumi demokrasi. Dalam sejarahnya, demokrasi adalah kelanjutan dari humanisme seperti dirintis dan dipahami oleh kalangan para pemikir Yunani Kuno. Perkataan “demokrasi” itu sendiri, sebagaimana telah kita ketahui bersama, berasal dari bahasa Yunani, dan ide tentang demokrasi, menurut pandangan orang-orang Barat, juga berasal dari pemikiran orang-orang Yunani. Maka di Amerika demokrasi dilambangkan dalam arsitektur gedung Capitol, seperti yang ada di Washington D.C. dan di setiap ibu kota negara bagian. Pembangunan gedung model arsitektur Capitol itu merupakan usaha pembangunan kembali gedung serupa di zaman Yunani Kuno.

Tetapi humanisme Yunani telah padam dan mati sejak ribuan tahun yang lalu. Kemudian ada indikasi bahwa orang-orang Barat menjadi sadar kembali tentang humanisme itu setelah berkenalan dengan Islam. Hal ini terbukti dari pembukaan orasi ilmiah yang dibuat oleh Giovanni Pico della Mirandola, seorang failasuf humanis zaman Renaisans Eropa. Di depan para pemimpin gereja, ia memulai pidatonya demikian:

Saya telah membaca dalam berbagai catatan orang-orang Arab, wahai para Bapak yang suci, bahwa ‘Abdullah, seorang Saracen (Muslim Arab), ketika ditanya apakah kiranya yang ada di panggung dunia ini, sebagaimana adanya, yang dapat dipandang sebagai paling menakjubkan, ia menjawab, “Tidak ada sesuatu yang dapat dipandang lebih menakjubkan daripada manusia.” Sejalan dengan pendapat ini ialah ucapan Hermes Trimegistus: “Suatu mukjizat yang agung, wahai Asclepius, ialah manusia.”

Dalam kutipan singkat itu dapat dibaca bahwa Mirandolla membandingkan apa yang dibacanya dalam buku-buku kaum Muslim itu dengan ucapan seorang failasuf Yunani Kuno, Hermes Trimegistus, kepada Asclepius. Kedua-duanya menyatakan adanya harkat dan martabat yang amat tinggi pada

manusia, dan itulah pangkal pandangan kemanusiaan atau humanisme. Eropa (Barat) memang kemudian menganut humanisme yang berakar dalam falsafah Yunani. Tetapi humanisme itu kemudian lepas dari bingkai ajaran keagamaan, dan berkembang menjadi unsur penting dalam

pandangan ke-duniawian Barat, yaitu sekularisme. Sekarang humanisme yang sekularistis itu menjadi sasaran kaum pascamodernis, meskipun mereka ini

juga belum menemukan kejelasan tentang paham alternatifnya, dan masih diliputi oleh kebingungan besar. Mengenai kebingungan ini seorang pemikir, failasuf, dan ahli perbandingan agama, Huston Smith, mengatakan:

“Tidak adanya model untuk dunia adalah definisi paling mendalam pascamodernisme dan kebingungan zaman kita. Dua hal itu hampir-hampir menjadi satu dan sama. Sebuah resensi baru-baru ini atas delapan buah buku, semuanya mencantumkan perkataan “pascamodernisme” dalam judul-judulnya, mengalami jalan buntu, dengan kesimpulan bahwa tidak ada lagi seorang pun yang tahu apa arti

perkataan itu. Ini benar jika kita berada bersama orang-orang pandai, tetapi suatu titik temu yang sangat bermanfaat melandasi definisi-definisi mereka. Tanyalah kepada diri Anda sendiri jika Anda memang tahu apa yang sedang terjadi. Kalau jawaban Anda ialah tidak, maka Anda adalah

seorang pascamodern. “Siapa saja yang pada zaman ini tidak bingung,” kata Simone Weil, “dia semata-mata tidak berpikir dengan benar.”

Jadi, kebingungan dan keadaan tidak lagi tahu apa yang sedang terjadi adalah ciri utama zaman kita sekarang. Inilah pascamodernisme yang sebenarnya, sebelum ada jawaban atas keadaan yang membingungkan sekarang ini. Maka jika pascamodernisme itu merupakan sebuah indikasi, pada tahap perkembangan sekarang ini umat manusia secara keseluruhan tampaknya memerlukan pegangan baru. Tetapi pegangan “baru” itu, demi autentisitasnya sendiri, haruslah “orisinil” manusia, artinya sejalan dan serasi dengan asal-usul manusia yang tidak akan berubah sepanjang masa. Dengan kata-kata lain, manusia hanyalah harus kembali kepada “*nature*”-nya,

Agama tidaklah cukup hanya dipahami sebagai formula-formula abstrak tentang kepercayaan dan nilai. Ia menyatu dan menyatakan diri dalam hidup nyata para pemeluknya. Dan sebuah agama dapat hidup hanya sebanding dengan kematangan jiwa para pemeluknya.

yaitu fitrahnya yang suci. Dari sini kita dapat mulai mendaftar kembali noktah-noktah pandangan dasar kemanusiaan Islam, yaitu: 1. Manusia diikat dalam suatu perjanjian primordial dengan Tuhan, yaitu bahwa manusia, sejak dari kehidupannya dalam alam ruhani, berjanji untuk mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pusat orientasi hidupnya (Q., 7: 172). 2. Hasilnya ialah kelahiran manusia dalam kesucian asal (*fiṭrah*), dan diasumsikan ia akan tumbuh dalam kesucian itu jika seandainya tidak ada pengaruh lingkungan (Q., 30: 30). 3. Kesucian asal itu bersemayam dalam hati nurani (*nûrânî*, artinya bersifat cahaya terang), yang mendorongnya untuk senantiasa mencari, berpihak dan berbuat yang baik dan benar. Jadi, setiap pribadi mempunyai potensi untuk benar (Q., 33: 4). 4. Tetapi karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah (antara lain, berpandangan pendek, cenderung tertarik kepada hal-hal yang bersifat segera), maka setiap pribadinya mempunyai potensi untuk salah, karena “tergoda” oleh hal-hal menarik dalam jangka pendek (Q., 4: 28). 5. Maka, untuk hidupnya, manusia dibekali dengan akal-pikiran, kemudian agama, dan terbebani kewajiban terus-menerus mencari dan memilih jalan hidup yang lurus, benar dan baik. 6. Jadi, manusia adalah makhluk etis dan

moral, dalam arti bahwa perbuatan baik-buruknya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik di dunia ini, sesama manusia, maupun di akhirat di hadapan Tuhan Yang Maha Esa (Q., 99: 7-8). 7. Berbeda dengan pertanggungjawaban di dunia yang nisbi sehingga masih ada kemungkinan manusia menghindarinya, pertanggungjawaban di akhirat adalah mutlak dan sama sekali tidak mungkin dihindari (Q., 40: 16). 8. Pertanggungjawaban mutlak kepada Tuhan di akhirat itu bersifat pribadi sama sekali, sehingga tidak ada pembelaan, hubungan solidaritas dan perkawanan, sekalipun antara sesama teman, karib kerabat, anak dan ibu-bapak (Q., 2: 48; Q., 6: 94; Q., 19: 95; Q., 31: 33). 9. Semuanya itu mengasumsikan bahwa setiap pribadi manusia, dalam hidupnya di dunia ini, mempunyai hak dasar untuk memilih dan menentukan sendiri perilaku moral dan etisnya (tanpa hak memilih itu tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral dan etis, dan manusia akan sama derajatnya dengan makhluk yang lain, jadi tidak akan mengalami kebahagiaan sejati) (Q., 18: 29). 10. Karena hakikat dasar yang mulia itu, manusia dinyatakan sebagai puncak segala makhluk Allah, yang diciptakan oleh-Nya dalam sebaik-baik ciptaan, yang menurut asalnya berharkat dan martabat yang setinggi-tinggi-

nya (Q., 95: 4). 11. Karena Allah-pun memuliakan anak cucu Adam ini, dan melindungi serta menanggungnya di daratan maupun di lautan (Q., 17: 70). 12. Setiap pribadi manusia adalah berharga, seharga kemanusiaan sejiat. Maka barangsiapa merugikan seorang pribadi, seperti membunuhnya, tanpa alasan yang sah maka ia bagaikan merugikan seluruh umat manusia, dan barangsiapa berbuat baik kepada seseorang, seperti menolong hidupnya, maka ia bagaikan berbuat baik kepada seluruh umat manusia (Q., 5: 32). 13. Oleh karena itu, setiap pribadi manusia harus berbuat baik kepada sesamanya, dengan memenuhi kewajiban diri pribadi terhadap pribadi yang lain, dan dengan menghormati hak-hak orang lain, dalam suatu jalinan hubungan kemasyarakatan yang damai dan terbuka. (Inilah salah satu makna amal saleh, yang terkandung dalam makna dan semangat ucapan salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri pada akhir shalat).



DAULAT

Melalui bahasa Persi, kita meminjam perkataan Arab “*daulat*” (aslinya, *dawlah*), dan menjadi salah satu kata-kata kunci dalam konsep nasional kita tentang kehidupan

berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, maka perkataan “*daulat*” merupakan bagian dari perbendaharaan peristilahan politik nasional kita.

Dalam bahasa Indonesia “*daulat*” berarti kekuasaan yakni, padanan perkataan Inggris “*sovereignty*”. Karena demokrasi merupakan salah satu asas atau segi cita-cita kenegaraan kita, maka kita mengenal ungkapan “*kedaulatan rakyat*”, yakni kekuasaan rakyat.

Tentu saja semua pengertian ini benar adanya. Tetapi kiranya baik juga kita melihat sejenak sisi lain makna perkataan “*daulat*” itu. Meskipun sisi lain ini ternyata sejalan saja dengan makna yang sudah umum dikenal, namun juga ternyata menunjukkan adanya suatu konsep yang amat mendasar di balik kata-kata “*daulat*” itu.



Sebenarnya, secara etimologis, perkataan Arab “*dawlah*” atau “*dawlah*” mempunyai makna “*giliran*” atau “*putaran*”. Pengertian ini, misalnya, termuat dalam firman-Nya berkenaan dengan harta kekayaan: *Agar supaya (harta kekayaan itu) tidak menjadi putaran pada orang-orang kaya di antara kamu saja ...*

(Q., 59: 7). Juga dalam firman lainnya yang berkenaan dengan jatuh-bangunnya seseorang, kelompok atau bangsa: ... *Dan begitulah masa Kami (Tuhan) buat berputar di antara manusia ...* (Q., 3: 140)

Karena itu, secara harfiah, ungkapan *Dawlah Abbâsiyah* misalnya, berarti “Giliran (Klan) ‘Abbasiyah,” yakni, giliran mereka untuk berkuasa. Adanya masalah “giliran” itu ialah akibat dinamika “Roda Nasib” (*Wheel of Fortune*) yang selalu berputar tanpa henti, sehingga seseorang atau suatu kelompok orang kadang kala berada di atas (berkuasa) dan kadang kala berada di bawah (dikuasai, dahulu malah diperbudak). Kosmologi “Roda Nasib” ini cukup luas dianut bangsa-bangsa Arya di Asia Tengah (seperti bangsa Iran, Afghanistan, dan India) yang ditaklukkan dan dikuasai orang-orang Arab Muslim. Maka konsep “Roda Nasib” dengan konsep *dawlah* pun menjadi klop, saling mengisi, sehingga akhirnya secara semantik *dawlah* menjadi berarti kekuasaan atau negara.

Maka suatu pandangan amat mendasar yang terselip di balik perkataan *dawlah* atau “daulat” ialah bahwa kekuasaan itu tidak langgeng. Kaum penguasa mempunyai kekuasaan hanyalah karena kebetulan dia mendapat “putaran” atau “giliran” itu pun akan terus menggelinding, berpisah dari mereka

yang “kebetulan” sedang berkuasa, lalu diterima atau diberikan kepada orang lain. Kiranya tidak perlu lagi dikatakan bahwa memang begitulah kenyataan perjalanan sejarah umat manusia, sebagai hukum Tuhan yang pasti.

Agar kita semua menyadari adanya masalah “daulat” atau “giliran” dalam kekuasaan itu, kita diajari untuk berdoa: “*Ya Allah, Pemilik segala kekuasaan! Engkau berikan kekuasaan kepada siapa saja yang Kau kehendaki, dan Engkau copot kekuasaan dari siapa saja yang Kau kehendaki, Engkau muliakan siapa saja yang Kau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa saja yang Kau kehendaki! Di tangan Engkaulah segala kebaikan! Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu*” (Q., 3: 26).



DAWLAH, THE WHEEL OF FORTUNE

Al-Quran mengisyaratkan tentang adanya hukum perputaran, yang disebut *dawlah*. Secara harfiah sebetulnya *dawlah* itu artinya perputaran. Ketika perkataan *dawlah* menghasilkan pengertian kekuasaan, maka maksudnya adalah giliran antarmanusia. Dalam kosmologi bangsa-bangsa Arya, ada istilah *the wheel of fortune*, roda nasib yang se-

lalu berputar. Kalau orang ada pada roda itu dan kemudian dalam perputaran itu kebetulan berada di atas, maka ia menjadi penguasa. Cuma di dalam kosmologi Arya ditambah lagi dengan kepercayaan bahwa kalau orang itu berkuasa, maka ia mempunyai hubungan spesial dengan dewa-dewa. Itu yang disebut konsep Dewa Raja, Sabdo Pandito Ratu. Menurut Islam, hal itu tidak diperbolehkan; manusia tetap manusia, tidak memiliki hubungan spesial dengan Tuhan. Dalam salah satu tafsiran Syi'ah, Islam digabung dengan kosmologi Arya—karena Iran itu adalah orang Arya. Maka ketika mereka menganggap bahwa Imam punya hubungan khusus dengan langit, sebetulnya itu adalah sisa-sisa konsep Dewa Raja. Orang Jawa yang banyak terpengaruh oleh Hindu, menganggap semua rajanya keturunan Dewa, paling tidak keturunan Sri Roro Kidul.

Konsep *the wheel of fortune* ini memang agak universal. Artinya, di mana-mana begitu. Al-Quran pun mengatakan demikian dan firman itu dikaitkan dengan peristiwa yang sangat konkret, yaitu ketika orang-orang Islam kalah dalam Perang Uhud, lalu Tuhan memperingatkan, “*in yamsaskum qarhun fa qad massa al-qawma qarhun mitsluhu, wa tilka al-ayyâmu nudâwiluhâ bayna al-nâs*” (Q., 3: 140). Ini arti-

nya, kalau kamu ditimpa penderitaan, mereka pun ditimpa penderitaan. Sebab kita ini biasanya *ngenes*, seakan-akan yang sengsara ditimpa penderitaan cuma kita, padahal orang lain juga sama saja. Dan memang, nasib itu berputar di antara umat manusia. Ada istilah, “*al-harbu sijâlnun, yawmun lanâ wa yawmun alaynâ*” (perang itu giliran, kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah).

Maka memahami politik dan kekuasaan juga begitu. Sekarang ini siapa yang menang dulu, nanti giliran siapa. Karena itu, kita harus rileks. Itu ajaran Al-Quran. Apalagi kalau dimensinya sudah global, dalam arti meliputi seluruh umat manusia, maka giliran itu sendiri bisa memakan waktu ratusan tahun. Itulah masalahnya. Kebetulan kita sekarang ini sedang di bawah. Saya sering mengatakan bahwa negara yang paling maju sekarang ini adalah negara-negara bangsa Eropa Utara dan keturunan mereka di Amerika, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Kebangsaaannya Anglo-Saxon, agamanya Protestan. Itulah yang paling maju di muka bumi sekarang ini. Yang kedua ialah orang-orang Mediteranian yang Katolik, yakni Prancis dan Itali.

Yang ketiga kita loncat ke Jepang, orang-orang Sintois. Yang keempat barangkali harus kita sebut orang-orang Kristen ortodoks, yaitu

Eropa Timur, karena sekalipun sekarang ekonominya berantakan, teknologi mereka maju sekali, misalnya memiliki kemampuan melontarkan manusia ke langit. Kemudian yang kelima sebut saja negara-negara industri baru (*new industrial countries*), yang disebut macam-macam Asia seperti Taiwan, Korea Selatan. Setelah itu adalah India, yang dari segi teknologi maju sekali; semua benda yang meluncur di atas rel kereta api, lokomotif, semuanya buatan dalam negeri. Bukankah itu luar biasa?



Baru setelah itu barangkali orang-orang Islam. Mungkin tidak ada bangsa-bangsa yang lebih rendah tingkatnya daripada bangsa Muslim kecuali bangsa-bangsa Afrika Hitam dan Amerika Latin. Saya pernah berbicara dengan sembilan duta besar Amerika Latin. Mereka itu merasa sebanding dengan kita. Jadi, kita ini memang ibarat dalam perputaran roda, sedang berada di bawah. Cuma karena dimensinya global, maka dimensi waktunya juga panjang, ratusan tahun. Tidak bisa diukur dengan umur pribadi.



Dengan adanya pengetahuan deduktif dari ajaran agama tentang hukum-hukum ketentuan Tuhan atau sunnatullah untuk kehidupan sosial manusia, dan pengetahuan induktif tentang sunnatullah itu dari pengamatan sejarah, maka bagi orang-orang Muslim pengetahuan deduktif itu menjadi miliknya sendiri, sedangkan yang induktif itu pada dasarnya me-

reka dapat menyertai atau disertai oleh orang lain. Tegasnya, usaha penelitian dan pemahaman hukum-hukum dari sejarah itu pada dasarnya dapat diajarkan kaum Muslim kepada mereka yang non-Muslim, sebagaimana kaum Muslim itu dapat menyertai penelitian dan pemahaman serta kesimpulan-kesimpulan yang dilakukan oleh yang non-Muslim. Maka sebagaimana teori-teori Ibn Khaldun dapat dipelajari dan diambil alih oleh kaum non-Muslim, mereka yang tersebut terakhir ini pun dapat mempelajari teori-teori yang dibuat atau disimpulkan oleh kaum non-Muslim.

Namun ada sesuatu yang harus diperhatikan dalam masalah ini.

Variabel gejala sosial adalah sedemikian banyak dan beraneka ragamnya, sehingga sulit sekali dan sejauh ini belum berhasil dipahami keseluruhannya oleh para ilmuwan sosial. Ini menyebabkan bahwa temuan-temuan mereka mempunyai nilai kepastian hanya sedikit saja, terbukti dari adanya banyak segi dalam temuan dan teori ilmu-ilmu sosial yang berlawanan dari seorang ahli ke seorang ahli yang lain, dan dari tempat ke tempat lain (misalnya, teori ekonomi menurut Barat yang kapitalis dan menurut Timur yang sosialis). Ini lebih-lebih lagi disebabkan bahwa seseorang, dalam hal ini para pengkaji gejala kehidupan masyarakat manusia, sulit sekali bertindak objektif dengan menjaga jarak antara dirinya dengan sasaran pengkajiannya. Sebagai seorang anggota masyarakat, ia dengan sendirinya termasuk pemeran serta dalam gejala sosial yang diamatinya, langsung ataupun tidak langsung. Karena itu, masih tetap ada bagian-bagian dari kehidupan manusia ini yang tidak dapat dipahami oleh manusia sendiri tentang hukum-hukum ketentuannya. Bagian-bagian itu kemudian diterangkan oleh agama, yang penerimaannya oleh manusia terjadi melalui sikap percaya atau iman, sekalipun tetap diharapkan adanya sikap kritis, justru untuk memantapkan sikap menerima dan percaya itu. Dan ber-

kenaan dengan hal-hal yang tidak termasuk pengajaran langsung Tuhan itu, manusia diperintahkan untuk bermusyawarah antara sesamanya, dengan maksud, antara lain, untuk meminimalisasi kemungkinan salah karena subjektivitas. Bahkan Rasulullah pun, berkenaan dengan hal-hal umum itu, tetap melakukan musyawarah. Ini dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, “Penetapan hukum keagamaan murni, seperti hukum-hukum ibadah, tidak pernah timbul kecuali dari wahyu Allah kepada Nabi-Nya Saw. baik dari Kitab ataupun Sunnah, atau dengan suatu ijtihad yang disetujuinya. Dan tugas Rasul tidak keluar dari lingkaran tugas menyampaikan (*tabligh*) dan menjelaskan (*tabyin*) Adapun penetapan hukum yang berkaitan dengan perkara duniawi, yang bersifat kehakiman, politik, dan perang, maka Rasul Saw. diperintahkan untuk bermusyawarah mengenai itu semua. Dan Nabi pernah mempunyai suatu pendapat, tapi ditinggalkannya dan menerima pendapat para sahabat, sebagaimana terjadi pada waktu Perang Badar dan Uhud.”



DEFINISI AGAMA

Terdapat bermacam-macam definisi mengenai agama. Profesor

Wallace mengatakan bahwa agama ialah “suatu kepercayaan tentang makna terakhir alam raya”. Sedang E.S.P. Haynes berpendapat bahwa agama ialah “suatu teori tentang hubungan manusia dengan alam raya”. Bagi John Morley, agama adalah “perasaan kita tentang kekuatan-kekuatan tertinggi yang menguasai nasib umat manusia”. Dan James Martineau mendefinisikannya sebagai “kepercayaan tentang Tuhan yang abadi, yaitu tentang Jiwa dan Kemauan Ilahi yang mengatur alam raya dan berpegang pada hubungan-hubungan moral dengan umat manusia”. Sedangkan seorang ahli filsafat terkenal, Profesor Mc Taggart, berkata: “Agama sudah jelas merupakan suatu keadaan kejiwaan ... ia dapat digambarkan secara paling baik sebagai perasaan yang terletak di atas adanya keyakinan kepada keserasian antara diri kita sendiri dan alam raya secara keseluruhan.”

Definisi tersebut, jika diteruskan, dapat berkepanjangan. Tetapi, dari beberapa definisi ini sebenarnya sudah menunjukkan keanekaragaman cara pendekatan para ahli kepada apa yang dimaksudkan dengan agama. Definisi-definisi itu, demikian juga kecenderungan definisi yang lain, berhasil memperjelas makna agama hanya dari satu atau beberapa segi. Tetapi, barangkali Julian Huxley benar, ketika me-

ngatakan bahwa realitas keagamaan yang esensial, yaitu berupa pengalaman khusus yang berusaha menyatakan dirinya dalam simbol-simbol dan mencari pernyataan intelektualnya dalam ilmu kalam atau teologia, ialah rasa kesucian. Dan rasa kesucian ini, sebagaimana rasa lapar, nafsu marah dan keasyikan cinta, adalah sesuatu yang tak mungkin diterangkan. Ia ada menurut apa adanya, dan hanya dapat dikomunikasikan dengan kata kepada orang lain yang memiliki pengalaman yang sama. (Dalam agama Islam, umpamanya, Tuhan senantiasa dinyatakan sebagai Yang Mahasuci, dan memahasucikan Tuhan atau ber-*tasbih* merupakan salah satu zikir yang sangat diutamakan, didukung oleh sebuah hadis: “*Dua kalimat yang ringan di lidah, tetapi berat pada timbangan: Mahasuci Tuhan lagi Mahaagung, Mahasuci Tuhan lagi Maha Terpuji.*”) Rasa kesucian itu dapat dipertukarkan (*interchangable*), atau, setidaknya, amat erat hubungannya dengan rasa kebaikan, kebenaran, keadilan, kemuliaan, dan seterusnya yang serba-*sublime* atau tinggi. Adanya rasa kesucian yang serbamencaup itu pada jiwa manusia, secara alamiah atau fitriah, telah membuat manusia menjadi apa yang disebut *hanif* dalam agama (Islam). Jadi, secara singkat, agama adalah pernyataan yang keluar dari

sifat *hanîf* manusia yang telah tertanam dalam alam jiwanya. Karena itu, beragama adalah amat *natural*, dan merupakan kebutuhan manusia secara esensial.



DEFINISI UMAT ISLAM

Sering kali definisi kita mengenai umat Islam di Indonesia sangat terbatas. Dalam definisi seperti itu kita sering (dalam politik, misalnya) tidak bisa mengakui Soekarno, Soeharto, Megawati, dan yang lain sebagai Muslim, seolah-olah mereka “di luar pagar”. Padahal, pada waktu yang sama kita mengklaim bahwa umat Islam itu 90 persen. Jadi di mana letak konsistensinya? Mengapa ada kriteria semacam itu? Kriteria itu sangat politis dan eksklusif, sehingga banyak sekali yang bisa dipersoalkan.

Islam sebagai Islam, kita tidak usah dikuatirkan; Indonesia ini mau dibolak-balik bagaimanapun juga akan tetap Islam. Banyak sekali tesis mengenai hal itu termasuk Harry J. Benda ketika menanggapi bagaimana Jepang membawa *isla-*

mic policy dari Tokyo sebagai *blueprint* politik kolonial atau pendudukan militernya di sini. Maksudnya Jepang itu menggunakan orang Islam tapi terbalik, hasilnya justru Jepang yang digunakan oleh orang Islam, dengan adanya Hizbullah, Sabilillah, dan sebagainya. Semua gerakan itu muncul karena Jepang.

Selain salah, definisi seperti itu juga sebetulnya merupakan definisi

antropologis santri. Jadi kalau mau mengatakan secara antropologis, bahwa santri itu kalah, itu bisa. Tapi itu pun masih menjadi persoalan, karena di Jawa

Timur semua kelompok santri sekarang memilih PDIP. Hal yang sama juga terjadi di Jurangmangu, misalnya. Orang Betawi pemilih tradisional PPP yang keras, sekarang ini (Pemilu 1999) justru memilih PDIP. Di Jombang PDIP menang. Ini artinya, ada unsur psikologi, yaitu suara protes—protes terhadap seluruh sistem yang selama 32 tahun ini dianut. Jadi sekarang ini banyak sekali unsur psikologinya. Nanti kalau semuanya sudah teratur dan tertata sehingga masalah psikologi itu sudah diminimalisasi, maka pilihan

“Harkat manusia terletak pada pandangan bahwa hidup itu berguna. Kita bersedia menanggung kepedihan, deprivasi, dan segala derita, jika semuanya itu menunjang suatu tujuan, daripada memikul beban hidup tak bermakna. Lebih baik mati daripada hidup tanpa arti.”

(C.G. Jung)

itu akan lebih objektif. Hal itu kira-kira masih membutuhkan 10-20 tahunan lagi, mudah-mudahan 5 tahun lagi kalau bisa dipercepat.

Jadi definisi kita mengenai umat Islam sering tidak konsisten dengan klaim 90 persennya. Kemudian juga klaim bahwa demokrasi itu harus mayoritas yang berkuasa. Demokrasi itu mayoritas yang dibuktikan melalui Pemilu. Jadi umat Islam tidak bisa apriori dengan alasan mayoritas, sehingga mereka harus berkuasa. Mayoritas umat Islam adalah mayoritas agama. Di Itali juga ada Kristen Demokrat, tapi tidak ada cara berpikir orang Kristen harus berkuasa secara apriori. Mayoritas-minoritas politik harus ditentukan melalui Pemilu. Karena itu, salah satu hikmah Pemilu ialah membuktikan klaim-klaim; klaim kelompok saya hebat, dan sebagainya, akan terlihat. Nah, sekarang setelah Pemilu banyak sekali orang yang egonya hancur karena ternyata kalah, sebab menggambarkan dirinya lebih dari semestinya. Maka, mengetahui diri itu sangat baik: tidak terlalu kurang, tidak terlalu lebih.

Kemudian, jangan kita lupakan bahwa PDIP itu memang gabungan dari partai-partai non-Islam. Karena itu kita tidak bisa dan tidak boleh mengharapkan semua calegnya adalah Muslim. Sebab di dalamnya ada Parkindo (Partai Katolik),

Murba (sebenarnya sudah keluar, tapi yang tersisa masih banyak), kemudian juga PNI yang resminya sebenarnya tidak keluar. Kalau kemudian mereka itu—katakanlah benar apa yang dibilang tadi—didominasi non-Muslim, maka itu intern mereka. Artinya orang Islam di situ tidak kuat dan di sini juga ada kesalahan kita. Kita menuntut Islam kuat di situ, tapi tidak mau masuk. Taufik Kiemas, suaminya Mbak Mega, bilang pada saya, “Cak Nur ada *dong* dari teman-teman Anda yang masuk ke kami. Kita meminta mereka masuk, tapi *nggak* mau.” Salah satu dari mereka adalah Soegeng Sarjadi yang menentang Megawati karena membela Suryadi, sehingga terpental. Nah, umat Islam itu tidak adil, tidak berbuat sesuatu *kok* sekarang menagih rekening. Oleh karena itu, kalau kita berpikir seperti ini, masuklah ke PDIP, dan mereka pun akan senang sekali.



DEFINISI WAKTU

Dalam Q., 18: 25, ada cerita mengenai *seven sleepers* (tujuh orang yang tertidur). Cerita tentang tujuh orang yang tidur itu sebetulnya menggambarkan tentang kematian atau juga tentang relativitas waktu. Mereka tinggal di gua selama 300

tahun ditambah 9 hari. Kalau mundur sedikit ke ayat sebelumnya, maka di situ dinyatakan, *Dan demikianlah Kami bangunkan mereka supaya mereka saling bertanya, salah seorang di antara mereka bertanya berapa lamakah kamu tinggal?* (Q., 18: 19). Mereka menjawab satu hari atau satu setengah hari, padahal mereka tinggal ratusan tahun. Ini juga merupakan indikasi tentang relativitas waktu. Waktu 300 tahun terasa sehari, atau setengah hari.

Waktu terasa panjang sebelum kita jalani. Menunggu besok itu lama, tetapi kalau tidak ditunggu, maka menjadi terasa cepat: “kok besok lagi, besok lagi.” Ini berarti bahwa waktu juga sangat psikologis. Orang yang bepergian biasanya merasakan betapa lamanya perjalanan; tetapi ketika pulang tidak terasa, tiba-tiba sudah sampai.

Dalam Q., 16: 77 dinyatakan bahwa perkara kiamat bagaikan kedipan mata atau bahkan lebih pendek dari kedipan mata. Kemudian dalam Q., 54: 50, *Dan urusan-Ku (urusan Tuhan itu, artinya perintah-Nya, keputusan-Nya, dan sebagainya) itu hanya satu kali, bagaikan kedipan mata.* Oleh karena itu seruan kembali kepada Tuhan juga disangkut-pautkan dengan mendadaknya peristiwa-peristiwa yang akan menimpa kita, sehingga pada waktu itu kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa.

Peristiwa kiamat juga termasuk peristiwa yang tidak bisa diramalkan. Artinya, ia bisa datang secara mendadak. Ini juga sebetulnya menyangkut masalah waktu dan sekali lagi menunjukkan betapa relatifnya waktu. Karenanya kita tidak bisa *sembrono* dengan waktu. Dalam bahasa Arab ada ungkapan, “Waktu itu bagaikan pedang, kalau kamu tidak sanggup mematahkannya, dia akan mematahkan kamu.”

Definisi mengenai waktu memang banyak dikemukakan para failasuf, di antaranya waktu adalah fungsi dari hubungan antara dua benda yang bergerak dengan kecepatan berbeda. Karena itu, waktu tidak akan ada kalau tidak ada benda; maka sebelum alam raya ini ada, waktu juga tidak ada. Ini sebenarnya perselisihan lama yang pernah diangkat oleh Al-Ghazali dalam polemiknya terhadap para failasuf Islam. Dialah yang mengatakan bahwa para failasuf itu kafir karena menganggap alam ini *qadim* atau tanpa waktu permulaan. Kesulitannya ialah, apa yang disebut waktu? Kalau waktu itu ada bersama benda, maka sebelum itu tidak ada waktu, sehingga benda itu memang abadi, dalam bahasa Arabnya *qadim*, artinya abadi ke belakang. Lawannya adalah *baqâ'*, abadi ke depan.

Ungkapan bahwa *lawh al-mahfûzh* diciptakan Allah seribu tahun atau ribuan tahun sebelum alam raya, ber-

arti mengukur *lawh al-mahfuzh* dengan ukuran alam raya, sehingga tidak simetris. Persoalan berikutnya, karena Allah mencampuri urusan manusia, apakah itu berarti Dia turun dalam ruang dan waktu? Ini persoalan yang pelik. Ilmuwan seperti Newton tidak percaya bahwa Tuhan menciptakan alam raya kemudian juga mengaturnya. Menurut Newton, Tuhan itu seperti pembuat jam, ketika jam selesai dibuat maka Dia biarkan jalan sendiri. Begitu juga alam raya ini. Ini menjadi bahan polemik dalam sejarah pemikiran Islam karena menyangkut masalah siapa sebenarnya *khâliq* atau pencipta itu. Sebab, kalau ada sesuatu yang bisa berjalan sendiri, maka itu berarti dia mempunyai fungsi sebagai *khâliq* sehingga Allah tidak menjadi Esa. Karena itu juga, ini berarti Allah pernah lepas dari intervensinya kepada kehidupan kita. Memang, ini adalah persoalan falsafah yang begitu rumit dan telah menimbulkan banyak kontroversi dan perdebatan.



DEGRADASI MAKNA *INSYÂ ALLÂH*

Perkataan *insyâ Allâh* yang berarti kalau Allah menghendaki, karena

sudah terlalu banyak diucapkan sehari-hari, mengalami inflasi yang menghilangkan makna aslinya. Dalam keseharian, *insyâ Allâh* seolah berarti tidak mau janji. Ini berbahaya, karena sebenarnya *insyâ Allâh* mengandung makna sangat serius, *Dan janganlah engkau mengatakan*

tentang sesuatu, "Aku akan melakukannya besok pagi. Kecuali dengan menambahkan, insya Allah—jika Allah menghendaki" (Q., 18: 23-24). Apa

(Q., 2: 264)

yang kita lakukan besok tidak semuanya berkat kita sendiri, tetapi terdapat bermacam-macam faktor yang semuanya bisa dikembalikan kepada Allah. Artinya, *insyâ Allâh* sebenarnya adalah untuk mendidik kita untuk rendah hati sehingga tidak terlalu banyak mengklaim.



DEGRADASI STATUS PEREMPUAN

K.H. Abdurrahman Wahid sering mengatakan agar umat Islam tidak mengidealisasi sejarah Islam, karena ia tidak terlalu ideal. Karen Armstrong dalam bukunya *The History of God* menulis bahwa, seperti agama-agama yang lain, Islam ke-

mudian dibajak oleh para pengikutnya sendiri, ketika penafsiran-penafsiran yang dilakukan tidak sesuai dengan para pendiri dan Kitab Sucinya. Masalah perempuan, misalnya, sekarang ada stereotip umum bahwa perempuan di dunia Islam adalah *the second class*. Hal ini tidak terjadi pada masa Nabi maupun masa sahabat. Menurut Armstrong, ini baru terjadi ketika orang-orang Islam pada masa itu keluar dari Jazirah Arab dan kemudian bergaul dengan bangsa-bangsa Ekumene, “bangsa-bangsa yang berperadaban”. Kemudian sedikit demi sedikit mereka mulai mengadaptasi pola-pola budaya dominan, termasuk pola budaya ekresi terhadap perempuan. Banyak yang mengatakan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang sangat umum di kalangan orang-orang Parsi, Byzantium dan sebagainya. Sudah sejak zaman ‘Abbasiyah perempuan Islam mengalami penurunan status.



DEISME

Ateisme dan deisme, sekalipun di satu sisi berlawanan, di sisi lain keduanya memiliki persamaan,



yaitu persamaan dalam penolakannya kepada agama-agama formal. Terhadap deisme, ada hal-hal yang cukup positif. *Pertama*, seperti dicerminkan dalam pandangan Jefferson, kaum deis sangat percaya kepada ukuran-ukuran budi pekerti luhur. *Kedua*, mereka percaya kepada adanya agama yang alami (istilah Al-Quran, fitri), yang merupakan bentuk asli dan primordial agama umat manusia, namun kemudian mengalami berbagai penyimpangan sehingga Tuhan (*Deo, Deva, Dos, Theo, God, Gott, Ilâh, Ill, El, Al*) memilih dan mengangkat di antara manusia seorang utusan guna meluruskan manusia dari penyimpangan dan membimbing mereka kembali ke agama yang alami, fitri, lurus, wajar, dan benar. Karena itu, sebagian kaum penganut deisme di Barat (baca: dalam lingkungan Yahudi Kristen) dalam melihat permasalahan agama Kristen berkenaan dengan sejarah universal agama-agama, mengatakan,

The role of Christianity in the universal history of religion became problematic. For many religious deists the teachings of Christ were not essen-

tially novel but were in reality as old as creation, a republication of primitive monotheism. Religious leaders had arisen among many peoples—Socrates, Buddha, Mohammed—and their mission had been to effect the restoration of the simple religious faith of early man.

Sekarang bandingkanlah pandangan itu dengan sistem keimanan Islam yang mewajibkan seorang Muslim untuk beriman kepada semua nabi dan Kitab Suci, dan dengan penegasan Allah Swt. yang ditujukan kepada Nabi kita, Muhammad Saw.:

Katakanlah (olehmu, wahai Muhammad), “Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat (yang terjadi) terhadapku dan tidak (pula) terhadap kamu sekalian. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pembawa kejelasan” (Q., 46: 9).



DEISME THOMAS JEFFERSON

Dalam penggunaannya secara polemis, sering kali “ateisme” ditujukan kepada mereka yang menganut “deisme”. Ini terutama banyak

dilakukan oleh para pemimpin agama di Barat. Padahal sesungguhnya deisme bukanlah ateisme, justru sebaliknya. Meskipun tidak sampai kepada taraf “teisme”, yaitu paham ketuhanan menurut agama, “deisme” adalah pandangan yang didasarkan kepada pengakuan akan adanya tuhan. Hanya saja, berbeda dengan “teisme”, tuhan menurut “deisme” lebih mirip dengan hukum alam yang tidak bersifat pribadi (impersonal). Berbeda dengan kaum teis dalam agama-agama, kaum deis tidak memercayai adanya Tuhan yang “aktif” mencampuri urusan manusia. Segi ini merupakan titik perbedaan atau pertentangan antara “deisme” dan “teisme”.

Salah seorang penganut deisme yang terkenal dan pengaruhnya membekas amat mendalam pada kehidupan politik zaman modern ialah bapak-pemikir negara Amerika Serikat, Thomas Jefferson (1743-1826). Sebagai seorang deis, Jefferson menolak konsep Ketuhanan agama-agama formal yang ia kenal di negerinya saat itu (khususnya Yahudi dan Kristen). Mungkin ia akan menolak juga konsep-konsep Ketuhanan menurut berbagai agama yang lain, kalau seandainya ia mengetahuinya. Ketika ia menyusun dokumen Deklarasi Kemerdekaan Amerika, sebagai seorang deis ia memasukkan ide-ide

Ketuhanan dalam deklarasi itu, namun “Tuhan” tidak dalam artian agama Kristen, melainkan “Tuhan” yang lebih “alami”. Karena itu ia menggunakan ungkapan-ungkapan, dalam bahasa Inggris, “*Laws of Nature*” dan “*Nature’s God*”, selain istilah “*Divine Providence*”. Dan ia tidak menggunakan ungkapan dan jargon Ketuhanan khas Kristen, misalnya, “*Jesus the Lord*”, “*the Savior*”, “*the Redeemer*”, dan sebagainya.

Jadi Jefferson bukanlah seorang Kristen atau Yahudi, juga bukan seorang penganut ateisme. Sekalipun begitu, ia adalah seorang yang sangat percaya kepada ajaran-ajaran etis agama, terutama Kristen. Ia mengagumi ajaran-ajaran akhlak Nabi Isa Al-Masih sebagai yang paling mulia dan sempurna sepanjang masa, tapi serentak dengan itu ia menolak berbagai kepercayaan sekitar pribadi Nabi Isa, yang kepercayaan tersebut ia nilai palsu, tidak masuk akal atau bodoh.

Jefferson memang tidak dapat melepaskan diri dari ajaran Kristen, meskipun ia menerapkan sikap pilih-pilih terhadap berbagai unsur ajaran agama itu. Ia pun menulis sebuah “Bibel” atau “Kitab Suci”, dan kelak

dinamakan *The Jefferson Bible*, yang isinya tidak lain ialah pilihannya sendiri dari bagian-bagian Kitab Injil yang empat (Matius, Lukas, Markus, dan Yohannes), yaitu bagian-bagian yang menurut pendapatnya “masuk akal” dan mencerminkan keagungan Isa Al-

Masih sebagai pengajar akhlak yang mulia. Dari pemahamannya yang khas itulah ia mendapatkan berbagai ilham bagi pandangan-pandangan politiknya, antara

Mereka yang ingkar (kafir) itu, amal-perbuatan mereka bagaikan fatamorgana di lembah padang pasir. Orang yang kehausan mengirannya air, namun ketika didatanginya ia tidak mendapatkannya sebagai sesuatu apa pun
(Q., 24: 39)

lain yang kini menjadi warisan umat manusia, selain Deklarasi Kemerdekaan Amerika, yakni dokumen penting tentang prinsip kebebasan beragama (*Bill for Establishing Religious Freedom*) yang disahkan oleh Majelis Umum (*General Assembly*) Virginia pada tahun 1786, dan yang kemudian menjadi undang-undang yang pertama dari jenisnya di Amerika Serikat. Tetapi karena penolakannya kepada segi-segi tertentu ajaran mapan agama Kristen, ia mendapat cap sebagai ateis, yang cap itu sempat menyulitkan posisinya sewaktu melakukan kampanye untuk kursi kepresidenan Amerika Serikat (Thomas Jefferson adalah Presiden AS yang ketiga).



DEKLARASI UNIVERSAL

Setiap kali kita menyebut hak-hak asasi manusia, dengan sendirinya rujukan paling baku kita ialah Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dari PBB. Ini wajar, dan merupakan keharusan, karena kita adalah anggota PBB, dengan akibat bahwa kita menerima dokumen yang memuat wawasan fundamentalnya. Namun perlu ditambahkan untuk diingat bahwa Deklarasi Universal itu hanyalah suatu titik, mungkin titik yang sangat akhir, dari perjalanan perjuangan umat manusia untuk menemukan jati dirinya dan menghormati serta melindungi jati diri itu. Deklarasi Universal adalah suatu “hasil bersih” atau “hasil akhir” proses pertumbuhan yang panjang, yang telah ditempuh umat manusia dengan susah payah. Ini harus diketahui, diakui, dan disadari bersama.

Adalah mustahil mengingkari bahwa nilai-nilai nasional yang kemudian dirumuskan sebagai Pancasila itu merupakan bagian dari hasil interaksi terbuka budaya bangsa kita dengan budaya-budaya bangsa lain. Dan juga mustahil mengingkari bahwa sebagian dari interaksi itu terjadi dengan hasil-hasil pemikiran kemanusiaan yang paling modern atau mutakhir, semisal Deklarasi Universal tadi, bahkan Deklarasi Kemerdekaan Ame-

rika Serikat buah pikiran seorang humanis besar, Thomas Jefferson. Lebih dari itu, jika kita percaya kepada Bung Karno (salah seorang tokoh paling instrumental bagi perumusan resmi Pancasila), nilai-nilai dasar negara itu juga merupakan hasil interaksi terbuka budaya kita dengan Manifesto Komunis, sekalipun interaksi itu berlangsung kritis dan tidak sekadar menerima “nilai permukaan” dokumen warisan Karl Marx. Namun, interaksi itu jelas ikut memberi “*flavour*” kepada ide-ide tentang keadilan sosial seperti yang dirumuskan pada sila terakhir Pancasila.

Dengan menyadari sejarah panjang kemanusiaan sejagat dan dinamika interaksi terbuka bangsa kita dengan bangsa-bangsa lain, maka kita juga menyadari bahwa ide-ide tentang hak-hak asasi bukanlah hal yang muncul begitu saja tanpa ongkos perjuangan dan pengorbanan yang amat mahal. Maka kita tidak dapat menyikapinya sebagai sesuatu yang bernilai “terima jadi” untuk kita, sehingga menjadi cenderung untuk meremehkan persoalannya dan menganggap ringan implikasinya. Bersama dengan umat manusia sejagat, kita harus menghayati sejarah pertumbuhan konsep-konsep hak-hak asasi itu, dan merasakan denyut jantung sejarah itu dengan mencamkan irama turun naik dan jatuh banggunya bangsa-

bangsa dan rakyat-rakyat yang memperjuangkannya. Sila “Perikemanusiaan yang adil dan beradab” bisa dipahami dimensi keluasan dan kedalamannya hanya jika ditelaah di bawah sorotan semangat kemanusiaan universal itu.

Berdasarkan hal-hal di atas itu, maka salah satu kemungkinan yang dapat ditempuh dalam usaha menanamkan dan meluaskan pengertian dan penghayatan akan hak-hak asasi manusia ialah menanamkan kesadaran tentang sejarah panjang dan penuh onak duri tumbuhnya ide-ide tentang nilai-nilai kemanusiaan itu pada berbagai bangsa di dunia. Sebagaimana argumen yang dikemukakan di atas, pemahaman, penerimaan, dan penghayatan kepada nilai-nilai hak asasi hanya dapat meluas dan mendalam jika masyarakat disadarkan tentang dimensi kesejarahannya yang panjang dan sulit. Karena itu, perjuangan menegakkan hak-hak asasi yang ada sekarang ini hendaknya janganlah dipandang sebagai gejala baru semata, tanpa akar sejarah kemanusiaan itu sendiri. Dengan perkataan lain, perjuangan hak-hak asasi adalah benar-benar bernilai asasi, merupakan bagian tak terpisahkan dari keinsafan akan nilai Perikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengatasi ruang dan waktu (universal, menjangat).

Dalam pada itu, harus disadari bahwa rumusan-rumusan tentang

hak-hak asasi sekarang ini adalah hasil pemikiran manusia modern. Rumusan-rumusan itu menjadi lengkap, sistematis dan padu atau kompak (sebagaimana layaknya rumusan modern), dengan memuat isi dan substansi dasar seperti dikemukakan dalam agama-agama dan tradisi-tradisi dalam berbagai budaya umat manusia sepanjang sejarah dan di semua tempat.

Sebuah kenyataan sejarah menunjukkan bahwa zaman modern ini bermula dari pengalaman beberapa bangsa Eropa Barat Laut, khususnya Inggris dan Prancis. Maka karena segi historis modernitas itu, mau tidak mau dalam rangka penghayatan yang luas dan mendalam tentang hak-hak asasi, kita harus pula sedikit-banyak mengenal sejarah pertumbuhan perjuangan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan itu di Barat. Jika kita mencoba mencatat garis besar urutan pertumbuhan kesadaran itu di Barat, maka tonggak-tonggak sosialisasinya adalah sebagai berikut:

1. Dimulai, yang paling dini, oleh munculnya “Perjanjian Agung” (*Magna Carta*) di Inggris pada 15 Juni 1215, sebagai bagian dari pemberontakan para baron terhadap Raja John (saudara Raja Richard Berhati Singa, seorang pemimpin tentara Salib). Isi pokok dokumen itu ialah hendaknya raja tidak melakukan pe-

- langgaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyat. (Sebenarnya cukup ironis bahwa pendorong pemberontakan para baron itu sendiri antara lain ialah dikenakannya pajak yang sangat besar oleh raja, dan dipaksakannya para baron untuk membolehkan anak-anak perempuan mereka kawin dengan rakyat biasa.)
2. Keluarnya *Bill of Rights* pada tahun 1628, yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapa pun, atau untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengirimkannya kepada siapa pun tanpa dasar hukum.
 3. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence*) pada tanggal 6 Juli 1776, yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.
 4. Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara (*Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*) dari Prancis, pada 4 Agustus 1789, dengan titik be-

rat kepada lima hak asasi: pemilikan harta (*propriété*), kebebasan (*liberté*), persamaan (*égalité*), keamanan (*securité*), dan perlawanan terhadap penindasan (*résistance à l'oppression*).

5. Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia, pada bulan Desember 1948, yang memuat pokok-pokok tentang kebebasan, persamaan, pemilikan harta, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja, dan kebebasan beragama (termasuk pindah agama).



DEMITOLOGISASI

Bangsa-bangsa Semit melakukan demitologisasi (meskipun ada yang belum tuntas) terhadap konsep tujuh hari dari bangsa-bangsa kuno di Mesopotamia dan Yunani sebagai konsekuensi kesadaran monoteis mereka. Kesadaran itu antara lain dimulai oleh Nabi Ibrahim a.s. yang tampil sekitar dua puluh abad sebelum Masehi. Dengan demitologisasi itu, konsep hari yang tujuh mengalami desakralisasi, dalam arti dilepaskan dari nilai sakralnya sebagai cara penentuan waktu memuja dewa-dewa langit yang tujuh. Dalam istilah yang lebih jelas, seperti digunakan oleh Robert N. Bellah, objek-objek mitologi itu dikenakan

“devaluasi radikal”, yaitu diturunkan secara tegas nilainya dari ketinggian derajat yang mengandung kesucian menjadi objek yang mungkin hanya mengandung kegunaan praktis sehari-hari. Bellah juga menamakan proses itu dengan “sekularisasi”. Istilah itu pernah saya gunakan, tetapi ternyata menim-

bulkan salah paham yang tidak proporsional.

Proses-proses demitologisasi, desakralisasi, devaluasi, dan sekuralisasi terjadi secara besar-besaran di seluruh dunia pada zaman modern ini, yaitu zaman yang ditandai dengan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah persoalan besar kemanusiaan sekarang.



DEMITOLOGISASI HARI

Agama Kristen, setelah melewati perjalanan pertumbuhan yang cukup panjang, meninggalkan konsep hari “*Sabat*” dan mengganti hari sucinya ke hari Ahad, hari pertama. Seperti telah kita ketahui bahwa hari pertama ini adalah bekas “Hari Matahari” (Inggris: *Sunday*). Karena matahari adalah benda langit yang paling hebat, maka tumbuh kultus kepadanya sebagai dewa utama,

sehingga hari itu pun juga dinamakan “Hari Tuhan” atau “*Domingo*”. Maka banyak kalangan sarjana Kristologi yang berpendapat bahwa pengalihan hari suci Kristen (yang tumbuh dari tradisi Yahudi) dari Sabtu ke Minggu masih mengandung unsur sisa kultus kepada

matahari. Jadi proses demitologisasi oleh agama (monoteis) Yahudi dan (trinitarianis) Kristen terhadap konsep

hari yang tujuh sebagai sisa kekafiran itu belum tuntas.

Yang menuntaskan proses demitologisasi hari yang tujuh itu ialah Islam, dengan menjadikan hari sucinya hari keenam dan dinamakan “Hari Berkumpul” (*Yawm Al-Jumu’ah*), yakni hari kaum Muslim berkumpul di masjid untuk menunaikan shalat tengah hari dalam *jamâ’ah*. Cara penamaan hari itu sebagai sebagai “Hari Berkumpul”, berbeda dari cara penamaan “Sabtu” dan “*Domingo*”, menunjukkan orientasi yang lebih praktis, fungsional dan bebas dari mitologi. Apalagi Islam pun tidak mengajarkan bahwa hari Jumat adalah hari istirahat. Yang ada ialah ajaran bahwa pada saat azan shalat Jumat dikumandangkan, kaum Muslim hendaknya meninggalkan pekerjaan masing-masing dan bergegas menu-

“Sesungguhnya puasa itu milik-Ku (Allah), maka Akulah yang akan memberikan balasannya.”

(Hadis Qudsi)

ju tempat shalat untuk bersama-sama mengingat Tuhan. Namun setelah selesai shalat, hendaknya mereka *menyebarkan di bumi dan mencari kemurahan Tuhan*”, yakni kembali bekerja mencari nafkah (Q., 62: 9-10).



DEMOKRASI ADALAH KATEGORI DINAMIS

Demokrasi adalah suatu kategori dinamis, bukan statis. Tidak seperti kategori-kategori statis yang stasioner (diam di suatu tempat), suatu kategori dinamis selalu berada dalam keadaan terus bergerak, baik secara negatif (mundur) atau positif (maju). Dalam masalah sosial, suatu nilai yang berkategori dinamis, seperti demokrasi dan keadilan, gerak itu juga mengimplikasikan perubahan dan perkembangan. Karena adanya sifat gerak itu, maka demokrasi dan keadilan tidak dapat didefinisikan “sekali untuk selamanya” (*once and for all*). Karena itu “demokrasi” adalah sama dan “proses demokratisasi” berjalan terus-menerus. Cukup untuk dikatakan bahwa suatu masyarakat tidak lagi demokratis kalau ia berhenti berproses menuju kepada yang lebih baik, dan terus yang lebih baik lagi.

Oleh karena itu, sekali lagi, faktor eksperimentasi, dengan proses

coba dan salah (*trial and error*) adalah bagian yang integral dari ide tentang demokrasi. Suatu sistem disebut demokratis jika ia membuka kemungkinan eksperimentasi terus-menerus, dalam kerangka dinamika pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*) masyarakat. Demokrasi yang dirumuskan “sekali untuk selamanya”, sehingga tidak memberi ruang bagi adanya perkembangan dan perubahan, adalah sesungguhnya bukan demokrasi, melainkan kediktatoran. Contoh yang paling mudah untuk hal ini ialah apa yang disebut “Demokrasi Rakyat” model negara-negara komunis. Itulah demokrasi yang dirumuskan “sekali untuk selamanya”. Dan pengalaman menunjukkan bahwa begitu orang mencoba merumuskan demokrasi “sekali untuk selamanya”, maka ia berubah menjadi ideologi tertutup, padahal mengatakan demokrasi sebagai ideologi tertutup adalah suatu kontradiksi dalam terminologi.

Berdasarkan itu, demokrasi memerlukan ideologi terbuka. Atau, demokrasi itu sendiri adalah sebuah ideologi terbuka, yaitu ideologi yang membuka lebar pintu bagi adanya perubahan dan perkembangan, melalui eksperimentasi bersama. Karena itu, demokrasi adalah satu-satunya sistem yang mampu mengoreksi dirinya sendiri dan membuat perbaikan dan perubahan

an ke arah kemajuan bagi dirinya sendiri, sebagaimana telah ditegaskan tadi.

Eksperimentasi itu dipertaruhkan kepada dinamika masyarakat, dalam wujudnya sebagai dinamika pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*). Mengapa

pengawasan, karena, sebagai ideologi terbuka, demokrasi adalah sistem yang terbuka untuk semua pemeran serta (partisipan), dan tidak dibenarkan untuk diserahkan

kepada keinginan pribadi atau kebijaksanaannya, betapapun *wasesanya* (*wise*) orang itu. Dan mengapa pengimbangan, karena sistem masyarakat dapat dikatakan sebagai demokratis hanya jika terbuka kesempatan bagi setiap kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi, apa pun dan bagaimanapun caranya, dan tidak boleh dibiarkan adanya unsur sebagian mendominasi keseluruhan. Adalah mekanisme ini yang membuat demokrasi di Amerika, misalnya, tidak sepenuhnya merupakan “tirani mayoritas” seperti dikatakan oleh Alexis de Tocqueville. Sebab suatu kelompok “minoritas” selalu mempunyai peluang terbuka untuk me-

menangkan aspirasinya, melalui berbagai saluran, khususnya berbagai pemilihan umum (untuk senat, wakil rakyat [*representatives*], presiden, gubernur, dan seterusnya) yang langsung, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil.

Dengan begitu terciptalah sis-

tem yang dalam dirinya terkandung mekanisme untuk mampu mengoreksi dan meluruskan dirinya sendiri, serta mendorong pertumbuhan dan perkembangannya ke arah yang le-

bih baik, dan terus lebih baik. Karena dalam analisis terakhir masyarakat terdiri dari pribadi-pribadi, atau dalam perkataan lain, masyarakat adalah jumlah keseluruhan pribadi-pribadi, maka demokrasi pun sesungguhnya berpangkal kepada pribadi-pribadi yang “berkemauan baik”. Tetapi karena sifatnya yang personal, kemauan atau iktikad, baik dan buruk, dapat dipandang sebagai “rahasia” yang menjadi urusan pribadi orang bersangkutan. Maka ia akan mempunyai fungsi sosial hanya jika diwujudkan dalam tindakan bermasyarakat, yang bersangkutan dengan orang lain, dan berdimensi sosial.



Karena tindakan berdimensi sosial itu menyangkut para anggota masyarakat yang menjadi lingkungannya, jauh atau dekat, maka ia tidak dapat dipertaruhkan hanya kepada keinginan atau aspirasi pribadi. Tidak boleh diremehkan adanya kemungkinan seorang pribadi dikuasai oleh kepentingan dirinya sendiri dan didikte oleh *vested interest*-nya, menuju kepada tirani. Maka dalam masyarakat selalu diperlukan adanya mekanisme yang efektif untuk terjadinya proses saling mengingatkan tentang apa yang benar dan yang menjadi kebaikan bersama. Dan pada urutannya, proses serupa itu memerlukan kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat.

Oleh karena itu, setiap pengekan terhadap kebebasan-kebebasan tersebut dan pencekalan atau pelarangan berbicara dan mengemukakan pikiran adalah pelanggaran yang amat prinsipil terhadap tuntutan falsafah kenegaraan kita. Di sinilah relevannya pembicaraan tentang perlunya partai oposisi, yaitu partai atau kelompok masyarakat yang senantiasa mengawasi dan mengimbangi kekuasaan yang ada, sehingga terpelihara dari kemungkinan jatuh kepada tirani.

Harus diakui bahwa ide tentang oposisi adalah sebuah temuan modern. Artinya, sebelum zaman

modern ini ide tentang pengawasan sosial sebagai kelembagaan yang dibuat secara *deliberate* belum ada. Yang ada pada zaman itu ialah pengawasan sosial *de facto* yang lahirnya dan penerimaannya dalam masyarakat bersifat kebetulan, tidak sengaja, alias *accidental*. Padahal, sesuatu yang terjadi hanya secara “kebetulan” (apalagi jika wujud *de facto*-nya ada, tetapi pengakuan *de jure*-nya tidak ada), tidak akan berjalan efektif, malah kemungkinan justru mudah mengundang anarki dan kekacauan karena usaha-usaha *check and balance* berlangsung sekenanya dan tidak dengan penuh tanggung jawab.

Dengan hasil pembangunan yang membuat rakyat kita semakin cerdas dan semakin mampu mengambil peran dalam kehidupan bersama sekarang ini, setiap pengekan dan pembatasan kebebasan menyatakan pendapat harus diakhiri dengan tegas, dan kita harus menumbuhkan dalam diri kita sendiri kepercayaan yang lebih besar kepada rakyat. Janganlah kita menjadi korban dari keberhasilan pembangunan nasional kita sendiri, karena tidak menyadari dinamika masyarakat yang menjadi konsekuensi logisnya, kemudian kita digulung oleh gelombang dinamika perkembangan masyarakat itu.

Namun prinsip-prinsip kemauan baik pribadi, komitmen sosial,

dan mekanisme pengawasan dan pengimbangan melalui kebebasan-kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat, belum-lah lengkap dan sempurna. Kembali kepada pribadi, juga kepada kelompok, masih diperlukan adanya sikap tabah dan tulus untuk mendahulukan kepentingan umum dan menyisihkan kepentingan pribadi atau golongan sendiri semata. Ini merupakan hal yang amat berat atas individu-individu, mengingat kecenderungan setiap orang kepada egoisme dan mendahulukan *vested interest*-nya sendiri. Demokrasi tidak akan terwujud jika tidak ada ketabahan pribadi untuk kemungkinan melihat dirinya salah dan orang lain benar.

“Orang-orang yang berdedikasi kepada pandangan hidup demokratis mampu bergerak ke arah tujuan itu jika mereka bersedia menerima dan hidup menurut aturan tentang terlaksananya (hanya) sebagian dari keinginan-keinginan. Perfeksionisme (pikiran tentang yang serbasempurna) dan demokrasi adalah dua hal yang saling tidak mencocoki.”

Barangkali terlalu banyak kalau dikatakan bahwa demokrasi menuntut adanya tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi. Tetapi memang keterbukaan dan kebebasan yang sejati selalu memerlukan sikap-sikap bertanggung jawab,

sikap-sikap yang bebas dari egoisme dan *vested interest*. Seperti kutipan di atas, kita mampu mendukung pandangan hidup demokratis kalau kita mampu meninggalkan sikap “mau menang sendiri”, dan menerima ketentuan bahwa demokrasi akan menghasilkan diterima dan dilaksanakannya hanya sebagian dari keinginan dan pikiran kita. Oleh karena itu, harus selalu ada kesediaan untuk membuat kompromi-kompromi. Apalagi selalu ada kemungkinan bahwa keinginan dan pikiran kita sendiri adalah hasil perpanjangan dari *vested interest* kita, jadi egois, setidaknya subjektif. Maka prinsip “*partial functioning of ideals*” harus benar-benar dimengerti, dihayati dan dipegang teguh. Sudah tentu demikian pula halnya ketika kita melakukan pengawasan sosial yang merupakan bagian amat penting dari mekanisme *check and balance*, sebagai kekuatan *amar ma’ruf nahi munkar* (mendorong kebaikan dan mencegah kejahatan).



DEMOKRASI ADALAH SEBUAH PROSES

Asumsi bahwa negara kita adalah negara demokrasi—sekurangnya itulah cita-cita kita semua—tentu tidak perlu lagi dipersoalkan. Cita-cita itu sudah menjadi tekad para

pendiri republik, dan merupakan salah satu unsur dorongan batin mereka yang sangat kuat untuk berjuang merebut, mempertahankan, dan kemudian mengisi kemerdekaan.

Untuk memulai pembahasan ini, perlu ditegaskan bahwa dari satu sudut pandangan, demokrasi adalah suatu kategori yang dinamis. Ia senantiasa bergerak atau berubah, kadang-kadang negatif (mundur), kadang-kadang positif (berkembang maju). Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh Willy Eichler (ideolog Partai Sosial Demokrat Jerman—SPD), demokrasi akhirnya menjadi sama dengan proses demokratisasi. Karena itu, suatu negara dapat disebut demokratis jika padanya terdapat proses-proses perkembangan menuju ke arah keadaan yang lebih baik dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan asasi dan dalam memberi hak kepada masyarakat, baik individu maupun sosial, untuk mewujudkan nilai-nilai itu. “*Check lists*” yang dapat digunakan untuk mengukur maju-mundurnya demokrasi ialah sekitar seberapa jauh bertambah atau berkurangnya kebebasan asasi, seperti kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Masing-masing dari ketiga pokok itu dapat diperinci lebih lanjut dalam kaitannya dengan berbagai bidang kehidupan perseorangan dan kemasyarakatan,

seperti politik, ekonomi, kebudayaan, akademik (ilmiah), hukum (legal), dan seterusnya.

Sudut pandang demokrasi sebagai kategori dinamis memungkinkan terjadinya hal yang dapat disebut ironis, seperti jika sebuah negara yang kini disebut (paling) demokratis—katakanlah Amerika Serikat—justru akan dinilai tidak lagi demokratis jika ia menunjukkan gejala “kemandekan” dengan menghambat laju tuntutan dan pelaksanaan kebebasan-kebebasan asasi dari para warganya. Apalagi jika kategori pengujian kedemokrasian negara itu dimasukkan pula unsur seberapa jauh terlaksana dengan nyata prinsip kesamaan umat manusia, maka Amerika dan negara-negara Barat lainnya menjadi kurang demokratis dibandingkan dengan banyak negara “Dunia Ketiga”. Sebab di negara-negara Barat itu masih banyak tampak paham warna kulit atau rasialisme dalam kehidupan sehari-hari.

Maka dari itu juga dapat disebut bahwa suatu negara berkembang pun, dalam perspektif Eichler, mungkin harus dipandang sebagai “lebih demokratis” jika padanya terjadi proses-proses perkembangan kemajuan sejati dalam mewujudkan dan melaksanakan kebebasan asasi, seperti kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Maka yang amat perlu diperhatikan

dalam perspektif tentang demokrasi seperti itu ialah adanya pesan tentang pentingnya proses perkembangan, dan bahayanya kemandekan. Masyarakat demokratis cenderung rumit, tapi keributan dinilai pasti lebih baik daripada ketenangan karena kemandekan.

Jika persoalan itu dibawa ke negeri kita, maka kita harus melihat ada-tidaknya proses-proses menuju kepada pelaksanaan *check lists* demokrasi tersebut. Berdasarkan itu barangkali, dalam penglihatan Eichler, Indonesia harus digolongkan sebagai “negara demokratis”. Dengan mengatakan negara kita demokratis, maka kita menyisihkan ruang dan hak keabsahan bagi diri kita untuk betul-betul berpikir dan berperilaku demokratis dan menuntut semua orang agar berbuat serupa, khususnya dari mereka yang tergolong “penentu kecenderungan” (*trend makers*) dengan kekuasaan yang efektif.



DEMOKRASI ANTIK

Setelah lebih setengah abad merdeka, bicara tentang demokrasi di negeri kita masih ibarat mengunjungi sebuah rumah antik. Misalnya rumah Thomas Jefferson, orang yang mengaku segan beragama, tapi sepenuhnya yakin kepada Tuhan

Yang Maha Esa dan nilai-nilai universal (*deist-unitarianist-universalist*). Dalam hal demokrasi, kita mungkin dapat memahami desain, tata ruang, dan susunan perabotannya, tapi belum tentu dapat dengan tepat mempunyai gambaran bagaimana penghuninya dulu hidup. “Demokrasi” memang barang antik.

Amerika menegaskan keantikannya dengan menghidupkan kembali gedung Capitol Yunani kuno untuk semua gedung perwakilannya di pusat dan di negara-negara bagian. Tetapi di Yunani sendiri sudah sejak ribuan tahun lalu demokrasi dilupakan orang. Dan setelah sistem Eropa Timur hancur berantakan, “demokrasi” kini semakin menjadi cap dagang utama bangsa-bangsa Nordik atau Anglo-Saxon, seperti Prancis, Itali, dan Jepang.

Demokrasi antik di Indonesia bukan ide dasarnya, melainkan kontroversinya. Dalam sejarah proklamasi, kita mendapati bahwa masalah demokrasi telah menjadi bahan perdebatan sengit antara pendiri Republik ini. Kita merasa kenal dengan jargon-jargon mereka: “dewan”, “perwakilan”, “rakyat”, “majelis”, “musyawarah”, “mufakat”, dan seterusnya. Juga ada pinjaman yang lebih kontemporer: “*delegation of authority*”, “*decision by representation*”, “*rule of law*”, “*majority rule and minority right*”, dan entah apa lagi.

Kita merasa kenal semuanya. Tapi rasanya tidak mungkin kita mengakui benar-benar mengerti maksudnya, apalagi menggambarkan dengan tepat bagaimana masing-masing yang mengklaim demokrasi itu bertingkah laku. Malah konon, ada di antara mereka yang begitu bersemangat mengumandangkan demokrasi, namun dalam kehidupan nyata sehari-harinya sendiri,

Kejujuran adalah dimensi moral dan akhlak yang sangat penting. Sebab kejujuran merupakan modal utama dalam menjalani segala aktivitas kehidupan.

ia tidak melaksanakannya. Meskipun banyak buku yang dibaca dan berbagai istilah dan frasiologi demokrasi yang dihafal, di rumahnya atau lebih mungkin lagi di kantornya, ia adalah seorang diktator dalam sistem Soviet supermini (misalnya dengan terus-menerus mengibuli “rakyatnya” dan membiarkan mereka putus informasi). Dalam kondisi seperti itu, bagaimana mungkin orang semacam itu menjadi seorang demokrat sejati! Apalagi kalau ia mudah sekali tersinggung! “*He easily got mad at the slightest difference of opinion,*” — seorang teman asing mencoba mendukung. “Jangan-jangan, ia dulu bicara tentang demokrasi tidak karena menghayatinya, tapi karena itulah kondisi politik yang paling laku,” komentar teman asing yang lain.

Memang, masalah demokrasi selalu menarik, lihat saja kasus Bung Karno. Dengan kemampuan retorikanya yang hebat, ia adalah pembela demokrasi yang bersemangat. Namun, sungguh ironis, ia jatuh karena tuduhan sebagai seorang diktator yang membiarkan

terjadinya kultus individu terhadap dirinya. Dan karena punya pandangan sendiri tentang apa itu demokrasi, ia

acap kali menuding para pengklaim demokrasi yang lain sebagai tidak lebih daripada kaki tangan “Nekolim”. Para pemimpin Masyumi, misalnya, sangat menderita oleh tuduhan semacam itu. Bahwa mereka kaki tangan “Nekolim”, terasa sungguh mustahil, mengingat peran positif mereka yang cukup besar dalam ikut meletakkan batu pertama fondasi kemerdekaan kita. Tetapi memang para pemimpin Masyumi saat itu, bersama dengan mereka dari PSI, Parkindo, Partai Katolik, adalah tokoh-tokoh yang banyak menggunakan jargon-jargon politik modern (Barat). Ini tentu menjadi hak mereka, dan dapat dibenarkan karena mereka termasuk barisan pertama warga Indonesia yang berpendidikan modern (Belanda) dan merupakan “*The Indonesian first-rate intellec-*

tuals.” Para peninjau asing pun banyak menilai mereka sebagai pendukung demokrasi Barat.

Karena itu, dapat dimengerti jika mereka kecewa sekali sebab sikap kritisnya terhadap Bung Karno—yang kemudian menjadi benar—tidak menghasilkan imbalan apa-apa di awal Orde Baru. Lebih pahit lagi mengenang pengalaman bagaimana usaha mereka membendung Bung Karno dan PKI—lewat pembentukan Liga Demokrasi—mengalami kegagalan hanya karena kesalahpahaman, atau ketidakpahaman, atau perbedaan kepentingan (*vested interest*) dari kelompok yang mereka harapkan akan mendukung tapi ternyata, kata mereka, malah menghalangi.

Para “penghayat demokrasi” barangkali masih harus mempelajari pandangan teoretis yang lebih “absah” tentang kekuasaan politik di kalangan rakyat. Sebagaimana banyak dikritik dengan pedas, sekelompok sarjana teori politik yang dianut sebagian besar kaum Muslim (yang berarti sebagian besar rakyat kita) sangat berat berorientasi kepada keamanan dan kestabilan, sehingga menjadi konservatif dan antiperubahan, sebab perubahan dianggap dapat membawa kekacauan (*fawdla*). Maka, Kiai Sholeh dari Semarang misalnya, dalam sebuah kitabnya yang berbahasa Jawa dan bertuliskan Arab Pegon, menegaskan

kan perlunya orang Islam berpegang pada pandangan politik Sunni klasik bahwa pemberontakan pada kekuasaan yang sah, biarpun *zhâlim*, adalah terlarang menurut agama, meskipun wajib melakukan *‘amar ma’rûf nabyî munkar*. “Enam puluh tahun di bawah pemerintahan yang *zhâlim* (tapi efektif) lebih baik daripada sehari tanpa pemerintahan (yang mengakibatkan kekacauan),” demikian ia menegaskan prinsip ini, yang konon katanya dari sebuah hadis.

Atau lihat Ibn Taimiyah yang katanya panutan kaum “modernis”. Ia berkata “Tuhan mendukung kekuasaan yang adil meskipun kafir, dan tidak mendukung kekuasaan yang *zhâlim* meskipun Islam!” Ia juga berkata “dunia akan tetap bertahan dengan keadilan sekalipun kafir, dan tidak akan bertahan dengan ke-*zhâlim*-an sekalipun Islam!” Ini karena, baginya, ide Islam tentang kekuasaan dan negara ialah keadilan. Barangkali sejiwa dengan dalil itu, Amerika yang Protestan pernah memiliki presiden Katolik, J. F. Kennedy. Atau India yang Hindu pernah punya presiden yang Muslim, Zahir Hussein (walaupun presiden di sana hanyalah lambang). Atau Filipina yang Katolik, pernah punya presiden Protestan, Fidel Ramos.

Demokrasi memang tak terelakkan, tapi penuh persoalan, sehingga

harus selalu sempat dibicarakan dalam suatu ruang publik. Hanya saja, barangkali, jangan terlalu gaduh, karena bisa dianggap sebagai lelucon atau guyonan. Apalagi jika kita sendiri, para penganjurannya, tidak mampu memberi teladan. Apakah kita menganjurkan orang lain berbuat kebaikan, tapi diri sendiri terlupakan? Padahal, kita tahu perkara demokrasi ini lewat bahan bacaan.



DEMOKRASI BARAT SEBAGAI PROSEDUR

Sering kali dikemukakan bahwa sistem demokrasi adalah sistem politik yang buruk. Kendati begitu, ia merupakan satu-satunya (sistem) yang dipercaya mampu mengoreksi dirinya sendiri. Karena itu, orang memilih demokrasi dengan harapan bahwa perbaikan dapat dilakukan terus-menerus. Jika mungkin, menuju kesempurnaan, jika tidak—mengingat tidak ada yang bakal sempurna di dunia ini—maka demokrasi diharapkan mampu menampung hasrat perubahan yang terus-menerus, sesuai dengan dalil umum “segala sesuatu berubah (yakni, mengalami transformasi), kecuali Esensi Tuhan”. Orang Yunani mengatakannya, “*panta rei*”.

Karena sentralnya segi prosedural ini, maka demokrasi meng-

hendaki pendasarannya di atas sebuah ideologi terbuka, atau ideologi yang berujung terbuka (*open-ended ideology*). Yaitu, ideologi yang tidak dirumuskan penjabaran rinciannya “sekali dan untuk selamanya” (*once and for all*) sebagaimana ciri ideologi tertutup seperti komunisme. Ideologi yang tertutup, yang penjabaran rinciannya dirumuskan sekali untuk selamanya selalu cenderung ketinggalan zaman (*obsolete*). (Dalam hal komunisme, peran pemimpin sangat dominan dalam penjabaran itu, atau ada hanya satu badan atau lembaga yang berhak menjabarkan). Sebab ideologi tertutup dengan sendirinya mengklaim kemutlakan, dan klaim kemutlakan itu sendiri menutup perubahan sehingga sebenarnya melawan hukum antropi. Inilah salah satu keterangannya mengapa Uni Soviet dan negara-negara komunis Eropa Timur runtuh, sebab segala sesuatu yang ketinggalan zaman tentu runtuh.

Jadi demokrasi sebagai prosedur yang terbuka dan dinamis mempunyai makna positif tersendiri yang tidak mungkin diremehkan. Sebab pelaksanaan prosedur yang terbuka tidak mungkin tanpa kukuhnya paham kesamaan manusia dan bahwa setiap orang mempunyai potensi untuk baik dan benar. Karena itu, prosedur yang terbuka mengasumsikan saling percaya

kepada sesama anggota masyarakat. Ia juga menuntut adanya kesediaan untuk melakukan kompromi-kompromi yang dilandasi oleh kerendahan hati untuk melihat kemungkinan diri sendiri salah atau berkekurangan dan orang lain benar atau berlebihan. Karena itu, demokrasi sebagai prosedur menuntut adanya sikap hidup tertentu yang intinya ialah paham kesamaan manusia, kesediaan melakukan kompromi, prasangka baik kepada sesama manusia, menahan diri dari sikap-sikap kemutlakan dan ekstremitas, dan keterbukaan yang kritis kepada ide-ide dari mana dan siapa pun.

Maka demokrasi sebagai prosedur tidak dapat dipandang rendah nilainya dalam usaha umat manusia memperbaiki dirinya. Dalam pengalaman bangsa-bangsa Barat, hal itu merupakan puncak perjalanan sejarah sosial politik mereka yang penuh dengan gejolak dan malapetaka berdarah. Sekarang demokrasi telah menjadi perbendaharaan budaya umat manusia, dan semua bangsa berkeinginan untuk mengikuti dan menerapkannya.

Tetapi sesungguhnya demokrasi Barat sebagai prosedur masih mengandung segi kekurangan yang akhir-akhir ini mulai tampak jelas melalui otokritik kaum cendekawan Barat sendiri. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di sana

yang luar biasa mengagumkan dan telah banyak mempermudah hidup manusia itu ternyata mengandung dari dalam dirinya ekses-ekses negatif yang sekarang mulai terkuak. Pascamodernisme mengkritik obsesi manusia Barat kepada segi kehidupan lahiriah telah menimbulkan dampak sampingan berupa terangkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi berhalwa baru. Sebab ciri berhalwa, menurut definisinya—seperti tersimpulkan di balik penuturan Al-Quran tentang sikap Nabi Ibrahim kepada ayahnya, Azar (Q., 6: 74)—ialah bahwa benda-benda itu dibuat dengan tangan manusia sendiri namun kemudian menguasai hidupnya, baik karena adanya keyakinan palsu seperti sikap kaum penyembah berhalwa maupun karena prosedur kehidupan lahiriah seperti pada masyarakat Barat dalam sikap dan keterkaitan mereka dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu pengetahuan dan teknologi membawa manusia kepada alienasi (perasaan terasing dari kemanusiaan diri sendiri karena terkuasai oleh kerja) dan dengan begitu juga berarti dehumanisasi.



DEMOKRASI DAN *CIVIL SOCIETY*

Apakah di negeri kita sedang terjadi proses demokratisasi? Jawab-

nya jelas positif. Hal itu antara lain sebagai kelanjutan gelombang politik yang kini boleh dikata berdimensi global, yaitu kecenderungan ke arah sistem politik yang lebih terbuka. Bagi negeri kita, sama dengan negeri-negeri dengan pola pembangunan dan tingkat perkembangan yang kurang lebih serupa, proses demokratisasi itu juga merupakan akibat logis pemerataan relatif kecerdasan umum lewat sistem-sistem pendidikan yang tersedia untuk sebagian besar warga, dan kemudahan serta keterpenuhan nisbi keperluan hidup pokok lewat keberhasilan pembangunan ekonomi. Dari negara-negara Asia Timur (atau Lembah Pasifik Barat) mungkin Singapura harus dikecualikan dari suatu hukum umum bahwa tingkat kecerdasan tertentu dan kemudahan ekonomi tertentu rakyat akan banyak melahirkan perkembangan kualitatif sosial-politik warga negara dalam bentuk tuntutan partisipasi yang lebih besar dan ruang kebebasan yang semakin lebar. Dari sudut pandang ini, tindakan menghalangi proses-proses demokratisasi yang wajar akan dapat berarti pengingkaran atau pembendungan akibat logis pembangunan yang berhasil itu sendiri, sehingga tindakan itu menjadi setara dengan penentangan hukum alam sosial. Oleh karena itu, krisis yang diakibatkan tindakan itu dapat bersifat

fatal dan berkemungkinan membatalkan hasil pembangunan itu atau mendorongnya ke belakang, ke garis kemunduran.

Karena itu, sekalipun tendensi ke arah demokratisasi merupakan sesuatu yang objektif dan alamiah—dan ide tentang demokrasi serta demokratisasi menggaung secara global—namun sama sekali tidak berarti pasti berlangsung terus secara konsisten menurut garis logikanya sendiri. Tendensi dan proses itu dapat dicegat, ditanggihkan, bahkan dibatalkan oleh suatu kecenderungan autokratik kalangan tertentu para pemegang kekuasaan. Gagasan-gagasan sederhana bahwa warga negara atau rakyat harus didengar suaranya dalam proses-proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka, bahwa rakyat punya hak untuk tidak diperlakukan secara tidak adil, bahwa pemerintah harus merespons hajat rakyatnya, dan seterusnya, mungkin merupakan hal-hal yang mudah mendapat kesepakatan verbal, tapi acap kali dalam pelaksanaan konkretnya menuntut “perjuangan” pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya rakyat sendiri. Karena gagasan-gagasan itu semua termasuk kategori perangkat lunak (bukan perangkat keras seperti prasarana fisik), maka argumentasi dan advokasinya pun bersifat lunak pula—seperti diisyaratkan oleh pepatah kita, “lidah tak bertulang”—dengan kemungkinan

setiap orang merasa, mengaku, bahkan meyakini sebagai punya gagasan yang sama dan sudah pula melaksanakannya. Karena itu, misalnya, jika tuntutan demokratisasi dilantangkan dengan sasaran terhadap kalangan para penguasa, hampir tidak ada kalangan itu yang begitu

saja melayani dan memberi respons positif, dengan dalih bahwa yang selama ini telah mereka lakukan sudah merupakan demokrasi dan bahwa sistem mereka adalah sistem

yang demokratis (sekalipun mereka sendiri memberi kualifikasi demokrasi macam mana). Akibatnya ialah, pengalaman-pengalaman empirik berbagai bangsa menunjukkan bahwa proses demokratisasi yang berhasil senantiasa dibarengi dengan fase-fase krisis tertentu di bidang kekuasaan. Dalam hal ini, apakah proses krisis itu bersifat konstitusional atau tidak, lancar atau terhambat, lunak atau keras, damai atau berdarah, semuanya itu hanyalah bentuk-bentuk krisis yang bervariasi dari yang semestinya dikehendaki karena ideal sampai kepada yang semestinya dihindari sebagai akibat pertimbangan “*cost and benefit*” yang berujung neto yang negatif.



Perlambang demokrasi ialah pemilihan umum yang bebas dan pemberian suara yang rahasia. Hal ini benar-benar dapat dimengerti, karena hak untuk memberi suara secara bermakna dan bebas dari paksaan merupakan metafora untuk sistem politik yang membuka partisipasi

rakyat umum. Tetapi demokrasi tidaklah “bersemayam” dalam pemilu. Jika demokrasi—sebagaimana dipahami di negeri maju—harus punya “rumah”, maka rumahnya

ialah *civil society* atau “masyarakat madani”, ketika berbagai macam perserikatan, klub, gilda, sindikat, federasi, persatuan, partai dan kelompok bergabung untuk menjadi perisai antara negara dan warga negara. Sekalipun konsep tentang *civil society* tidak dapat dianalisis secara persis, berfungsinya *civil society* jelas dan tegas ada dalam inti sistem-sistem politik yang membuka partisipasi rakyat umum.



DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam persimpangan jalan pertumbuhan dan perkembangan bang-

sa kita yang amat penting sekarang ini, prinsip-prinsip kebebasan nurani dalam semangat kemanusiaan universal harus mulai menjadi acuan serius bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip-prinsip itu merupakan dasar dan titik tolak bagi segenap usaha mengembangkan dan menegakkan kesadaran akan hak-hak asasi dan demokrasi, sejalan dengan tekad dan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam falsafah negara. Tidak seorang pun dari kita yang boleh dibiarkan menyisihkan hak istimewa untuk dirinya sehingga terbebas dari kewajiban memenuhi tuntutan nilai-nilai falsafah negara itu. Hak dan kewajiban setiap pribadi warga negara adalah sama di hadapan nilai kefalsafahan negara. Hak seseorang terhadap yang lain adalah kewajiban orang lain itu, dan kewajiban seseorang terhadap orang lain adalah hak orang bersangkutan.

Seperti halnya semua nilai luhur tidak dengan sendirinya terwujud dalam masyarakat tanpa kesungguhan mengusahakannya, maka demikian pula hak-hak asasi juga tidak akan terwujud tanpa pribadi-pribadi dan lembaga-lembaga yang memiliki komitmen dan ketulusan batin untuk memperjuangkannya. Maka kini, dalam simpang jalan perjalanan bangsa ini, tindak lanjut logis dari pembangunan bangsa yang amat prinsipil antara lain ialah

memperjuangkan hak-hak asasi sebagaimana dikehendaki oleh falsafah negara. Berkaitan dengan sumber-sumber kekuasaan, dalam masyarakat secara minimal harus ditegakkan hak-hak yang tak terpisahkan dari perikehidupan yang sentosa, yaitu hak-hak pribadi untuk hidup dan memperoleh jaminan keamanan atas hidupnya itu; hak-hak pribadi untuk tidak disiksa, baik fisik maupun mental; hak-hak pribadi untuk memperoleh pengadilan yang tidak memihak, yang *fair*; hak-hak pribadi untuk tidak mengalami penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.

Pelanggaran atas hak-hak pribadi tersebut akan merupakan pelanggaran hak asasi yang paling telanjang. Pelanggaran atas hak-hak itu juga merupakan penyelewengan yang paling gawat dari dasar dan falsafah kenegaraan kita. Dan karena hak-hak itu ada dalam konteks kekuasaan, maka usaha melindungi dan menegakkannya memerlukan sistem dan tatanan kekuasaan yang adil, yang *fair*, yang tidak memihak kepada kepentingan diri sendiri dan golongan. Yaitu suatu sistem kekuasaan yang tidak terpengaruh oleh perasaan suka-tidak suka. Yaitu suatu kekuasaan yang sanggup menegakkan keadilan sekalipun terkena kepada diri si penguasa sendiri.



DEMOKRASI DAN KEBEBASAN

Kiranya harus dipandang dan diterima sebagai hal yang wajar saja bahwa akhir-akhir ini negeri kita ditandai oleh arus deras tuntutan mewujudkan demokrasi dan demokratisasi. Wajar, karena arus itu merupakan salah satu dari banyak konsekuensi alami tingkat perkembangan negara kita, baik yang materiil maupun yang nonmateriil. Yang materiil ialah taraf hidup yang makin baik dari masyarakat pada umumnya, dan yang nonmateriil ialah taraf kemampuan kognitif yang lebih tinggi daripada sebelumnya, sebagai hasil kesempatan berpendidikan yang bertambah luas.

Sebagai hal yang wajar, kita harus menilai arah perkembangan itu secara positif. Jika dapat dilakukan pembedaan analitis yang tegas dan jelas antara segi makro dan segi mikro arah perkembangan itu, maka barangkali penilaian kita ialah bahwa keseluruhan perkembangan tersebut akan membawa kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sekalipun segi-segi mikronya mungkin ada hal-hal yang tidak sepadan.

Dengan titik tolak pandangan dasar itu kita ingin bicara tentang demokrasi, demokratisasi, dan pengawasan sosial, dengan korelasi kuat sekali kepada ide tentang oposisi. Oleh karena perkataan

demokrasi sudah menjadi kata-kata harian, ada kesan seolah-olah pembicaraan tentang hal itu tidak perlu lagi. Tetapi ketika orang menyadari adanya tarik-menarik antara, di satu pihak, pengertian demokrasi sebagai sesuatu yang universal dan, di pihak lain, perwujudan demokrasi itu dalam konteks ruang, seperti faktor geografis yang acapkali berdampak kultural, dan konteks waktu seperti pengalaman kesejarahan suatu bangsa yang menjadi unsur kuat identifikasi diri bangsa itu, maka kita dapati bahwa demokrasi—seperti halnya dengan konsep-konsep besar lainnya, termasuk agama—tidak pernah sederhana. Diskusi, bahkan kontroversi, di negeri kita sekitar masalah itu sudah lama dikenal, sejak dari masa-masa para bapak republik meletakkan dasar pemikiran kenegaraan kita (yang antara lain menghasilkan Pancasila).

Kompleksitas demokrasi yang berada dalam dinamika tarik-menarik antara universalitasnya dan kenisbian kultural dalam perwujudannya tecermin dalam kenyataan tentang banyaknya ragam atau versi demokrasi, dari satu negara ke negara lain. Keragaman itu sedemikian rupa sehingga penilaian terhadap versi yang berbeda-beda itu mendorong penilaian yang berbeda-beda pula, dalam kategori penolakan dan penerimaan, pendukung

dan penentangan. Alexis de Tocqueville, misalnya, dalam bukunya yang sudah menjadi klasik, *Democracy in America*, mendapati bahwa demokrasi ala Amerika Serikat pada hakikatnya adalah sebuah sistem yang memberi peluang kepada mayoritas untuk bertindak semau-nya. Demokrasi Amerika, kata sarjana Prancis kenamaan itu, adalah semacam

“Tidak akan menjadi baik umat ini kecuali dengan sesuatu yang telah membuat baiknya umat terdahulu.”

sistem diktator mayoritas. Jika Anda termasuk minoritas, kata de Tocqueville, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa, karena semuanya telah ditentukan oleh mayoritas yang memenangkan pemilihan umum. Dan melalui kemenangan dalam pemilihan umum itu, sebuah partai mayoritas menyisihkan untuk dirinya semua hak menentukan kebijakan politik, melalui institusi kepresidenan yang amat kuat. Presiden yang memangku jabatan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu empat tahun, adalah seorang kepala eksekutif yang sangat berkuasa, dan tidak dapat dijatuhkan di tengah masa jabatan. Tentu ada perkecualian, seperti Richard Nixon yang dikenakan tuntutan Kongres (*impeachment*) karena skandal Watergate. Di luar itu, demokrasi ala Amerika adalah

sistem politik yang melandasi pemerintahan yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada banyak pemerintahan demokratis di Eropa Barat. Jika pengamatan dan penilaian de Tocqueville benar—sebagaimana banyak orang menerima dan meyakini demikian—bahwa demokrasi Amerika adalah “kediktatoran” atau “tirani” mayoritas, maka demokrasi

Amerika sesungguhnya boleh dikatakan bukanlah demokrasi, sebab sebuah kediktatoran atau tirani, betapapun kualifikasinya seperti pelaksanaannya oleh mayoritas, sama sekali bukanlah demokrasi.

Namun sudah pasti bahwa mereka yang bersangkutan sendiri, yaitu orang-orang Amerika, akan dengan keras menolak penilaian serupa itu. Demokrasi dalam pengertian yang lebih menyeluruh tidak dapat direduksikan hanya kepada mekanisme-mekanisme pelaksanaan kekuasaan yang antara lain melahirkan kekuasaan mayoritas yang mungkin saja berlangsung atas kerugian minoritas.

Demokrasi adalah lebih banyak daripada sekadar tatanan pemerintahan. Meskipun hal itu amat penting, namun ia harus dipandang sebagai salah satu hasil akhir yang

bersifat formal dan struktural. Dan segi-segi kekurangan sudut formal dan struktural demokrasi itu dapat diimbangi dengan usaha perbaikan sambil berjalan, melalui improvisasi berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata. Sebab, justru kekuatan demokrasi ialah bahwa ia merupakan sebuah sistem yang mampu, melalui dinamika internnya sendiri, untuk mengadakan kritik ke dalam dan perbaikan-perbaikannya, berdasarkan prinsip keterbukaan dan kesempatan untuk bereksperimen. Dan prinsip keterbukaan serta kesempatan bereksperimen itulah salah satu dari ruh demokrasi yang paling sentral.

Keterbukaan itu dengan sendirinya mengandung pengertian kebebasan. Dan logika dari kebebasan ialah tanggung jawab. Seseorang disebut bebas apabila ia dapat melakukan sesuatu seperti dikehendakinya sendiri atas pilihan serta pertimbangannya sendiri, sehingga orang itu secara logis dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan. Seseorang yang melakukan sesuatu karena terpaksa dengan sendirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya itu. Seperti dikatakan oleh S.I. Benn dan R.S. Peters:

“Mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menghindari atau terpaksa melakukan sesuatu yang ia kerjakan adalah sama dengan me-

ngatakan bahwa dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya itu. Karenanya dalam pembicaraan tentang keadaan tak mampu menghindar dalam kaitannya dengan kebebasan dan determinisme, kita sesungguhnya juga berbicara tentang konsep pertanggungjawaban.”

Oleh karena itu, menurut Bradley, tanggung jawab dalam kaitannya dengan kebebasan melibatkan beberapa persyaratan:

Pertama, kelangsungan identitas perorangan. Artinya, tindakan yang bebas ialah tindakan yang tetap mencerminkan kepribadian orang bersangkutan. Justru seseorang bebas melakukan sesuatu karena sesuatu itu sesuai dengan dirinya, sehingga menjadi pilihannya. Maka tidak dapat dinamakan sebagai kebebasan jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak merupakan kelanjutan yang konsisten dari kepribadiannya. Dan hanya dengan dasar kontinuitas dan konsistensi itu maka seseorang dapat dipandang sebagai bertanggung jawab atas tindakannya. Dan ini merupakan dasar bagi keharusan adanya *freedom of conscience*, kebebasan nurani.

Kedua, seseorang disebut bebas dan bertanggung jawab kalau pekerjaan yang dilakukannya benar-benar keluar dari dirinya sendiri, jadi tidak dipaksakan dari luar. Pemaksaan didefinisikan oleh Bradley sebagai

“dihasilkannya suatu akibat, dalam jasmani atau ruhani suatu makhluk hidup, dari sesuatu yang tidak terkait sebagai konsekuensi kemauan makhluk itu”. Dengan perkataan lain, pemaksaan adalah dihasilkannya suatu tindakan yang bertentangan dengan kemauan yang bersangkutan. Karena itu, dia tidak dapat disebut sebagai bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

Ketiga, orang disebut bebas dan bertanggung jawab jika ia berakal, yakni, ia mengetahui keadaan khusus perkara yang dihadapi. Jika ia melakukannya karena tidak mengerti, maka ia tidak dapat dipandang sebagai bertanggung jawab.

Keempat, orang bersangkutan haruslah seorang pelaku moral (*moral agent*), yaitu orang yang mengetahui aturan umum yang dituntut oleh masyarakatnya. Tanpa pengetahuan itu, seseorang tidak mungkin diperlakukan sebagai bertanggung jawab atas tindakannya.



DEMOKRASI DAN KEDEWASAAN

Prinsip-prinsip kemauan baik pribadi, komitmen sosial, dan mekanisme pengawasan dan pengambilan melalui kebebasan-kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat, belumlah lengkap dan sempurna. Kembali kepada pribadi, juga kepada kelom-

pok, masih diperlukan adanya sikap tabah dan tulus untuk mendahulukan kepentingan umum dan menyisihkan kepentingan pribadi semata, dan untuk melihat kemungkinan diri sendiri salah dan orang lain benar. Dengan kata-kata lain, diperlukan kedewasaan menyatakan pendapat, menerima pendapat, dan berbeda pendapat. Ini memang merupakan hal yang amat berat atas individu-individu, mengingat kecenderungan setiap orang kepada egoisme dan mendahulukan *vested interest*-nya sendiri. Demokrasi tidak akan terwujud jika tidak ada ketabahan pribadi untuk kemungkinan melihat dirinya salah dan orang lain benar. Dan ini hanya dapat diatasi jika setiap orang memahami dan menerima demokrasi sebagai pandangan hidup, atau *way of life*. Seperti dikatakan oleh T.V. Smith dan Eduard C. Lindeman:

“Orang-orang yang berdedikasi kepada pandangan hidup demokratis mampu bergerak ke arah tujuan itu jika mereka bersedia menerima dan hidup menurut aturan tentang terlaksananya (hanya) sebagian dari ide-ide. Perfeksionisme dan demokrasi adalah dua hal yang saling tidak cocok.”

Barangkali terlalu banyak kalau dikatakan bahwa demokrasi menuntut adanya tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi. Tetapi memang keterbukaan dan kebebasan yang

sejati selalu memerlukan sikap-sikap bertanggung jawab, sikap-sikap yang bebas dari egoisme dan *vested interest*. Seperti kutipan di atas, kita mampu mendukung pandangan hidup demokratis kalau kita mampu meninggalkan sikap “mau menang sendiri”, dan menerima ketentuan bahwa demokrasi akan menghasilkan diterimanya dan dilaksanakannya hanya sebagian dari keinginan dan pikiran kita. Perfeksionisme dan absolutisme adalah pandangan-pandangan yang berlawanan dengan ide demokrasi dan demokratisasi. Dalam demokrasi harus selalu ada kesediaan untuk membuat kompromi-kompromi. Apalagi selalu ada kemungkinan bahwa keinginan dan pikiran kita sendiri itu adalah hasil perpanjangan dari *vested interest* kita, jadi egois, setidaknya subjektif. Maka prinsip “*partial functioning of ideas*” harus benar-benar dimengerti, dihayati dan dipegang teguh. Sudah tentu demikian pula halnya ketika kita melakukan oposisi yang merupakan bagian amat penting dari mekanisme *check and balance*, sebagai kekuatan *amar ma’ruf nahi mungkar* (mendorong kebaikan dan mencegah kejahatan).



DEMOKRASI DAN PENGAWASAN SOSIAL

Kiranya harus dipandang dan diterima sebagai hal yang wajar saja

bahwa saat ini negeri kita ditandai oleh arus deras tuntutan mewujudkan demokrasi dan demokratisasi. Wajar, karena arus itu merupakan salah satu dari banyak konsekuensi alami tingkat perkembangan negara kita.

Sebagai hal yang wajar, kita harus menilai arah perkembangan itu secara positif. Jika dapat dilakukan pembedaan analitis yang tegas dan jelas antara segi makro dan segi mikro arah perkembangan itu, maka barangkali penilaian kita ialah bahwa keseluruhan perkembangan tersebut akan membawa kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sekalipun segi-segi mikronya mungkin ada hal-hal yang tidak sepadan.

Dengan titik tolak pandangan dasar itu, kita ingin membicarakan tentang demokrasi, demokratisasi dan pengawasan sosial, dengan korelasi kuat sekali pada ide tentang oposisi. Oleh karena perkataan demokrasi sudah menjadi kata-kata harian, ada kesan seolah-olah pembicaraan tentang hal itu tidak perlu lagi. Tetapi ketika orang menyadari adanya tarik-menarik antara, di satu pihak, pengertian demokrasi sebagai sesuatu yang universal dan, di pihak lain, perwujudan demokrasi itu dalam konteks ruang, seperti faktor geografis yang acapkali berdampak kultural, dan konteks waktu seperti pengalaman keseja-

rahan suatu bangsa yang menjadi unsur kuat identifikasi diri bangsa itu, maka kita dapati bahwa demokrasi—seperti halnya dengan konsep-konsep besar lainnya, termasuk agama—tidak pernah sederhana. Diskusi, bahkan kontroversi, di negeri kita sekitar masalah itu sudah lama dikenal, sejak masa-masa para bapak republik meletakkan dasar pemikiran kenegaraan kita (yang antara lain menghasilkan Pancasila).

Kompleksitas demokrasi yang berada dalam dinamika tarik-menarik antara universalitasnya dan kenisbian kultural dalam perwujudannya tecermin dalam kenyataan tentang banyaknya ragam atau versi demokrasi, dari satu negara ke negara lain. Keragaman itu sedemikian rupa sehingga penilaian terhadap versi yang berbeda-beda itu mendorong penilaian yang berbeda-beda pula, dalam kategori penolakan dan penerimaan, pendukungan dan penentangan. Alexis de Tocqueville, misalnya, dalam bukunya yang sudah menjadi klasik, *Democracy in America*, mendapati bahwa demokrasi ala Amerika Serikat adalah pada hakikatnya sebuah sistem yang memberi peluang kepada mayoritas

untuk bertindak semaunya. Demokrasi Amerika, kata sarjana Prancis kenamaan itu, adalah semacam sistem diktator mayoritas. Jika Anda termasuk minoritas, kata de Tocqueville, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa, karena semuanya telah ditentukan oleh mayoritas yang me-



menangkan pemilihan umum. Dan melalui kemenangan dalam pemilihan umum itu sebuah partai mayoritas menyisihkan untuk dirinya semua

hak menentukan kebijakan politik, melalui institusi kepresidenan yang amat kuat.

Presiden yang memangku jabatan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu empat tahun, adalah seorang kepala eksekutif yang sangat berkuasa, yang tidak dapat dijatuhkan di tengah masa jabatan. Tentu ada perkecualian, seperti Richard Nixon yang dikenakan tuntutan Kongres (*impeachment*) karena skandal *Watergate*. Di luar itu, demokrasi ala Amerika adalah sistem politik yang melandasi pemerintahan yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada banyak pemerintahan demokratis di Eropa Barat. Jika pengamatan dan penilaian de Tocqueville benar—

sebagaimana banyak orang menerima dan meyakini demikian—bahwa demokrasi Amerika adalah “kediktatoran” atau “tirani mayoritas”, maka demokrasi Amerika sesungguhnya boleh dikata bukanlah demokrasi, sebab sebuah kediktatoran atau tirani, betapapun kualifikasinya seperti pelaksanaannya yang oleh mayoritas, sama sekali bukanlah demokrasi.

Namun sudah pasti bahwa mereka yang bersangkutan sendiri, yaitu orang-orang Amerika, akan dengan keras menolak penilaian serupa itu. Demokrasi dalam pengertian yang lebih menyeluruh tidak dapat direduksikan hanya pada mekanisme-mekanisme pelaksanaan kekuasaan yang antara lain melahirkan kekuasaan mayoritas yang mungkin saja berlangsung atas kerugian minoritas.

Demokrasi adalah lebih banyak daripada sekadar tatanan pemerintahan. Meskipun hal itu amat penting, namun ia harus dipandang sebagai salah satu hasil akhir yang bersifat formal dan struktural. Dan segi-segi kekurangan sudut formal dan struktural demokrasi itu dapat diimbangi dengan usaha perbaikan sambil berjalan, melalui improvisasi berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata. Telah dikemukakan di atas, justru kekuatan demokrasi ialah bahwa ia merupakan sebuah sistem yang mampu, melalui dina-

mika internnya sendiri, untuk mengadakan kritik ke dalam dan perbaikan-perbaikannya, berdasarkan prinsip keterbukaan dan kesempatan untuk bereksperimen. Dan prinsip keterbukaan serta kesempatan bereksperimen itulah salah satu dari ruh demokrasi yang paling sentral.

Keterbukaan itu dengan sendirinya mengandung pengertian kebebasan. Dan logika dari kebebasan ialah tanggung jawab. Seseorang disebut bebas apabila ia dapat melakukan sesuatu seperti dikehendakinya sendiri atas pilihan serta pertimbangannya sendiri, sehingga orang itu secara logis dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan. Seseorang yang melakukan sesuatu karena terpaksa dengan sendirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya itu. Seperti dinyatakan oleh S.I. Benn dan R.S. Peters.

Mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menghindar atau terpaksa melakukan sesuatu yang ia kerjakan adalah sama dengan mengatakan bahwa dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya itu. Karenanya, dalam pembicaraan tentang keadaan tak mampu menghindar dalam kaitannya dengan kebebasan dan determinisme, kita sesungguhnya juga berbicara tentang konsep pertanggungjawaban.

Oleh karena *itu*, menurut Bradley, sebagaimana dikutip oleh Benn dan Peters, tanggung jawab dalam kaitannya dengan kebebasan melibatkan beberapa persyaratan.

Pertama, kelangsungan identitas perorangan. Artinya, tindakan yang bebas ialah tindakan yang tetap mencerminkan kepribadian orang bersangkutan. Justru seseorang bebas melakukan sesuatu karena sesuatu itu mencocoki dirinya, sehingga menjadi pilihannya. Maka tidak dapat dinamakan sebagai kebebasan jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak merupakan kelanjutan yang konsisten dari kepribadiannya. Dan hanya dengan dasar kontinuitas dan konsistensi itu, maka seseorang dapat dipandang sebagai bertanggung jawab atas tindakannya. Dan ini merupakan dasar bagi keharusan adanya *freedom of conscience*, kebebasan nurani.

Kedua, seseorang disebut bebas dan bertanggung jawab kalau pekerjaan yang dilakukannya benar-benar keluar dari dirinya sendiri, jadi tidak dipaksakan dari luar. Pemaksaan didefinisikan oleh Bradley sebagai, "... dihasilkannya suatu akibat, dalam jasmani atau ruhani makhluk hidup, dari sesuatu yang tidak terkait sebagai konsekuensi kemauan makhluk itu." (... *The production, in the body or mind of an animate being, of a result which is not related as a consequence to its*

will.) Dengan perkataan lain, pemaksaan adalah dihasilkannya suatu tindakan yang bertentangan dengan kemauan yang bersangkutan. Karena itu, orang yang demikian tidak dapat disebut sebagai bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

Ketiga, orang disebut bebas dan bertanggung jawab jika ia berakal, yakni ia mengetahui keadaan khusus perkara yang dihadapi. Jika ia melakukannya karena tidak mengerti, maka ia tidak dapat dipandang sebagai bertanggung jawab.

Keempat, orang bersangkutan haruslah seorang pelaku moral (*moral agent*), yaitu orang yang mengetahui aturan umum yang dituntut oleh masyarakatnya. Tanpa pengetahuan itu, seseorang tidak mungkin diperlakukan sebagai bertanggung jawab atas tindakannya.



DEMOKRASI ITU DINAMIS

Bahwa negara kita adalah negara demokrasi—yang merupakan cita-cita kita semua—tentu tidak perlu lagi dipersoalkan. Cita-cita itu sudah menjadi pandangan para pendiri Republik, dan merupakan salah satu unsur dorongan batin mereka yang sangat kuat berjuang merebut, mempertahankan dan kemudian mengisi kemerdekaan.

Tetapi perlu ditegaskan bahwa dari satu sudut pandangan, demokrasi adalah suatu kategori yang dinamis. Ia senantiasa bergerak atau berubah, kadang-kadang negatif (mundur), kadang-kadang positif (berkembang maju). Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh Willy Eichler (Ideolog Partai Sosial Demokrat Jerman-SPD), demokrasi akhirnya menjadi sama dengan proses demokratisasi. Suatu negara bisa disebut demokratis jika padanya terdapat proses-proses perkembangan menuju ke arah keadaan yang lebih baik dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan asasi, dan dalam memberi hak kepada masyarakat, baik individu maupun sosial, untuk mewujudkan nilai-nilai itu. *Check lists* yang dapat digunakan untuk mengukur maju-mundurnya demokrasi ialah seberapa jauh bertambah atau berkurangnya kebebasan asasi, seperti kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Masing-masing dari ketiga pokok itu dapat dirinci lebih lanjut dalam kaitannya dengan berbagai bidang kehidupan perorangan dan kemasyarakatan, seperti politik, ekonomi, kebudayaan, akademis, (ilmiah), hukum, dan seterusnya.

Sudut pandang demokrasi sebagai kategori dinamis memungkinkan terjadinya hal yang dapat disebut ironis, seperti jika sebuah

negara yang kini disebut (paling) demokratis—katakanlah Amerika Serikat—justru akan dinilai tidak lagi demokratis jika ia menunjukkan gejala “kemandekan” dengan menghambat laju tuntutan dan pelaksanaan kebebasan asasi para warganya. Apalagi jika kategori pengujian kedemokrasian negara itu dimasukkan pula unsur seberapa jauh terlaksana dengan nyata prinsip kesamaan umat manusia, maka Amerika dan lain-lain negara Barat menjadi kurang demokratis dibandingkan dengan banyak negara “Dunia Ketiga”. Sebab di negar-negara Barat itu masih banyak tampak paham warna kulit atau rasialisme dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian dapat disebut bahwa suatu negara berkembang pun, dalam perspektif Eichler, mungkin harus dipandang sebagai “lebih demokratis” jika padanya terjadi proses-proses perkembangan kemauan sejati dalam mewujudkan dan melaksanakan kebebasan berupa kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.

Oleh karena itu, yang amat perlu diperhatikan dalam perspektif tentang demokrasi ialah pesan tentang pentingnya proses perkembangan, dan bahayanya kemandekan. Masyarakat demokratis cenderung ribut, tapi keributan itu dinilai pasti lebih baik daripada ketenangan karena kemandekan.

Jika persoalan itu kita bawa ke negeri kita, maka kita harus melihat ada-tidaknya proses-proses menuju pada pelaksanaan *check lists* demokrasi tersebut. Berdasarkan itu barangkali dalam penglihatan Eichler, Indonesia harus digolongkan sebagai “negara demokrasi”. Dengan mengatakan negara kita demokratis kita menyisihkan ruang dan hak keabsahan bagi diri kita untuk betul-betul berpikir dan berperilaku demokratis, dan untuk menuntut semua orang agar berbuat serupa, khususnya dari mereka yang tergolong “penentu kecenderungan” (*trend makers*) dengan kekuasaan yang efektif.



DEMOKRASI, KEBEBASAN, DAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI

Demokrasi mengimplikasikan kebebasan. Namun menurut Eric Fromm, banyak orang yang takut kebebasan, karena di situ dituntut tanggung jawab pribadi yang cukup besar. Ketakutan itu bisa menjadi penghalang yang besar atas terwujudnya demokrasi, seperti yang terjadi pada bangsa Jerman menjelang Perang Dunia II. Oleh karena itu, penting sekali diperhatikan segi pendidikan politik, yang di situ masalah kebebasan dan tanggung jawab pribadi yang mengiringinya harus diberikan secara proporsional.

Suatu kebenaran yang mungkin terdengar ganjil mengatakan bahwa dimensi sosial hidup manusia—termasuk sistem politik demokrasi—akan membutuhkan tumbuhnya individu-individu yang kuat, yang menghargai kebebasan, dan siap menerima konsekuensinya berupa tanggung jawab pribadi.



DEMOKRASI, MASYARAKAT MADANI, DAN *CIVILITY*

Perlambang demokrasi ialah pemilihan umum yang bebas dan pemberian suara yang rahasia. Hal ini benar-benar dapat dimengerti, karena hak untuk memberi suara secara bermakna dan bebas dari paksaan merupakan metafor untuk sistem politik yang membuka partisipasi rakyat umum. Tetapi demokrasi tidaklah “bersemayam” dalam pemilu-pemilu. Jika demokrasi sebagaimana dipahami di negeri maju harus punya “rumah”, maka rumahnya ialah *civil society* atau “masyarakat madani”, di mana berbagai macam perserikatan; klub, gilda, sindikat, federasi, persatuan, partai, dan kelompok bergabung untuk menjadi perisai antara negara dan warga negara. Sekalipun konsep tentang *civil society* tidak dapat dianalisis secara persis, berfungsinya *civil society* jelas dan tegas ada dalam inti

sistem-sistem politik yang membuka partisipasi rakyat umum.

Banyak yang mengatakan bahwa ikon kecenderungan global demokratisasi ialah *civil society*. Berhadapan dengan penindasan di Amerika Latin, Eropa Selatan dan Timur, *civil society* kerap kali dipandang berjasa dalam menghala-
ngi rancangan kekuasaan otoriter dan menentang pemerintahan sewenang-wenang. Walaupun begitu, *civil society* tidaklah menumbangkan pemerintahan, yang jika dilanda korupsi merajalela dalam kalangannya sendiri dan kehilangan pijakan legitimasinya, biasanya tumbang dari dalam. *Civil society* lebih merupakan penerima manfaat (*beneficiary*) ketimbang sebuah kekuatan penghancur. Lebih dari itu, *civil society* sering diidealisasikan sebagai suatu kebaikan sempurna. Sama halnya dengan semua gejala sosial, *civil society* dapat, dan sering, mempunyai sisi-sisi buruk. Sikap mementingkan diri sendiri, prasangka dan kebencian tidak jarang berjalan seiring dengan altruisme, sikap adil dan santun. Kiprah *civil society* yang bebas tak terkekang bukanlah suatu gagasan yang harus disambut hangat, melainkan pikiran yang sung-

“Ingatlah bahwa dalam jasad ada segumpal daging, bila ia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan bila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ingatlah, segumpal daging itu ialah kalbu.”

(Hadis)

terkenal ada ungkapan bijak, “Kebebasan seseorang terbatas oleh kebebasan orang lain” *Hurriyat-u ‘l-mar’i mahdûdat-un bi-hurriyat-i siwâhu*.

guh mengerikan. Setiap *chaos* akan mudah menjadi dasar pembenaran tampilnya orang kuat yang hendak mengatasinya, sehingga *civil society* dengan kiprah bebas tak terkendali akan justru menciptakan lawannya sendiri, yaitu otoritarianisme seorang kuat. Di kalangan para ulama

Ungkapan “bebas dan bertanggung jawab” terdengar kurang simpatik karena sering lebih ditekankan segi bertanggungjawabnya daripada segi bebasnya (terutama jika yang mengucapkan ialah pihak penguasa). Tetapi sebaliknya, jika yang ditekan hanyalah kebebasan tanpa menganggap serius masalah tanggung jawab, maka yang dihasilkan ialah kekacauan. Ironisnya, kebebasan tanpa tanggung jawab itu akan segera hilang atau dirampas oleh penguasa atas nama keperluan mengatasi kekacauan.

Adanya masyarakat madani atau *civil society* mengisyaratkan identitas yang dipunyai bersama, setidaknya melalui persetujuan tidak langsung tentang garis-garis besar batas-batas pranata politik. Dengan kata lain,

kewargaan, dengan hak dan tanggung jawabnya, adalah bagian utuh dari pengertian *civil society*. Kewargaan memberi landasan masyarakat madani. Sebab menjadi bagian dari keseluruhan adalah prasyarat bagi keseluruhan itu untuk menjadi suatu masyarakat. Kalau tidak, masyarakat itu tidak mempunyai keutuhan, menjadi sekadar ibarat bejana yang penuh dengan onderdil-ondertil yang terpisah-pisah. Karena itu, pribadi dalam *civil society* diakui hak-hak asasnya oleh negara, tapi, sebagai imbalannya, dituntut menunaikan kewajiban kepada negara. Semua pemerintahan, khususnya yang autokratis, cenderung meremehkan kewargaan, dengan menuntut dukungan warga dan penampilan seremoni patriotik, namun pada saat yang sama hanya dalam ucapan menyatakan penghargaan kepada hak-hak kewargaan. Ketika negara, gagal dan kehilangan kepercayaan warganya, maka kewargaan itu sendiri akan menjadi sasaran pengorbanan yang pertama. Ketika legitimasi pemerintahan runtuh, *civil society* juga terancam untuk mengalami fragmentasi. Karena itulah tidak punya makna apa-apa membicarakan *civil society* tanpa negara yang tangguh.

Civil society adalah lebih daripada sekadar campuran berbagai bentuk asosiasi. Pengertian *civil society* juga mengacu pada kualitas *civility*, yang

tanpa itu lingkungan hidup sosial akan hanya terdiri dari faksi-faksi, klik-klik, dan serikat-serikat rahasia yang saling menyerang. *Civility* mengandung makna toleransi, kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial; juga kesediaan untuk menerima pandangan yang sangat penting bahwa tidak selalu ada jawaban yang benar atas suatu masalah. Dan penting sekali diperhatikan ada-tidaknya *civility* itu dalam diri serikat-serikat yang ada, selain dalam hubungan antara berbagai serikat itu satu sama lain. Ironisnya, kelompok-kelompok yang memperjuangkan demokrasi dan nilai-nilai terpuji lainnya kerap kali tidak mencerminkan nilai-nilai itu dalam diri kalangan mereka sendiri ataupun pribadi para tokohnya. Malangnya, *civility* adalah suatu mutu yang banyak hilang di negara-negara berkembang. Mungkin suatu negara menjunjung tinggi kehidupan keserikatan (*associational life*) yang aktif, tapi cukup sering di negara itu *civil society* dirongrong oleh kurangnya toleransi politik dan terkekang oleh peraturan pemerintah yang sewenang-wenang. Tidak adanya *civility* menimbulkan sikap ragu tentang prospek jangka pendek demokrasi dalam suatu negara. Tetapi jika seni berasosiasi dapat dimengerti dengan baik, maka peningkatan *civil society* akan

menjadi bermakna lebih daripada sekadar menciptakan dasar-dasar demokrasi. Ia sendiri menjadi *milieu* bagi kehidupan sosial yang sehat.



DEMOKRASI PADANG PASIR

Sudah lama negeri-negeri Barat, khususnya Amerika, memandang segi-segi tertentu kehidupan di kerajaan Arab Saudi dengan penghargaan secukupnya. Misalnya, dikatakan bahwa Saudi adalah “kapitalis” dalam maknanya yang positif, yaitu negeri yang menganut pola ekonomi terbuka kepada mekanisme pasar. Ditambah dengan sikapnya yang moderat dalam masalah Palestina, kapitalisme Saudi menjadi alasan utama simpati Barat kepada negeri gurun itu.

Tapi juga sudah lama masyarakat Barat mengidap stereotip yang serba negatif tentang Saudi. Asosiasi antara orang Arab yang berhidung bengkok (semitik) dan berigai dengan unta dan padang pasir yang gersang dan kejam selalu menjadi bumbu karikatur-karikatur ejekan kepada Arab Saudi. Asosiasi antara orang Arab dan minyak serta bagaimana minyak itu digunakan untuk tujuan-tujuan politik juga merupakan tema karikatur ejekan yang akan selalu muncul kapan saja orang

Barat merasa mempunyai kesulitan dengan orang Arab.

Sebuah karikatur ejekan lagi menggambarkan seorang Arab, dengan ciri-ciri khas profil dan pakaiannya, yang shalat di sebelah menara pengeboran minyak. Pesannya ialah: kehadiran industri modern di Arabia tidak berhasil mengangkat penduduknya dari keprimitifan mereka digambarkan dalam bagaimana orang Arab masih “sempat” shalat di tengah hiruk-pikuk mesin-mesin industri. Tetapi di mata orang yang mengerti hakikat orang Saudi, karikatur itu dapat ditafsirkan justru sebaliknya, menjadi sebuah pujian. Bagi Robert Lacey, penulis buku laris, *The Kingdom, Arabia and the House of Sa'ud*, misalnya, karikatur tersebut justru mengisyaratkan bahwa meskipun orang Arab mengalami modernisasi, mereka tetap bertahan dengan budaya mereka. Suatu hal yang baginya sungguh mengagumkan. Karena itu, dapat diharapkan bahwa apa pun yang berkembang di Saudi, termasuk sistem sosial-politiknya, masih dapat dilacak sebagai kelanjutan dari tradisi dan pola budaya mereka sendiri.

Maka, ketika Raja Fahd mengumumkan rencana pembaharuan politiknya dengan memberi rakyat Saudi konstitusi tertulis dan ketika menegaskan bahwa rakyat akan diberi hak lebih banyak dan lebih

luas daripada yang selama ini ada, orang dapat melihatnya sebagai isyarat menuju demokrasi modern. Tetapi orang juga dapat melihatnya sebagai kelanjutan dari “demokrasi padang pasir” (*desert democracy*) hanya dalam pelebagaan baru. Sebab, betapapun orang luar melihatnya sebagai “primitif”, “demokrasi padang pasir” memiliki unsur yang paling esensial dari sebuah sistem masyarakat demokratis, yaitu egalitarianisme.

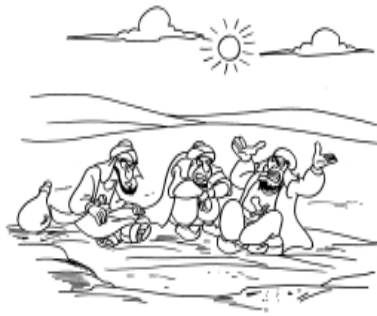
Literatur Barat tentang Saudi selalu tidak lupa menyebut adanya “*majlis*”. Salah satunya ialah yang dituturkan oleh Robert Lacey. Suatu hari di bulan Mei 1981, Raja Khalid menerima rakyatnya sebelum shalat zuhur di istananya yang sederhana. Semua jenis makanan ada di situ: orang kota yang kaya dengan jubahnya yang berhias benang emas, kaum Badui yang telanjang kaki, orang buta, orang lumpuh, seorang pekerja asal Mesir dengan pakaian kerjanya dan kedua kakinya masih membawa lumpur dari galian selokan di kota, dan lain-lain. Mereka berebut tempat di *majlis*, semuanya berjumlah sekitar seratus orang. Satu per satu datang kepada Raja

dan berjabat tangan dengan kukuh. Sebagian mencium pundak Raja. Tetapi ketika ada yang merunduk dan mencoba mencium tangan. Sang Raja menarik tangannya dengan cepat dan berteriak, “*As-taghfirullâh!*” lalu mengajari orang Badui itu berjabat tangan secara

benar dan berdiri tegak.

Dalam suasana perjumpaan di *majlis* itu, kata-kata sopan kepada Raja paling jauh hanyalah “*thawîl ‘um-rak!*” (semoga panjang umur!).

Dan banyak dari mereka yang memanggil Raja cukup dengan nama pribadi: “Ya Khalid!” sembari melemparkan secarik kertas kumal ke pangkuan Raja. Kertas itu sendiri mungkin berasal dari *wallpaper* yang koyak. Namun, di dalamnya tertulis petisi, permohonan, keluhan, protes, atau apa saja yang dirasa perlu disampaikan langsung kepada Raja. Dan Raja memerhatikan dengan penuh kesungguhan. Biasanya, asalkan tidak berarti melanggar ketentuan birokrasi yang sudah diakui, apa pun yang menjadi isi kertas-kertas kumal itu mendapatkan tindak lanjut.



Saya pribadi menyaksikan “drama” serupa pada suatu hari di bulan Desember 1968, di masa Raja Faisal. Inilah Raja Saudi yang benar-benar berwawasan “modern”, yang antara lain dengan berani merintis adanya sekolah-sekolah untuk gadis-gadis. Dalam masyarakat yang menurut ukuran negeri-negeri Arab tetangganya pun dianggap sangat kolot, rintisan Raja Faisal adalah tindakan luar biasa, dan dia pahlawan besar Saudi. Tapi seakan untuk menegaskan egalitarianisme Arab, pemakaman jenazah Raja Faisal, yang mati secara tragis, hanya didahului dengan shalat jenazah semestinya dengan upacara penghormatan resmi seperlunya tanpa ingar-bingar *ala* pemujaan jenazah Imam Khomeini. Dan kuburannya pun cukup hanya ditandai dengan batu gurun, jauh dari kemegahan *mausoleum* Kemal Attaturk atau Ali Jinnah.

Memandang *majlis* di Arab Saudi sebagai jenis “demokrasi” seperti dikenal tentu akan terlalu jauh. Tapi Robert Lacey mengatakan bahwa *majlis* itu mendemonstrasikan suasana yang amat akrab antara penguasa dan rakyat dalam gaya yang penuh kesantiaian dan rasa saling memercayai, bahkan saling mencintai, yang semua itu tidak pernah ada di Iran pada zaman Syah. Dan jika benar demikian, maka di Saudi pun sesungguhnya

terdapat fondasi sistem sosial-politik yang demokratis. Tinggal bagaimana di atas fondasi itu didirikan bangunan demokrasi modern, dengan bahan-bahan dan desain-desain yang disediakan oleh taraf pendidikan dan kemakmuran yang meningkat. Jika benar “lain lubuk lain ikan dan lain ladang lain belalang,” maka orang Saudi berhak mengembangkan “demokrasi” menurut apa yang mereka dapatkan sesuai dengan tuntutan khas budayanya.



DEMOKRASI PANCASILA I

Kita ketahui bersama bahwa dalam masyarakat politik kita ada keinginan untuk melaksanakan demokrasi, namun dengan penyesuaian konsep-konsep dan aturan-aturan operasionalnya menurut kondisi kultur bangsa ini. Dari keinginan itu lahir ungkapan “Demokrasi Indonesia” atau, lebih umum lagi, “Demokrasi Pancasila”. Secara teoretis, dorongan untuk mengembangkan demokrasi menurut kondisi khusus suatu tempat sangatlah wajar. Sekalipun dasar yang paling prinsipil dari demokrasi itu bersifat universal—berlaku untuk semua tempat dan waktu—namun dalam rincian dan pelaksanaannya, juga dalam institusinya yang menyang-

kut masalah struktural dan prosedural tertentu, terdapat variasi yang cukup besar antara berbagai negara demokrasi.

Jika kita amati, apa yang tampak pada negara-negara demokrasi di Barat ialah, misalnya, keanekaragaman bentuk kenegaraannya. Di antara negara-negara Barat dengan demokrasi yang paling stabil dan mapan, sebagian besar dari mereka banyak yang berbentuk kerajaan, yaitu Swedia, Norwegia, Denmark, Belanda, Belgia, Luxemburg, dan Inggris, dengan ciri khususnya masing-masing. Yang berbentuk republik pun memiliki ciri-ciri tertentu pula, seperti Jerman, Prancis, Itali, Swiss, Austria, Finlandia, dan Irlandia. Di luar Eropa Barat, demokrasi tumbuh kukuh di Amerika Serikat yang republik maupun di Kanada, Australia, dan Selandia Baru yang merupakan anggota *Commonwealth* dengan pengakuan kepada Mahkota Inggris sebagai kepala negara.

Sebagian besar demokrasi Barat itu diterapkan dengan mengikuti sistem pemerintahan parlementer. Yang tidak mengikutinya, seperti Amerika Serikat (yang berpemerintahan presidensial), menampilkan gaya dan cara berdemokrasi yang berbeda. Dalam sistem parlementer, sebuah pemerintah tidak didasarkan kepada masa tugas tertentu (seperti empat tahun di Amerika Serikat),

melainkan seberapa jauh ia kuat di parlemen dalam hal dukungan atau tantangan. Ada pemerintahan parlementer yang mampu bertahan lebih lama daripada periode pemerintahan presidensial; sebaliknya, selalu terdapat kemungkinan sebuah pemerintahan jatuh sewaktu-waktu (sering dengan kesan tidak terhormat), jika dukungan di parlemen runtuh.

Dari gambaran singkat itu jelaslah bahwa demokrasi bukan suatu sistem sosial politik dengan konsep yang tunggal. Hampir semua bangsa yang mempraktikkannya mempunyai pandangan, pengertian, dan cara-cara pelaksanaannya sendiri yang khas. Selain tuntutan kekhususan budaya yang bersangkutan, hal itu juga karena perbedaan tingkat perkembangan atau kemajuan sebuah bangsa di bidang-bidang lain, seperti ekonomi dan pendidikan. Maka dengan alasan kenyataan itu, bangsa mana pun, termasuk bangsa kita, dapat dibenarkan untuk mengaku mempunyai pengertian dan cara pelaksanaan sendiri tentang demokrasi. Ini tidak berarti tertutup sama sekali terhadap kemungkinan melihat demokrasi sebagai sesuatu yang bersifat universal atau menjangat. Cara pandang yang khas tentang demokrasi hanya merupakan akibat logis interaksi antara inti atau dasar pengertiannya yang universal dengan kenyataan lokal, kadang-kadang

justru guna melaksanakan demokrasi itu secara efektif.

Dalam sejarah pemikiran politik Indonesia sekitar tahun 1945, agaknya sudah tumbuh kesadaran tentang masalah yang akan dialami oleh sebuah negara dengan sistem demokrasi parlementer. Suatu negeri dengan penduduk yang hampir semuanya buta huruf tidak mungkin didorong pada suatu lompatan sosial-politik untuk sepenuhnya melaksanakan demokrasi. Karena itu, yang sejak semula agaknya menjadi pilihan para penggagas demokrasi Indonesia ialah suatu sistem dan tata cara penyelenggaraan pemerintah dan penggunaan kekuasaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal demokrasi, namun sekaligus menjamin keteguhan usaha pembinaan bangsa dan pembangunan ekonomi. Ini berarti menuntut pemerintahan yang kuat dan stabil, sehingga mampu dengan tenang melaksanakan program-program pembangunannya.

Dari berbagai kemungkinan pilihan menurut contoh Barat tadi, model Amerika Serikat dengan sistem pemerintahan presidensial agaknya menarik perhatian para pendiri bangsa kita. UUD 45 disusun dengan latar belakang pemikiran semacam itu. Tapi karena desakan waktu dan faktor-faktor lainnya, maka tampak sekali bahwa UUD 45 dirancang dalam suasana yang ku-

rang lapang, dan diterima hanya untuk kemudian disempurnakan. Walaupun begitu, ide-ide paling mendasar sesungguhnya telah sangat mantap, khususnya seperti yang tertuang dalam Mukadimah UUD 45, termasuk ide tentang pemerintahan presidensial. Sementara yang pertama itu tidak pernah mengalami perubahan berarti—misalnya, ketika diperkenalkan UUD Republik Indonesia Serikat dan kemudian UUD Sementara tahun 1950—namun ide tentang pemerintahan presidensial sempat ditinggalkan dan diganti dengan parlementer.

Secara umum, kita sekarang mengenang perubahan itu sebagai masa eksperimen demokrasi liberal yang berakhir dengan kesuraman, meskipun ada juga yang melihatnya dengan positif sebagai masa kehidupan konstitusional yang sangat baik untuk suatu negara muda. Yang jelas, demokrasi liberal telah terbukti membawa kekacauan dan berakhir dengan munculnya keabसान bagi tampilnya seorang aktor politik yang kuat, yaitu Bung Karno, bahkan prosesnya tidak berhenti sampai di situ. Sistem Bung Karno telah membawa bangsa kepada malapetaka sosial politik yang dahsyat, yaitu kudeta yang sangat berdarah namun gagal dari kaum komunis, yang dikenal sebagai Gerakan Tiga puluh September/PKI (G30S/PKI) pada tahun 1965.

Berbagai pengalaman nasional yang penuh trauma itu telah membuat para pemimpin Indonesia berpikir dan bekerja keras untuk menemukan dan menerapkan suatu sistem yang diyakini paling cocok bagi bangsa dalam tahap perkembangannya yang masih muda. Banyak yang berpendapat bahwa sistem itu telah ditemukan—bahkan berjalan dalam masa pemerintahan Orde Baru yang sampai sekarang sudah berlalu selama tiga puluh tahun—yang kemudian dikenal dengan epitet “Demokrasi Pancasila”. Demokrasi yang kelak diklaim sebagai khas Indonesia inilah yang selalu diterangkan sebagai sistem pemerintahan berdasarkan musyawarah mufakat.

Klaim itu tentu saja absah belaka. Tetapi untuk memahami keabsahannya dengan baik dan agar tidak terjerembab pada sikap-sikap simplistik, perlu uraian secukupnya mengenai latar belakang pemikirannya yang lebih jauh. Kejelasannya akan lebih mudah diperoleh jika kita membuat pendekatan perbandingan, pertama dengan segi positif dan negatif demokrasi Barat, dan kedua meneliti lebih jauh makna asasi ajaran musyawarah dalam agama.



DEMOKRASI PANCASILA II

Modal utama untuk mewujudkan demokrasi di negeri kita ialah

Pancasila. Dasar negara itu melengkapi kita dengan prasyarat asasi untuk mewujudkan demokrasi atau tatanan sosial-politik yang membawa pada kebaikan untuk semua.

Prasyarat asasi itu ialah: *pertama*, adanya orientasi hidup transendental. *Kedua*, ikatan batin pada nilai-nilai kemanusiaan. *Ketiga*, kesadaran akan tanggung jawab bersama (tidak menyerahkan atau memper-taruhkan masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat sematamata pada kemauan seorang tokoh, betapapun iktikad baiknya, tetapi pada mekanisme pengawasan umum dalam tatanan sosial politik yang partisipatif). *Keempat*, pandangan yang lebih mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan diri pribadi. *Kelima*, prasarana dan wadah persatuan dan kesatuan negara bangsa.

Jika perkembangan terakhir di negeri kita dapat dijadikan indikasi (keterbukaan, kesadaran akan hak-hak asasi, proses-proses menuju “*clean government*”) maka kita patut merasa optimistis. Namun persoalannya ialah seberapa jauh unsur-unsur perkembangan positif itu dapat didorong dan ditumbuhkan ke arah yang terus lebih baik, dan bagaimana agar tidak membentur dinding-dinding kultur politik “asli” (dalam artian nativisme dan atavisme, yaitu paham bahwa apa pun yang berasal dari negeri dan

bangsa sendiri serta berasal dari masa lampau akan dengan sendirinya baik dan benar) yang tidak kondusif bagi pandangan-pandangan yang lebih kosmopolit, terbuka, dan berwawasan masa depan. Kalau benturan ini terjadi atau sengaja diarahkan ke sana oleh orang atau kelompok dengan *vested interest*-nya yang terancam, maka optimisme tersebut berbalik menjadi pesimisme.



DEMOKRASI PARTISIPATIF

Demokrasi yang sebenarnya ialah demokrasi partisipatif, yang dulu dijalankan Nabi dan khalifah yang empat. Tetapi sayang, umurnya sangat pendek, hanya 30 tahun, dan berhenti dengan terbunuhnya 'Ali. Sejak itu, umat Islam yang semula menentukan kepala negara atau pemimpinnya melalui pemilihan, berubah menjadi melalui keturunan. Itu adalah dinasti geneologis dan ironis. Sampai perkenalan dengan konsep republik dari Barat, barulah umat Islam belajar kembali memilih pemimpinnya.

Oleh karena itu, ketika Mu'awiyah memutuskan untuk mengangkat anaknya sendiri, Yazid, sebagai khalifah, orang-orang Madinah dan Makkah menentang. Mereka menuduh Mu'awiyah telah menyelewengkan Islam, meninggalkan

Sunnah Rasul dan Sunnah *Al-Khulafâ' Al-Râsyîdûn*; Mu'awiyah lebih mementingkan melaksanakan Sunnah Kisra Persia dan Kaisar Romawi. Islam tidak mengenal adanya konsep keturunan dalam menentukan kepemimpinan. Hal ini terlihat ketika Nabi Ibrahim ditegur oleh Tuhan tatkala dia menanyakan tentang anak keturunannya. *Ia berfirman, "Akan Kujadikan engkau seorang Imam umat manusia." Ia bermohon, "Dan juga (Imam-Imam) dari keturunanku?" Ia berfirman, "Janji-Ku tak berlaku bagi orang yang zalim"* (Q., 2: 124).

Dalam ayat di atas seolah-olah Nabi Ibrahim menuntut, kalau dirinya menjadi imam umat manusia, maka keturunannya pun demikian. Allah menjawab, "*Janji-Ku tak berlaku bagi orang yang zalim, meskipun anakmu sendiri.*" Banyak sekali ayat Al-Quran yang memiliki semangat seperti itu. Nabi Muhammad bersabda dengan nada mengancam, "*Barangsiapa mati untuk klannya, sukunya, dan keluarganya, dengan cara yang zalim. Maka dia mati dalam keadaan Jahiliah.*"

Seluruh hidup Nabi memang untuk memberantas tribalisme, yaitu paham yang membanggakan keturunan, seolah-olah yang mempunyai kebaikan hanyalah mereka yang mempunyai darah biru. Dalam Al-Quran tidak ada paham seperti itu. Semua tergantung takwa,

yang nanti di akhirat kita pertanggungjawabkan kepada Allah secara pribadi mutlak. Kalau nanti kita menghadap Allah dalam pengadilan Ilahi di akhirat, seolah-olah kita disambut dengan sebuah spanduk yang berbunyi, *Kamu mendatangi Kami seorang diri seperti pertama kali Kami menciptakan kamu; dan segala yang Kami karuniakan kepadamu kamu tinggalkan di belakangmu. Kami tidak melihat bersamamu para perantaramu yang kamu anggap sekutu-sekutumu. Sekarang (semua hubungan) antara kamu sudah terputus dan yang dulu kamu angan-angankan sudah hilang meninggalkan kamu* (Q., 6: 94).

Maka, salah satu hak asasi manusia ialah kebebasan nurani dan hak untuk ikut menentukan proses-proses yang memengaruhi hidup dirinya dan hidup orang banyak. Itulah yang disebut dalam bahasa modern sebagai demokrasi atau demokrasi partisipatoris. Sayangnya, kata Robert N. Bellah, demokrasi yang telah dilaksanakan Nabi dan para *Al-Khulafâ' Al-Râsyidûn*, karena terlalu modern pada masanya, maka berhenti setelah berumur 30 tahun.



DEMOKRASI PROSEDURAL

Pancaran pola hidup yang dilandasi ilmu pengetahuan dan teknologi ialah kehidupan demokrasi prosedural. Sementara keberhasilan menciptakan prosedur yang terbuka dan mampu memperbaiki dirinya

sendiri itu merupakan suatu prestasi atau capaian (*achievement*) umat manusia yang sama sekali tidak dapat diremehkan, namun tidak dapat diingkari bahwa

dalam banyak hal, demokrasi tanpa tujuan intrinsik kemanusiaan itu berkembang menjadi prosedur kosong (*empty procedure*). Sebab prosedur, teknik, atau piranti telah menjadi “baik” dalam dirinya sendiri, tidak soal apa yang menjadi tujuannya.

Demokrasi prosedural yang kosong ini terbukti dari suatu cara pandang dan pelaksanaan kebebasan asasi, yaitu kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat. Dapat dikatakan bahwa segala macam bentuk iktikad baik telah mendorong para pemikir untuk memperjuangkan dan merumuskan perlunya kebebasan asasi dilindungi dan dijalankan. Pikiran-pikiran di balik *Bill of Rights* dan

amandemen-amandemen yang relevan dengan sejarah demokrasi di Amerika Serikat jelas merupakan puncak-puncak kemajuan manusia di bidang sosial politik. Tetapi ketika prinsip-prinsip itu diwujudkan dalam praktik nyata, ternyata dapat menimbulkan gejala anomali, ganjil, dan menyimpang dari akal sehat. Misalnya saja, kebebasan pers yang mencakup pula kebebasan pornografi, serta kebebasan berkumpul dan berserikat yang menjadi landasan pembenaran bagi klaim-klaim legal-formal kaum homoseksual.

Kebebasan itu sendiri memang tidak menjadi masalah, dan tetap merupakan nilai yang harus dipertahankan. Tetapi apa tujuan kemanusiaan intrinsik bagi pelaksanaan kebebasan itu, demokrasi Barat umumnya malu-malu untuk menjawab. Sebab setiap percobaan menjawabnya akan menyangkut masalah metafisikal, jika bukan transendental, sehingga tentu akan mendorong orang untuk berpaling kepada agama dan melihat apa yang diajarkan olehnya. Padahal demokrasi Barat dan zaman modern pada umumnya dimulai dengan sikap menolak agama, karena berbagai pengalaman traumatis kezaliman pemimpin agama di masa lampau.

Jika zaman modern—seperti umumnya para ahli sejarah mengatakan—dimulai oleh revolusi in-

dustri di Inggris dan revolusi sosial politik di Prancis, maka teknikalisme Inggris yang digabung dengan antiklerikalisme dan paham keawaman (*laicisme*) Prancis telah mengakibatkan modernitas yang dihasilkannya menjadi sangat lahiriah dan anti-ruhani. Trauma-trauma keagamaan di masa lampau telah mendorong bangsa-bangsa Barat untuk mencari jalan keluar, dan mereka temukan dalam konsep-konsep sekularisme dan liberalisme. Tetapi, sekularisme dan liberalisme itu—di mata para pengkritiknya dari kalangan para pemikir Barat sendiri—hanya mengandung muatan utama “kebaikan negatif” (*negative good*), seperti menyingkirkan sikap-sikap fanatik dan membendung eksklusivisme keagamaan dengan klaim-klaim kebenaran mutlaknya yang menjadi sumber sikap-sikap tidak toleran. Sekali lagi, hasil ini pun tidak harus diremehkan, namun jelas tidak memadai bagi persoalan kemanusiaan yang berdimensi universal dan berlaku jangka panjang.

Karena latar belakang kesejarahan itu, maka demokrasi di Barat menjadi *shy away* dari usaha mencari jawaban atas dilema-dilemanya dari sumber-sumber metafisik, apalagi iman keagamaan. Dalam pluralisme demokrasi Barat, ide-ide yang menjadi keabsahan tatanan itu sendiri, termasuk “toleransi”, “kebebasan”, dan “kom-

promi” (“*democracy is partial functioning of ideas*”) dan lain sebagainya, disisihkan dari wacana umum, lebih-lebih jika ide-ide itu ternyata hanya dapat diterangkan dari sudut pandang keagamaan atau diartikulasikan melalui persyaratan-persyaratan keagamaan. Orang tidak akan dapat bertanya tentang makna sebenarnya keadilan, atau dasar metafisis atau keimanan bagi hak-hak asasi manusia, karena pluralisme tidak membenarkan pendekatan hanya dari sudut satu agama, misalnya. Pluralisme atau paham kemajemukan seperti itu tidaklah sejati, karena ia mengukuhkan kemustahilan pelibatan banyak orang dengan titik tolak perbedaan. Dengan perkataan lain, pluralisme serupa itu hanya berhasil untuk menerima perbedaan sebagai kenyataan, namun gagal untuk menghargai perbedaan sebagai sumber dinamika kreativitas, bahkan pencerahan, masyarakat.

Pluralisme semacam itu hanya mengatakan bahwa kita memang “banyak”, tetapi lebih pada pengertian bahwa kita terpecah-pecah, tidak ada pengertian bahwa keanekaragaman harus dipangku dalam ikatan kewargaan (*bonds of civility*) yang penuh sikap saling penghargaan dan harapan baik, satu dengan lainnya. Jika teokrasi atau kekuasaan oleh pemangku wewenang keagamaan (yang bercirikan klaim kemutlakan) di Barat (dan di

mana saja, sebenarnya) telah terbukti membawa bencana akibat semakin mengerasnya absolutisme kekuasaan itu, maka sikap menghindari pertimbangan keagamaan dalam masalah sosial politik adalah sepenuhnya dapat dibenarkan dan diterima (dalam konteks itu). Tetapi ketika pengalaman traumatis itu membuntu sama sekali kemungkinan diperkuatnya orientasi transendental, maka yang terjadi ialah situasi *deadlock* sebagaimana diamati para pemikir Barat mutakhir.

Maka dalam tahap perkembangan kemanusiaan yang menghendaki jawaban atas kebuntuan itu, kita harus bergerak mengatasi sikap sekadar pengakuan dangkal adanya perbedaan, menuju kepada sikap saling harap dan hormat dalam ikatan kewargaan. Mencapai kesepakatan bulat tentang masalah-masalah etika dan moral barangkali mustahil bagi masyarakat manusia yang sedemikian luas, namun kita dapat saling berbagi dan setuju bersama ide-ide dasar moralitas dan etika metafisis atau transendental yang merupakan titik temu garis besar berbagai agama dan paham.



DEMOKRASI SEBAGAI CARA HIDUP

Tantangan masa depan demokrasi di negeri kita ialah bagaimana

mendorong proses-proses untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut agar terus berlangsung secara konsisten. Dengan kata lain, bagaimana melaksanakannya sehingga benar-benar menjadi pandangan hidup (*way of life*) nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah percobaan untuk mendaftarkan beberapa noktah penting pandangan hidup demokratis, berdasarkan bahan-bahan yang sedikit banyak telah berkembang, baik secara teoretis maupun praktis, di negeri-negeri yang demokrasiya cukup mapan.

Pertama, pentingnya kesadaran kemajemukan. Ini tidak saja sekadar pengakuan (pasif) akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Lebih dari itu, kesadaran kemajemukan menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Seseorang akan dapat menyesuaikan dirinya pada cara hidup demokratis jika ia mampu mendisiplin dirinya ke arah jenis persatuan dan kesatuan yang diperoleh melalui penggunaan kreatif dari dinamika dan segi-segi positif kemajemukan masyarakat. Masyarakat yang teguh berpegang pada pandangan hidup demokratis harus dengan sendirinya juga teguh memelihara dan melindungi lingkup keanekaragaman yang luas. Pandangan hidup demokratis seperti ini menuntut moral pribadi yang tinggi.

Kedua, dalam peristilahan politik kita dikenal “musyawarah” (dari bahasa Arab, *musyâwarah*, dengan makna asal sekitar “saling memberi isyarat”). Keinsafan akan makna dan semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan adanya keinsafan dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi atau bahkan “kalah suara”. (Nabi Muhammad Saw., misalnya, dalam suatu musyawarah untuk menentukan strategi menghadapi serbuan kaum kafir Makkah mengalami kekalahan suara, dan beliau dengan tulus serta teguh menerima keputusan orang banyak dan dalam proses pelaksanaannya beliau menolak “*second thought*” yang dikemukakan oleh sementara sahabat).

Semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menerima kemungkinan terjadinya “*partial functioning of ideals*”, yaitu pandangan dasar bahwa belum tentu, dan tidak harus, seluruh keinginan atau pikiran seseorang atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Korelasi prinsip itu ialah kesiediaan untuk kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu kompromi atau *ishlâh*. Korelasinya yang lain ialah seberapa jauh kita dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan meng-

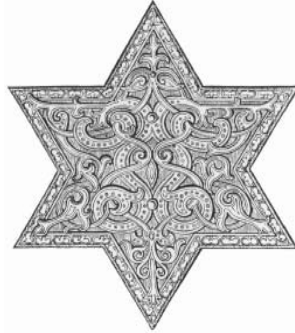
ambil pendapat yang lebih baik. Dalam masyarakat yang belum terlatih benar untuk berdemokrasi sering terjadi kejumuhan antara mengkritik yang sehat dan bertanggung jawab dan menghina yang merusak dan tanpa tanggung jawab.

Ketiga, ungkapan “tujuan menghalalkan cara” mengisyaratkan suatu kutukan kepada orang yang berusaha meraih tujuannya dengan cara-cara yang tidak peduli kepada pertimbangan moral. Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya. Seperti dikatakan Albert Camus, “*Indeed the end justifies the means. But what justifies the end? The means!*” Maka antara keduanya tidak boleh ada pertentangan. Setiap pertentangan antara cara dan tujuan, jika telah tumbuh menggejala cukup luas, pasti akan mengundang reaksi-reaksi yang dapat menghancurkan demokrasi. Maka demokrasi tidak terbayang tanpa akhlak yang tinggi.

Contoh akhlak seperti itu ialah sikap kesatria Sultan Saladin—Shalahuddin Al-Ayyubi—yang melindungi prajurit dari kalangan musuh, tentara Salib, yang kesasar ke kemahnya dalam keadaan luka parah kemudian diobatinya (dengan merahasiakan rapat-rapat

siapa sebenarnya dirinya sebagai komandan tentara Islam) dan setelah sembuh dilepaskan dengan aman. Atau seperti sikap pengurus “Liga Anti-Pencemaran Nama”

(*Anti-Defamation League*) dari organisasi Yahudi, *B’nai Brith* di Amerika yang melindungi seorang aktivis neo-Nazi yang datang melapor setelah melalui gerakan kultusnya membunuh sekian orang tokoh Semitik di sana. Perlindungan itu diberikan atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak dengan bebas menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat—dalam konteks gerakan neo-Nazi yang anti-Yahudi itu: biarpun merugikan orang lain—karena percaya bahwa masyarakat akan “dengan bebas” pula “*to hire and fire*” suatu ide ataupun gerakan. Sikap seperti itu jelas sekali memerlukan tingkat kepercayaan diri yang ting-



gi, yang membebaskan seseorang atau kelompok dari kekhawatiran yang berlebihan dan, sebagai konsekuensinya, kecurigaan dan prasangka yang juga berlebihan.

Keempat, pemufakatan yang jujur dan sehat adalah hasil akhir musyawarah yang juga jujur dan sehat. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat guna mencapai pemufakatan yang juga jujur dan sehat pula. Pemufakatan yang dicapai melalui "engineering manipulasi atau taktik-taktik yang sesungguhnya hasil sebuah konspirasi, bukan saja merupakan pemufakatan yang curang, cacat atau sakit, malah dapat disebut sebagai pengkhianatan pada nilai dan semangat demokratik. Karena itu, faktor ketulusan dalam usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk semua merupakan hal yang sangat pokok. Faktor ketulusan itu, seperti telah disinggung, mengandung makna pembebasan diri dari *vested interest* yang sempit. Prinsip ini pun terkait dengan paham musyawarah seperti telah dikemukakan di atas. Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau kelompok yang bersangkutan mempunyai kesediaan psikologis untuk melihat kemungkinan orang lain benar dan

diri sendiri salah, dan bahwa setiap orang pada dasarnya baik berkecenderungan baik, dan beriktikad baik.

Kelima, dari sekian banyak unsur kehidupan bersama yang baik ialah terpenuhinya keperluan pokok, yaitu pangan, sandang, dan papan. Dan karena ketiga hal itu menyangkut masalah sosial dan budaya (seperti masalah mengapa kita makan nasi, bersandangkan sarung, kopiah, kebaya, serta berpapankan rumah "joglo", misalnya), maka pemenuhan segi-segi ekonomi itu tidak lepas dari perencanaan sosial-budaya. Warga masyarakat demokratis ditantang untuk mampu menganut hidup dengan pemenuhan kebutuhan secara berencana, dan harus memiliki kepastian bahwa rencana-rencana itu benar-benar sejalan dengan tujuan dan praktik demokratis yang *check list*-nya, seperti telah dikemukakan tadi, dapat kita buat berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal, namun dengan memerhatikan kenyataan kenisbian kultural.

Keenam, Kerja sama antara warga masyarakat dan sikap saling memercayai iktikad baik masing-masing, kemudian jalinan dukung-mendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi. Masyarakat yang tertokak-

kotak dengan masing-masing penuh curiga kepada lainnya bukan saja mengakibatkan tidak efisiennya cara hidup demokratis, tapi juga dapat menjurus pada lahirnya pola tingkah laku yang bertentangan dengan nilai-nilai asasi demokrasi. Pengakuan akan kebebasan nurani (*freedom of conscience*), persamaan hak dan kewajiban bagi semua (*egalitarianisme*), dan tingkah laku penuh percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain mengharuskan adanya landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimistis. Pandangan kemanusiaan yang negatif dan pesimistis akan dengan sendirinya sulit menghindari perilaku curiga dan tidak percaya kepada sesama manusia, yang kemudian ujungnya ialah keengganan bekerja sama. Berkaitan dengan perkara ini, bagi masyarakat bekas jajahan, masalah *colonial legacy* yang masih belum seluruhnya terhapus akan menjadi sumber tantangan dan kendala usaha bersama mewujudkan demokrasi.

Ketujuh, dalam keseharian, kita biasa berbicara tentang pentingnya pendidikan demokrasi. Tapi karena pengalaman kita yang belum pernah dengan sungguh-sungguh menyaksikan atau apalagi merasakan hidup berdemokrasi—ditambah kenyataan bahwa “demokrasi” dalam abad ini yang dimaksud adalah demokrasi modern—maka bayangan kita tentang “pendidikan demo-

krasi” umumnya masih terbatas pada usaha indoktrinasi dan penyuaian konsep-konsep secara verbalistik. Kejengkelan yang sering terdengar dalam masyarakat tentang adanya kesenjangan antara apa yang dikatakan (ada yang rajin mengajari kita “jangan biarkan kolusi penguasa-pengusaha”, tapi yang bersangkutan sendiri justru menjadi contoh mencolok kolusi itu) ialah akibat dari kuatnya budaya “menggurui” (secara feodalistik) dalam masyarakat kita, sehingga verbalisme yang dihasilkannya juga menghasilkan kepuasan tersendiri dan membuat yang bersangkutan merasa telah berbuat sesuatu hanya karena telah berbicara.



DEMOKRASI SEBAGAI “CARA” (BUKAN “TUJUAN”)

Persis seperti yang pernah dikatakan oleh salah seorang pemimpin kita bahwa keterbukaan adalah suatu “cara”, bukan “tujuan”, demokrasi pun harus kita pandang sebagai “cara” mencapai tujuan, dan bukan tujuan itu sendiri. Maka logikanya ialah bahwa suatu bentuk demokrasi tidak dapat diterapkan begitu saja secara kaku dan “dogmatis”, jika diperkirakan justru merusak atau mengganggu hasil-hasil positif perkembangan negara yang

telah dicapai. Adalah *absurd* untuk melakukan hal demikian.

Karena yang esensial adalah proses, maka beberapa ahli, seperti Willy Eichler, berpendapat bahwa demokrasi bukanlah suatu nilai statis yang terletak di suatu tempat di depan kita, lalu kita bergerak menuju ke sana untuk mencapainya. Bagi Eichler demokrasi adalah suatu nilai dinamis, karena nilai esensialnya adalah proses ke arah yang lebih maju dan lebih baik dibanding dengan yang sedang dialami oleh suatu masyarakat atau negara. Jadi Eichler melihat bahwa demokrasi adalah identik dengan demokratisasi. Yang penting adalah bahwa dalam suatu masyarakat atau negara terdapat proses terus-menerus, secara dinamis, dalam gerak perkembangan dan pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Cukuplah suatu masyarakat disebut demokratis selama ia bergerak tanpa berhenti menuju kepada yang lebih baik itu.

Maka, dari sudut penglihatan Eichler, negeri kita ini harus dipandang sebagai sebuah negeri demokratis, karena tetap dan terus bergerak menuju kepada keadaan yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Sebaliknya, negeri seperti Republik Afrika Selatan, sekalipun memiliki sistem politik parlementer yang liberal, namun karena dalam nilai yang jauh lebih fundamental, yaitu pengakuan akan persamaan hakiki

umat manusia, negara itu tidak pernah bergerak satu inci pun dari ideologi rasialisme dan apartheidnya yang telah dianut berabad-abad, maka ia sama sekali bukanlah negara demokratis. Bahkan banyak alasan untuk menyebutnya sebagai negara tanpa perikemanusiaan menurut ukuran nilai-nilai Pancasila kita dan menurut nilai kemanusiaan mana pun juga.

Karena pengertian demokrasi sebagai cara dan proses itu, maka tidaklah mengherankan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi sangat beragam dari satu negara ke negara lainnya, misalnya, jika kita melihat negara-negara dengan sistem demokrasinya yang paling mantap dan mapan pada sekarang ini, maka—berbeda dengan kesan sepintas kebanyakan orang—kita dapati kebanyakan justru berbentuk kerajaan, yaitu Inggris Raya, Belanda, Belgia, Norwegia, Swedia, Denmark, Luxembourg; ditambah dengan Kanada, Australia, dan Selandia Baru yang mengakui Mahkota Inggris Raya sebagai kepala negara masing-masing. Beberapa negara berbentuk republik dalam jangka waktu lama memang sangat stabil, seperti Swiss, Irlandia, dan Amerika Serikat.

Tetapi republik-republik demokratis lainnya pernah (beberapa waktu yang lalu) mengalami kegoncangan dalam tingkat tertentu,

seperti Prancis, Jerman Barat, dan Itali. Sedangkan Jepang dan India merupakan negeri-negeri demokratis yang mapan setelah Perang Dunia II. Jepang mempunyai segi keunikan karena sejauh ini merupakan satu-satunya negara non-Barat yang demokratis sekaligus maju industrinya. Dan India pun unik, karena biarpun negeri ini demokratis, namun dari segi perkembangan ekonominya tergolong yang paling miskin di dunia.

Berdasarkan kenyataan itu, maka sangat dibenarkan jika kita bangsa Indonesia juga mempunyai sistem demokrasi yang lebih sesuai dengan keadaan kita. Merupakan suatu hal yang masuk akal bahwa demokrasi Indonesia adalah penerapan ide-ide demokrasi sejagat (universal) menurut kondisi Indonesia dan tingkat perkembangannya.

Meskipun begitu, kiranya perlu disadari bahwa demokrasi sebagai “cara” atau “jalan” akan menentukan kualitas tujuan yang dicapai oleh suatu masyarakat. Suatu tujuan yang dicapai secara demokratis akan memiliki kualitas keabsahan yang lebih tinggi daripada yang dicapai secara tidak demokratis. Apalagi, seperti dikatakan Albert Camus, tidak boleh ada pertentangan antara cara dan tujuan. Jika tujuan membenarkan cara yang digunakan, maka cara yang digunakan itu sendiri ikut mem-

benarkan tujuan yang dicapai. Inilah salah satu sendi pandangan hidup demokratis. “Pandangan hidup demokratis bertumpu dengan teguh di atas asumsi bahwa cara harus bersesuaian dengan tujuan. Ketentuan inilah, jika dipraktikkan, yang akan memancarkan tingkah laku demokratis dan membentuk moralitas demokratis.”

Atau seperti didendangkan oleh Ferdinand La Salle:

“Janganlah kami ditunjukkan hanya tujuan, tanpa cara.

Sebab tujuan dan cara di dunia ini sedemikian terjalin (erat).

Mengubah salah satu akan berarti mengubah satunya lagi juga.

Setiap cara yang berbeda akan menampakkan tujuan yang lain.”

Dalam Pancasila, prinsip demokrasi itu terungkap dalam sila keempat. Pancasila dapat dilihat terdiri dari sila pertama sebagai sila dasar, sila kedua sebagai pancaran sila pertama, sila ketiga sebagai wahana, sila keempat sebagai cara, dan sila kelima sebagai tujuan. Namun, kita diajari—dan memang benar—untuk memandang seluruh sila itu sebagai kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka berarti bahwa antara “cara” dan “tujuan” pun tidak bisa dipisah-pisahkan satu dari yang lain.



DEMOKRASI SEBAGAI KATEGORI DINAMIS

Demokrasi adalah suatu kategori yang dinamis. Ia senantiasa bergerak atau berubah, kadang-kadang negatif (mundur), kadang-kadang positif (berkembang maju). Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh Willy Eichler (Ideolog Partai Sosial Demokrat Jerman—SPD), demokrasi akhirnya menjadi sama dengan proses demokratisasi. Karena itu, suatu negara dapat disebut demokratis jika padanya terdapat proses-proses perkembangan menuju ke arah keadaan yang lebih baik dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan asasi dan dalam memberi hak kepada masyarakat, baik individu maupun sosial, untuk mewujudkan nilai-nilai itu. “*Check lists*” yang dapat digunakan untuk mengukur maju-mundurnya demokrasi ialah sekitar seberapa jauh bertambah atau berkurangnya kebebasan asasi, seperti kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Masing-masing dari ketiga pokok itu dapat dirinci lebih lanjut dalam kaitannya dengan berbagai bidang kehidupan perorangan dan kemasyarakatan, seperti politik, ekonomi, kebudayaan, akademik (ilmiah), hukum (legal), dan seterusnya.

Sudut pandang demokrasi sebagai kategori dinamis memung-

kinkan terjadinya hal yang dapat disebut ironis, seperti jika sebuah negara yang kini disebut (paling) demokratis—katakanlah Amerika Serikat—justru akan dinilai tidak lagi demokratis jika ia menunjukkan gejala “kemandekan” dengan menghambat laju tuntutan dan pelaksanaan kebebasan-kebebasan asasi dari para warganya. Apalagi jika pada kategori pengujian kedemokrasian negara itu dimasukkan pula unsur seberapa jauh terlaksana dengan nyata prinsip kesamaan umat manusia, maka Amerika dan lain-lain negara Barat menjadi kurang demokratis dibandingkan dengan banyak negara “Dunia Ketiga”. Sebab di negara-negara Barat itu masih banyak tampak paham warna kulit atau rasialisme dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, dapat disebut bahwa suatu negara berkembang pun, dalam perspektif Eichler, mungkin harus dipandang sebagai “lebih demokratis” jika padanya terjadi proses-proses perkembangan kemajuan sejati dalam mewujudkan dan melaksanakan kebebasan asasi, seperti kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Maka yang amat perlu diperhatikan dalam perspektif tentang demokrasi seperti itu ialah adanya pesan tentang pentingnya proses perkembangan, dan bahayanya kemandek-

an. Masyarakat demokratis cenderung ribut, tapi keributan dinilai pasti lebih baik daripada ketenangan karena kemandekan.

Jika persoalan itu kita bawa ke negeri kita, maka kita harus melihat ada-tidaknya proses-proses menuju pada pelaksanaan *check lists* demokrasi tersebut.

Berdasarkan itu barangkali, dalam penglihatan Eichler, Indonesia harus digolongkan sebagai “negara demokrasi”. Dengan mengatakan negara kita demokratis maka

kita menyisihkan ruang dan hak keabsahan bagi diri kita untuk betul-betul berpikir dan berperilaku demokratis dan untuk menuntut dari semua orang agar berbuat serupa, khususnya dari mereka yang tergolong “penentu kecenderungan” (*trend makers*) dengan kekuasaan yang efektif.



DEMOKRASI SEBAGAI PRINSIP DAN ATURAN PERMAINAN

Sekalipun Islam bukanlah suatu ideologi sosial-politik, tetapi ia bisa, malah terus, menjadi sumber ideo-

logi tertentu bagi para pemeluknya. Dengan kata lain, atas dasar pertimbangan ajaran agamanya itulah seorang Muslim memilih suatu ideologi. Penulis rasa ini adalah wajar dan sudah semestinya. Dan hal ini sudah tentu berlaku tidak hanya bagi pemeluk-pemeluk Islam, tetapi

juga pemeluk-pemeluk agama lain, meskipun terdapat perbedaan-perbedaan penting dalam berbagai hal khusus agama-agama itu. Tanpa sikap demikian, seorang pemeluk berarti telah

mengalami kepribadian yang pecah.

Maka seseorang atau sekelompok Muslim menetapkan untuk memilih suatu ideologi karena ia mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bahwa ideologi itu didukung oleh keyakinan dan ajaran agamanya. Tetapi, ia harus selalu waspada untuk tidak menganggap ideologi pilihannya tersebut sebagai Islam itu sendiri. Sebab kita sudah mengetahui bahwa suatu ideologi terbentuk dengan sangat terpengaruh oleh keadaan ruang dan waktu. Dan memandang suatu ideologi tersebut, betapapun cermatnya ia dipertimbangkan, sebagai sama dengan agama itu sendiri, akan berarti menisbikan agama.

Bertitik tolak dari pandangan dasar ini, maka dapat diduga kemungkinan adanya perbedaan dalam ideologi politik di antara berbagai individu atau kelompok Muslim. Dan hal ini tidaklah perlu menimbulkan kekhawatiran, sebab sampai batas-batas tertentu yang cukup luas memang diizinkan oleh agama. Kita ingat sabda Nabi bahwa perbedaan di antara umat adalah rahmat. Tetapi pada waktu yang sama juga sudah tentu dibenarkan adanya harapan bahwa di antara ideologi-ideologi kalangan Muslim itu terdapat titik-titik persamaan. Tanpa hal terakhir ini, maka berarti bahwa ajaran-ajaran Islam bagi suatu kelompok atau lainnya dari kalangan Muslim itu tidak mempunyai makna apa-apa, dan karenanya terdapat kemungkinan adanya semacam disorientasi. Sebab, sekalipun terdapat ruang untuk memilih suatu ideologi yang relevan untuk seseorang atau sekelompok Muslim sesuai dengan kaitan ruang dan waktu—dan penulis rasa inilah salah satu implikasi prinsip ijtihad—namun jelas bahwa seorang Muslim tidak dibenarkan memilih suatu ideologi yang terang-terangan bertentangan dengan jiwa Islam, misalnya sistem yang mendukung kezaliman. Keabsahan ideologi itu diperoleh hanya jika penganutnya mampu membuktikan bahwa ia bisa mendapat dukungan prinsip-prinsip ajaran agamanya.

Dengan cara di atas itulah kita dapat mengerti mengapa senantiasa ada kemungkinan berbagai kelompok kaum Muslim menganut ideologi sosial-politik yang berbeda-beda. Di Indonesia ini misalnya, Masyumi, khususnya partai itu sebelum 1955 (pemilu pertama), dikenal sebagai partai politik yang gigih menganut ideologi demokrasi. Partai-partai Islam lain pun juga menyatakan sebagai penganut demokrasi. Tetapi Masyumi mempunyai kelebihan atas partai-partai Islam tersebut, karena tokoh-tokohnya sanggup mengartikulasikan ide-ide demokrasi dengan cara yang sangat baik. Lebih dari itu, Masyumi, berkat pendidikan para anggota pucuk pimpinannya (yakni pendidikan modern [Belanda]), maka artikulasi ide-idenya begitu rupa sehingga memberi kesan kuat bahwa partai itu, lewat pucuk pimpinannya, secara langsung menganut ide demokrasi Barat yang liberal. Kesan itu tecermin, misalnya, pada tuduhan kepada partai itu oleh lawan-lawannya, seperti Bung Karno dan PKI, bahwa ia adalah “kampion liberalisme” di Indonesia. Karena orientasi itu, maka tidak mengherankan, malah sepenuhnya bisa dibenarkan, bahwa Masyumi mendapatkan dirinya berada pada pandangan ideologi yang hampir sama, kalau tidak sama benar, dengan partai-partai lain yang bukan

Islam, tetapi pemimpin mempunyai latar belakang latihan dan pendidikan yang sama dengan tokoh-tokoh Masyumi, yaitu Partai Sosialis, Partai Kristen, dan Partai Katolik. Dengan para tokoh partai-partai bukan Islam inilah, ditambah unsur-unsur perorangan partai-partai lainnya, Masyumi pernah menggalang semacam front bersama menghadapi kecenderungan anti-demokrasi Bung Karno dengan mendirikan Liga Demokrasi. Selain komitmennya kepada demokrasi yang cukup menarik itu, pengalaman Masyumi menunjukkan satu bukti di tanah air sendiri dalam sejarah yang tidak terlalu jauh, bahwa selalu terdapat kemungkinan suatu kelompok Muslim menganut ideologi sosial-politik modern yang inklusif sifatnya, dan yang karenanya memungkinkan tumbuhnya keserasian plural, suatu bentuk tatanan yang menjadi tuntutan situasi Indonesia. Di sini, kita tidak membicarakan citra Masyumi setelah pemilu 1955, khususnya karena peranannya dalam konstituante. Juga tidak kita bicarakan alienasi Masyumi dari partai-partai Islam lainnya—NU, PSII, dan Perti—yang mengucilkan Masyumi dan membentuk Liga Muslim. Tidak pula kita bicarakan keterlibatan beberapa tokoh Masyumi dalam pergolakan kedaerahan yang sangat membahayakan Republik.

Tahap perkembangan Indonesia sekarang, meski secara politik masih dianggap sedikit bermasalah, merupakan titik penting untuk Indonesia mendatang. Tahap ini disebut titik penting karena pada saat inilah kita sebagai warga negara, baru pertama kalinya diikutsertakan untuk merumuskan pencarian format politik bangsa ini. Tentu saja kita memilih demokrasi sebagai ideologi politik. Dan kita memilih demokrasi sebagai ideologi tidak hanya karena pertimbangan prinsipil—yaitu karena nilai-nilai demokrasi itu menurut kita dibenarkan dan didukung oleh semangat ajaran-ajaran Islam—tetapi juga karena fungsinya sebagai aturan permainan politik yang terbuka. Aturan permainan terbuka itu kita perlukan agar dalam sistem politik terwujud secara *built-in* suatu mekanisme untuk sewaktu-waktu mengadakan koreksi atas kesalahan-kesalahan pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan ditinjau dari sudut kepentingan rakyat dan ketentuan-ketentuan konstitusional. Sebab, sekalipun kita telah menyatakan akan dengan sepenuh hati berpegang pada filsafat kenegaraan dan konstitusi kita, namun kita juga menyadari bahwa pegangan-pegangan itu berada dalam rumusan-rumusan garis besar. Rumusan-rumusan itu, tanpa perincian segi-segi pelaksanaannya, akan tidak

mempunyai makna apa-apa. Dan pembuatan perincian segi pelaksanaan itu akan menyangkut berbagai kelompok paham dan kepentingan dalam kemajemukan masyarakat, serta akan terkait erat dengan pertimbangan kenyataan sehari-hari. Karena itu ia akan berkembang secara dinamis, dan karenanya pula memerlukan pengawasan yang lestari dengan mengikutsertakan semua warga negara dalam keterbukaannya sistem demokrasi. Maka dengan sendirinya bergandengan dengan demokrasi itu adalah prinsip pluralisme sosial.

Ada sebuah argumentasi bahwa salah satu inti kemanusiaan ialah perkembangan. Hal ini membuat tidak adanya penyelesaian sekali untuk selamanya bagi masalah-masalah kemanusiaan. Demikian pula halnya dengan demokrasi, sebab demokrasi adalah kemanusiaan. Karena itu, sebaiknya kita tidak memahami demokrasi sebagai sesuatu yang statis, yang terletak seolah-olah pada suatu tempat di depan kita dan kita menuju kepadanya. Demokrasi lebih baik kita pahami sebagai sesuatu yang dinamis, yang menyatu pada masyarakat dalam bentuk proses-proses progresif mengikuti suatu garis kontinum. Jadi, antara keadaan masyarakat kita sekarang ini (*das Sein*) dan keadaan demokratis yang kita kehendaki (*das Sollen*) tidak

bisa kita ukur jarak ruang atau waktunya. Kita akan mengatakan suatu masyarakat tidak demokratis jika tidak ada *proses demokratisasi*. Sebaliknya, cukuplah suatu masyarakat disebut demokratis, jika di dalamnya terdapat proses demokratisasi yang lestari dan konsisten. Dan proses itu bisa diukur atau diketahui dalam beberapa "*check list*", terutama bagaimana kita mengembangkan nilai-nilai yang merupakan implikasi masyarakat demokratis seperti hak-hak asasi manusia, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, tertib dan keadilan hukum, perwujudan dan kesempatan yang merata, dan seterusnya. Karena itu demokrasi merupakan hasil perkembangan masyarakat yang bertahap. Tetapi percepatan proses demokratisasi juga sangat tergantung kepada kemauan dan keputusan politik pimpinan negara dan kaum terpelajar masyarakat. India, misalnya, bisa disebutkan sebagai contoh negara dengan proses demokratisasi yang dipercepat oleh kemauan dan keputusan politik pihak pimpinan. Sebagai satu negara yang sering disebut sebagai demokrasi terbesar di dunia, India melaksanakan suatu sistem politik yang relatif sangat maju dan terbuka, dan kemajuan serta keterbukaan sistem politiknya seakan-akan mengingkari kenyataan bahwa masyarakat India masih

sangat terbelakang. Ini menunjukkan kemungkinannya bagi suatu negara (berkembang, seperti Indonesia) untuk memiliki serta mengembangkan komitmen yang kuat kepada demokrasi dan melaksanakannya dalam pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan politik. Permasalahannya ialah, bagaimana mewujudkan lapisan pemimpin dengan kesadaran tinggi itu dan, lebih penting lagi, bagaimana memilih mereka menjadi pelaksana-pelaksana pemerintahan.



DEMOKRASI TERPIMPIN

Keadaan serba-tidak menentu dari sistem parlementer mendorong Bung Karno, Presiden (konstitusional) saat itu, mengumumkan dekrit kembali ke UUD '45 pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit itu disusul dengan pidato kenegaraan 17 Agustus 1959 berjudul "Menemukan Kembali Revolusi Kita", yang populer dengan terjemah Inggrisnya, *"Rediscovery of Our Revolution"*. Bagi Bung Karno, yang dimaksudkan "menemukan kembali revolusi kita" dapat diringkaskan berupa pemerintahan yang kembali ke sistem presidensial dari sistem parlementer. Sejak itu presiden, dalam hal ini Bung Karno, bukan lagi sekadar lambang negara, melainkan kepala pemerintahan.

Sistem presidensial diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang kuat, stabil, dan berwibawa. Dengan begitu, pembangunan nasional dapat dijalankan dengan mantap, seperti halnya Amerika yang berhasil menjadi negara industri modern pertama di dunia berkat kestabilan sistem presidensial.

Tetapi Bung Karno agaknya menyalahpahami dan mencampuradukan pengertian "pemerintahan yang kuat" dengan "kepemimpinan yang kuat". "Pemerintahan" lebih mengacu kepada sistem, sedangkan "kepemimpinan" mengacu kepada perorangan. Karena pandangannya itu, Bung Karno mengubah sistem presidensial periodik lima tahunan menjadi sistem kepresidenan seumur hidup. Kemudian Bung Karno tidak lagi memandang dirinya cukup sebagai kepala pemerintahan atau ketua badan eksekutif negara, melainkan sebagai "pemimpin besar revolusi". Pemerintahan presidensial periodik yang seharusnya dilaksanakan dengan mencontoh dan mengembangkan sistem serupa yang sudah mapan di dunia, ia ubah menjadi "demokrasi terpimpin". Beberapa partai politik yang dipersatukan oleh *platform* demokrasi modern adalah Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Parkindo dan Partai Katolik, didukung beberapa pribadi tokoh

kalangan NU dan PNI, dan dengan restu Bung Hatta, membentuk gerakan “Liga Demokrasi” guna menggalang kekuatan politik untuk mencegah dan menghalangi Bung Karno meluncur ke lembah kediktatoran. Sebab, rakyat mulai merasa kehilangan kebebasan sipilnya dan ekonominya merosot sampai hampir membankrutkan Negara. Politik *grandiose* Bung Karno dengan, misalnya, ambisinya hendak mengganti PBB, Olimpiade, dan lain-lain, ikut memperburuk keadaan ekonomi bangsa hingga terasa tidak tertahankan lagi oleh rakyat. Dalam keadaan seperti itulah Bung Karno pada tahun 1965 jatuh *in disgrace* lepas dari persoalan siapa sebenarnya yang berperan dalam proses penjatuhan itu, adil ataupun tidak adil. Sistemnya yang kemudian disebut “Orde Lama” harus memberi jalan kepada sistem lain yang disebut “Orde Baru”.

Jatuhnya Bung Karno *in disgrace* banyak diratapi tidak saja oleh bangsa Indonesia sendiri, tetapi juga oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia, khususnya “Dunia Ketiga”. Sebab Bung Karno adalah

bapak sebenarnya Republik Indonesia merdeka, dan pejuang besar untuk membebaskan bangsa-bangsa terjajah. Namun, tanpa sedikitpun mengurangi penghargaan kepada putra terbesar bangsa Indonesia itu, kita harus menarik pelajaran dari kelemahan manusiawi

Bung Karno untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kepada Allah Swt. kita panjatkan sebaik-baik harapan dan doa untuk Bung Karno, bapak kita semua.



DEMOKRASI YANG SEHAT

Pada prinsipnya, dalam demokrasi yang sehat diperlukan *check and balance*, yakni ada kekuatan pemantau dan pengimbang. Sebab dari pandangan yang agak filosofis, manusia itu tidak mungkin selalu benar, sehingga harus ada cara untuk saling mengingatkan, apa yang tidak baik dan tidak benar. Selanjutnya, kita menghargai sikap seseorang dengan komitmennya. Misalnya, seseorang menyatakan, “saya hendak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni.” Dalam melaksanakannya, pasti belum tentu dia benar. Karena

itu, tanpa mengurangi iktikad baiknya, dalam masyarakat harus ada semacam mekanisme untuk tukar pikiran. Atau, dalam bentuk yang lebih canggih, adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan akademik, kebebasan pers, dan sebagainya.

Bagaimana caranya? Gambarnya adalah, *to check*, yaitu membuktikan apa tindakan-tindakannya yang sudah memasyarakat merupakan cerminan dari itikadnya. Nah, orang dengan sendirinya berhak untuk mengakui bahwa dia masih tetap setia kepada cita-citanya. Tapi, masyarakat juga berhak membuktikan. Jadi di sini, kita bukan berbicara tentang iktikad, bukan berbicara tentang komitmen batin, tapi berbicara tentang wujud sosial komitmen batin itu. Masalahnya, komitmennya tadi menyangkut masyarakat luas atau orang lain. Karena itu, masyarakat berhak mengecek; “Ini benar nggak?” Kalau merasa itu kurang benar atau tidak benar, maka harus diimbangi dengan pikiran lain.



DEMOKRATISASI DAN HAMBATAN KEKUASAAN

Apakah benar di negeri kita sedang terjadi proses demokratisasi? Jawabnya jelas positif. Hal itu antara lain sebagai kelanjutan gelombang politik yang kini boleh dikata ber-

dimensi global, yaitu kecenderungan ke arah sistem politik yang lebih terbuka. Bagi negeri kita, sama dengan negeri-negeri dengan pola pembangunan dan tingkat perkembangan yang kurang lebih serupa, proses demokratisasi itu juga merupakan akibat logis pemerataan relatif kecerdasan umum lewat sistem-sistem pendidikan yang tersedia untuk sebagian besar warga, dan kemudahan serta keterpenuhan nisbi keperluan hidup pokok lewat keberhasilan pembangunan ekonomi. Dan negara-negara Asia Timur (atau Lembah Pasifik Barat), kecuali Singapura, mengikuti suatu hukum umum bahwa tingkat kecerdasan tertentu dan kemudahan ekonomi tertentu rakyat banyak melahirkan perkembangan kualitatif sosial-politik warga negara dalam bentuk tuntutan partisipasi yang lebih besar dan ruang kebebasan yang semakin lebar. Dari sudut pandang ini, tindakan menghalangi proses-proses demokratisasi yang wajar akan dapat berarti pengingkaran atau pembendungan akibat logis pembangunan yang berhasil itu sendiri, sehingga tindakan itu menjadi setara penentangan hukum alam sosial. Oleh karena itu, krisis yang diakibatkan tindakan itu dapat bersifat fatal dan berkemungkinan membatalkan hasil pembangunan itu atau mendorongnya ke belakang, ke garis kemunduran.

Karena itu, sekalipun tendensi ke arah demokratisasi merupakan sesuatu yang objektif dan alamiah—dan ide tentang demokrasi serta demokratisasi menggaung secara global—sama sekali tidak berarti bahwa hal itu pasti berlangsung terus secara konsisten menurut garis logikanya sendiri. Tendensi dan proses itu dapat dicegat, ditanggihkan, bahkan dibatalkan oleh suatu kecenderungan otokritik kalangan tertentu para pemegang kekuasaan. Gagasan-gagasan sederhana bahwa warga negara atau rakyat harus didengar suaranya dalam proses-proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka, bahwa rakyat punya hak untuk tidak diperlakukan secara tidak adil, bahwa pemerintah harus merespons hajat rakyatnya, dan seterusnya, mungkin merupakan hal-hal yang mudah mendapat kesepakatan verbal, tapi acapkali dalam pelaksanaan konkretnya menuntut “perjuangan” pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya rakyat sendiri. Karena gagasan-gagasan itu semua termasuk kategori perangkat lunak (bukan perangkat keras seperti prasarana fisik), maka argumentasi dan advokasinya pun bersifat lunak pula—seperti diisyaratkan oleh pepatah kita, “lidah tak bertulang”—dengan kemungkinan setiap orang merasa, mengaku bahkan meyakini sebagai mempunyai gagasan yang sama dan sudah pula

melaksanakannya. Karena itu, misalnya, jika tuntutan demokratisasi dilantangkan dengan sasaran terhadap kalangan para penguasa, hampir tidak ada dari kalangan itu yang begitu saja melayani dan memberi respons positif, dengan dalih bahwa yang selama ini telah mereka lakukan sudah merupakan demokrasi dan bahwa sistem mereka adalah sistem yang demokratis (sekalipun mereka sendiri memberi kualifikasi demokrasi macam mana). Akibatnya ialah, pengalaman-pengalaman empirik berbagai bangsa, termasuk bangsa Indonesia, menunjukkan bahwa proses demokratisasi yang berhasil senantiasa dibarengi dengan fase-fase krisis tertentu di bidang kekuasaan. Dalam hal ini, proses krisis itu bersifat konstitusional atau tidak, lancar atau terhambat, lunak atau keras, damai atau berdarah, semuanya hanyalah bentuk-bentuk krisis yang bervariasi dari yang semestinya dikehendaki, karena dari yang ideal sampai pada yang semestinya dihindari sebagai akibat dari pertimbangan “*cost and benefit*” yang berujung *neto* yang negatif.



DEMOKRATISASI MENUJU TINGGAL LANDAS

Pada tahun 1970, Howard P. Jones, Duta Besar Amerika Serikat

di Indonesia, pernah meramalkan bahwa 30 tahun ke depan, Indonesia akan menjadi bangsa nomor satu di Asia. Jika benar ramalan penuh harapan itu, maka saat kejayaan bangsa kita sebagai bangsa No. 1 di Asia itu adalah pada sekitar tahun 2000. Tanpa mengabaikan pernyataan-pernyataan lain tentang masa depan bangsa kita yang penuh kekhawatiran dan pesimistis, kita sudah tentu sangat mendambakan bahwa kenyataan itu akan menjadi kenyataan. “*Indonesia, the Possible Dream*”, (Indonesia, mimpi yang mungkin terwujud), adalah bunyi judul buku Howard P. Jones. Tetapi, apakah dambaan kita didukung oleh adanya faktor-faktor positif perkembangan negeri ini dan negeri-negeri di sekitar kita?

Dalam seminar tentang demokrasi di Taiwan pada akhir tahun 90-an, disebutkan bahwa tampilnya Asia Timur di bidang ekonomi jelas merupakan kecenderungan besar yang secara mendasar bakal mengubah perimbangan kekuatan dunia. Dan Indonesia termasuk kawasan Asia Timur itu, atau secara lebih luasnya kawasan Lembah Pasifik Barat.

Kecenderungan kedua di Asia Timur, bahkan boleh dikatakan di seluruh dunia, terjadi di bidang politik, yaitu peralihan ke arah demokrasi dalam banyak negara. Ini terjadi karena dorongan faktor-

faktor tertentu, seperti kemakmuran ekonomi (Taiwan dan Korea Selatan), kegagalan rezim totaliter (Pakistan), meningkatnya komunikasi, interaksi antara berbagai sektor masyarakat yang ikut menyebarkan ide-ide tentang demokrasi dan konsep tentang keabsahan politik. Ditambah lagi dorongan dan pengaruh negeri-negeri demokratis besar di dunia. Maka, banyak negara mengalami proses demokrasi, atau memasuki ambang pelaksanaan demokrasi yang lebih maju dan kompleks. Dan seperti dikatakan Samuel P. Huntington, direktur Center for International Affairs (CFIA), Universitas Harvard, “Demokratisasi adalah suatu proses terus-menerus, yang kini semakin tidak bisa dibalikkan lagi.”

Kondisi serupa itu juga dialami oleh negeri kita menyusul berbagai kemajuan hampir di segala bidang sebagai hasil dari pembangunan selama Orde Baru ini. Timbulnya dorongan ke arah demokrasi yang lebih maju oleh perkembangan ekonomi ini disebabkan adanya kaitan yang jelas antara demokrasi dan tingkat kemakmuran rakyat. Ini juga disebabkan semakin banyaknya jumlah kelas menengah yang memainkan peranan penting di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, profesi, dan lain-lain. Meskipun tidak sepesat perkembangan yang ada di Negara-Negara Industri Baru (NICs),

gejala kemajuan itu juga jelas menjadi ciri utama negara kita.



DENGKI MEMAKAN SEGALA KEBAIKAN

Dalam *mush-hâf* Kitab Suci Al-Quran surat kedua terakhir memuat perintah kepada Nabi Saw. agar beliau memohon kepada Tuhan dari cuaca pagi (*rabb al-falâq*) supaya dilindungi dari kejahatan seorang pendengki. Ini menunjukkan betapa gawat dan berbahaya kedengkian itu.

Memang di antara berbagai penyakit ruhani, dengki atau *hasad* adalah salah satu yang paling berbahaya untuk kehidupan manusia. Kita disebut dengki kepada seseorang jika kita tanpa alasan yang jelas, apalagi alasan yang adil—serta-merta merasa tidak senang kepada segala kelebihan atau ketupamaan yang dipunyainya. Kelebihan itu dapat bersifat kebendaan, seperti kekayaan dan harta; dapat juga tidak bersifat kebendaan, seperti kedudukan, kehormatan, atau prestise, kecakapan, dan lain-lain. Jika kita menyimpan kedengkian kepada seseorang, biasanya selain

membencinya kita juga secara diam-diam dalam hati menginginkan orang itu celaka. Dan kalau sudah begitu, besar sekali kemungkinan kita langsung atau tidak langsung berusaha mencelakakannya.

Berbarengan dengan itu, kita mungkin akan terdorong untuk

melancarkan fitnah-fitnah, yaitu berita-berita buruk yang tak benar atau palsu, tentang orang tersebut. Malangnya ialah

bahwa fitnah itu, sekali dilancarkan dengan gencar, biasanya sulit sekali dibendung, dan membuat posisi orang yang difitnah itu menjadi tak berdaya dan tak mampu membela diri. Dan sementara orang yang menjadi objek si pendengki itu tidak mengetahui, dan mustahil mengamati, tingkah-laku si pendengki. Jadi kedengkian adalah pertarungan sepihak, yaitu si pendengki menyerang sasarannya, tanpa sasaran itu mengetahui sehingga tidak berdaya untuk mengelak dan melawan. Karena itu kedengkian dan fitnah acapkali benar-benar mencelakakan atau menjatuhkan nama orang yang menjadi sasarannya itu. Maka tidak heran bahwa Allah mengajari kita semua, agar memohon perlindungan-Nya dari kejahatan pendengki.

Kami (Allah) mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki dan di atas setiap orang yang tahu ada Dia yang Mahatahu.

(Q., 12: 76)

Lebih lanjut, Nabi Saw. bersabda dalam sebuah hadis, “*Jauhilah olehmu segala kedengkian, sebab kedengkian itu memakan segala kebaikan, sama seperti api memakan kayu bakar yang kering.*” Peringatan dan penegasan Nabi Saw. itu sungguh harus kita renungkan dalam-dalam. Dari hadis itu jelas sekali bahwa jika mendengki seseorang, maka seluruh kebaikan itu habis dimakan oleh kedengkian tersebut. Keterangannya ialah demikian, “Karena di dalam rasa dengki itu dengan sendirinya tersembunyi keinginan agar orang lain celaka, maka kedengkian itu merupakan bukti yang tandas sekali bahwa sesungguhnya kita tidak memiliki iktikad baik kepada orang lain atau sesama manusia secara tulus. Dengan kata-kata lain, adanya kedengkian itu merupakan bukti amat nyata bagi kepalsuan semua perbuatan baik kita. Karena itu, seluruh perbuatan baik kita itu pun musnah, ibarat rumah kertas yang dilahap habis oleh api kedengkian kita sendiri. Sebab, apalah makna segala amal kebajikan, jika tidak dilandasi oleh iktikad kebaikan? Nabi Saw. pun menegaskan bahwa semua perbuatan tergantung kepada niatnya, yakni dorongan batin dan iktikadnya.”

Maka selain memohon kepada Allah perlindungan dari kejahatan pendengki, kita juga memohon agar dibebaskan dari kedengkian.



DENGKI, PANGKAL KESENGSARAAN

Dengki memang merugikan orang lain dan membahayakannya. Di samping itu, dengki itu juga tidak kurang-kurangnya merugikan dan membahayakan si pendengki sendiri. Sabda Nabi Saw. menggambarkan bahwa dengki itu menghabiskan berbagai kebaikan kita sendiri.

Lebih jauh, dengki dapat menjadi pangkal kesengsaraan orang yang bersangkutan itu sendiri. Dan memang tidak ada orang dengki yang tidak menanggung jenis kesengsaraan tertentu. Mengapa? Sebab perasaan benci kita kepada seseorang yang menjadi sasaran kedengkian tersebut ialah justru karena “kebahagiaan” orang itu. Dan “kebahagiaan” di sini diletakkan dalam tanda kutip, sebab masih merupakan pertanyaan, apakah betul orang yang menjadi sasaran kedengkian itu bahagia? Ataukah sesungguhnya kebahagiaannya itu hanyalah hasil ilusi kita, akibat merasa diri sendiri kurang bahagia, sehingga membuat kita mempunyai gambaran terlalu besar tentang orang lain dan terlalu kecil tentang diri kita sendiri? Ini berarti bahwa “kebahagiaan” orang lain itu hanyalah hasil refleksi atau pantulan kaca situasi batin kita sendiri yang merasa tidak bahagia. Ini agaknya sering

diderita orang, seperti diisyaratkan oleh peribahasa Inggris, “*The grass over the fence always looks greener*” (Rumput di balik pagar sendiri selalu tampak lebih segar). Jika dibalik, berarti rumput dalam pagar sendiri selalu tampak lebih layu.

Apa arti itu semua? Artinya, perasaan tak berdasar bahwa orang lain selalu lebih bahagia daripada kita sendiri itu paling tidak adalah akibat rasa rendah diri, tapi dapat lebih gawat daripada itu, yaitu akibat ketidakmampuan bersyukur kepada Allah atas karunia yang telah kita terima dari-Nya. Tegas dan ringkasnya, kedengkian itu sebagian adalah akibat *kufir* kita akan karunia Tuhan, lalu kita melihat seolah-olah orang lain selalu mendapatkan karunia lebih dari kita. Inilah pangkal kesengsaraan kaum pendengki, sesuai dengan peringatan dalam Kitab Suci: *Dan ingatlah ketika Tuhanmu sekalian menegaskan, Jika kamu benar-benar bersyukur, maka pasti Aku akan tambahi (Karunia) bagi kamu; dan jika kamu benar-benar ingkar, maka sesungguhnya azab-Ku amat pedih* (Q., 14: 7). Jadi kalau kita pandai berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat karunia-Nya, maka apa pun yang ada pada kita akan terasa semakin membawa kebahagiaan. Inilah yang dinamakan *barkah*. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak pandai bersyukur, apalagi

kalau *kufir* (ingkar) atas nikmat karunia itu, maka perasaan kurang beruntung pada jiwa kita akan menjadi sumber kesengsaraan. Satu dan lain hal kemudian membuat kita mudah sekali cemburu, iri hati, dan dengki kepada orang lain. Lalu kita merasa bahagia atas kesengsaraan orang itu, dan merasa sengsara atas kebahagiaannya.

Itu berarti bahwa, secara tidak sadar kita mendefinisikan kehidupan kita pada kehidupan orang lain: “jika dia bahagia kita merasa sengsara, dan jika dia sengsara kita merasa bahagia!” Karena itu, seorang pendengki akan dengan sendirinya selalu gelisah, karena dihantui perasaan kalah oleh orang lain. Dan kesengsaraan itu akan menjadi-jadi ketika kedengkiannya itu membuatnya bertindak hanya sekadar hendak “mengalahkan” orang lain. Itu adalah tindakan tak sejati, dan tindakan tak sejati mustahil membawa kebahagiaan. Maka untuk menangkal kedengkian, kita harus selalu pandai bersyukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.



DEPARTEMEN KEAGAMAAN

Tatkala berlangsung rapat PPKI untuk merumuskan konstitusi, sehari setelah kemerdekaan Indonesia diumumkan, ada informasi

yang menyatakan bahwa orang-orang Kristen yang berasal dari Sulawesi Utara, tanah kelahiran A.A. Maramis, secara serius menolak satu ungkapan dalam piagam tersebut yang menyatakan: “Ketuhanan dengan ketetapan tertentu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya.”

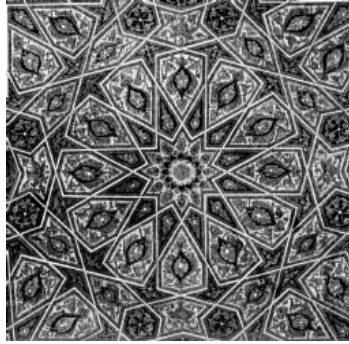
M o h a m m a d Hatta, yang memimpin rapat itu, setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan dan Kasman Singodimedjo, dua pemimpin Muslim terkemuka, menghapus ungkapan tujuh kata dari Piagam Jakarta yang menjadi keberatan dimaksud. Sebagai gantinya, atas usul Ki Bagus Hadikusumo (yang kemudian menjadi ketua gerakan pembaharu Islam Muhammadiyah), ditambahkan sebuah ungkapan baru dalam sila Ketuhanan itu, sehingga berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada hakikatnya, ungkapan ini, bagi kebanyakan orang-orang Muslim, mengandung tekanan khusus menyangkut kualitas mono-teistik prinsip keesaan Tuhan yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu *tawhîd*. Dan bagi mayoritas rakyat Indonesia, konstitusi ini, dipandang

dari sudut agama, cukup netral, untuk tidak mengatakan sekular. PPKI mengadopsi versi piagam yang telah direvisi ini sebagai Mukadimah Konstitusi Republik ini. Sejak saat itu, Konstitusi itu dikenal sebagai “Undang-Undang Dasar 1945” (yang sering disingkat UUD ‘45).

Pancasila dan UUD 1945 inilah dua serangkaian yang lebih sering disebutkan dalam retorika politik Indonesia. Namun demikian, apa yang terkandung

dalam “Undang-Undang Dasar 1945” dan “Pancasila” bukanlah titik akhir dari kontroversi ideologis di Indonesia. Walaupun undang-undang ini oleh mayoritas rakyat, dari sudut agama telah dianggap netral, orang-orang Islam terbiasa memandangnya sebagai bentuk lain dari kompromi antara mereka dengan orang-orang sekularis. Walaupun, dilihat dari perspektif orang-orang Muslim, hal itu diakui sebagai kompromi yang lemah, tapi sedikit banyaknya undang-undang ini tetap memberikan tempat yang utama bagi status Islam di negara ini. Dan sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang pasal 29 bahwa “Negara berdasarkan pada



Ketuhanan Yang Maha Esa” dan bahwa “Negara menjamin seluruh penganut agama untuk menjalankan ajaran-ajaran yang sesuai dengan agamanya”, maka tidaklah salah jika orang-orang Islam dapat dengan bebas dan sepenuhnya melakukan berbagai macam cara untuk menegakkan syariat Islam sebagai bagian dari religiusitas Islam. Hal ini menyeret Republik yang masih muda ini ke dalam fase kompromi yang lain, sehingga pada masa itu pula yaitu pada September 1945, Parlemen Indonesia sementara memutuskan perlunya didirikan Departemen Agama. Keputusan ini baru dapat diimplementasikan pada 3 Januari 1946, yaitu hari ketika didirikannya kementrian itu. Muhammad Rasyidi, seorang alumnus Universitas Al-Azhar, Kairo, ditunjuk sebagai Menteri pertama (12 Maret 1946), dengan tugas utama, sebagaimana telah disebutkan di atas, menjamin kebebasan beragama dalam pengertian kebebasan dari setiap penganut agama untuk hidup sesuai dengan semangat keimanan mereka. Dalam konteks Islam, misi Departemen Agama ini adalah untuk memudahkan dan mengawasi implementasi hukum Islam, khususnya Hukum Keluarga Islam (*Islamic Family Law*). Karenanya, tidak mengherankan jika orang-orang Kristen—yaitu masyarakat

Indonesia yang telah begitu mendalam terilhami dengan konsep sekular negara modern sebagaimana dilambangkan oleh sistem politik Barat—melihat Departemen Agama hanya sekadar bentuk lain dari kesadaran yang diam-diam bahwa Islam adalah agama negara Republik ini. Karena itu, berdirinya Departemen ini adalah untuk mengcounter konsep negara yang berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini, Walter Bonar Sidjabat, salah satu intelektual Protestan terkemuka Indonesia berkenaan dengan berdirinya Departemen Agama ini menyatakan:

“Fakta ini membawa kita pada sebuah observasi bahwa berdirinya Departemen Agama adalah untuk mempersiapkan mayoritas rakyat Indonesia pada suatu pandangan hidup yang, meskipun hal ini secara khusus tidak disebutkan dalam undang-undang, melihat Islam sebagai agama negara. Segala sesuatu selain dari konsep negara Islam Indonesia, lebih lanjut, tidak akan memuaskan orang-orang Muslim, karena mereka lebih sering berada dalam situasi yang memperlihatkan besarnya peran Islam dalam masyarakat. Karena itu, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, terutama dipahami dan diinterpretasikan sebagai konsep Islam mengenai Allah.”

Masalah Departemen Agama yang didominasi Islam ini juga menjadi perhatian Jend. T.B. Simatupang (purnawirawan). Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan yang beberapa kali, selama revolusi fisik Indonesia, memegang jabatan sebagai Komandan Angkatan Darat. Beliau juga beberapa kali memegang jabatan sebagai ketua Dewan Gereja Indonesia. Simatupang mempunyai reputasi sebagai pemimpin Kristen beraliran sosialis-demokratis yang telah berjuang bagi terwujudnya toleransi beragama dalam konteks politik Indonesia dalam arti yang sesungguhnya. Karena itu, sepanjang pemikirannya, berdirinya Departemen Agama adalah bertentangan dengan prinsip toleransi negara dalam kaitannya dengan persoalan agama. Dan jika departemen semacam itu hendak didirikan, maka dengan berdirinya departemen itu harus ada jaminan toleransi. Oleh karenanya “Departemen Keagamaan” lebih cocok daripada “Departemen Agama” sebagaimana telah dikenal selama ini. Menurut Simatupang, istilah “Departemen Agama” secara literal berarti “Departemen Agama (tunggal)”, yang implikasinya hanya ada satu agama, yakni Islam, yang benar-benar diperhatikan. Menurut beliau, ungkapan ini sebenarnya berarti sebuah “Departemen kepunyaan Islam” sementara

ungkapan “Departemen Keagamaan”, menurut beliau mempunyai arti yang dekat dengan ungkapan Inggris “Department of Religious Affairs” yang memang demikian terjemahan resminya.

Dengan istilah “Departemen Keagamaan”, berarti departemen bersangkutan adalah kepunyaan semua agama yang diakui secara resmi di Indonesia (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha), tanpa, baik secara implisit atau eksplisit, diskriminasi terhadap salah satu dari agama-agama tersebut.



DESAKRALISASI KARYA SENI

Setelah budaya Islam mencapai titik puncak pertumbuhannya, banyak kaum Muslim yang mulai mampu memisahkan aspek mitologis sebuah representasi benda bernyawa dari aspek artistiknya, bahkan dari aspek kegunaan praktisnya untuk tujuan tertentu. Maka mereka pun mulai mendevaluasi atau mendesakralisasi karya-karya tersebut, dan memandang karya seperti patung atau lukisan sebagai semata-mata bernilai dekoratif dan ornamental belaka. Gejala ini tampak nyata, misalnya, dalam penggunaan patung-patung singa untuk air mancur di gedung Alhambra (*Al-Qalât Al-Hamrà*, Benteng atau

Istana Merah) di Cordova, atau dalam hiasan miniatur (lukisan-lukisan kecil) dari binatang atau manusia pada buku-buku cerita atau ilmu pengetahuan.

Sekalipun begitu, semangat ikonoklasme tetap secara amat pekat mewarnai ekspresi artistik Islam yang lebih luas dan justru semangat itu mendorong seni Islam universal untuk tampil dengan kepribadian dan wataknya yang sangat khas. Berbeda dengan kaum Yahudi yang semangat ikonoklasmenya menghalangi mereka untuk mendapatkan saluran ekspresi artistik yang memadai (sampai akhirnya kaum Yahudi sepenuhnya mengikuti saja contoh bangsa-bangsa Barat dalam zaman modern ini), kaum Muslim menemukan saluran alternatif ekspresi seni itu dalam dua media yang amat khas budaya Islam: *kaligrafi* dan *arabesk*.

Kaligrafi dan arabesk sesungguhnya merupakan kontinum yang harmonis. Kaligrafi mengekspresikan paham ketuhanan yang abstrak (dalam arti, Tuhan yang tidak bisa dilukiskan) dengan menekankan pernyataan diri Tuhan melalui wahyu. Maka kaligrafi, kebanyakan, dicurahkan untuk mengekspresikan kekuatan wahyu itu. Sedangkan arabesk merupakan pengembangan rasa keindahan yang bebas dari mitos alam, dan dilakukan dengan mengembangkan pola-pola abstrak

diambil dari pengolahan motif bunga-bunga, daun-daunan, dan poligon-poligon. Kedua-duanya dinyatakan lebih di bidang datar (dua dimensi), dengan kemungkinan variasi relief, tidak dalam bentuk tiga dimensi kecuali jika menjadi bagian dari karya arsitektur. Kaligrafi dalam Islam semata-mata hanya menggunakan medium huruf dan tulisan Arab. Ini tidak saja karena huruf Arab (huruf yang penggunaannya paling luas kedua di dunia setelah huruf Latin) dipakai untuk menuliskan bahasa—bahasa kaum Muslim (meskipun bukan bahasa Arab, seperti bahasa-bahasa Persi, Kurdi, dan Urdu) tetapi lebih-lebih karena dukungan watak huruf Arab itu sendiri bagi seni kaligrafi; luwes dan elastis, sehingga mudah dibentuk bagi tujuan-tujuan ornamental dan dekoratif tertentu. Dengan alternatif *khathth* yang kaya seperti *Naskhî*, *Riq'î*, *Tsulutsî*, *Rayhâni*, *Fârisî*, *Kûftî*, dan seterusnya, seorang seniman kaligrafi dapat memilih tema yang dianggapnya paling sesuai bagi tujuannya.

Disebabkan oleh beberapa faktor, arabesk dan kaligrafi di Indonesia pada mulanya tidak berkembang sebagaimana layaknya di sebuah negeri Muslim. Tetapi fenomena akhir-akhir ini sungguh memberi harapan. Banyak seniman dan seniwati Indonesia yang mulai ter-

tarik kepada kaligrafi Islam. (Sekadar menyebut contoh, dua di antaranya adalah seniwati bunga kering yang terkenal, Lia Aminuddin dan Lucy Nugroho. Dalam suatu kesempatan pameran beberapa tahun silam, keduanya menampilkan keunikan medium ekspresi artistik bunga kering dengan kaligrafi). Ini merupakan langkah maju yang luar biasa, dan kita harapkan akan tumbuh dan berkembang menjadi bentuk kontribusi khas Indonesia dalam ekspresi artistik Islam universal yang amat penting dalam rangka pengukuhan eksistensi Indonesia sebagai umat dan bangsa yang besar. Tidak mustahil, fenomena ini akan menjadi permulaan babak baru perkembangan seni lukis Indonesia. Dan perkembangan baru itu tentu mempunyai peran dalam memperkokuh paham Tauhid, Monoteisme atau Ketuhanan Yang Maha Esa di negara kita.



DESAKRALISASI KESUKUAN

Konsep kesucian dalam agama Islam adalah semacam *keyword* (kata kunci) yang secara ritual keseharian biasa dikaitkan dengan, misalnya, konsep *subh* atau *tasbih*, artinya mensucikan Allah Swt. *Subh* sebenarnya adalah sifat Allah Swt. Kalau kita mengucapkan *subhānal-*

lāh, artinya kita mengakui bahwa yang suci atau sakral itu hanya Allah Swt.; sementara yang lain tidak suci, tidak sakral. Pengakuan ini mempunyai implikasi yang sangat jauh. Pada zaman Nabi Muhammad Saw., akibat yang paling langsung dari penyucian hanya kepada Allah—sebagai bagian dari tauhid—ialah runtuhnya pandangan hidup orang Arab yang berpusat kepada suku.

Di zaman Arab pra-Islam memang terdapat paham kesukuan atau tribalisme. Itulah sebabnya orang-orang Arab dulu sulit sekali diorganisasi menjadi sebuah negara karena masing-masing suku bersaing. Bukan itu saja, suku itu sendiri bahkan telah menjadi objek kesucian dan kebaktian, sehingga seseorang berani mati untuk suku, karena dipandang sebagai suatu kehormatan. Maka syair-syair yang digubah di zaman pra-Islam pun sebagian besar adalah pemujaan kepada suku itu sendiri.

Islam, dengan konsep tauhidnya, meruntuhkan semua fenomena tersebut; meruntuhkan pandangan kesucian kepada objek apa pun selain Allah. Dalam bahasa sekarang, konsep kesukuan mengalami devaluasi, dari nilai yang sakral menjadi tidak sakral, dari yang tabu menjadi tidak tabu, dari yang tertutup menjadi terbuka untuk dipersoalkan, dan seterusnya. Semua

itu merupakan efek pembebasan semangat *tasbîh*, yaitu “menghanyakan” kesucian kepada Allah Swt. semata. Konsep *tasbîh* ini berasosiasi dengan konsep yang paling mendasar dalam agama Islam, yaitu *Lâ ilâha illallâh*. Hanya saja penekanannya pada sesuatu atau objek yang disembah (*ilâh*). Kalau diterjemahkan secara harfiah maka berarti “tidak ada sesuatu yang boleh disembah kecuali yang berhak disembah itu sendiri”. Para ulama menyebut tentang *al-nafy* (peniadaan, negasi) dan *al-itsbât* (afirmasi). Karena itu dalam konteks kalimat *Lâ ilâha illallâh*, berarti menegasi “segala sesuatu yang boleh disembah” dan mengafirmasi Allah. Artinya, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Swt.; atau, tidak ada yang sakral kecuali Allah Swt.



DESPOTISME DI DUNIA ISLAM

Penyelewengan oleh rezim Umayyah yang kembali kepada despotisme, setelah sebelumnya umat Islam mempraktikkan gagasan pemilihan dalam kekuasaan, sangat berpengaruh

kepada pemahaman umat Islam tentang agama dan pemerintahan. Meminjam ungkapan Muhammad Abduh, “Islam tertutup oleh kaum Muslim sendiri,” dan dalam ungkapan Karen Armstrong, “Islam telah dibajak oleh para pengikutnya sendiri” atau, lebih tepatnya, oleh

mereka yang mengaku sebagai para pengikutnya, sehingga menyimpang jauh dari prinsip-prinsip Madinah.

(Hadis)

Sebagaimana telah diisyaratkan,

pengaruh buruk penyimpangan itu tampak jelas dalam sistem-sistem kekuasaan yang ada di lingkungan yang dikenal sebagai “dunia Islam” sekarang ini. Sistem-sistem yang kini ada di dunia Islam, baik yang berbentuk kerajaan maupun yang secara formal berbentuk republik, sebagian besar mencocoki kategori kezaliman kekuasaan yang dinamakan “despotisme timur” (“*oriental despotism*”), bukan komunitas nasional terbuka dan egaliter partisipatif. Terdapat urgensi yang sangat tinggi pada umat Islam untuk memahami kembali prinsip-prinsip tatanan masyarakat Madinah yang oleh Robert Bellah disebut sebagai contoh nasionalisme modern. Keberhasilan dalam memahami kem-

bali prinsip-prinsip itu akan memudahkan memahami prinsip-prinsip *modern nation-state* dari tinjauan ajaran dan sejarah Islam, untuk kemudian berpartisipasi positif dan ikut memberi arah kepadanya, meneladani sistem *madinah* dari Nabi.

Kaitan masalah ini dengan Indonesia ialah bahwa dalam masyarakat kita masih marak unsur-unsur feodalistik yang amat menghambat terwujudnya negara-bangsa atau *nation-state* modern menurut cita-cita para pendiri. Mungkin tanpa kita sendiri sadar, penampilan kita masih sangat pekat oleh nilai-nilai feodalistik, seperti tekanan berlebihan kepada unsur prestise dan gengsi, untuk kemudian menempuh hidup tidak sesuai dengan prestasi dan kemampuan kerja. Karena itu, “pejabatisme” sangat menggejala dalam masyarakat, yaitu cara pandang penuh gengsi para pemegang tugas kenegaraan yang tidak lagi bertindak sebagai “pelayan publik” (*public servants*), tetapi justru sebaliknya, bertingkah laku seperti “juragan publik” yang minta dilayani dan dihormati. Banyak dari kita yang mengidap penyakit “gila pangkat”. Pemerintah kolonial memanfaatkan itu semua sebagai perangkat pemerintahan tak langsung (*indirect government*), yang menghasilkan mentalitas “amtenarisme” dan “priayiisme”.



DESPOTISME ORIENTAL

Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu disebut *khalifat al-rasûl*, pengantinya Nabi. Tetapi ketika Islam berkenalan dengan kebudayaan-kebudayaan lain yang cenderung despotis, maka kecenderungan despotisme oriental ini menyusup ke dalam Islam, dan sedikit demi sedikit menggeser konsep-konsep yang sudah ada untuk disesuaikan dengan *expediency* (kelayakan). Hal ini antara lain tecermin dari pergeseran gelar, dari *khalifat al-rasûl* ke *khalifat allâh*. Ini adalah kecenderungan despotis. Untuk selanjutnya ia betul-betul menjadi teokrasi; para khalifah menganggap dirinya berkuasa atas nama Tuhan.

Abu Bakar atau ‘Umar sama sekali tidak menggunakan gelar itu. Bahkan, dalam pidato inagurasinya, Abu Bakar mengatakan, “Saya bukanlah yang terbaik di antara kamu, hanya saja saya mendapat kehormatan kamu pilih. Oleh karena itu, jika saya benar ikuti, kalau saya salah ingatkan.” Itu berarti bahwa seluruh tindakannya *just human actions*. Kalau dia berusaha sekonsisten mungkin dengan ajaran Nabi, maka itu pun merupakan usaha manusiawi, artinya masih bisa salah. Tetapi ketika dunia Islam mulai dirasuki despotisme oriental, maka raja-raja mulai mengklaim: apa pun yang mereka lakukan adalah benar.



DEWASA DALAM BERAGAMA

Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa yang paling mulia di antara manusia ialah yang paling bertakwa (Q., 49: 13). Itu artinya kita tidak boleh membagi-bagi manusia menjadi tinggi dan rendah, sebab tinggi dan rendah manusia itu menurut kadar takwanya, dan hanya Allah yang mengetahuinya. Karena itu pula firman di atas diakhiri dengan penegasan, *Sesungguhnya Allah itu Mahatahu, Maha Menenal* (Q., 49: 13).

Di tempat lain Allah berfirman, *Dia lebih tahu tentang kamu ketika Ia mengeluarkan kamu dari bumi, dan ketika kamu masih tersembunyi dalam rahim ibumu* (Q., 53: 32). Memang bayi adalah *lovely creature* (makhluk yang sangat mengundang cinta kasih), tetapi janin, misalnya terjadi keguguran, adalah menjijikkan. Jadi kalau dikatakan bahwa “kamu itu tidak lebih dari janin”, artinya diingatkan bahwa manusia itu dulunya adalah makhluk-makhluk yang tidak berdaya (mungkin menjijikkan). Manusia diingatkan oleh Tuhan supaya tidak menganggap dirinya suci (atau jangan *sok suci*), sebab hanya Allah yang lebih

mengetahui tentang siapa yang bertakwa. Kalau keseluruhan makna itu diambil dan dihayati, maka *ukhûwah Islâmîyah* akan bisa berjalan, karena kita akan menjadi sabar dan toleran dengan sesama kita.

Begitu juga dalam konteks interaksi Sunni-Syi'ah, yang diharapkan bisa melahirkan sinergi antarumat Islam. Dengan mengesampingkan beberapa individu atau kelompok yang agak mengalami kesulitan besar untuk mengakomodasi kenyataan baru, peranan kaum

Syi'ah yang amat mengesankan dalam percaturan keislaman internasional sekarang ini dapat diterima selayaknya. Revolusi Iran bagi sebagian orang Muslim telah menawarkan semacam “hikmah terselubung” berupa cakrawala pandangan keagamaan (Islam) yang lebih luas. Karena itu kita harus berusaha bersama mendorong lebih jauh kecenderungan positif tersebut. Dengan begitu diharapkan secara berangsur-angsur kita dapat mewujudkan dalam kenyataan berbagai angangan mengenai umat atau masyarakat Islam yang mendekati gambaran dalam Kitab Suci sebagai *ruhâ-mâ'u baynahum* (saling cinta kasih antara sesamanya).



Tetapi berbagai pengalaman menunjukkan bahwa keadaan itu tidak akan tercipta jika kita tidak memiliki cukup kedewasaan dalam sikap keberagamaan, dan dalam memandang keberagamaan orang lain (dalam pengertian yang seluas-luasnya). Termasuk dalam makna kedewasaan ini ialah kesediaan dan kemampuan untuk melihat berbagai kenyataan sejarah secara proporsional, dengan mengakui dan memasukkannya ke dalam hitungan berbagai faktor sejarah yang ikut menentukan apa yang telah terjadi, apa yang sedang dan bakal terjadi.



DIALOG ISLAM DENGAN RUANG DAN WAKTU

Persoalan budaya Islam bukanlah hanya pada isu-isu *ad hoc* seperti kubah, beduk, dan kentungan, dan lain-lain. Persoalan sederhana itu hanya melambangkan sesuatu yang lebih besar, yang hendak dicoba bahas di sini. Adanya arsitektur “neomodern”, “neoklasik” atau “pascamodern” serta konsep estetikanya yang terkait, melambangkan kemungkinan solusi atas problem itu, yaitu kemungkinan tetap dapat diterimanya kehadiran kelembagaan tradisional seperti kubah, beduk, kentungan, dan lain-lain, meskipun, demi konsistensi

dalam beragama, diperlukan kesadaran yang tegas akan kenisbian nilainya. Maka Masjid Istiqlal, misalnya, bukan saja merupakan masjid terbesar di Asia Timur, tapi juga masjid dengan kubah terbesar di dunia serta menara yang menjulang amat tinggi dan, sungguh menarik, juga dengan beduk yang ukurannya rekor di dunia, mungkin di seluruh jagat raya yang kasat mata (*syahâdah*, bukan yang gaib)—jika memang di planet-planet lain juga ada beduk!

Persoalan kita dengan contoh-contoh tadi ialah adanya kecenderungan orang Islam untuk memutlakkan sesuatu yang nilai sesungguhnya adalah nisbi belaka, meskipun sesuatu itu memang memiliki arti penting dilihat dari sudut pandangan kultural dan historis. Jika soal kubah, beduk, dan kentungan tidak terlalu nyaring menggetarkan gendang telinga kita (karena sederhananya fenomena itu terkesan dalam pikiran), maka gantilah itu semua dengan hal-hal yang lebih abstrak dan “prinsipil”, yang sangat banyak memengaruhi kehidupan masyarakat Islam seperti konsep-konsep, ajaran-ajaran, dan paham-paham tertentu, malah “akidah-akidah” tertentu pula. Banyak dari hal-hal itu yang sesungguhnya tidak lebih daripada hasil interaksi dan dialog antara Islam yang universal dengan situasi

nyata ruang dan waktu yang partikular.

Sudut pandang persoalan itu dapat ditukar: apakah setiap ekspresi keagamaan (biarpun dibatasi hanya kepada yang bersifat lahiriah saja seperti cara berpakaian tertentu, misalnya) yang datang dari tempat lain, apalagi dari Timur Tengah, harus dianggap sebagai ekspresi keagamaan yang sertamerta mesti bernilai mutlak sehingga mesti pula berlaku di semua tempat?

Bagaimana dengan kemungkinannya melihat bahwa itu semua adalah tidak lebih daripada hasil dialog Islam yang universal (yang datang dari Tuhan dan diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di mana saja dan sepanjang zaman) dengan situasi konkret budaya dalam konteks ruang dan waktu tertentu yang relevan dan partikular (seperti partikularitas Jazirah Arab, kawasan Timur Tengah, dan abad ke-7 sampai ke-8 Masehi)?

Barangkali masih harus ditegaskan lagi di sini bahwa persoalan yang dicoba kemukakan itu bukanlah perkara apakah suatu hasil dialog kultural antara keuniversalan

Islam dan kekhasan suatu kawasan dan zaman itu absah atau tidak. Justru alur argumen yang hendak dicoba kembangkan dalam pembahasan ini diarahkan kepada kesimpulan bahwa setiap hasil dialog kultural dari kedua aspek, universal-partikular atau *kullî-juz'î* tidak saja

absah, tapi juga merupakan kreativitas kultural yang amat berharga. Dengan kreativitas itulah suatu sistem ajaran universal seperti agama menemukan relevansinya dengan tuntutan khusus

dan nyata para pemeluknya, menurut ruang dan waktu, dan dengan begitu menemukan dinamika dan vitalitasnya.

Jadi memang, persoalannya ialah apakah suatu hasil dialog kultural dalam format universal-partikular itu mesti dianggap mutlak dan berlaku selama-lamanya? Apakah tidak dari waktu ke waktu perlu ditinjau seberapa kuat relevansinya dengan tuntutan dasar zaman dan tempat dengan kemungkinan meningkatkannya, atau mengubahnya, atau menggantinya sama sekali, dalam semangat kesadaran akan kenisbian spasial dan temporalnya, ruang dan waktunya? Bagi mereka

Karena kebebasan-kebebasan asasi adalah landasan penting demokratisasi, maka diperlukan suatu bentuk komitmen yang lebih mendalam kepada nilai-nilai itu, yang menghendaki adanya persepsi kepadanya sebagai nilai-nilai prinsipil, bukan sekadar nilai-nilai prosedural.

yang benar-benar mengerti permasalahan ini, dan mempunyai ke-siapan psikologis yang diperlukan, akan cukup mudah tiba kepada jawaban yang positif-afirmatif (*ijâbi-itsbâtî*). Tetapi bagi kebanyakan anggota masyarakat, atau masyarakat itu sendiri secara keseluruhan, persoalan itu tentu sangat rumit, padahal pemecahannya jelas merupakan suatu urgensi bagi umat Islam di mana saja pada persimpangan zaman ini. Dan kalau kita umat Islam Indonesia termasuk yang secara cukup dini menyadari permasalahannya, maka kita harus menerimanya sebagai rahmat dan amanat Allah, dan kita mengemban tugas dan tanggung jawab mewujudkannya.

Sebagaimana tersimpul dalam kata-kata hikmah, suatu “*Kalimah*” (dalam arti seluas-luasnya, yang meliputi dari ungkapan sehari-hari sampai kepada “ideologi”, pemikiran dan pandangan hidup yang lebih mendalam) yang benar-benar baik ialah yang berakar kukuh, bercabang dan beranting subur, menjulang ke angkasa bagaikan mencakar langit. Dengan kata-kata lain, setiap ide yang baik memerlukan autentisitas, dengan memiliki dasar-dasar pemikiran yang berasal dari sumber-sumber pokok ajaran, dan dengan kesadaran akan dimensi sejarah dalam usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mewujudkan

ajaran-ajaran itu berkaitan dengan kehidupan nyata. Kemudian diperlukan kecakapan menggunakan bahan-bahan sumber itu, termasuk yang bersifat kesejarahan, dengan daya cipta begitu rupa sehingga dapat menjabarkan kembali ide-ide itu secara relevan dengan zaman dan menjawab tantangannya.

Oleh karena itu, kepada kita tidak saja dituntut adanya kemampuan memahami dan menggunakan sumber-sumber suci, tapi juga dikehendaki adanya kecakapan menangkap pesan-pesan sejarah masa lalu yang akan bermanfaat untuk memperkaya wawasan guna lebih mampu menangkap pesan-pesan masa kini dan nanti. Jadi, ada unsur kontinuitas dan kreativitas, unsur keautentikan dan kezamanan (*al-ashâlah wa al-mu'âsharah*), keduanya ialah tuntutan untuk belajar dari masa lalu dalam kerangka mempertahankan mana saja unsur-unsur yang positif dan membuang mana saja unsur-unsur yang negatif, kemudian digunakan untuk meningkatkan kecakapan mengambil apa saja unsur-unsur yang lebih baik dari masa kini dan masa depan yang diperkirakan. Dengan begitu, suatu pandangan memiliki tidak saja keabsahan yang diperlukan sebagai sumber dinamika pengembangannya, tapi juga keterkaitan dengan tuntutan nyata menurut perkembangan zaman. Dan hanya dengan begitu klaim tentang

suatu sistem ajaran seperti Islam sebagai “cocok untuk segala zaman dan tempat” (*shâlih li kulli zamân wa makân*) dapat dibuktikan. Dan karena suatu ajaran tidak pernah bereksistensi nyata sebagai kesatuan wujud terpisah yang ibaratkan terbang melayang di angkasa, melainkan tentu “hinggap” di pikiran manusia dan menyatakan diri dalam tingkah lakunya, maka yang bertanggung jawab membuktikan bahwa ajaran itu “cocok untuk segala zaman dan tempat” bukanlah ajaran itu sendiri, melainkan manusia para penganutnya yang menyejarah dan terkena oleh hukum-hukum kepastian dari Tuhan (*Sunnatullâh* [“sunatullah”]) untuk sejarah itu, di samping terkena oleh hukum kenisbian manusia sendiri yang membuatnya bisa benar dan bisa salah.

Jadi memang diperlukan kesadaran akan kekayaan tradisi, sekaligus kemampuan untuk senantiasa membuat inovasi. Sudah banyak dilakukan pembicaraan tentang masalah ini dari berbagai segi. Namun kita masih berharap dapat memberi sumbangan secukupnya dari suatu segi yang lain.



DIFERENSIASI KEKUASAAN

Tegaknya hukum dan peraturan sebagai salah satu tujuan pengawasan dan pengimbangan yang ber-

jalan secara efektif, dalam penyelenggaraan kenegaraan modern mengharuskan adanya diferensiasi antara berbagai lembaga kenegaraan menurut kekhususan bidangnya, terutama kekhususan bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tugas utama sistem pemerintahan, dan yang menjadi tolok ukur keberhasilan dan kegagalannya, ialah kemampuan memelihara ketertiban, atau mengatur dan menyelesaikan pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Tetapi ketertiban itu sendiri memerlukan parameter-parameter, berupa peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum. Maka dalam menjalankan tugasnya menegakkan ketertiban, pemerintahan secara keseluruhan berkewajiban memerhatikan agar parameter-parameter itu dipegang teguh dan dilaksanakan dengan taat.

Oleh karena kekuasaan itu sendiri, khususnya kekuasaan eksekutif, memiliki fasilitas dan prasarana untuk melanggar ketentuan dengan dampak yang amat luas terhadap kehidupan masyarakat (*“power tends to corrupt”*), maka sistem pengawasan dan pengimbangan harus terlebih dahulu, dan terutama, diciptakan antara ketiga unsur kekuasaan itu sendiri, yaitu unsur-unsur eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pengawasan dan pengimbangan yang efektif akan terwujud jika masing-masing dari ketiga unsur

kekuasaan itu independen satu dari yang lain, dan berkebebasan melaksanakan pengawasan dan keseimbangan satu sama lain.

Secara khusus, berkenaan dengan usaha penegakan hukum dan peraturan, sistem peradilan yang independen dan berfungsi secara penuh merupakan jaminan kelembagaan yang paling kuat bagi tegaknya hukum dan peraturan itu. Sebaliknya, sistem peradilan yang tidak dapat lepas dari pengaruh pemerintahan eksekutif, juga pengaruh luar mana pun, adalah salah satu jaminan paling pasti untuk runtuhnya ketentuan hukum dan peraturan.

Dalam hubungan interaktif antara ketiga unsur kekuasaan itu, badan legislatif dituntut untuk benar-benar memenuhi fungsinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Badan legislatif yang berfungsi penuh karena absah melalui pemilihan umum yang bebas, terbuka dan demokratis, merupakan faktor pengimbang dan pengawas terhadap keseluruhan proses dan struktur politik yang terjadi sebagai realisasi kedaulatan rakyat.



DIKENDALIKAN HAWA NAFSU

Sesungguhnya, orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu digambarkan sebagai orang yang dibiarkan

(*yadd'au* dari *wadd'a'a*). Ia dibiarkan berbuat apa saja, yang tanpa disadari, sebenarnya justru sedang dimasukkan ke dalam kehancuran. Ketika seseorang sudah tidak bisa lagi mengontrol hawa nafsunya, maka sebenarnya orang itu sedang diacuhkan oleh Allah Swt. (*istidrâj*). Ini fatal, tapi orang tidak menyadarinya.

Sejarah telah membuktikan banyak contoh atau fakta mengenai ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu yang berakibat fatal. Salah satunya digambarkan oleh sejarawan terkenal Gibbon dalam karyanya *The Decline and the Fall of Roman Empire*. Dikisahkan bahwa kejatuhan kerajaan Romawi yang besar ditandai dengan munculnya gejala ketidakmampuan menguasai hawa nafsu. Setiap pejabat berbuat untuk mencapai dan memenuhi kepentingan serta keuntungan dirinya semata. Mereka mengabaikan aturan atau hukum—perlu diingat, bangsa Romawi terkenal sebagai bangsa dengan produk hukum dalam sejarah peradaban dan kebudayaan dunia. Setelah mereka sudah tidak lagi menaati hukum yang telah dibuat, karena mengikuti hawa nafsunya, maka pada akhirnya semua dibuktikan dengan kehancuran.

Kejadian ini universal dan menjadi sunnatullah, artinya tanpa memandang apakah ia orang atau

bangsa yang kafir atau Islam. Dalam sejarah umat Islam sendiri, pada masa Dinasti ‘Abbasiyah, kota Bagdad, Irak, merupakan Kota metropolis dan menjadi pusat peradaban dunia. Ini sebelum kedatangan tentara Hulagu atau pasukan Mongol yang terkenal amat kejam. Namun akhirnya, sedikit demi sedikit masyarakat dirasuki penyakit ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu. Umumnya para penguasa dan pejabat Dinasti ‘Abbasiyah hanya mementingkan diri dan berlomba-lomba memenuhi tuntutan hawa nafsunya dengan berfoya-foya. Hingga akhirnya, mereka dibinasakan dengan tragis dan nista ketika datang serangan pasukan Mongol yang ganas. Mereka dibunuh dan kotanya diratakan. Perpustakaan-perpustakaan yang kaya akan literatur dan buku-buku, dibakar. Bahkan menurut catatan, sebagian buku tersebut dibuang, dicemplungkan ke sungai-sungai di Bagdad, sehingga air sungai menjadi hitam karena tinta.



DIKOTOMI ILMU

Ilmu yang termasuk kategori *fardlu kifâyah* adalah ilmu yang praktiknya sendiri sudah menunjukkan bidang spesialisasi orang yang bersangkutan, misalnya kedokteran, astronomi, ilmu bangunan, dan se-

bagainya. Al-Ghazali tidak mewajibkan ilmu-ilmu semacam itu. Menurut Al-Ghazali, tidak semua orang harus menjadi dokter, tetapi semua orang harus tahu shalat. Yang satu *fardlu kifâyah*, dan yang lain *fardlu ‘ayn*. Tetapi ekses pendikotomian semacam itu membuat orang tidak lagi tertarik dengan ilmu-ilmu yang dikategorikan *fardlu kifâyah*, seperti terjadi di pesantren-pesantren, kecuali ilmu astronomi atau *hisâb* yang tetap dipelajari, yaitu untuk menghitung waktu shalat dan puasa.

Pada kenyataannya, dikotomi itu tidak harus dilihat berdasarkan klasifikasi materialnya, tetapi juga formalnya. Misalnya dikatakan bahwa fiqih itu adalah *fardlu kifâyah*, maka semua orang tidak harus tahu hukum perkawinan antaragama, misalnya. Tetapi fiqih dalam arti pengetahuan yang primer adalah *fardlu ‘ayn*. Dan pada zaman keemasan Islam, fiqih adalah ilmu profesional, yaitu suatu pengetahuan yang dipelajari orang untuk memperoleh profesi sebagai hakim. Oleh karena itu ada sekolahnya, sama persis dengan *school of law* di Amerika Serikat sekarang ini. Berbeda dengan fiqih yang ada sekolahnya, pada zaman keemasan Islam, ilmu-ilmu seperti kedokteran, ekonomi, ilmu bumi, ilmu bangunan (arsitektur), dan lain-lainnya, tidak ada sekolahnya. Orang yang mau jadi dokter, arsitek dan

sebagainya, harus magang, karena itu sifatnya *fardlu kifayah*, seperti fiqih dalam pengertian sebagai *professional knowledge for education*, yang tidak semua orang harus melakukannya. Tetapi, kalau tidak ada yang melakukannya, maka semuanya ikut berdosa.



DIKTATOR MAYORITAS

Alexis de Tocqueville dalam bukunya yang sudah menjadi klasik, *Democracy in America*, mendapati bahwa demokrasi ala Amerika Serikat pada dasarnya adalah sebuah sistem yang memberi peluang kepada mayoritas untuk bertindak semauanya. Demokrasi Amerika, kata sarjana Prancis kenamaan itu, adalah semacam sistem “diktator mayoritas”.

Jika Anda termasuk minoritas, kata de Tocqueville, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa, karena semuanya telah ditentukan oleh mayoritas yang memenangkan pemilihan umum. Melalui kemenangan dalam pemilihan umum itu, sebuah partai mayoritas menyisihkan untuk dirinya semua hak dalam menentukan kebijakan po-



litik, melalui institusi kepresidenan yang amat kuat. Presiden yang memangku jabatan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu empat tahun, adalah seorang kepala eksekutif yang sangat berkuasa, dan tidak dapat dijatuhkan di tengah masa jabatan (kecuali kasus Richard Nixon yang mengundurkan diri—sehingga tidak dikenakan tuntutan Kongres [*impeachment*])—karena skandal Watergate).

Dalam kenyataannya memang seperti de Tocqueville katakan, demokrasi Amerika adalah sistem politik yang didasarkan pada pemerintahan yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada banyak pemerintahan demokratis di Eropa Barat mana pun. Jika pengamatan dan penilaian de Tocqueville benar—sebagaimana banyak orang menerima dan meyakini demikian: bahwa demokrasi Amerika adalah “kediktatoran” atau “tirani mayoritas”—maka demokrasi Amerika sesungguhnya boleh dikatakan secara logisnya bukanlah demokrasi dalam arti sebenarnya, sebab sebuah kediktatoran atau tirani, betapapun kualifikasinya, seperti pelaksanaannya oleh mayoritas,

sama sekali bukanlah demokrasi. Tetapi anehnya, tentang hal tersebut, orang-orang Amerika akan dengan keras menolak penilaian itu.

Dalam suatu pamflet yang diterbitkan USIS, 1991 tentang “Apa itu Demokrasi” dikatakan, bahwa semua demokrasi adalah sistem di mana warganya bebas mengambil keputusan berdasarkan kekuasaan mayoritas. Tetapi kekuasaan oleh mayoritas tidak selalu demokratis. Bagaimana suatu sistem bisa disebut demokratis jika misalnya suara pemilu 51% penduduk menindas sisanya 49% atas nama mayoritas? Maka menarik dalam sistem demokrasi dewasa ini, kekuasaan mayoritas haruslah digandengkan dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia termasuk perlindungan atas hak-hak minoritas. Hak-hak minoritas ini dilindungi lewat UU yang melindungi hak-hak semua warga negara.

Demokrasi dalam pengertian yang lebih menyeluruh sebenarnya tidak dapat direduksikan hanya kepada mekanisme-mekanisme pelaksanaan kekuasaan yang antara lain melahirkan kekuasaan mayoritas yang mungkin saja berlangsung atas kerugian minoritas. Demokrasi lebih banyak daripada sekadar tatanan pemerintahan. Meskipun hal itu amat penting, namun ia harus dipandang sebagai salah satu hasil akhir yang bersifat formal dan

struktural. Dan segi-segi kekurangan sudut formal dan struktural demokrasi itu dapat diimbangi dengan usaha perbaikan sambil berjalan, melalui improvisasi berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata.

Kekuatan demokrasi ialah bahwa ia merupakan sebuah sistem yang mampu melalui dinamika internnya sendiri untuk mengadakan kritik ke dalam dan perbaikan-perbaikannya, berdasarkan prinsip keterbukaan dan kesempatan untuk bereksperimen itulah salah satu dari ruh demokrasi yang paling sentral. Di sini ada ide *trial and error* (coba dan salah), juga *check and balance* (pengawasan dan pengimbangan) yang semuanya memberi tempat kepada ide keterbukaan dan kebebasan. Juga paham *partial functioning of ideals* yaitu pandangan dasar bahwa belum tentu dan tidak harus seluruh keinginan atau pikiran seseorang atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya—yang dalam bahasa agama disebut *ishlah*, yaitu perlunya kompromi-kompromi politik.



DILEMA PERTUMBUHAN DAN Keadilan Sosial

Bagi mereka yang dengan serius mengikuti perkembangan negeri kita semenjak tiga dasawarsa terakhir

ini, judul bahasan ini pastilah tidak terasa asing lagi, jika tidak malah telah menjadi semacam klise dan kedengaran stereotipikal. Sebab, persoalan itu telah menjadi bagian dari kesadaran banyak kalangan (di negeri kita) yang terlibat dalam usaha pembangunan nasional, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya, dilema antara pertumbuhan dan keadilan sosial itu dicerminkan dalam ungkapan alegoris tentang pembagian “kue nasional”: Apakah kita akan berusaha memperbesar kue dan baru kelak setelah cukup besar (entah kapan dan entah seberapa besar) baru dibagi-bagi, ataukah kita akan segera membagi-bagi kepada setiap warga negara begitu setiap kali sepotong kue tercipta? Sebab, sementara usaha penciptaan kemakmuran dirasakan sebagai hal amat mendesak—jika kita tidak mau ketinggalan oleh negara-negara tetangga dengan segala akibatnya—namun, di sisi lain cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat telah menjadi kesadaran prinsipil nasional dan telah melekat sebagai bagian dari cita-cita kenegaraan kita. Ini membawa kita kepada situasi dilematis antara *imperative* pertumbuhan ekonomi dan kewajiban moral menciptakan keadilan sosial.

Jika persoalan itu disimpan dalam pikiran kemudian kita pergi

ke luar batas-batas nasional, maka kita akan mendapati bahwa ternyata situasi dilematis antara pertumbuhan dan keadilan itu merupakan gejala universal. Ini digambarkan, misalnya, oleh Bruce A. Ackerman, yang oleh majalah *TIME* pada tahun 1977 dipilih sebagai seorang intelektual Amerika yang paling terkemuka dan “bakal memengaruhi masa depan”. Ia membuat suatu hipotesis yang membayangkan seandainya kita ingin membuat paguyuban yang seluruhnya diperuntukkan bagi kegiatan dan pandangan hidup yang sama dan terdiri dari anggota-anggota yang berpikiran sama pula. Dalam situasi seperti itu pun kita masih menghadapi kemungkinan memiliki latar belakang anggota yang berbeda-beda jauh, tidak peduli bahwa yang tampil ke depan, pada peringkat intelektual dan rasional, ialah pikiran dan wawasan yang sama. Maka ketika kita dihadapkan pada jawaban individualistik tentang kepemilikan kekayaan, misalnya, kita barangkali akan terlibat dalam dialog sengit seperti ini:

Orang Banyak: Kita protes. Jika kamu membagi-bagi kue dalam irisan kecil-kecil (pribadi), maka akan menjadi amat sulit bagi kita semua untuk mengetahui di mana masing-masing irisan itu dan untuk mengumpulkannya dalam suatu usaha yang saling menguntungkan.

Pemimpin: Lalu apa saran Anda yang harus kita lakukan?

Orang banyak: Laksanakan pemilihan umum atas irisan-irisan kue dalam ukuran besar, dan tugaskan kita semua atas satu irisan. Ini akan sangat mempermudah kita untuk mulai membangun masyarakat.

Penyendiri: Tetapi itu akan membuat hidupku lebih susah. Tidak ada yang kuinginkan daripada hidup menyendiri dan berbuat terhadap kue bagianku dengan damai. Kalau Anda membagi-bagi kue itu dalam irisan-irisan besar, paling tidak aku akan harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga sebelum aku bisa mengiris sepotong kecil kue yang sudah sejak semula menjadi bagianku dari bongkah besar kue milik bersama itu.

Pemimpin: Lalu, bagaimana kita harus melangkah ke depan? Dan diharapkan Anda jangan mengajukan rencana yang mengharuskan saya untuk mengatakan bahwa suatu paguyuban yang terdiri dari para anggota dengan jalan pikiran sama adalah lebih baik atau lebih buruk daripada suasana menyendiri seorang pertapa.

Dilema itu dalam kehidupan nasional kita pada tahap perkembangan sekarang ini semakin menunjukkan dirinya. Pada peringkat pertama, saat-saat sekarang ini banyak dilontarkan orang bahwa kelanjutan tahap pembangunan nasional harus dititikberatkan pada pe-

laksanaan pembangunan yang lebih tulus dan substantif daripada nilai-nilai Pancasila. Dan pada peringkat kedua, dari nilai-nilai Pancasila itu yang semakin gencar didengungkan ialah dua nilai terakhir, yaitu kerakyatan atau demokrasi dan keadilan sosial. Bahkan nilai keadilan sosial ini—yang usaha mewujudkannya untuk seluruh rakyat ditegaskan dalam konstitusi (UUD '45) sebagai tujuan kita bernegara—semakin menjadi fokus dan sumbu pikiran-pikiran reformatif untuk tahap perkembangan dan pembangunan nasional kita pada masa mendatang.

Wujud paling nyata dari dilema pertumbuhan dan keadilan itu dapat dirasakan di balik kenyataan semakin terpusatnya sumber-sumber daya—khususnya modal, keahlian, dan informasi—di tempat-tempat tertentu, yaitu di kota-kota besar. Tumbuhnya DKI Raya dan sekitarnya (Jabotabek) menjadi sebuah megapolis tidak saja merupakan fungsi gerak demografis masyarakat kita, tetapi juga memunculkan fungsi kemandekan atau immobilitas sumber-sumber daya tersebut. Bahkan gerak demografis masyarakat—terutama dalam bentuk urbanisasi—dari satu sisi dapat dilihat sebagai salah satu akibat dari kemandekan pemanfaatan sumber-sumber daya itu.



DILEMA TERJEMAHAN

Ada dua persoalan dalam penerjemahan. Kata orang, kalau sebuah penerjemahan menghasilkan karya yang mudah dibaca dan enak, itu berarti hasil kerja yang “bohong”. Ia dapat dianggap mengubah sintaksis bahasa aslinya ke dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, jika sintaksisnya dipertahankan, maka sebuah karya terjemahan akan sulit dibaca, dan itu juga merupakan terjemahan yang “bodoh”. Jadi pilihannya adalah bohong dan bodoh. Memang, demikianlah dilema menerjemahkan.

Menerjemahkan adalah pekerjaan yang sulit, apalagi bahasa Indonesia masih muda usianya, sehingga sering terasa kekurangan kosakata. Bahasa lain, seperti bahasa Inggris, saat ini adalah bahasa yang paling kaya kosakatanya setelah bahasa Arab, bahasa Sanskerta, bahasa Yunani dan bahasa Latin. Maka, menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia pasti akan melibatkan beberapa kesulitan.

Namun, jika kita tidak menerjemahkan, lalu apa yang akan kita lakukan? Bukankah kita harus mencerna ilmu pengetahuan dalam bahasa kita sendiri? Maka, penulis sangat bersimpati kepada almarhum Sutan Takdir Alisyahbana yang pernah mengatakan bahwa kita harus menggalakkan gerakan pener-

jemahan besar-besaran, seperti dulu peradaban Islam yang maju antara lain karena gerakan penerjemahan. Buku-buku dari bahasa Yunani, Mesir, India dan Cina diterjemahkan secara besar-besaran ke bahasa Arab. Peradaban Barat maju antara lain karena penerjemahan besar-besaran atas buku-buku dari bahasa Arab. Demikian juga dengan orang-orang Jepang, Korea, dan Taiwan belakangan ini. Kalangan terpelajar Malaysia dan Filipina banyak berbicara dalam bahasa Inggris, sehingga mereka tidak banyak memerlukan penerjemahan. Tetapi, karena kita memiliki bahasa nasional sendiri, yang merupakan salah satu kelebihan kita, maka kita akan mengalami isolasi intelektual. Karena itu, sebelum kita secara kreatif menciptakan buku-buku sendiri, maka yang harus kita lakukan adalah menerjemahkan.



DILEMA WILSON

Kita semuanya mengetahui bahwa sebelum Zaman Industri, perang banyak terjadi atas dorongan agama. Setelah Zaman Industri, perang banyak didorong oleh rebutan harta. Dan kita tidak dapat begitu saja menilai bahwa perang atas nama agama adalah lebih mulia daripada perang atas nama harta,

kecuali jika kita termasuk dan ada dalam pihak golongan agama yang berperang itu sendiri. Jika kita berada dalam agama ketiga, di luar dua agama yang sedang berperang, kita akan tersenyum mengejek karena memandangi bahwa peperangan yang terjadi antara dua agama (yang bu-

kan agama kita itu) adalah suatu ironi dan tragedi, karena perang itu merupakan usaha saling menghancurkan oleh dua pihak yang (dalam pandangan

kita) sama-sama palsu (karena kedua agama itu bukan agama kita sendiri dan tidak seperti agama kita sendiri). Jadi perang itu adalah suatu perang atas nama kepalsuan, dari kedua pihak, dan yang membuat perang semacam itu tidak masuk akal! Karena itu, perang atas nama harta tentunya masih lumayan lebih baik, karena masih lebih masuk akal! Suatu logika yang tidak terlalu buruk!

Tapi jika kita termasuk dan berada di pihak suatu agama yang berperang dengan agama lain, maka dengan sendirinya perang itu adalah perjuangan sebuah kebenaran melawan dan menghancurkan kepalsuan. Adakah nilai hidup yang

lebih tinggi daripada perjuangan menegakkan kebenaran melawan kepalsuan? Kita pun akan meyakini adanya unsur kesucian dalam perang serupa itu, sehingga mati di dalamnya adalah kehormatan yang besar, sebagai syahid atau martir.

Hanya saja kita harus ingat bah-

wa mereka yang ada di pihak lawan agama kita juga berpendapat persis sama, tapi dengan nilai yang terbalik: benar menjadi palsu, dan palsu menjadi benar, seperti bayangan

kita dalam kaca cermin. Kemudian kita juga harus ingat bahwa mereka yang berada di pihak ketiga, yang tidak beragama seperti agama kita atau agama lawan kita, akan memandang perang kita sebagai usaha saling menghancurkan antara kedua kepalsuan! Dan inilah “dilema Wilson”, yaitu dilema bahwa agama mengajak kepada kebaikan, dan semakin orang yakin kepada agamanya, adalah semakin baik; tapi justru “orang baik” itu semakin kuat membenarkan dirinya untuk tidak toleran kepada orang lain, bahkan merasa berhak mengejar-ngejar orang yang tidak sepaham dengan dirinya. Ia justru menjadi sumber keonaran sendiri.

Karena kebebasan-kebebasan asasi adalah landasan penting demokratisasi, maka diperlukan suatu bentuk komitmen yang lebih mendalam kepada nilai-nilai itu, yang menghendaki adanya persepsi kepadanya sebagai nilai-nilai prinsipil, bukan sekadar nilai-nilai prosedural.

Jika kita perhatikan, peta dunia sekarang ditandai oleh konflik-konflik dengan warna keagamaan. Meskipun agama bukanlah satu-satunya faktor, namun jelas sekali bahwa pertimbangan keagamaan dalam konflik-konflik itu dan eskalasinya sangat banyak memainkan peranan. Di ujung paling utara, di Irlandia, ialah pertentangan tidak berkesudahan antara kaum Katolik dan kaum Protestan. Dan di tengah-tengah Eropa, sekitar Prancis dan Jerman, terjadi konflik-konflik yang malu-malu disebut bersifat keagamaan (karena akan menodai “liberalisme” mereka) dan terbungkus oleh rasialisme atau kepentingan ekonomi terhadap para pekerja asing yang kebanyakan beragama Islam. Sedikit ke selatan, dan masih dalam wilayah Eropa, terjadi konflik dengan banyak warna keagamaan, yaitu di Bosnia-Herzegovina. Kemudian di Cyprus, betapapun pertentangan antara mereka yang keturunan Turki dan yang keturunan Yunani tetap sedikit banyak diwarnai oleh sentimen keagamaan. Konflik-konflik di Palestina khususnya dan Timur Dekat umumnya yang melibatkan kaum-kaum Yahudi, Muslim, dan Kristen, dengan faksi masing-masing yang cukup membingungkan, hampir merupakan anomali bagi sebuah tempat buaian peradaban manusia yang paling berpengaruh, dan jelas anakronistik bahwa kaum Yahudi hendak men-

dirikan negara agama di zaman modern dan atas bantuan negara-negara modern. Dan di Afrika Hitam pun konflik-konflik dengan warna keagamaan juga tidak mudah disembunyikan. Di Sudan, ada konflik antara Islam yang “Arab” di sebelah utara dan Kristen yang “Negro” di sebelah selatan. Belum lagi konflik-konflik karena rasialisme dan paham apartheid, yang juga mengundang keterlibatan berbagai tokoh keagamaan (Kristen). Negeri-negeri Timur Tengah yang lain juga diramaikan oleh konflik-konflik dengan warna keagamaan, sebagian daripadanya sungguh dramatis. Tidak saja konflik antara Irak dan Iran merupakan konflik antara pemerintahan yang berturut-turut didominasi oleh Islam Sunni dan Islam Syi’ah, bahkan juga masing-masing pihak dengan jelas menggunakan simbol-simbol keagamaan, seperti heroisme Qadasiyah dari pihak Irak dan jihad melawan *thâghûl* (tiran) yang ateis dari pihak Iran. Perang Teluk yang dahsyat itu secara resmi terhindar dari pewarnaan keagamaan, namun tidak luput terjadi persepsi populer yang aneh di sementara kalangan bahwa perang itu adalah perang antara Islam (Irak) melawan kekafiran (Kuwait, Saudi, Syria, Mesir, yang dibantu negeri-negeri Barat, khususnya Amerika)! Dan jika kita teruskan ke timur, kita melewati Afghanistan yang masih dalam kemelut konflik-konflik politik dengan

tema perebutan keabsahan menurut jenis penganut keagamaan (Islam) mereka. Anak Benua dan sekitarnya juga meriah dengan percekocokan keagamaan: Islam Sunnah lawan Islam Syi'ah di Pakistan, Hindu lawan Islam di India, Hindu lawan Buddhisme (dan Islam) di Srilanka, dan Buddhisme lawan Islam di Burma dan Thailand. Di Filipina kita sudah lama mengetahui adanya konflik berlarut-larut antara Katolik dan Islam. Di tempat-tempat lain, konflik keagamaan itu jelas selalu merupakan potensi, yang syukurlah belum, tidak, atau malah tidak akan, terbuka.

Konflik-konflik tersebut memang mengandung hal-hal di luar masalah keagamaan sebagai faktor penyebab, utama atau tidak utama, seperti faktor kebangsaan, kesukuan, kebahasaan, kesenjangan ekonomi, kesejarahan, kekuasaan teritorial dan seterusnya. Namun jelas sekali bahwa warna keagamaan tidak dapat diabaikan, bahkan sedikit banyak mengandung semangat kebencian atas nama sebuah agama menghadapi agama yang lain, seperti yang amat tampak pada gejala konflik di bekas Yugoslavia. Dan setiap warna keagamaan dalam suatu konflik tentu melibatkan agama formal atau agama terorganisasi (*organized religion*).



DIMENSI HAJI

Secara keseluruhan, haji berdimensi vertikal dan horizontal sekaligus. Karena pada kenyataannya, sebagian besar ritual haji adalah tindakan-tindakan memperingati pengalaman Ibrahim, Hajar, dan Isma'il. Ketiga orang tersebut sangat berjasa dalam meletakkan dasar-dasar tauhid. Maka sebenarnya dimensi haji yang terutama adalah vertikal, tetapi efek yang diharapkan darinya adalah horizontal. Inilah yang dimaksudkan dengan haji mabrur: adanya keterkaitan antara segi vertikal (*ḥablun min Allâh*) dalam ibadah, dengan segi horizontal (*ḥablun min al-nâs*) dalam kerja-kerja kemanusiaan.

Seluruh ajaran agama, kalau dicoba untuk divisualisasikan, akan berbentuk kerucut dengan puncaknya adalah perikemanusiaan. Ini juga yang merupakan puncak dari seluruh pengalaman Nabi dalam Haji—hanya beliau lakukan satu kali—seperti terlihat dalam Pidato Perpisahan di Arafah ketika turun ayat yang terakhir mengenai kesempurnaan agama Islam. *Hari ini Kusempurnakan agamamu bagimu dan Kucukupkan karunia-Ku untukmu dan Kupilihkan Islam menjadi agamamu* (Q., 5: 3). Pesan-pesan perikemanusiaanlah yang seharusnya ditangkap oleh orang yang pergi haji, sehingga ketika pulang orang

itu memiliki perikemanusiaan yang lebih tinggi: itulah haji yang mabrur.



DIMENSI HIDUP KEMANUSIAAN

Sesungguhnya kita dapat mengetahui nilai-nilai budi luhur secara akal sehat atau “*common sense*” mengikuti hati nurani. Dan memang begitulah petunjuk Nabi, bahwa kita akan mengetahui amal perbuatan yang berbudi luhur jika kita rajin bertanya kepada hati nurani. Justru dalam agama Islam, hati kita disebut nurani (dari bahasa Arab, *nûrâni*, artinya, bersifat cahaya atau terang), karena baik menurut Al-Quran maupun Sunnah Nabi, hati kita adalah modal primordial (ada sebelum lahir) untuk *menerangi* jalan hidup sehingga kita terbimbing ke arah yang benar dan baik, yakni, ke arah budi luhur. Tetapi, sekadar untuk pegangan operatif dalam menjalankan pendidikan keagamaan kepada anak, mungkin nilai-nilai akhlak berikut ini patut sekali dipertimbangkan oleh orangtua untuk ditanamkan kepada anak dan keturunannya:

(1) Silaturahmi (*shîlat al-rahm*): yaitu pertalian rasa cinta kasih antara sesama manusia, khus-

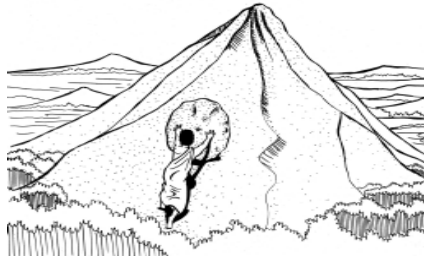
usnya antara saudara, kerabat, handai taulan, tetangga, dan seterusnya. Sifat utama Tuhan adalah kasih (*rahm*, *rahmah*) sebagai satu-satunya sifat Ilahi yang diwajibkan sendiri atas Diri-Nya (Q., 6: 12). Maka manusia pun harus cinta kepada sesamanya, agar Allah cinta kepadanya. “Kasihilah kepada orang di bumi, maka Dia (Tuhan) yang ada di langit akan kasih kepadamu.”

(2) Persaudaraan (*ukhûwah*): yaitu semangat persaudaraan, lebih-lebih antara sesama kaum beriman (biasa disebut *ukhûwah Islâmîyah*) seperti disebutkan dalam Al-Quran (Q., 49: 10-12), yang intinya ialah hendaknya kita tidak mudah merendahkan golongan yang lain, kalau-kalau mereka itu lebih baik daripada kita sendiri, tidak saling menghina, saling mengejek, banyak berprasangka, suka mencari-cari kesalahan orang lain, dan suka mengumpat (membicarakan keburukan seseorang yang tidak ada di depan kita).

(3) Persamaan (*musâwâh*): yaitu pandangan bahwa semua manusia, tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan ataupun kesukuannya, dan lain-lain, adalah sama dalam harkat dan martabat. Tinggi

rendah manusia hanya ada dalam pandangan Tuhan yang tahu kadar takwa itu (Q., 49: 13). Prinsip ini dipaparkan dalam Kitab Suci sebagai kelanjutan pemaparan tentang prinsip persaudaraan di kalangan kaum beriman. Jadi persaudaraan berdasarkan iman (*ukhûwah Islâmîyah*) diteruskan dengan persaudaraan berdasarkan kemanusiaan (*ukhûwah insânîyah*).

- (4) Adil (*‘adl*): yaitu wawasan yang “seimbang” atau “*balanced*” dalam memandang, menilai atau menyikapi sesuatu atau seseorang, dan seterusnya. Jadi tidak secara *apriori* menunjukkan sikap positif atau negatif. Sikap kepada sesuatu atau seseorang dilakukan hanya setelah mempertimbangkan segala segi tentang sesuatu atau seseorang tersebut secara jujur dan seimbang, dengan penuh iktikad baik dan bebas dari prasangka. Sikap ini juga disebut tengah (*wasth*) dan Al-Quran menyebutkan bahwa kaum beriman dirancang oleh Allah un-



tuk menjadi golongan tengah (*ummah wasath*) agar dapat menjadi saksi untuk sekalian umat manusia, sebagai kekuatan penengah (*wasîth*) (Q., 2: 143).

- (5) Baik sangka (*husnuzhzhann*): yaitu sikap penuh baik sangka kepada sesama manusia, berdasarkan ajaran agama bahwa manusia itu pada asal dan hakikat aslinya adalah baik, karena diciptakan Allah dan dilahirkan atas *fithrah* atau

kejadian asal yang suci. Sehingga manusia itu pun pada hakikat aslinya adalah makhluk yang berkecenderungan kepada kebenaran dan kebaikan (*hanîf*)

- (6) Rendah hati (*tawadldlu*): yaitu sikap yang tumbuh karena keinsafan bahwa segala kemuliaan hanya milik Allah, maka tidak sepatasnya manusia “mengklaim” kemuliaan itu kecuali dengan pikiran yang baik dan perbuatan yang baik, yang itu pun hanya Allah yang akan menilainya (Q., 35: 10). Lagi pula, kita harus rendah hati karena *Di atas setiap orang yang tahu (berilmu) adalah Dia*

Yang Mahatahu (Maha Berilmu) (Q., 12: 76). Apalagi kepada sesama orang yang beriman, sikap rendah hati itu adalah suatu kemestian. Hanya kepada mereka yang jelas-jelas menentang kebenaran kita dibolehkan untuk bersikap “tinggi hati” (Q., 5: 54 dan Q., 48: 29).

- (7) Tepat janji (*wafâ*): salah satu sifat orang yang benar-benar beriman ialah sikap selalu menepati janji bila membuat perjanjian (Q., 2: 177). Dalam masyarakat dengan pola hubungan yang lebih kompleks dan luas, sikap tepat janji lebih-lebih lagi merupakan unsur budi luhur yang amat diperlukan dan terpuji.
- (8) Lapang dada (*insyirâh*): yaitu sikap penuh kesediaan menghargai orang lain dengan pendapat-pendapat dan pandangan-pandangannya, seperti dituturkan dalam Al-Quran mengenai sikap Nabi sendiri disertai pujian kepada beliau (Q., 3: 159). Sikap terbuka dan toleran serta kesediaan bermusyawarah secara demokratis terkait erat sekali dengan budi luhur lapang dada ini.
- (9) Dapat dipercaya (*amânah*): salah satu konsekuensi iman ialah amanah atau penampilan diri yang dapat dipercaya.

Amanah sebagai budi luhur adalah lawan dari khianat (*khiyânah*) yang amat tercela. Keteguhan masyarakat memerlukan para anggotanya yang terdiri dari pribadi-pribadi yang penuh amanah dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar.

- (10) Perwira (*‘iffah* atau *ta’affuf*): yaitu sikap penuh harga diri, namun tidak sombong (jadi tetap rendah hati), dan tidak mudah menunjukkan sikap memelas atau iba dengan maksud mengundang belas kasihan orang lain dan mengharapkan pertolongannya (Q., 2: 273).
- (11) Hemat (*qawâmîyah*): yaitu sikap tidak boros (*isrâf*) dan tidak pula kikir (*qatr*) dalam menggunakan harta, melainkan sedang (*qawâm*) antara keduanya (Q., 25: 67). Apalagi Al-Quran menggambarkan bahwa orang yang boros adalah teman setan yang menentang Tuhannya (Q., 17: 26).
- (12) Dermawan (*munfiqûn*): yaitu sikap kaum beriman yang memiliki kesediaan yang besar untuk menolong sesama manusia, terutama mereka yang kurang beruntung (para fakir miskin) dan terbelenggu oleh perbudakan dan kesulitan hidup lainnya [*raqabah*] dengan

mendermakan sebagian dari harta benda yang dikaruniakan dan diamanatkan Tuhan kepada mereka. Sebab manusia tidak akan memperoleh kebaikan sebelum mendermakan sebagian dari harta benda yang dicintainya itu (Q., 3: 17 dan 93).

Nilai-nilai kemanusiaan yang membentuk akhlak mulia di atas itu tentu masih dapat ditambah dengan deretan nilai yang banyak sekali. Namun kiranya, yang tersebut di atas itu akan sedikit membantu mengidentifikasi agenda pendidikan keagamaan dalam rumah tangga yang lebih konkret dan operasional. Sekali lagi, pengalaman nyata orangtua dan pendidik akan membawanya kepada kesadaran akan nilai-nilai budi luhur lainnya yang lebih relevan untuk perkembangan anak. Maka faktor eksperimentasi, asalkan disertai ketulusan niat dan kejujuran memandang masalah, akan sangat penting dalam usaha menemukan agenda-agenda pendidikan keagamaan untuk anak, dalam rumah tangga, juga di luar rumah tangga.



DIMENSI HIDUP KETUHANAN

Dalam bahasa Al-Quran, dimensi hidup Ketuhanan juga disebut jiwa *rabbânîyah* (Q., 3: 79) atau

ribbîyah (Q., 3: 146). Dan jika dicoba diperinci apa saja wujud nyata atau substansi jiwa Ketuhanan itu, maka kita dapatkan nilai-nilai keagamaan pribadi yang amat penting yang harus ditanamkan kepada anak. Kegiatan menanamkan nilai-nilai itulah yang sesungguhnya akan menjadi inti pendidikan keagamaan. Di antara nilai-nilai itu yang sangat mendasar ialah:

- (1) *Îmân*: yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi tidak cukup hanya *percaya* kepada adanya Tuhan, melainkan harus meningkat menjadi sikap *memercayai* kepada adanya Tuhan dan *menaruh kepercayaan* kepada-Nya.
- (2) *Islâm*: sebagai kelanjutan adanya *îmân*, maka sikap pasrah kepada-Nya (yang merupakan makna asal perkataan Arab “*Islâm*”), dengan meyakini bahwa apa pun yang datang dari Tuhan tentu mengandung hikmah kebaikan, sementara kita yang lemah (*dla’îf*) ini tidak mungkin mengetahui seluruh wujudnya. Sikap taat (Arab: *dîn*) tidak absah (dan tidak diterima oleh Tuhan) kecuali jika berupa sikap pasrah (*Islâm*) kepada-Nya.
- (3) *Ihsân*: yaitu kesadaran yang mendalam-dalamnya bahwa Allah senantiasa hadir atau berada ber-

sama kita di mana pun berada. Bertalian dengan ini, dan karena menginsafi bahwa Allah selalu mengawasi kita, maka kita harus berbuat, berlaku, dan bertindak menjalankan sesuatu dengan sebaik mungkin dan penuh rasa tanggung jawab, tidak setengah-setengah dan tidak dengan sikap sekadarnya saja.

- (4) *Taqwâ*: yaitu sikap yang sadar penuh bahwa Allah selalu mengawasi kita, kemudian kita berusaha berbuat hanya sesuatu yang diridlai Allah, dengan menjauhi atau menjaga diri dari sesuatu yang tidak diridlai-Nya. Takwa inilah yang mendasari budi pekerti luhur atau *al-akhlâq al-karîmah*.
- (5) *Ikhlâsh*: yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan, semata-mata demi memperoleh ridla atau perkenan Allah, dan bebas dari pamrih lahir dan batin, tertutup maupun terbuka. Dengan sikap yang *ikhhlâsh* orang akan mampu mencapai tingkat tertinggi nilai karsa batinnya dan karya lahirnya, baik pribadi maupun sosial.
- (6) *Tawakkal* (dalam ejaan yang lebih tepat, “*tawakkul*”): yaitu sikap senantiasa bersandar kepada Allah, dengan penuh harapan kepada-Nya dan keyakinan bahwa Dia akan menolong kita dalam mencari dan menemukan

jalan yang terbaik. Karena kita “memercayai” atau “menaruh kepercayaan” kepada Allah, maka *tawakkal* adalah suatu kemestian.

- (7) *Syukûr*: yaitu sikap penuh rasa terima kasih dan penghargaan, dalam hal ini atas segala nikmat dan karunia yang tidak terbilang banyaknya, yang dianugerahkan Allah kepada kita. Sikap bersyukur sebenarnya sikap optimistis kepada hidup ini dan pandangan senantiasa berpengharapan kepada Allah. Karena itu, sikap bersyukur kepada Allah adalah sesungguhnya sikap bersyukur kepada diri sendiri (Q., 31: 12), karena manfaat besar kejiwaannya yang akan kembali kepada yang bersangkutan.
- (8) *Shabr* (sabar): yaitu sikap tabah menghadapi segala kepahitan hidup, besar dan kecil, lahir dan batin, fisiologis maupun psikologis, karena keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Jadi, sabar adalah sikap batin yang tumbuh karena kesadaran akan asal dan tujuan hidup, yaitu Allah Swt.

Tentu masih banyak lagi nilai-nilai keagamaan pribadi yang diajarkan dalam Islam. Namun, kira-

nya sedikit yang disebutkan di atas itu akan cukup mewakili nilai-nilai keagamaan mendasar yang perlu ditanamkan kepada anak, sebagai bagian amat penting dari pendidikan keagamaannya. Biasanya, orangtua atau pendidik akan dapat mengembangkan pandangan tersebut sehingga meliputi nilai-nilai keagamaan lainnya, sesuai dengan perkembangan anak.



DIMENSI HORIZONTAL SHALAT

Bacaan dalam ruku' dan sujud adalah masalah *khilâfiah*, atau perbedaan pendapat kecil yang tidak perlu dirisaukan. Sebab akhirnya bacaan itu sama saja, karena yang penting adalah bagaimana menghayatinya dalam hati. Yang wajib dalam shalat adalah *takbîr* yang pertama, membaca Al-Fâtihah, lalu *tahîyah* yang merupakan *greeting* (sambutan), bahwa semua tegur sapa yang baik adalah untuk Allah. Seolah kita menegur sapa Tuhan, kemudian menegur sapa Nabi, dan menegur sapa kepada semua sesama manusia yang saleh. Kemudian syahadat, shalawat, dan salam adalah juga wajib.

Salam pada akhir shalat seolah merupakan peringatan kepada kita agar shalat menghasilkan suatu yang bersifat amal saleh. Meng-

ucapkan *assalâmu'alaykum* adalah doa untuk sesama manusia supaya semuanya sejahtera dan bahagia. Hal ini diperkuat dengan anjuran supaya menengok ke kanan dan ke kiri yang merupakan simbolisasi, perlambangan dari keharusan kita untuk menengok atau memerhatikan masyarakat kanan-kiri kita. Maka dalam shalat seolah kita menghadap Tuhan dengan *Allâhu Akbar* yang “mati dalam hidup”, yang vertikal, dan ketika selesai meminta izin pada Tuhan untuk kembali kepada pekerjaan kita. Seolah Tuhan mengizinkan dan berpesan “ucapkan salam terlebih dahulu, nyatakan bahwa kamu punya perhatian kepada sesama manusia dan tengok kanan-kirimu.” Itulah amal saleh. Jadi *Allâhu Akbar* adalah *ḥablun min Allâh* dan *assalâmu'alaykum* adalah *ḥablun min al-nâs*. *Allâhu Akbar* harus kita hayati setinggi-tingginya, yaitu sampai kepada takwa, ridla dan sebagainya; dan *assalâmu'alaykum* juga kita hayati setinggi-tingginya sampai kepada menegakkan keadilan, menciptakan pemerintahan yang baik dan sebagainya.



DIMENSI IBADAH DALAM ISLAM

Ibadah-ibadah dalam Islam selalu mempunyai dua dimensi, verti-

kal dan horizontal. Dimensi vertikal sifatnya sangat pribadi, sehingga tidak dapat dijangkau oleh orang lain dan di situlah letak takwa, ikhlas, dan sebagainya. Sedang dimensi horizontal bersifat sosial, menyangkut orang lain. Contoh yang paling dekat adalah shalat yang dimulai dengan *takbîr*, *Allâhu Akbar*, suatu pernyataan untuk membuka komunikasi dengan Allah. Inilah dimensi vertikal dan pribadi, ka-

rena *takbîr* merupakan simbolisasi dari keimanan kita, yang tidak mungkin diukur dari luar. Karena itu, Nabi menegaskan bahwa “*sesungguhnya Allah tidak melihat jasmanimu (penampilan luarmu) akan tetapi melihat batinmu.*” Namun, penegasan ini tidak boleh dipahami secara simplistik untuk kemudian mengabaikan yang lahiriah, karena Nabi juga menegaskan bahwa “*yang lahir itu menunjukkan yang batin.*” Jadi, keduanya selalu ada korelasi.

Akhir dari shalat adalah salam, mengucapkan *assalâmu ‘alaykum* yang merupakan doa untuk keselamatan orang lain. Menengok ke kiri dan ke kanan, meskipun sunnah, sebenarnya merupakan simbolisasi bahwa selain berhubungan

dengan Allah, kita juga harus berhubungan dengan sesama manusia. Inilah aspek sosial dari shalat. Jadi, antara *takbîr* dengan salam tidak bisa dipisahkan, seperti juga adanya perwujudan dualitas antara iman dan amal saleh, takwa dan budi pekerti luhur. Ada sebuah hadis sahih yang menyebutkan bahwa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga adalah takwa kepada Allah dan budi pekerti luhur.

Dalam Al-Quran ada gambaran metafor mengenai apa yang akan terjadi di akhirat ketika orang yang di surga merasa kaget karena temannya masuk neraka. *Apakah yang membawa kamu ke dalam api neraka? Mereka berkata, “Kami tak termasuk golongan orang yang shalat. Juga tidak memberi makan orang miskin”* (Q., 74: 42-44).

Dari keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa yang menyebabkan orang masuk neraka adalah *pertama*, tidak pernah mengucapkan *Allâhu Akbar*, dan *kedua*, tidak pernah mengucapkan *assalâmu ‘alaykum*, yang berarti tidak pernah menengok ke kiri dan ke kanan. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian tingkat kualitas yang tinggi dalam ibadah tidak cukup dengan forma-

Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu bertikai, maka kamu akan menjadi lemah dan hilang wibawamu. Bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta mereka yang sabar.

litas semata, melainkan harus menangkap makna di balik setiap ibadah. Kita tidak boleh puas dengan kesalahan formal, karena batin lebih primer dibanding lahir. Karena itu, khusyuk menjadi instrumen yang sangat penting.

Ketika shalat, setelah bertakbir Nabi membaca “*wajjahtu wajhiya li al-ladzî fathara al-samâwât wa al-ardl hanîfan musliman wamâ ana min al-musyrikîn*”. Artinya, secara hakiki sebenarnya manusia itu baik. Maka “hadapkanlah diri kepada Allah penuh pasrah kepada-Nya tanpa menyimpangkan tujuan hidup kepada selain-Nya” merupakan kelanjutan dari apa yang sudah ada dalam diri manusia. Allah kemudian diposisikan sebagai *sangkan paran*, asal dan tujuan hidup. Inilah ide yang terkandung dalam kalimat *innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji’ûn* (kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada-Nya).

Khusyuk adalah aspek terpenting dalam ibadah, terlepas dari pembahasan kitab-kitab fiqih yang lebih menekankan sah tidaknya shalat dari aspek lahir, seperti wudlu, kebersihan badan, pakaian, dan sebagainya. Khusyuk merupakan hal yang sangat prinsipil dan menjadi tujuan shalat itu sendiri. Apalah gunanya shalat kalau tidak khusyuk kepada Allah; *dirikan shalat untuk mengingat Aku* (Q., 20: 14). Inilah tujuan intrinsik dari shalat. Sedang-

kan tujuan yang dilambangkan dalam salam di akhir shalat boleh disebut sebagai tujuan akibat, yakni konsekuensi orang yang berhubungan baik dengan Allah adalah berhubungan baik pula dengan sesama manusia yang terejawantahkan dalam *al-akhlâq al-karîmah*.



DIMENSI KERUHANIAN WAHYU

Indra jasmani itu sesungguhnya tidak dapat menangkap lebih mendalam hakikat sebenarnya wujud sekeliling yang ada, padahal keinsafan akan hakikat wujud itu diperlukan bagi kebahagiaan hakiki manusia dalam ukuran yang lebih besar dan jangka waktu yang lebih panjang. Karena itulah, manusia memerlukan “informasi” atau “berita”. Dalam bahasa Arab, salah satu kata-kata untuk “berita” ialah “*naba*” atau *naba’un*” yang dari situ terambil kata-kata dan istilah “Nabi” (*Nabî*) yang menurut para ahli bahasa berasal dari kata-kata *Nabi’un* (“orang yang mendapat berita”). Tentu, berita dari Tuhan yang dibawa atau diperoleh para nabi ialah apa yang dimaksudkan dalam istilah keagamaan sebagai “Wahyu”.

Oleh karena Wahyu berasal dari, dan bersifat, ruhani (antara lain, tidak empirik sehingga juga tidak terjangkau oleh sains), maka, sung-

guh menarik, banyak keterangan dalam Al-Quran yang menyebutkan Wahyu itu sebagai Ruh atau, dalam bahasa Inggris, *Spirit*. Beberapa firman Allah menegaskan hal ini: *Demikianlah Kami (Allah) wahyukan kepada engkau (Muhammad) Ruh dari perintah Kami* (Q., 42: 52) serta firman *Nya, Dia (Allah) menurunkan para malaikat dengan Ruh dari perintah-Nya* (Q., 16: 2) dan *Dia (Allah) yang Mahatinggi derajat-Nya, yang memiliki Singgasana (Arasy), yang mengirimkan Ruh dari Perintah-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki dari kalangan para hamba-Nya untuk menyampaikan peringatan tentang adanya Hari Pertemuan (Kiamat)* (Q., 40: 15).

Berdasarkan itu, Ruh juga berarti inspirasi. Sebab inspirasi, yaitu sumber pengetahuan, keinsafan dan kebijakan yang mendalam pada manusia, adalah sejenis wujud non-empirik (antara lain, tidak dapat diulang karena tidak dapat diketahui hukum-hukum yang mengaturnya). Terlebih lagi jika inspirasi itu mencapai tingkat seperti yang diterima oleh para nabi dan rasul, yang kemudian dinamakan Wahyu atau Revelasi. Seperti halnya dengan Al-Quran, Wahyu yang berdimensi keruhanian itu tampil sebagai mukjizat. Dan itulah yang terjadi pada masa hidup Nabi, sehingga orang pun banyak bertanya

dan mempertanyakan apa hakikat Al-Quran yang disebut Ruh itu? Apakah ia sejenis syair atau malah perdukunan? Adanya sikap bertanya-tanya dan mempertanyakan tentang Al-Quran sebagai Ruh itu diabadikan dalam Kitab Suci sendiri: *Dan mereka bertanya kepada engkau (Muhammad) tentang Ruh (Wahyu). Katakan, "Ruh itu dari Perintah Tuhanku, dan kamu tidaklah diberi sesuatu dari pengetahuan (tentang Ruh itu), kecuali sedikit saja."* Dan jika Kami (Allah) menghendaki, tentulah Kami (dapat) melenyapkan apa yang telah Kami wahyukan kepada engkau (Muhammad), kemudian engkau dengan begitu tidak akan mendapatkan Pelindung terhadap Kami (Q., 17: 85-86).



DIMENSI KONSEKUENSIAL IBADAH

Setiap ibadah di dalam Islam, seperti shalat, puasa, zakat, dan sedekah, selalu diiringi dengan dimensi konsekuensial atau ikutan. Seperti ibadah puasa, perintah menjalankan ibadah shalat juga selalu diiringi dengan perintah berzakat—maksudnya zakat kekayaan. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan mendirikan atau me-

ngerjakan shalat, dan diiringi dengan perintah mengeluarkan zakat. Salah satu di antaranya ialah, *Dan dirikanlah shalat, keluarkanlah zakat, dan tundukkanlah kepalamu (ruku'lah—NM) bersama mereka yang menundukkan kepala (dalam ibadah)* (Q., 2: 43). Dan banyak lagi ayat lain dalam Al-Quran yang serupa, seperti surat Al-Hajj (Q., 22: 78), Yûnus (Q., 10: 87), dan Al-Nûr (Q., 24: 56).



DIMENSI KONSEKUENSIAL PUASA

Hakikat zakat, baik zakat *mâl* (kekayaan) maupun zakat fitrah atau zakat individu, adalah sebuah proses penyucian yang berdimensi kemanusiaan atau sosial. Dengan begitu, baik zakat *mâl* maupun zakat fitrah merupakan wujud dimensi konsekuensial sebuah pelaksanaan perintah Allah Swt. Di samping itu, ia juga merupakan sebuah penegasan, mengingatkan bahwa dalam agama Islam setiap ibadah selalu memiliki korelasi positif dengan amal saleh yang berdimensi kemanusiaan.

Hal ini adalah seperti shalat yang diawali oleh hubungan vertikal,

yang disimbolisasikan dengan melakukan takbir, dan diakhiri dengan melakukan salam, yang berarti memberikan kesejahteraan kepada seluruh manusia, bahkan kepada alam semesta. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, salam sebagai dimensi konsekuensial praktik ibadah shalat

merupakan wujud dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas kemanusiaan.

Paralel dengan shalat adalah ibadah puasa, yang pada satu sisi merupakan ibadah yang penuh

dengan misteri atau bahkan sangat misterius—yakni ibadah yang paling personal antara hamba dengan Allah Swt. Apalagi kalau dibandingkan dengan ibadah haji umpamanya, yang selalu diikuti oleh upacara seremonial—juga menekankan arti pentingnya dimensi konsekuensial yang wujudnya adalah adanya anjuran mengeluarkan zakat fitrah.

Berkenaan dengan ketentuan secara kuantitatif, sesuai kesepakatan para ulama, zakat fitrah dikeluarkan sebesar satu *shâ'*, yakni untuk ukuran orang Indonesia sama dengan 3,5 liter beras. Itu karena beras adalah makanan pokok mayoritas bangsa Indonesia. Para ulama



pun telah sepakat, setiap Muslim—tidak saja yang berpuasa—yang mampu diperintahkan menunaikan zakat fitrah.

Ide dasar zakat fitrah adalah mengajarkan orang beriman bahwa ibadah puasa tidak hanya berdimensi sangat pribadi seperti dalam Hadis Qudsi, “*Ibadah puasa adalah untuk-Ku, maka Aku (Allah) yang akan memberi balasannya,*” namun juga mengandung fungsi sebagai prasyarat menyempurnakan puasa. Di sini, fungsi dan kedudukan zakat fitrah dengan sendirinya paralel dengan salam dalam shalat. Shalat dinyatakan tidak sah kalau tidak melakukan salam, begitu pula dengan puasa yang tidak dianggap sah bila tidak diiringi dengan membayar zakat fitrah. Ini sekadar sebuah analogi dengan melihat ide dasarnya.

Perlu kiranya dipahami bahwa zakat fitrah, yang dianjurkan senilai dengan yang dimakan oleh setiap orang dalam sekali makan, ternyata memiliki pesan yang dinamik. Tentunya, tidak hanya seharga satu kali makan kebanyakan orang, umpamanya Rp.3.500,00 atau hanya berupa 3,5 liter beras semata. Namun, hal itu menjadi sangat variatif, bergantung pada kondisi perekonomian atau daya konsumsi makan setiap hari orang perseorangan yang sudah pasti juga beragam.

Sebagai contoh, kalau ada orang yang setiap hari mengeluarkan uang

sebesar seratus ribu rupiah untuk satu kali makan, tentunya akan tidak adil kalau kemudian ia hanya mengeluarkan zakat fitrah berupa beras kira-kira seharga Rp3.500,00 saja.

Hal yang demikian sebenarnya sudah diingatkan dan ditegaskan oleh Al-Quran bahwa dalam bersedekah, termasuk dalam mengeluarkan zakat fitrah, orang beriman hendaknya memberikan yang terbaik. Sesungguhnya sedekah, baik zakat *mâl* maupun fitrah, efeknya akan kembali kepada dirinya sendiri. *Hai orang yang beriman! Sumbangkanlah yang baik-baik sebagian dari penghasilanmu dari yang dikeluarkan bumi untuk kamu dan bahkan janganlah kamu niatkan menyumbangkan yang buruk-buruk padahal kamu sendiri tak mau menerimanya, kecuali dengan mata tertutup dan ketahuilah Allah Mahakaya, Maha Terpuji* (Q., 2: 267).

Dari pernyataan dan teguran Al-Quran tersebut, sebenarnya kita diingatkan, apakah yang biasa memakan makanan dengan nilai dan kualitas makanan sekali makan senilai Rp.100.000,00 umpamanya, juga mau memakan atau menerima makanan yang nilainya hanya Rp.3.500,00? Tentu, kita menjadi tidak suka, tersinggung, atau bahkan barangkali memicingkan mata karena merasa malu menerima atau memakannya.



DIMENSI MODERN SOSIAL- POLITIK ISLAM KLASIK

Pembicaraan tentang Islam dan politik selalu menarik perhatian, karena kenyataan adanya hubungan yang sangat erat antara keduanya dalam sejarah. Semenjak Nabi Saw. hijrah dari Makkah ke Yatsrib dan kemudian memberi nama baru kepada kota itu sebagai *Al-Madīnah*, maka agenda-agenda politik kerassulan telah diletakkan, dan beliau bertindak sebagai Utusan Allah, kepala negara, komandan tentera, dan pemimpin kemasyarakatan. Semua yang dilakukan oleh Nabi Saw. di Kota hijrah itu adalah refleksi dari ide yang terkandung dalam perkataan Arab "*madīnah*", yang secara etimologis berarti "tempat peradaban", yaitu padanan perkataan Yunani "*polis*" (seperti dalam nama kota "Constantinopolis"). Dan "*madīnah*" dalam arti itu, adalah sama dengan "*ḥadlārah*" dan "*tsa-qāfah*", yang masing-masing sering diterjemahkan berturut-turut, "peradaban" dan "kebudayaan", tetapi secara etimologis mempunyai arti "pola kehidupan menetap" sebagai lawan "*badāwah*" yang berarti "pola kehidupan mengembara, *nomad*". Karena itu perkataan "*madīnah*", dalam peristilahan modern, menunjuk kepada semangat dan pengertian "*civil society*", suatu istilah Inggris yang berarti

"masyarakat sopan, beradab dan teratur" dalam bentuk negara yang baik. Dalam arti inilah maka harus dipahami kata-kata hikmah dalam bahasa Arab, "*al-insānu madaniyyun bi al-adabi*" ("manusia menurut *nature*-nya adalah bermasyarakat-budaya"—merupakan padanan adagium terkenal Yunani bahwa manusia adalah "*zoon politicon*").

Para khalifah, selaku para penguasa Islam, kemudian bertindak mengikuti konsekuensi logis prinsip-prinsip yang telah dirintis dan diletakkan Nabi. Di tangan para khalifah itu, khususnya 'Umar ibn Al-Khaththab, khalifah kedua, Islam tampil dengan keberhasilan politik yang luar biasa, lebih daripada agama lain mana pun. Berkaitan dengan hal inilah sering dikemukakan keunikan Islam di antara agama-agama. Dalam telaah perbandingan yang lebih luas dengan agama-agama lain, sesungguhnya keunikan Islam di sini bukanlah keterkaitan erat antara agama dan politik itu sendiri. Agama-agama lain juga mengenal keterkaitan yang sangat erat dengan politik, jika tidak boleh dikatakan menyatu atau tidak mengenal pemisahan dengan masalah politik. Negeri kita sendiri pernah menyaksikan tampilnya dengan megah negara-negara agama, seperti Sriwijaya yang Buddha dan Majapahit yang Hindu. Sebelum abad kedelapan belas, agama

Kristen di Eropa juga menyatu-padu dengan kekuasaan politik. Dan sebelum itu, sebelum munculnya agama Kristen, agama Yahudi juga mewujudkan nyata dalam politik atau kenegaraan, sehingga para pemimpin mereka adalah sekaligus pemimpin agama dan politik. Maka, sekali lagi, keunikan Islam bukanlah hubungannya yang sangat erat dengan politik. Keunikan Islam dibanding dengan agama-agama lain berada dalam pandangan-pandangannya tentang politik yang sangat maju, bahkan Robert N. Bellah, seorang sarjana sosiologi agama terkemuka, menyebutnya “sangat modern”, khususnya pandangan dan praktik politik yang berlaku di zaman para khalifah bijaksana (*al-khulafâ’ al-râsyidûn*). Letak kemodernan pandangan sosial-politik Islam klasik itu ialah: 1. Kedudukan pemimpin kenegaraan yang terbuka terhadap penilaian berdasarkan kemampuan; 2. Karena itu, pemimpin ditetapkan melalui proses pemilihan terbuka, dengan cara apa pun pemilihan itu dilakukan dalam sejarah sesuai dengan keadaan; 3. Semua warga masyarakat dan negara, yang disebut *ummat*, mempunyai hak dan kewajiban yang sama berdasarkan pandangan persamaan manusia (egalitarianisme) di depan Allah dan hukum-Nya; 4. Hak-hak tertentu yang luas dan adil juga diakui

ada pada golongan agama-agama lain (konsep tentang *Ahl Al-Kitâb*), yang dalam Piagam Madinah disebut menjadi bagian dari umat.



DIMENSI RASIONALITAS PERADABAN ISLAM

Salah satu kekayaan peradaban Islam adalah filsafat. Bagaimana filsafat Islam banyak memengaruhi berbagai peradaban umat manusia merupakan petunjuk betapa pentingnya arti filsafat itu. Berbagai tulisan telah banyak dibuat tentang pengaruh filsafat Islam pada agama-agama lain, khususnya Yahudi dan Kristen. Sekalipun Islam lebih muda usianya dari kedua agama itu, namun telah memengaruhi keduanya secara mendasar. Agama Yahudi dan Kristen sebelum dan sesudah Islam memiliki segi-segi perbedaan yang menunjukkan pengaruh Islam. Ini tentu saja di samping Islam sendiri yang merupakan kelanjutan kedua agama yang datang sebelumnya itu. Karena itu, banyak segi-segi ajaran Islam yang memiliki kesamaan dengan agama-agama Nabi Musa a.s. dan Nabi Isa Al-Masih a.s. Maka, jika dalam sejarah ketiga agama tersebut terjadi saling mengisi dan memperkaya, hal itu memang memiliki dasar dalam ajaran Kitab Suci.

Namun tentu tidak dapat diingkari adanya perdebatan-perdebatan sekitar masalah tersebut. Tentang unsur-unsur ajaran Yahudi dan Kristen yang memperkaya peradaban Islam, ada bagian-bagian yang kemudian terbukti tidak sejalan dengan ajaran Islam sendiri, lalu disebut *Yahûdiyât* dan *Nashrâniyât*. Unsur-unsur itu masuk ke dalam kitab-kitab tafsir, khususnya yang menyangkut sejarah dan berita tentang umat-umat yang telah lalu. Para pemikir pemurnian Islam seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridla banyak mengkritik unsur-unsur itu.

Jika demikian pengaruh kaum *Ahl Al-Kitâb*, maka lebih-lebih lagi pengaruh peradaban kalangan luar mereka seperti peradaban Yunani (kuno), Persi, India, dan Cina. Secara umum boleh dikatakan bahwa pengaruh peradaban-peradaban itu pada Islam ada dalam lingkup filsafat. Sebab pengertian “filsafat” sendiri, dalam pengertian literatur klasik Islam (dan literatur klasik banyak peradaban lain), meliputi pula bagian-bagian Zaman Modern ini yang disebut “ilmu pengetahuan” atau “Sains”. Bahkan, mencakup pula bidang-bidang kajian kemanusiaan seperti sastra dan musik. Tetapi pengertian “filsafat” lebih lanjut memang menyempit, dan hampir terbatas hanya kepada “filsafat pertama”, yaitu metafisika. Filsafat dalam pengertian inilah yang kelak menjadi

sasaran kritik dan polemik Al-Ghazali. Tetapi, kerasnya pukulan yang dilancarkan Al-Ghazali (juga banyak ulama ortodoks dari golongan kaum Hanbali), tidaklah sama sekali mematikan filsafat, melainkan hanya melemahkannya.

Kecurigaan pada filsafat antara lain timbul karena kesalahan para pendukungnya sendiri. Khalifah Al-Ma'mun dari Dinasti 'Abbasiyah selalu disebut oleh para ahli sejarah dengan sikap penghargaan dan kekaguman, karena idenya mendirikan *Bayt Al-Hikmah* di Baghdad, yang merupakan pusat pengembangan filsafat dan ilmu pengetahuan. Tetapi pada saat yang sama Khalifah juga mempraktikkan hal yang tidak bijaksana, yaitu *mihnah* (pemeriksaan paham pribadi, bahkan kalau perlu penganiayaan). Salah seorang korban *mihnah* ialah sarjana keagamaan besar, Ahmad ibn Hanbal, murid Al-Syafi'i, pendiri mazhab Hanbali yang banyak dianut di Arabia. Karena itu perlawanan yang sengit pada filsafat kemudian muncul dari kalangan kaum Hanbali, yang juga dikenal sebagai *Ahl Al-Hadits* itu.



DIMENSI VERTIKAL SHALAT

Bacaan pembuka shalat *Allâhu Akbar* disebut dengan *takbîrat al-ihrâm*, artinya takbir yang meng-

haramkan segala yang berdimensi horizontal. Begitu *Allâhu Akbar*, seluruh pekerjaan kita menjadi haram, karena kita harus memusatkan diri kepada Tuhan, dalam situasi menghadap Tuhan (*tawajjuh*). Karena itu, ada anjuran supaya kita membaca doa *iftitâh* (pembuka) seperti yang terdapat dalam Al-Quran *Kuhadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi sebagai penganut agama hanif—yang jauh dari syirik dan aku bukanlah golongan musyrik* (Q., 6: 79).

Penggunaan kata *samâwât* (banyak langit) karena Al-Quran menunjukkan bahwa langit terdiri dari tujuh lapis. Tujuh lapis langit dapat dipahami dengan berbagai tafsiran. Ada yang berpendapat bahwa tujuh lapis langit sebagai metafor, sedang yang dimaksud adalah banyak sekali. Banyak juga yang berpendapat, sesuai dengan kosmologi pada zaman Nabi, bahwa memang secara nyata ada tujuh lapis langit. Tetapi terlepas dari berbagai tafsiran yang ada, intinya kita menghadap Dia yang telah menciptakan langit dan bumi, menghadap suatu Zat yang sangat besar, yang agung. Maka ketika kita mengucapkan *Allâhu Akbar*, segala perhatian kita curah-

kan hanya kepada Allah, sehingga semua pekerjaan menjadi haram. Yang tinggal hanyalah hubungan vertikal kepada Allah, tidak ada hubungan horizontal, tidak ada hubungan solidaritas, kecuali terpaksa.



DINASTI ANAK KETURUNAN

Kita tahu bahwa *al-khulafâ' al-râsyidûn* hanya empat, dan itu pun hanya berlangsung 30 tahun.

Setelah itu apa yang terjadi? Negeranya tetap, dan mungkin etikanya juga tetap, tetapi formatnya sudah berbeda dan meng-

gunakan bahasa tertentu, misalnya Daulah Umawiyah, Daulah 'Abbasiyah. Kerajaan Saudi Arabia yang ada sekarang sebenarnya merupakan sisa-sisa dari penamaan (format) ini. Semuanya adalah keluarga, dinasti: Daulah Umawiyah berarti dinasti anak keturunan Umawiyah.

Umayyah sendiri adalah orang yang sangat memusuhi Nabi, tetapi anak keturunannya menjadi penguasa. Karena itu, muncul dendam berupa revolusi 'Abbasiyah setelah Bani Umayyah berkuasa sekitar seratus tahun. Dendam itu diwujudkan-

"*Apa pun yang dikehendaki Allah akan terjadi, dan apa pun yang tidak dikehendaki-Nya tidak akan terjadi.*"

kan dalam tindakan yang luar biasa sadisnya: seluruh Bani Umayyah dibunuh, laki-laki, perempuan, tua-muda, kecuali satu orang yang sempat melarikan diri ke Spanyol dan kemudian mendirikan Bani Umayyah di sana—peninggalannya dapat kita lihat sampai sekarang. Dalam melakukan revolusi, ‘Abbasiyah berkoalisi dengan kaum Khawarij dan Syi’ah, yang selama ini memang menjadi oposisi Bani Umayyah.

Kenapa disebut ‘Abbasiyah? Karena nenek moyangnya adalah Abbas, paman Nabi. Legitimasinya sangat tradisional, bahwa yang berhak memimpin dunia Islam adalah keluarga Nabi—sementara Syi’ah memandang bahwa yang berhak memimpin dunia Islam adalah keturunan ‘Ali. Setelah ‘Abbasiyah menang ternyata adagium “revolusi makan anaknya sendiri” pun berlaku. Maka berdirilah kerajaan ‘Abbasiyah yang ideologinya sama dengan Bani Umayyah. Sejak saat itu hingga sekarang perwujudan politik Islam selalu muncul dalam kerangka suku atau keluarga. Sisanya yang terakhir adalah kerajaan Saudi Arabia. Jadi, kerajaan sebenarnya lebih sempit daripada negara nasional.



DINASTI GENEALOGIS

Dikatakan Robert Bellah bahwa prinsip organisasi sosial yang ter-

buka dan egaliter partisipatif dalam sejarah awal Islam hanya berlangsung tidak terlalu lama. Setelah berjalan selama sekitar 40 tahun, sistem Madinah digantikan oleh sistem kekuatan dinastik klan Umayyah di Damaskus. Menurut Ibn Khaldun, sistem Umayyah bukanlah sistem kekhalifahan—sekalipun resminya kekhalifahan—melainkan sistem kerajaan (*mulk*) absolut. Dalam menjalankan pemerintahan dan menggunakan kekuasaan, rezim Umayyah mengikuti model kekaisaran otokratik Byzantium. Hal ini mencocoki sabda Nabi bahwa Islam dimulai dengan kenabian dan rahmah, disusul dengan kekhalifahan dan rahmah, kemudian kerajaan dan despotisme.

Lebih dari itu, rezim Umayyah kembali ke dalam prinsip-prinsip tatanan masyarakat pra-Islam (“*relapse into pre-Islamic principles of social organization*”—Bellah). Gerak kembali ke tatanan Arab pra-Islam kaum Umayyah itu terjadi karena mereka terdiri dari anggota-anggota klan yang memusuhi Nabi sampai saat-saat terakhir. Mereka bergabung dengan komunitas Madinah, dengan secara resmi menerima agama Islam, hanya setelah pembebasan Kota Makkah oleh Nabi dan pemberian amnesti umum kepada bekas musuh-musuh itu. Maka mereka disebut “*al-thulaqâ*”, yakni, orang-orang yang terbebaskan karena adanya amnesti.

Mereka sebenarnya tidak memiliki penghayatan tentang *al-Islâm* dalam makna generiknya—bukan fenomena sosiologis-historisnya—begitu pula tentang prinsip-prinsip komunitas nasional terbuka dan egaliter partisipatif yang menjadi konsekuensinya.

Kekuasaan yang demikian besar di Damaskus membuat mereka tidak berdaya terhadap godaan kembali kepada sistem sosial Arab pra-Islam yang telah mereka kenal dan jalankan sebelumnya. Maka ketika datang saatnya kekuasaan harus diganti, mereka tidak berpikir atau berusaha untuk meneruskan tradisi atau sunnah pengangkatan terbuka berdasarkan kemampuan calon pemimpin seperti pada masa-masa empat khalifah pertama. Sebaliknya, mereka menunjuk kalangan keluarga sendiri dengan pertalian darah sebagai dasar legitimasi, suatu dinasti genealogis yang ditentang oleh masyarakat Madinah. Dipelopori oleh 'A'isyah, janda Nabi, dan saudaranya, 'Abdurrahman bin Abu Bakar, masyarakat Madinah menilai kekuasaan berdasarkan pertalian darah itu sebagai penerapan sistem Persia dan Yunani, dan merupakan tradisi Kisra dan Kaisar (*sunnat-u Kisrâ wa Qaysar*) yang bertentangan dengan tradisi Rasul (*sunnat-u l-Rasûl*) dan bukan pula tradisi para khalifah (*sunnat-u l-Khulafâ*). Bahkan masyarakat Madinah menentangnya sebagai

Hirqabyyah, yakni, Herakliusisme, mengacu kepada sistem Heraklius, Kaisar Bizantium saat itu.

Tetapi rezim Umayyah tetap melanjutkan kehendak mereka yang menyimpang, dan asas komunitas nasional terbuka dan egaliter partisipatif pun sangat melemah, untuk kemudian berganti menjadi asas komunitas kekuasaan raja di mana seluruh negara dan kekayaannya adalah pada dasarnya milik dan untuk kepentingan para penguasa dan anggota kelompoknya semata, bukan untuk mashlahat umum. Sejak masa-masa itu, dunia Islam hanya mengenal prinsip organisasi kemasyarakatan dan kenegaraan atas dasar legitimisasi genealogis atau hubungan darah, dan berstruktur kekuasaan religio-feodalistik. Kekuasaan negara menjadi identik dengan kesukuan atau kekeluargaan, seperti 'Abbasiyah, Fathimiyah, 'Utsmaniyah (Ottoman), Ayyubiyah, dan seterusnya. Sebagian dari sistem kekuasaan dinastik-genealogis itu masih bertahan sampai hari ini, suatu penyimpangan dari prinsip *madînah* yang menyesatkan.

Dalam bahasa keagamaan, prinsip serupa itu disebut *'ashâbîyah*, dan tingkah laku berdasarkan *'ashâbîyah* disebut *ta'ashâhub*, tingkah laku kefanatikan buta. *Ashâbîyah* adalah perilaku Jahiliah, sehingga Rasulullah Saw. menegaskan bahwa barangsiapa mati dalam *'ashâbîyah*

maka ia mati dalam paham Jahiliyah. Prinsip organisasi sosial berdasarkan legitimasi genealogis itu baru mulai pudar setelah sebagian kaum Muslim berkenalan dengan paham republik (*republicanism*) dan demokrasi modern. Mereka menemukan bahwa republikanisme dan demokrasi lebih absah daripada paham kerajaan dinastik-genealogis, karena lebih mirip dengan sistem kekhalifahan klasik yang menerapkan sistem penetapan pemimpin melalui pemilihan terbuka berdasarkan kemampuan, suatu sistem yang dapat dipandang sebagai model bagi republikanisme modern.



DIPUJA DAN DICERCA

Ibn Rusyd lahir di Cordova (Arab: Qurthubah) pada 520 H/1126 M, 15 tahun setelah wafat Al-Ghazali (1111 M). Keluarga Ibn Rusyd, dari kakeknya, tercatat sebagai tokoh ilmuwan. Kakeknya menjabat sebagai *qâdlî* di Cordova dan meninggalkan karya-karya ilmiah yang berpengaruh di Spanyol, begitu pula ayahnya.

Maka Ibn Rusyd dari kecil tumbuh dalam suasana rumah tangga dan keluarga yang besar sekali perhatiannya kepada ilmu pengetahuan. Ia mempelajari kitab *Qânûn* karya Ibn Sina dalam kedokteran dan filsafat di kotanya sendiri.



Pada 548 H/1135 M, ia pergi ke Marakesh atas permintaan Ibn Thufayl (pengarang Kitab *Al-Hayy Ibn Yaqzhân* yang diduga kemudian dijiplak atau diadaptasi oleh Daniel Defoe menjadi *Robinson Cruso*). Saat itu Ibn Thufayl adalah dokter Khalifah Abu Ya'qub Yusuf dari dinasti Al-Muwahhidun. Dalam pertemuannya dengan Khalifah, Ibn Rusyd ditanya pendapatnya mengenai pandangan kaum filsafat tentang alam, apakah alam itu *Qadîm* (tak berawal) ataukah *muhdats* (terciptakan dan berawal). Ibn Rusyd segera merasa bahwa pertanyaan ini adalah permulaan bahwa ia bakal di-"*kuyo-kuyo*", mengingat kutukan terhadap failasuf mengenai hal itu dalam kitabnya *Tahâfut al-Falâsifah* masih sedang hangat-hangatnya dibicarakan para ulama dan agamawan.

Maka Ibn Rusyd pun menyatakan tidak tertarik kepada filsafat.

Setelah Khalifah melihat gelagat ketakutan pada Ibn Rusyd, ia berpaling kepada Ibn Tufayl, dan berdiskusi dengan Ibn Tufayl tentang masalah di atas, dengan mengutip berbagai pendapat dari Aristoteles, Plato, dan para ahli filsafat lain, serta menjelaskan bagaimana para *mutakallimûn* (ahli ilmu kalam, khususnya aliran Al-Asy'ari yang juga dengan giat dipopulerkan oleh Al-Ghazali) menolak pendapat para failasuf itu. Ibn Rusyd kagum dengan pengetahuan Khalifah mengenai filsafat, dan ia pun memberanikan diri menyatakan pendapat pribadinya yang sebenarnya. Khalifah yang berminat kepada filsafat itu pun kemudian memberinya berbagai hadiah.

Setelah pertemuan dengan Khalifah yang mengesankan itu, Ibn Tufayl meminta kepada Ibn Rusyd untuk menjabarkan dan menafsirkan karya-karya Aristoteles, dan memperkuat permintaannya itu dengan mengatakan bahwa Khalifah sering mengeluh atas sulitnya bahasa para failasuf Yunani dan buruknya terjemahan yang ada. Ibn Rusyd harus memikul kewajiban memecahkan masalah ini.

Pada 565 H/1169 M, Ibn Rusyd menjabat sebagai *qâdlî* (hakim) Kota Seville (Arab: Asybiliyyah, kota di Spanyol barat daya) untuk selama dua tahun, kemudian menjabat di Cordova, kota kelahirannya.

Tapi kesibukannya sebagai pejabat tidak menghalangi Ibn Rusyd untuk menulis, bahkan saat-saat inilah ia paling produktif dengan karya-karya ilmiah. Ia tetap menduduki jabatan itu sampai 578 H/1182 M, saat ia dipanggil oleh Khalifah ke Marakesh untuk menjadi dokter pribadinya, karena Ibn Tufayl sudah berusia lanjut. Tetapi ia tidak lama di Marakesh karena harus kembali ke Cordova sebagai *qâdlî al-qudlât* (hakim tinggi).

Ibn Rusyd tetap menikmati kehormatan dan priviledi yang diberikan kepadanya, sampai saat-saat permulaan Khalifah Ya'qub Ibn Yusuf, (harap dibedakan dengan Khalifah sebelumnya, Abu Ya'qub Yusuf, ayah Ya'qub yang namanya sendiri adalah Yusuf) menggantikan ayahnya yang bijaksana itu. Khalifah Ya'qub mula-mula, seperti ayahnya, juga menghormati Ibn Rusyd. Tetapi pada 1195 M Ibn Rusyd mulai di-*"kuyo-kuyo"* atas saran para tokoh agama, dan mulailah perang terhadap filsafat dan para failasuf. Ibn Rusyd dicopot dari segala jabatannya, dan diasingkan di Lausanne, dekat Cordova. Lebih dari itu, semua buku Ibn Rusyd diperintahkan untuk dibakar, kecuali yang mengenai ilmu-ilmu kedokteran, matematika, dan astronomi. Ia pun diumumkan ke seluruh negeri sebagai penyeleweng dan kafir, meskipun masih kurang dari

tuntutan para musuh Ibn Rusyd yang menghendaki “penyelesaian terakhir” atas failasuf kita ini.

Inilah saat-saat paling berat bagi Ibn Rusyd. Ia menjadi sasaran ejekan dan penghinaan para tokoh agama dan penyair. Dengan maksud menjilat Khalifah, para penyair menggubah puisi-puisi yang menghina Ibn Rusyd.

Pengalaman Ibn Rusyd yang sama sekali tidak nyaman itu adalah karena hasutan sebagian para tokoh agama (*rijâl al-dîn* belum tentu ulama) yang merasa iri hati atau hasad terhadapnya karena kedudukannya yang tinggi di bidang kehakiman. Tetapi hasutan mereka itu juga karena kebodohan, salah paham dan keagairahan keagamaan (*al-ghîrah al-dînîyah*) simplistik.

Beberapa kejadian kecil melukiskan kenyataan itu. Dalam salah satu bukunya, Ibn Rusyd dituduh menulis bahwa Khalifah adalah “raja Barbar” (*mâlik al-barbar*). Ia dipanggil Khalifah untuk ditanya tentang hal itu, dan Ibn Rusyd mencoba menerangkan bahwa ia tidak menulis *mâlik al-barbar*, melainkan *mâlik al-barrayn* (yang dalam penulisan Arab sangat mirip, hanya beda satu titik pada *bâ'* dalam ungkapan pertama dengan dua titik pada *yâ'* dalam ungkapan kedua: (*al-barbar*) dan (*al-barrayn*). Sedangkan makna antara keduanya jauh berbeda, karena ungkapan

kedua itu berarti “raja dua daratan”, maksudnya ialah Daratan Maghrib dan Daratan Andalusia di Eropa.

Ibn Rusyd juga dituduh kafir, lagi-lagi karena kebodohan dan sikap terburu nafsu sebagian para tokoh agama yang bukan selalu *'ulamâ'* itu. Dalam salah satu bukunya Ibn Rusyd menulis, “Telah tampak jelas bahwa Al-Zuhrah (planet Venus) adalah salah satu dari tuhan-tuhan (mereka).” Sebagian para tokoh agama memandang bahwa itulah keyakinan Ibn Rusyd—seorang *faqîh* yang sangat luas pengetahuannya dan seorang *qâdlî* atau hakim yang terkenal ketegaran dan keadilannya. Padahal Ibn Rusyd dalam buku itu membicarakan suatu kelompok manusia masa silam yang musyrik.

Memang, permusuhan antara kaum konservatif yang biasanya diwakili oleh tokoh-tokoh agama dengan kaum liberal yang diwakili oleh para failasuf dan ilmuwan selalu terdapat di mana saja dan dalam segala zaman. Kezaliman paling buruk akan terjadi jika terjalin koalisi dan hubungan saling menunjang antara para penguasa dan para tokoh agama yang berpandangan sempit dan kolot, seperti kezaliman yang menimpa Ibn Rusyd.

Asal mula penindasan terhadap tokoh filsafat ini ialah karena Khalifah ingin mengambil hati para to-

koh agama yang biasanya mempunyai hubungan emosional yang erat dengan rakyat awam. Khalifah melakukan hal itu karena didesak oleh keperluan memobilisasi rakyatnya menghadapi pemberontakan orang-orang Kristen di Spanyol. Apalagi, suatu hal yang cukup menarik, kaum Muslim di Spanyol lebih keras sikap antinya kepada para failasuf daripada kaum muslim Maghrib. Sebagian tokoh agama melihat hal itu sebagai kesempatan untuk tampil dengan kebencian atau kecemburuan mereka yang terpendam selama ini terhadap para pemikir kreatif seperti Ibn Rusyd itu. Seperti biasanya, demagog dan agitator yang kesukaannya memanipulasi sentimen publik selalu berusaha mengeruk manfaat dari situasi kritis yang mencekam.

Tetapi setelah pemberontakan itu berhasil diatasi dan situasi kritis berganti normal, keadaan pun berubah. Khalifah menunjukkan kecenderungannya yang asli, yaitu memihak pemikiran kreatif seperti diwakili oleh Ibn Rusyd, suatu sikap yang sebenarnya ia warisi dari ayahnya, Khalifah Abu Ya'qub Yusuf, mentor Ibn Tufayl dan Ibn Rusyd. Maka Khalifah pun memanggil kembali Ibn Rusyd ke istananya, dan memperlakukan failasuf itu dengan penuh kehormatan dan penghargaan. Hanya saja, Ibn Rusyd tidak lama menikmati po-

sisinya yang telah direhabilitasi itu, karena ia pada 19 Shafar 595 H/ Desember 1197 M berpulang ke rahmat Allah.



DISIPLIN DAN “BALASAN SETIMPAL”

Kita ketahui bersama bahwa terdapat kaitan antara disiplin dengan konsep tentang balasan setimpal—terhadap perbuatan baik maupun buruk—yaitu konsep keagamaan tentang “balasan dan dosa”, “*reward and punishment*”. Sebab, ketika seseorang bersedia menunda atau mengorbankan kesenangan atau kepentingannya sendiri, maka sebetulnya dia mempunyai harapan bahwa pada akhirnya nanti (pada Hari Pembalasan), dia akan mendapatkan balasan dari amalnya ini dan tidak bakal merugi. Ini memang sedikit banyak berdasarkan suatu realisme bahwa manusia pada dasarnya adalah egoistis, ingin melihat kepentingan pribadinya terpenuhi, lambat atau cepat, jangka panjang atau jangka pendek. Maka, *appeal* (pertimbangan) untuk berdisiplin dapat dilakukan pada pribadi-pribadi berkenaan dengan betapa kepentingannya itu akan terpenuhi dengan baik justru melalui ketaatan, kepatuhan, dan sikap tunduk secara sukarela dan penuh keinsafan pada aturan bersama dan

ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat.

Karena adanya keterkaitan dengan masalah “balasan setimpal” itu, maka disiplin tidak bisa dipisahkan dengan masalah penegakan hukum dalam masyarakat. Tertib hukum yang di situ dengan jelas terlaksanakannya prinsip “balasan setimpal” akan memberi kerangka institusional pada sikap berdisiplin. Dan tertib hukum itu tidak akan terwujud dengan baik tanpa partisipasi semua anggota masyarakat, dalam semangat “saling mengingatkan tentang kebenaran, dan saling mengingatkan tentang kesabaran.” Sebagai konsekuensinya—berkenaan dengan masalah disiplin ini—masing-masing anggota masyarakat dapat dengan bebas untuk saling memperingatkan dan saling mengawasi, serta untuk secara bersama memikul beban “penderitaan sementara”, karena yakin bahwa kelak, dalam jangka panjang, kebahagiaan sejati akan terwujud. Seperti kita ketahui, ini adalah salah satu interpretasi ajaran khas agama tentang dunia dan akhirat.



DISIPLIN DAN KETAKWAAN

Takwa itu diperlukan dalam kedisiplinan, karena kedisiplinan tidak tergantung kepada adanya peng-

awasan lahiriah. Ketulusan dalam perilaku, termasuk disiplin, mengharuskan adanya keyakinan bahwa semua perbuatan orang bersangkutan itu ada yang mengawasinya secara gaib dan mutlak, yaitu Tuhan. Karena itu, Rasulullah Saw. bersabda bahwa seseorang yang berbuat kejahatan, pada waktu sedang menjalankan kejahatannya itu maka ia tidaklah beriman, karena pada waktu itu dia menolak (*kufri*) kepada adanya pengawasan Tuhan.

Dalam rangka menanamkan budaya disiplin, memang penting sekali ditanamkan keimanan kepada Allah yang mendalam, khususnya keimanan dalam arti keinsafan akan adanya Dia Yang Mahahadir (*Omnipresent*), yang selalu menyertai manusia dan tidak pernah “absen” barang sedetik pun dalam mengawasi tingkah laku manusia. *Maka ke mana pun kamu menghadap, di sanalah Wajah Allah* (Q., 2: 115). *Dan Dia (Tuhan) itu beserta kamu di mana pun kamu berada, dan Allah Mahatahu segala sesuatu yang kamu kerjakan* (Q., 57: 4). *Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui segala yang ada di seluruh langit dan segala yang ada di bumi. Tidak akan terjadi bisikan antara tiga orang kecuali Dia adalah yang keempat, dan tidak akan terjadi bisikan antara lima orang kecuali Dia adalah yang keenam, tidak juga lebih sedikit dari itu atau lebih banyak kecuali Dia mesti bersama mereka di mana pun*

mereka berada. Kemudian Dia akan membeberkan kepada mereka segala sesuatu yang telah mereka kerjakan, nanti di hari kiamat. Sesungguhnya Allah Mahatahu atas segala sesuatu (Q., 58: 7). Maka barangsiapa memperbuat seberat atom kebaikan, ia akan melihatnya; dan barangsiapa memperbuat seberat atom kejahatan, ia pun akan melihatnya (Q., 99: 7-8). Semua yang di atas itu bersifat dasar, dan dimensinya lebih pribadi. Jika setiap pribadi memiliki rasa tanggung jawab yang mendalam berdasarkan keinsafan Ketuhanan tersebut, maka dapat diharapkan ia akan tampil dengan penuh ketulusan, termasuk dalam menaati dan mematuhi pemimpin dan peraturan-peraturannya, karena ia yakin bahwa semuanya itu akan membawa kebaikan umum (*mashlahah*) masyarakat yang luas. Perilaku seperti itu tentunya akan mendapat ridla Allah.



DISIPLIN DIMULAI DARI INDIVIDU-INDIVIDU

Dalam rangka mengusahakan disiplin nasional, maka yang harus dilakukan ialah dimulai dengan usaha penanaman kesadaran masing-masing anggota masyarakat bahwa tindakannya (yang berdimensi sosial) tidak hanya mempunyai akibat untuk dirinya sendiri,

tetapi juga untuk masyarakat. Oleh karena itu, masing-masing anggota masyarakat ini juga dituntut untuk selalu dapat mempertimbangkan apakah suatu tindakan yang semula tampak menguntungkan diri sendiri itu tidak merugikan orang lain.

Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa rasa kepedulian terhadap orang lain menuntut adanya pandangan hidup yang menegaskan bahwa melalui pemenuhan kepentingan masyarakat secara meluas, realisasi kepentingan seseorang secara individual dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Itu berarti masing-masing pribadi (dalam bertindak) tidak mudah terkecoh oleh penampakan lahiriah keuntungan atau perolehan pribadi saja. Dalam konteks ini, disiplin sangat terkait dengan konsep “sabar” (dari bahasa Arab *al-shabr*), yang arti sesungguhnya adalah ketabahan, kesanggupan menahan diri, dan kesediaan untuk tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri yang merugikan kepentingan orang banyak. Sikap untuk tidak mendahulukan kepentingannya sendiri ini timbul karena adanya keyakinan bahwa kepentingan diri sendiri itu akan terpenuhi dengan lebih baik melalui pemenuhan kepentingan bersama. Jadi, disiplin ini mengharuskan adanya kesediaan masing-masing pribadi untuk menunda kesenangan diri sendiri, dan dengan

tabah menunggu atau mengandalkan terwujudnya kesenangan diri sendiri itu melalui terwujudnya kesenangan bersama. Sepintas lalu sikap semacam itu mengesankan sebagai sikap yang bersedia berkorban. Namun, dalam analisis selanjutnya, sikap itu justru akan menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar, lebih awet, dan lebih hakiki. Dan sikap ini pun sepenuhnya dapat dibenarkan. Dengan kata lain—sebagaimana diungkapkan dalam pepatah Melayu—disiplin menghendaki semangat “Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.”

Pepatah Melayu itu sebenarnya memperingatkan kita agar selalu berpikir strategis, jangka panjang, dan jangan hanya berpikir taktis, jangka pendek. Jargon dalam ilmu strategi mengatakan, “*You may lose the battle, but You should win the war*” (Anda boleh kalah dalam pertempuran, tetapi Anda harus menang dalam peperangan). Pertempuran adalah segi taktis, jangka pendek; sedangkan peperangan adalah segi strategis, jangka panjang. Terjemah bebas dalam konteks

“Mengisi pribadi dengan sifat-sifat yang ada pada Tuhan, yakni sifat-Nya, yang dapat kita jadikan sifat kita, menurut kesanggupan yang ada pada kita ... Bertasawuflah tetapi bukan menolak hidup.”

(Buya Hamka)

ini adalah tidak mengapa kita mengalami “kerugian” pribadi karena mendahulukan kepentingan bersama, sebab kita yakin bahwa terwujudnya kepentingan bersama pada akhirnya akan membawa pada “keuntungan” pribadi kita semua. Prinsip ini dengan jelas tampak dalam sikap berdisiplin. Dan memang tujuan dilaksanakannya sikap berdisiplin ini adalah untuk merealisasikan kepentingan bersama secara lebih efektif dan lebih efisien. Karena hanya dengan cara itu pulalah kepentingan-kepentingan pribadi dapat terpenuhi dengan baik.



DISIPLIN NASIONAL

Tegaknya disiplin nasional dalam arti yang seluas-luasnya langsung terkait dengan pandangan hidup yang melihat jauh ke depan dan meliputi dimensi sosial yang luas. Disiplin nasional tidak akan terwujud jika dalam masyarakat tidak cukup banyak orang, kalau pun tidak semua orang, memiliki kesadaran dan keinsafan akan dimensi hidup yang tidak hanya me-

nyangkut hari ini, tetapi juga meliputi masa mendatang. Sebab, sikap berdisiplin dengan sendirinya mengandung semangat perhitungan tidak hanya untuk saat ini saja, tetapi justru lebih ditekankan untuk kelak kemudian hari.

Sikap disiplin juga mengharuskan adanya keinsafan bahwa hidup seorang pribadi tidak terlepas dari hidup orang banyak. Kesediaan untuk tidak mendahulukan kesenangan diri sendiri—kesediaan ini merupakan unsur amat penting dalam mewujudkan sikap berdisiplin—hanya terjadi jika seseorang mampu melihat bahwa dirinya adalah bagian dari keseluruhan masyarakat, dan bahwa dalam lingkup yang lebih luas serta jangka waktu yang lebih panjang, kesenangan atau kebahagiaan dirinya itu terkait, bahkan tergantung pada kesenangan atau kebahagiaan orang banyak, yaitu keseluruhan masyarakat.

Keterpaduan dari semua faktor tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa disiplin bisa benar-benar tumbuh dan mentradisi hanya jika dikaitkan dan didasarkan pada keyakinan hidup yang menyeluruh dan total, dan jika seseorang menemukan makna hidup—yang nyangkut asal dan tujuan hidup itu—dalam keyakinan tersebut. Sistem keyakinan serupa itu disediakan oleh agama-agama atau ideologi padanan agama seperti

komunisme, nazisme, dan bahkan berbagai kultus (seperti *People's Temple*, *Children of God*, *Unification Church*, Bhagwan Shri Rajneesh, Harri Krishna, Jamaah Tabligh, tarekat-tarekat tertentu, Mbah Suro dan lain-lain)—semuanya menghasilkan perilaku berdisiplin yang tinggi. Itulah sebabnya, dalam hampir setiap pembicaraan mengenai usaha menegakkan disiplin nasional perlu dikaitkan juga dengan peranan agama dalam memberi tuntunan bagi para pemeluknya untuk berdisiplin. Meskipun tidak dapat dikatakan tentang adanya hubungan satu-satu (*one-to-one relationship*) antara pemeluk suatu agama dengan wujud disiplin pribadi dalam hidup sehari-hari, tetapi secara normatif—sesuai ajaran agama bersangkutan—penganutan suatu agama seharusnya menghasilkan suatu kedisiplinan. Tetapi setiap tinjauan normatif akan dapat menyesatkan, yaitu jika tidak dikaitkan dengan kenyataan yang sedang dihadapi pemeluknya. Namun, segi normatif itu paling tidak bisa menjadi tumpuan harapan bagi pelaksanaan disiplin ini.

Untuk memperjelas persoalan di atas, ada baiknya terlebih dulu kita telusuri makna kata disiplin itu. Secara etimologis kata “disiplin” (Inggris: “*discipline*”) berarti sesuatu, termasuk sikap dan tindakan yang berkenaan dengan kedudukan sese-

orang sebagai murid (*disciple*), kebalikan dari “doktrin” (Inggris: “*doctrine*”) yang secara etimologis berarti sesuatu yang berkenaan atau berasal dari guru atau sarjana (*doctor*). Oleh karena itu, dalam kata-kata tersebut, “doktrin” lebih banyak menyangkut teori abstrak, sedangkan “disiplin” lebih banyak menyangkut praktik atau tindakan.



patuh, dan taat adalah bagian sangat penting dari sikap keagamaan. Dalam hal ini ialah tunduk, patuh, dan taat kepada Tuhan (makna generik perkataan Arab “*islâm*”, yang semula digunakan untuk menunjukkan semangat dan kemudian digunakan sebagai nama, yaitu khususnya semangat dan nama agama yang dibawa Nabi Muhammad Saw.)



DISKRIMINASI PENDIDIKAN KOLONIAL

Dari keterangan etimologis itu tampak bahwa sebenarnya “disiplin” memiliki persamaan atau kesejajaran makna dengan kata-kata “taat”. Hal yang sudah amat jelas itu perlu dikemukakan karena dari sisi itulah kita dapat melihat kaitan langsungnya dengan agama. Dalam bahasa Arab, misalnya, perkataan yang memiliki makna serupa dengan “agama” ialah “*dîn*”. Seperti terbaca dalam Kitab Suci “*lakum dînukum waliya dîn*” (*bagimu dîn-[agama]-mu dan bagiku dîn-[agama]-ku—* Q., 109: 6), dan perkataan “*dîn*” itu berasal dari “*dâna—yadînu*”, yang artinya antara lain ialah tunduk, patuh, atau taat. Maka agama adalah suatu sistem ketundukan, kepatuhan, dan ketaatan, atau sistem disiplin. Sehingga sikap tunduk,

Sistem pendidikan kolonial sangat diskriminatif terhadap kaum Muslim (*santri*). Sistem itu diorganisasi dengan konsep stratifikasi sosial Belanda atas pendudukan Indonesia. Di puncak piramida adalah orang-orang Eropa, disusul oleh kaum ningrat pribumi (*priyayi*), dan kemudian oleh “orang-orang Timur asing” khususnya orang Cina. Pada dasar piramida adalah rakyat jelata, terutama terdiri atas orang Muslim. Karenanya, sekolah-sekolah dasar dilembagakan secara hierarkis, yang di puncaknya adalah sekolah-sekolah khusus untuk orang-

orang Eropa (ELS—*Eropesche Lagere School*—*European Elementary School*), disusul sekolah-sekolah kaum ningrat tradisional (HIS—*Holland's Inlandse School*)—dan kemudian disusul oleh HCS (*Holland's Chinese School*). Semua sekolah itu menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, dan lulusannya diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi seperti Mulo (setingkat SMP) yang dilanjutkan ke AMS (setingkat SMA). Di puncak sistem ada lembaga-lembaga studi lebih tinggi yang sangat berorientasi kerja. Yang terkenal di antaranya ialah sekolah teknik di Bandung (THS), sekolah kedokteran di Jakarta (STOVIA-GHS), sekolah hukum di Jakarta (RHS) dan sekolah kedokteran di Surabaya (NIAS). Adapun tingkat terendah dari sistem itu berada di sekolah-sekolah desa, yang terbagi menjadi Sekolah Dasar (tiga tahun), dan Sekolah Menengah Pertama (lima tahun). Kebanyakan masyarakat dan, karena itu, kebanyakan Muslim santri, memasuki sekolah-sekolah pribumi ini. Tidak seperti lulusan sekolah-sekolah Belanda, lulusan sekolah-sekolah pribumi ini tidak bisa melanjutkan ke tingkat pendidikan lebih tinggi. Mereka dipandang sudah bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri di wilayah-wilayah pedesaan dan dinas-dinas nonpemerintah lainnya.



DISPENSASI DALAM PUASA

Bukti yang menegaskan bahwa perintah puasa merupakan wujud cinta kasih Allah Swt. kepada hamba-Nya dan bukan dimaksudkan untuk menyusahkan dan menyengsarakan adalah dengan ditemukannya ketentuan berupa dispensasi (*rukhsah*), yakni keringanan tidak menjalankan puasa karena ada halangan atau uzur. Dispensasi itu diberikan kepada orang yang sakit, melahirkan, mengandung, orang yang sudah tua, wanita menyusui atau orang yang sedang dalam perjalanan.

Sebagai gantinya kemudian dianjurkan berpuasa pada hari-hari yang lain atau dengan membayar *fidyah* kepada orang miskin—khususnya orang yang sudah lanjut usia atau sakit. Hal ini terungkap dalam firman-Nya, (*Berpuasa*) untuk beberapa hari tertentu, tetapi jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka (berpuasalah) sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari lain ... (Q., 2: 184).

Makna ayat tersebut di atas benar-benar merupakan hal yang sangat logis bahwa perintah puasa bukanlah untuk menyengsarakan hamba-Nya, melainkan wujud cinta kasih Allah Swt. kepada hamba-Nya.

Namun demikian, sejauh manakah alasan sakit diperbolehkan un-

tuk menunda perintah puasa. Dalam kasus semacam itu, tentunya yang menjadi ukuran bukanlah keyakinan diri masing-masing, melainkan orang itu harus terlebih dahulu berkonsultasi kepada ahlinya. Dalam hal ini, tentulah seorang dokter yang akan memberikan saran: apakah berpuasa itu dapat membahayakan atau, malah sebaliknya, dapat menjadi sarana penyembuhan.

Dalam Islam, kita dinasihatkan agar berkonsultasi apabila menemukan kesulitan kepada seorang ahli supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang berbahaya. Apalagi hal yang menyangkut masalah agama, kita sangat dianjurkan. Dalam Kitab Suci Al-Quran disebutkan, ... *Maka tanyakanlah kepada ahli risalah (orang yang mempunyai pengetahuan—NM) jika kamu tidak tahu* (Q., 16: 43).

Berkenaan dengan orang yang sedang melakukan perjalanan (*mu-sâfir*), dalam fiqh klasik dikatakan bahwa orang yang sedang melakukan perjalanan sejauh 80 km diperbolehkan berbuka puasa dan menggantikan puasa Ramadhan tersebut pada hari-hari lain. Pendapat semacam itu tentunya juga sangat logis karena jarak tempuh 80 km pada zaman dahulu merupakan perjalanan yang sangat berat.

Perlu diingat bahwa hukum fiqh merupakan hasil sebuah ijtihad sehingga pendapat ulama sering berubah sesuai dengan kondisi yang

melingkupinya, seperti tempat dan waktu. Jarak 80 km adalah perjalanan yang sangat berat, apalagi kalau dilihat dari sarana jalan dan kendaraan berupa hewan tunggangan. Jadi, sangat logis untuk berbuka puasa pada saat itu.

Namun, pendapat semacam itu jelas mengandung hal yang sangat nisbi atau relatif untuk masa sekarang. Jarak 80 km untuk zaman sekarang, tentunya, sudah tidak lagi dipandang sebagai penghalang bagi seseorang untuk terus menjalankan perintah puasa. Ini karena kemajuan di bidang teknologi yang begitu pesat, khususnya dalam bidang transportasi, seperti adanya bus, kereta api, dan pesawat. Bahkan, barangkali dalam perjalanan berjarak 1.000 km pun untuk zaman sekarang seseorang masih bisa menjalankan perintah puasa karena nyaman dan enaknyanya pelayanan perjalanan.

Meski mereka yang melakukan perjalanan diberi keringanan atau dispensasi untuk tidak berpuasa, Al-Quran juga masih menganjurkan agar mereka tetap berpuasa. Dan diingatkan, yang demikian itu tetap lebih baik jika kita mengetahui dampak berpuasa.

Tentu saja dampak yang dimaksudkan tidak hanya pada hal-hal yang bersifat lahiriah atau jasmaniah, tetapi yang sangat penting adalah jika seseorang menjalankan perintah berpuasa dengan baik dan

benar, maka yang terjadi adalah sebuah penyembuhan ruhaniah, *spiritual treatment*. Dan ini mahal nilainya demi kelestarian manusia itu sendiri. Dengan menjalankan perintah puasa secara benar, seseorang akan dapat merasakan kehadiran Allah Swt. setiap saat, di mana saja dan kapan saja. Dengan sendirinya, ia akan menjadi orang yang percaya diri, optimistik, dan selalu memiliki ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan dan masalah hidup. Sikap yang demikian itulah yang sangat dibutuhkan kapan saja dan di mana saja.

Selain dampak pelaksanaan perintah yang berdimensi vertikal tadi, yakni lahirnya keyakinan akan kehadiran Allah Swt. yang selalu menyertai dirinya, puasa juga memiliki dimensi konsekuensial atau ikutan, seperti adanya anjuran bagi yang sakit untuk membayar ganti (*fidyah*) kepada fakir miskin. Juga adanya perintah kepada setiap yang menjalankan puasa dan setiap pribadi Muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah atau zakat penyucian diri. Berkaitan dengan perintah berpuasa yang memiliki kaitan dengan pesan-pesan kemanusiaan, zakat harta benda atau zakat fitrah, kalau saja mampu dikoordinasikan dan dikelola dengan baik, lewat pendirian sebuah badan atau lembaga, maka akan dapat menjadi ke-

kuatan yang sangat besar. Dan yang demikian itu tetap sejalan dengan pesan perintah puasa, yakni menghilangkan kemiskinan, yang dalam bahasa sekarang lebih populer dengan istilah kemiskinan struktural.



DOA DALAM HAJI

Doa-doa di sekitar pelaksanaan haji yang panjang-panjang memang semuanya memiliki dasar, tetapi banyak yang dikembangkan oleh para ulama sendiri. Ini artinya, berdoa dalam haji tidak mesti harus seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh, karena yang lebih penting adalah yang di dalam hati. Tetapi kalau menurut petunjuk yang paling umum, doa yang paling baik adalah mengaku dosa, seperti doa Nabi Adam, “*Tuhan! Kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami pasti kami termasuk orang yang rugi*” (Q., 7: 23). Itu adalah doa Adam ketika dia menyadari telah melanggar larangan Tuhan.



DOA *IFTITÂH*

Membaca doa *iftitâh* dalam shalat adalah sunnah, karena semua

yang dilakukan dalam shalat paling tidak adalah sunnah. Mengenai apa yang dibaca memang bermacam-macam, dan itu terserah kepada pilihan pribadi. Sedangkan *innî wajjahtu*, dasarnya adalah Al-Quran. Itu sebenarnya pernyataan Nabi Ibrahim ketika dalam proses mencari Tuhan dan akhirnya menemukan Tuhan yang sebenarnya.

Pada mulanya, Ibrahim seperti juga masyarakatnya yang menyembah bintang, menganggap bintang sebagai Tuhan. Tetapi setelah tenggelam, dia berkesimpulan bahwa bintang bukan Tuhan. Kemudian ada bulan yang lebih besar, dan besoknya matahari yang lebih hebat. Tetapi setelah matahari tenggelam dia juga berkesimpulan bahwa matahari bukan Tuhan. Tuhan mestinya lebih tinggi dari gejala-gejala alam. Maka dia membuat patokan untuk tidak menyembah bulan dan matahari, melainkan menyembah Dia yang telah menciptakan semuanya itu. Setelah itulah lahir pernyataan *innî wajjahtu*. Jadi mendalam sekali maknanya. Banyak ulama yang mengatakan, karena shalat merupakan peristiwa menghadap Tuhan, bahkan shalat adalah mi'rajnya orang beriman, maka sebaiknya

pengalaman Ibrahim tersebut diresapi kembali dengan membaca *innî wajjahtu*.



DOA MEMOHON BIMBINGAN ALLAH

Sesungguhnya tanggung jawab pendidikan keagamaan memang amat berat, khususnya atas orangtua. Karena itu kita hendaknya tidak putus-putus memohon pertolongan kepada Allah untuk memperoleh bimbingan dan petunjuk-Nya. Seperti pengakuan yang lebih mendalam dalam ajaran kesufian Islam, manusia tidak akan mampu melaksanakan apa-apa, termasuk melaksanakan perbuatan baik seperti mendidik anak, jika tanpa bantuan dan bimbingan Allah, karena "Tiada daya, tiada pula kemampuan, kecuali dengan Allah Yang Mahatinggi dan Mahaagung." Maka berikut ini adalah doa-doa pendek dari Al-Quran yang relevan untuk orangtua yang benar-benar menaruh perhatian kepada pertumbuhan anak keturunannya menjadi orang-orang yang saleh.

"Oh Tuhanku! Bimbinglah aku agar mampu untuk bersyukur atas

karunia-Mu yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orangtuaku, dan agar mampu untuk berbuat baik yang Engkau ridlai, serta berilah aku kebaikan (kesalehan) berkenaan dengan anak keturunanku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk mereka yang pasrah (kepada Engkau) (Q., 46: 15).

“Oh Tuhan kami! Jadikanlah kami berdua orang-orang yang pasrah kepada engkau, dan juga jadikanlah dari anak keturunan kami umat yang pasrah kepada Engkau, serta bimbinglah kami dalam amal ibadah kami, dan berilah kami tobat, sesungguhnya Engkau adalah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang” (Q., 2: 127).

“Oh Tuhanku! Jadikanlah aku orang yang menegakkan shalat, demikian pula anak keturunanku. Oh Tuhan kami! Terimalah doa kami ini” (Q., 14: 40).

Doa yang pertama adalah ajaran langsung Allah kepada umat manusia dalam rangkaian ajarannya agar manusia selalu hormat dan berbuat baik kepada orangtua, khususnya kepada ibu (Q., 31: 14). Sedangkan doa kedua dan ketiga adalah doa-doa Nabi Ibrahim, beserta putranya, Isma‘il, yang dituturkan dalam Kitab Suci untuk kita tiru dan teladani. Semua doa itu menunjukkan perhatian atau *concern* yang men-

dalam dan tulus kepada pertumbuhan anak keturunan agar mereka semua menjadi manusia yang saleh, beriman dan berbudi luhur.

Seperti telah dikemukakan, tugas dan kewajiban menempuh jalan hidup yang baik dan benar di dunia ini bukanlah perkara yang mudah dan ringan. Maka kita hendaknya selalu memohon kepada Allah bimbingan ke arah keberhasilan (*tawfiq*), petunjuk (*hidayah*), dan santunan (*inayah*).



DOKTRIN “KEJATUHAN” MANUSIA

Dalam Kitab Suci Al-Quran, terdapat ajaran yang agaknya merupakan asal-muasal ketidakdamaian hidup manusia dan kerincuhannya. Ajaran atau doktrin itu berada di sekitar “kejatuhan” (Arab: *hubuth*, Inggris: *fall*). Yaitu kejatuhan Adam dan Hawa dari surga ke dunia atau bumi karena melanggar larangan Tuhan memakan buah pohon “khuldi”. Doktrin itu selengkapnya termuat di berbagai tempat dalam Al-Quran.

Tuhan berfirman: “Turunlah kamu (Adam dan Hawa), sebagian darimu akan menjadi musuh sebagian yang lain, dan bagimu di bumi tempat tinggal dan kesenangan sementara.” Tuhan seterusnya ber-

firman: *Di bumi itu kamu hidup, di situ pula kamu mati, dan dari situ kamu akan dikeluarkan* (Q., 7: 24-25). Doktrin yang sama juga terdapat di dalam Q., 2: 37 dan Q., 20: 124.

Dari situ kita dapat menarik pelajaran bahwa Adam dan Hawa, yaitu dua manusia yang menjadi ayah dan ibu umat manusia, karena melanggar larangan Tuhan, menerima hukuman diusir dari surga, dan mendapat kutukan bahwa kehidupan mereka di bumi akan merupakan sesuatu yang tak damai, penuh permusuhan. Manusia kehilangan hidup damainya yang abadi di dalam alam surgawi, dan digantikan dengan kehidupan duniawi yang bersifat sementara. Inilah sesungguhnya sifat kehidupan di bumi ini: rinci dan singkat. Keterangan lebih khusus juga dapat ditemui di berbagai tempat dalam Kitab Suci. Kelengkapan doktrin itu selanjutnya mengatakan, sebagaimana terbaca, misalnya di dalam Q., 20: 123-127 yang terjemahannya berikut ini:

Tuhan berfirman: "Turunlah kamu semua dari sini (surga), sebagian kamu menjadi musuh sebagian lainnya. Maka, jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, maka siapa saja yang mengikuti petunjuk-Ku itu, ia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Dan barangsiapa berpaling

dari ajaran-Ku, maka sesungguhnya baginya ialah kehidupan yang sesak ("rupeg"), dan Kami akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan buta." Orang itu akan berkata: "Tuhanku, mengapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku melihat?" (Tuhan) berfirman (menjawab): "Begitulah, telah datang kepadamu ajaran-Ku, kemudian kamu melupakannya; maka demikianlah hari ini kau terlupakan." Begitulah Kami membalas orang yang berlebihan dan tidak percaya kepada ajaran Tuhan-Nya. Dan sungguh, siksa di Hari Kemudian itu lebih hebat dan lebih kekal.

Doktrin yang semakna juga terdapat di tempat lain, khususnya di dalam Q., 2: 37-40. Doktrin ini mengatakan bahwa kutukan Tuhan kepada manusia berupa kesengsaraan hidup di muka bumi ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dicabut oleh-Nya. Dengan kasih-Nya, Allah menunjukkan kepada manusia jalan mengatasi kerupegan hidupnya, yaitu dengan mengikuti petunjuk yang diberikan-Nya kepada umat manusia melalui utusan-utusan atau rasul-rasul-Nya, yaitu ajaran-ajaran agama. Kehidupan sengsara hanya dialami oleh mereka yang berpaling dari ajaran-ajaran Tuhan.



DOKTRIN CALVIN DAN PAHAM ASYARI

Masalah etos kerja selalu menjadi bahan pembahasan dalam setiap kesempatan pembicaraan tentang pembangunan. Apakah Islam mengajarkan etos kerja yang positif guna mendukung suatu transformasi sosial yang positif pula?

Masalah besar dalam pembahasan tentang etos kerja ini ialah bahwa belum ada satu pun negeri berpenduduk mayoritas Muslim yang benar-benar telah menjadi negara maju, sehingga bisa dibuat pengamatan empirik atas hal itu. Tetapi, sekali lagi, jika kita dibenarkan untuk sementara hanya melihatnya dari segi ajaran saja—yang notabene maknanya juga sama sekali tidak dapat diabaikan—kita akan mendapati kontroversi klasik tentang masalah kemampuan manusia menentukan pekerjaannya (paham Qadariyah) atau keterpaksaan sehingga ia tidak berdaya menentukan pekerjaannya sendiri itu (paham Jabariyah).

Tetapi sebelum pergi lebih jauh ke arah masalah itu, dirasa perlu di sini membuat beberapa penegasan mengenai watak agama Islam berkenaan dengan kerja. Frithjof Schuon (Muhammad Isa Nuruddin), seorang filsuf Muslim dari Swiss, dalam bukunya *The Transcendent Unity of Religions* menggolongkan Nabi Muhammad Saw.

bersama dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Mereka adalah nabi-nabi yang mengajarkan tentang Tuhan Yang Maha Esa dan pendekatan kepada-Nya melalui amal perbuatan yang baik, sehingga ajaran mereka disebut “*ethical monotheism*”. Ini berbeda dengan Buddha Gautama dan Nabi Isa Al-Masih. Menurut Baigent, ajaran Nabi Isa Al-Masih telah diubah oleh Paulus dari yang semula sama dengan agama Nabi Ibrahim dan Musa, yaitu monoteisme etis, menjadi agama sakramen, karena mengubah ajaran Nabi Isa untuk menyembah Tuhan melalui amal perbuatan dan aktivitas kerja menjadi ajaran menyembah pribadi Nabi Isa itu sendiri yang kini berubah menjadi Tuhan. Maka sakramen, terutama dalam bentuk Ekaristi, menjadi amat sentral bagi pemeluk Kristen, karena bagi mereka keselamatan diperoleh melalui dan dalam diri atau tubuh Isa Al-Masih.

Berbeda dengan itu, Islam mengajarkan pendekatan pribadi kepada Tuhan melalui ibadah dan aktivitas kerja dalam amal kebajikan. Karenanya dalam sistem peribadatan Islam tidak ada mitologi atau sakramen, dan semua ibadah ditekankan sebagai usaha pendekatan pribadi kepada Tuhan semata. Dibandingkan dengan Kristen, oleh Andrew Rippin, ibadah dalam Islam dipandang tidak mengan-

dung mitologi, *amythical* dan juga *non-sacramental*. Meskipun ada bentuk-bentuk ibadah yang sekaligus juga bersifat memperingati kejadian masa lalu (*commemorative*) seperti haji dan kurban, namun tetap semuanya itu diarahkan kepada pendekatan pribadi kepada Tuhan.

Maka berkenaan dengan kurban itu, Allah memperingatkan kita semua, *Tidak akan mencapai Allah daging kurban itu, juga tidak darahnya, tetapi akan mencapainya takwa dari kamu ...* (Q., 22: 37).

Jika memahami firman di atas, dipedomani dan dilaksanakan dengan baik, maka akan menjadi orientasi kerja yang baik pada kaum Muslim. Hal lain, misalnya, dapat dilihat pada teori lebih luas dari kaum Asy'ari, seperti tecermin dalam kitab *Sabil Al-Abid* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa oleh K.H. Muhammad Sholeh ibn Umar Samarani (dari Pesantren Mranggen, Semarang), sebagai berikut.

Rasulullah Saw bersabda: *"Telah kuperintahkan kepada umatku jangan sampai berpegang kepada takdir."* Seorang sahabat menyahut: *"Apakah kami tidak boleh berpegang kepada takdir dan mening-*

galkan kerja?" Rasulullah menjawab: *"Jangan! Bekerjalah, sebab setiap orang dimudahkan menuju takdir dan kepastiannya."* (HR Al-Bukhari). Kalau takdirnya sengsara (masuk neraka) maka dia mudah bermaksiat; dan jika takdirnya bahagia (masuk surga), maka dia

mudah taat (kepada Allah); kalau takdirnya kaya, maka mudah usahanya; dan kalau takdirnya miskin, maka sulit usahanya Rasulullah Saw. bersabda: *"Men-*

cari rezeki yang halal itu wajib atas setiap orang Islam." Jadi, hadis ini menunjukkan bahwa mencari rezeki dengan usaha itu wajib, supaya tidak mengemis, sebab mengemis itu haram. Dan wajibnya usaha itu agar jangan sampai merendahkan diri terhadap pengabdikan kezaliman.

Walhasil di zaman sekarang lebih baik usaha, bahkan wajib usaha, karena iman orang awam tidak sempurna kecuali dengan harta. Penuturan dari Sayyidina Anas r.a., bahwa Rasulullah Saw. bersabda: *"Sebaik-baik dukungan untuk bertakwa kepada Allah ialah harta."* Dan Rasulullah Saw. juga bersabda: *"Kemiskinan bagi para sahabatku adalah kebahagiaan, dan*



kekayaan bagi kaum beriman di akhir zaman adalah kebahagiaan.” Juga sabda beliau: “*Kemuliaan orang beriman ialah bahwa ia tidak tergantung kepada orang lain.*”

Sekarang marilah kita bandingkan keterangan K.H. Sholeh (“Darat”) dari Semarang itu dengan teologi Calvin tentang teori predestinasi dan tanggung jawab:

Tak dapat tidak Calvin pun tiba pada masalah lama yang muskil dipecahkan, yaitu bagaimana predestinasi Allah dapat disesuaikan dengan keberdirisendirian dan tanggung jawab manusia. Bagi Calvin soal itu lebih sukar lagi, oleh sebab itu ia menghubungkan predestinasi dengan takdir Allah yang ‘*am* (umum), dan dalam hal itu pun ia berpendapat, bahwa segala perbuatan manusia, juga yang salah, dipimpin oleh Allah. Jikalau begitu, Allahkah pokok dosa? Dan manusia tidak bertanggung jawab atas perbuatannya? Kesimpulan demikian ditolak oleh Calvin. Ia mengingatkan orang kepada rahasia wujud dan perbuatan Allah yang tidak dapat dipahami oleh akal budi kita

Begitulah doktrin Calvinis yang mirip sekali dengan teori *kasb* kaum Asy‘ari di kalangan kaum Muslim Sunni. Menarik sekali bahwa Calvinisme itu adalah acuan Max Weber tentang apa yang dinamakan Etika Protestan. Maka dalam perbandingan antara kedua teori tentang per-

buatan manusia itu dapatlah disimpulkan bahwa tidak ada halangan bagi kaum Asy‘ari, yaitu bagian terbesar kaum Sunni termasuk di negeri kita, untuk mengembangkan etos kerja yang positif dan kuat guna mendukung pembangunan. Bahkan sesungguhnya, sebagaimana terlihat dari perbandingan di atas, teori *kasb* Asy‘ari masih lebih banyak mengakui peran manusia daripada predestinasi Calvin. Sekarang persoalannya ialah bagaimana menyadarkan para pengikut Asy‘ari akan dinamika ajaran yang mereka anut itu.



DOKUMEN AELIA

Dokumen Aelia adalah naskah perjanjian yang dibuat oleh Khalifah ‘Umar Ibn Al-Khaththab dengan penduduk Kota Aelia, nama lain untuk Kota Yerusalem, pada waktu kota itu jatuh ke tangan kaum beriman. Yerusalem adalah kota suci tiga agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Karena pentingnya kota itu bagi kaum Muslim, maka Patriak yang menguasainya tidak menyerahkannya kepada mereka kecuali jika pemimpin tertinggi mereka sendiri, yaitu Khalifah ‘Umar, datang menerimanya secara pribadi.

Bagi kaum Muslim, Yerusalem adalah *Al-Quds* atau *Bayt Al-Maqdis*,

artinya Kota Suci. Pandangan serupa itu juga sudah dipunyai orang Arab sebelum Islam. Tetapi ada nama lain untuk kota suci itu, yaitu Aelia Capitolina, disingkat Aelia. Dan pada waktu ditaklukkan oleh tentara Islam, nama Aelia itu sangat melekat. Maka perjanjian yang dibuat untuk penduduk kota itu pun disebut “Dokumen Aelia” (*Mitsâq Ailiyâ*).

Riwayat nama Aelia itu sendiri cukup menarik. Ketika Yerusalem dihancurkan oleh Kaisar Titus dari Roma pada tahun 70 Masehi, maka saking bencinya kepada kaum Yahudi dia putusan untuk menghapus segala sisa keyahudian dari kota itu. Lalu, di atas Masjid Aqsha yang telah diruntuhkannya dia dirikan bangunan guna memuja Dewa Aelia, lengkap dengan patung berhala Romawi itu.

Memang ketika Yerusalem kemudian berada di bawah kekuasaan kaum Kristen dari Byzantium, bangunan untuk memuja Dewa Aelia itu sudah runtuh. Namun tidak berarti kebencian kepada kaum Yahudi juga berarti. Justru kaum Kristen menunjukkan kebenciannya itu dengan menjadikan puncak Bukit Moria, letak bekas bangunan suci Masjid Aqsha, dijadikan *pelbak* (tempat pembuangan sampah). Para ahli sejarah Islam, seperti Ibn Taimiyah, menuturkan bagaimana sampah menggunung di atas kiblat Yahudi (dan kiblat Islam juga, un-

tuk beberapa lama), sebagai penghinaan kaum Kristen kepada kaum Yahudi. Inilah yang membuat ‘Umar sangat marah, kemudian memerintahkan Patriak Kristen itu untuk menyingsingkan lengan bajunya, ikut membersihkan tempat suci itu bersama kaum Muslim.

Dari peristiwa sejarah itu, dapat dilihat bagaimana sikap Islam kepada agama-agama lain, khususnya agama *Ahl Al-Kitâb* seperti Yahudi dan Kristen, yaitu sikap menenggang dan menghargai. Ini lebih-lebih lagi tecermin dalam Dokumen Aelia sendiri, yang di dalamnya termuat jaminan Islam untuk kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan kaum Kristen beserta lembaga-lembaga keagamaan mereka. Bahkan, berbeda dengan penguasa Kristen sebelumnya, penguasa Islam justru mengizinkan kaum Yahudi ikut menghuni kembali Yerusalem. Namun karena kaum Kristen keberatan jika mereka dicampur dengan kaum Yahudi, maka ‘Umar pun menempuh jalan membagi Yerusalem menjadi sektor-sektor Islam, Yahudi, dan Kristen.

Karena politik ‘Umar yang amat “liberal” itu, maka kaum Kristen Yerusalem sangat senang di bawah kekuasaan Islam, sebab selama ini, di bawah kekuasaan Byzantium, sebagian mereka mengalami penindasan keagamaan karena sekte mereka tidak diakui Gereja Ortodoks di

Konstantinopel. Begitu pula kaum Yahudi, mereka sangat senang, karena setelah ratusan tahun mulai diperbolehkan kembali ke tanah leluhur mereka.

Mengapa ‘Umar menempuh politik yang begitu “liberal”? Umar hanyalah mencontoh Sunnah Nabi Saw. yang telah membuat “Konstitusi Madinah” yang amat terkenal itu.



DONOR ORGAN TUBUH

Praktik kedokteran menyangkut donasi organ tubuh tampaknya belum pernah ada dalam zaman klasik Islam. Karena itu, permasalahan ini dari sudut pandangan ajaran Islam termasuk masalah *ijtihâdî*. Artinya, pemutusan hukumnya diperoleh karena analogi dengan permasalahan serupa (tidak berarti sama) yang telah pernah ada, atau dari penalaran tentang prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang baku. Masalah yang mula-mula timbul agaknya ialah akibat penghadapan donasi organ tubuh kepada beberapa ajaran Islam seperti konsep fitrah (*al-fithrah*—suatu ajaran yang mengatakan bahwa alam, termasuk alam manusia, menurut keadaan asalnya adalah baik); prinsip keharusan menghormati jenazah; dan prinsip kewajiban memelihara serta meningkatkan kehidupan manusia.

Pro-kontra terhadap praktik donasi organ tubuh biasanya berkisar pada variasi penafsiran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Konsep fitrah merupakan salah satu fondasi ajaran Islam. Ajaran itu mengatakan, seperti disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, bahwa manusia menurut kejadian asalnya adalah suci dan baik. Kesucian disejajarkan dengan keaslian, kewajaran, dan kealamian. Meskipun titik berat konsep itu dikenalkan pada bidang keruhanian (ruhani manusialah yang pada dasarnya suci dan bersih), namun sering juga dibawa kepada segi lahiriah manusia, yakni tubuh atau jasmaninya. Terkait dengan fitrah manusia ialah sifat manusia yang *hanîf* (Q., 30: 30), yang oleh Muhammad Marmaduke Pickthall diterjemahkan sebagai “*as a man by nature upright*”—sebagaimana seorang manusia secara alami berdiri tegak.

“Tegak” di situ bisa berarti tegak secara keruhanian, tapi juga bisa tegak secara kejasmanian, yakni bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk “berdiri tegak” (erektus). Di situ tersirat pandangan bahwa jasmani atau bentuk lahir manusia adalah bentuk pemberian Tuhan yang paling baik, salah satu cara menafsirkan firman, *Sungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya* (Q., 95: 4). Maka pada prinsipnya tidak di-

benarkan melakukan “intervensi” artifisial kepadanya, sebab hal itu akan berarti mengubah fitrah dari Tuhan, suatu tanda sikap yang kurang bersyukur kepada-Nya.

Selain disebut sebagai makhluk yang tertinggi, manusia juga makhluk yang dimuliakan Tuhan (Q., 17: 70). Karena itu manusia wajib menghormati sesamanya, tidak saja semasa masih hidup, tapi sampai kepada saat meninggal. Ajaran agama sekitar perawatan jenazah (memandikan, mengafani, menshalati, dan mengubur dengan sebaik-baiknya) adalah upacara yang penuh rasa hormat kepada orang yang meninggal. Karena itu jenazah pun harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya, lebih baik daripada kepada orang hidup. Maka tidak diperbolehkan memperlakukannya dengan cara-cara yang akan “menyakiti” jenazah itu. Berkaitan dengan ini, sebuah hadis Nabi menyebutkan, “*Mematahkan tulang orang yang telah mati adalah sama dengan mematahkannya hidup-hidup.*”

Hal-hal di atas sering merupakan pangkal penolakan berdasarkan pandangan keagamaan terhadap pembedahan organ tubuh seseorang, baik di kala masih hidup maupun sesudah mati, dan pencangkokannya ke tubuh orang lain. Tetapi ada beberapa “*loophole*” (jalan keluar) dalam garis argumen yang ada.

Jika prinsip fitrah betul-betul melarang “intervensi” kepada keaslian

keadaan jasmani manusia—sehingga, misalnya, para ulama umumnya berpendapat bahwa menghilangkan tali lalat atau, apalagi melakukan bedah plastik untuk tujuan kecantikan, adalah haram hukumnya—namun satu bentuk praktik “intervensi” serupa itu telah ada bahkan dianggap baik, seperti khitan dan melubangi daun telinga wanita untuk perhiasan. Preseden tradisional keagamaan itu harus ditambah dengan preseden medis—para tabib Muslim klasik justru ikut memelopori—yaitu pembedahan, yang kemudian berkembang pesat di zaman modern. Maka secara *qiyâs* atau analogi, tentunya bentuk apa pun “intervensi” kita kepada tubuh pemberian Tuhan yang amat baik ini bisa dibenarkan, asalkan hasil “intervensi” itu mempertinggi tingkat mutu kebaikan pemberian Tuhan tersebut.



DORONGAN KEMBALI KE ASAL

Mengapa ada dorongan untuk kembali kepada asal? Dorongan itu ada karena memang sebenarnya kita sudah terikat perjanjian primordial dengan Allah Swt., yakni mengakui bahwa Dia (Allah) adalah sebagai *Rabb*, Pangeran atau *The Lord*. “*Bukankah Aku ini Tuanmu?*” Mereka menjawab, “*Ya, kami bersaksi*” (Q., 7: 172).

Kata tuan atau *lord* artinya adalah suatu zat atau wujud, dalam hal ini adalah Allah Swt. yang kita jadikan sandaran untuk hidup. Dengan demikian, jika kita mengakui Allah sebagai *Rabb*, maka konsekuensinya adalah kita harus menyembah-Nya. Ketika berada dalam alam ruhani, dalam perjanjian tersebut, kita menjawab, “Ya, kami bersaksi.”

Iniilah yang mengendap dalam kedirian kita yang paling mendalam, atau disebut sebagai *lubbun* (jamak: *albâb*). Oleh karena itu, kata *ûlû al-albâb* bisa diterjemahkan sebagai “orang-orang yang mempunyai kesadaran yang mendalam”; kesadaran tentang dirinya sendiri yang meresap atau mengendap dalam *lubb*, jauh lebih dalam dari apa yang secara psikologis disebut sebagai alam bawah sadar. Jika alam bawah sadar masih berada dalam bidang *nafsânî* (psikologis), sehingga seorang ahli psikoanalisis, misalnya, masih bisa mengorek dan mengungkap, maka sesuatu yang sudah mengendap dalam alam ruhani, atau dalam *lubbun* itu tidak bisa lagi dikorek, namun wujudnya amat nyata dalam kehidupan kita.

“Bekerjalah kamu semua, maka Allah akan melihat pekerjaanmu itu, begitu juga Rasul-Nya dan seluruh masyarakat kaum beriman.”
(Q., 9: 105)

Itulah yang menyebabkan kenapa rindu kepada Allah Swt. dan ingin kembali pulang kepada-Nya. Pulang kepada Allah itu dimulai dengan pulang ke tanah. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Saw. menanam seseorang, menguburkan seseorang, beliau berkata sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, *Dari (tanah) Kami ciptakan kamu, ke dalamnya Kami kembalikan kamu dan dari sana Kami keluarkan kamu sekali lagi* (Q., 20: 55).

Jadi, yang dialami Nabi ialah sebuah simbolisasi bahwa kita pun akan kembali ke tanah, juga kembali menjadi air, apalagi jika kita memercayai kedokteran, yang menjelaskan bahwa 80 persen unsur dalam diri kita adalah cairan. Fakta ini paling tidak menyadarkan kita, bahwa kita akan menjadi air, dan kembali kepada Allah Swt. Hanya orang yang bisa kembali kepada Allah yang akan merasakan kebahagiaan, atau disebut *sakînah*. Dalam bahasa sehari-hari, kata *sakînah* ini berarti tujuan dari kehidupan keluarga. Hal ini karena memang Allah berfirman, *Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya, Ia menciptakan pasangan-pasangan bagimu dari jenis kamu sendiri, supaya kamu*

hidup tenang dengan mereka, dan Ia menanamkan rasa cinta dan kasih di antara kamu. Sungguh, yang demikian ialah tanda-tanda bagi orang yang berpikir (Q., 30: 21).



DOSA KARENA SERAKAH

Ketika di surga, Adam dan Hawa melanggar larangan Tuhan untuk tidak mendekati sebuah pohon. Hal ini dikarenakan setan terus-menerus menggoda, sehingga tergodalah keduanya. Akibatnya Adam dan Hawa diusir dari surga. Dosa yang dilakukan Adam dan Hawa ini kemudian dikategorikan sebagai dosa nomor dua dari makhluk Allah. Yaitu dosa karena serakah, ingin memiliki sesuatu yang tidak menjadi haknya. Itulah dosanya Adam dan Hawa ketika keduanya melanggar larangan Tuhan untuk tidak mendekati pohon larangan. Kalau serakah dan nafsu ingin memiliki sesuatu yang bukan haknya itu dikategorikan sebagai dosa nomor dua, maka dosa nomor satunya ialah kesombongan, *superiority complex*. Yaitu dosanya iblis ketika menolak untuk bersujud kepada Adam. Iblis menolak bersujud kepada Adam karena ia berargumen bahwa ia lebih baik daripada Adam. Ia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ke-

sombongan yang ditunjukkan iblis ini bisa juga disebut rasialisme. Sedangkan yang menjadi dosa ketiga adalah dosa yang dilakukan oleh anak Adam, Qabil, ketika membunuh adiknya, Habil. Pembunuhan itu terjadi karena adanya iri hati atau cemburu. Ceritanya begini. Kedua anak Adam itu melakukan korban. Tapi yang diterima oleh Allah adalah korbannya Habil. Sedangkan korbannya Qabil tidak diterima. Sebab Qabil melakukan korbannya kurang ikhlas. Nah, atas dasar itu, Qabil cemburu. Lalu ia membunuh saudaranya, Habil.

Dari peristiwa-peristiwa di atas, kita mengenal tiga peringkat dosa (didasarkan pada dosa makhluk yang paling awal). *Pertama*, dosa karena kesombongan, yaitu yang dilakukan iblis. *Kedua*, dosa karena serakah dan selalu ingin memiliki sesuatu yang bukan haknya, yaitu seperti yang dilakukan Adam dan Hawa. Dan *ketiga*, dosa karena iri hati dan cemburu bila melihat orang lain senang dan sukses, yaitu seperti yang diperbuat Qabil terhadap Habil. Ketiga dosa tersebut harus kita *pupus* (kikis habis) dalam hati dan dijauhkan dari segala perbuatan kita.

Dalam hal sombong misalnya, Al-Quran mengatakan:

Tatkala Allah berkata kepada Malaikat: "Sujudlah kalian semua kepada Adam," maka semuanya

bersujud kecuali Iblis karena ia enggan dan sombong. Maka dia pun tergolong mereka yang kafir (Q., 2: 34).

Demikian juga Allah sangat membenci kepada orang yang tamak atau serakah seperti Adam, ketika memakan buah larangan. Dan Allah lebih-lebih melarang orang iri hati dan cemburu (*hasad*), sampai-sampai dalam Al-Quran ditegaskan bahwa *hasad*, dengki, dan iri hati itu, akan merusak amal kebajikan. Dalam hal ini, Nabi mengingatkan umatnya sangat keras:

Jauhilah dengki, iri hati, dan cemburu. Karena sifat-sifat itu akan memakan seluruh kebaikanmu seperti halnya api memakan kayu bakar yang kering.

Jadi, seluruh kebaikan manusia akan hancur dan lenyap kalau manusia itu mempunyai *hasad* dan cemburu. Nah, sifat-sifat itu semua harus kita buang. Cara yang paling baik untuk membuangnya adalah bahwa kita harus ikhlas di hadapan Allah. Jika kita sudah ikhlas, dengan sendirinya sifat-sifat itu akan hilang. Dan ikhlas itu adalah rahasia antara manusia dengan Tuhan. Tidak ada yang tahu bahwa kita harus hati-hati betul. Sebab, ketika mengatakan bahwa kita ikhlas saja, itu tandanya kita tidak ikhlas. Misalnya, kita mengatakan, “Yang saya

lakukan ini, ikhlas lho, karena Allah.” Nah, orang yang mengatakan demikian itu berarti tandanya *nggak* ikhlas. Sebab dalam pengakuan tersebut terselip ketakutan untuk tidak disebut ikhlas. Karenanya, orang yang ikhlas itu betul-betul tidak punya potensi apa-apa. Dia tidak terlalu risau dengan apa yang sudah dikerjakannya, karena yang diharapkannya hanya *ridlâ* dari Allah Swt.



DOSA KOSMIS

Konsep ekonomi sebagai *iqtiṣhād* atau keseimbangan itu sendiri mempunyai kaitan dengan hukum dualitas pada semua ciptaan Tuhan. Dalam Al-Quran difirmankan, *Dan dari segala sesuatu Kami ciptakan dua pasang, agar kamu sekalian renungkan (Q., 51: 49).* Dan, *Mahasuci Dia yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, dari tetumbuhan bumi, dari diri mereka (manusia) sendiri, dan dari hal-hal yang tidak mereka ketahui (Q., 36: 36).*

Perintah Allah untuk merenungkan hukum perpasangan atau dualitas itu mengisyaratkan adanya sesuatu yang amat penting, yang berkaitan dengan hukum itu, dalam usaha manusia memahami lingkungan hidupnya, baik fisik maupun sosial. Manusia tidak akan

mengerti kenyataan sekitarnya jika mengabaikan hukum dualitas itu, karena hukum itu merupakan pangkal dari keharusan menjaga keseimbangan antara dua unsur segala yang ada. Dalam Al-Quran terdapat keterangan yang serba meliputi tentang hukum itu, dalam pengkalimatan yang singkat dan padat.

Dan langit-pun diangkat-Nya, dan diletakkan-Nya hukum keseimbangan. Karena itu, janganlah kamu sekalian melanggar hukum keseimbangan. Dan tegakkanlah timbangan dengan jujur, dan janganlah kamu curang terhadap hukum keseimbangan (Q., 55: 7-9).

Jadi, hukum keseimbangan atau *al-mîzân* adalah hukum yang menguasai alam raya. Pesan kepada umat manusia untuk jangan sampai melanggar hukum keseimbangan adalah karena hukum keseimbangan itu sebenarnya merupakan hukum bagi keseluruhan yang ada di alam raya. Maka dalam melakukan kegiatan menimbang barang, manusia harus benar-benar jujur, dan tidak melanggar hukum keseimbangan itu. Pelanggaran terhadap hukum keseimbangan, biarpun terjadi hanya dalam kegiatan menimbang barang sekecil

apa juga, adalah pelanggaran terhadap hukum alam raya. Maka dosanya adalah “dosa kosmis”, oleh karena itu, daya merusaknya juga kosmis, yaitu hancurnya seluruh tanaman hidup. Ancaman kehancuran masyarakat datang jika muncul orang-orang yang hidup berlebihan dalam

masyarakat dan kemudian mereka bertingkah laku fasik atau tidak peduli kepada ukuran-ukuran keputusan etika dan moral, dan vonis penghancuran pun dijatuhkan Tuhan atas ma-

syarakat itu (Q., 17: 16).

Hukum keseimbangan adalah juga hukum keadilan. Seperti halnya dengan hukum keseimbangan dalam alam, hukum keseimbangan dalam susunan hidup sosial manusia berlaku secara tetap, tidak akan berubah, dan tidak tergantung kepada keadaan atau keinginan manusia. Karena itu, terdapat ungkapan di kalangan para ulama, konon berasal dari ‘Ali ibn Abi Thalib, bahwa: “Allah menegakkan negara yang adil sekalipun kafir, dan tidak menegakkan negara yang zalim sekalipun Islam,” dan “Dunia akan bertahan dengan keadilan bersama kekafiran, dan tidak bertahan dengan kezaliman bersama Islam.”



Makna dan pesan ungkapan-ungkapan itu sepenuhnya bersesuaian dengan beberapa penegasan dalam Al-Quran. Dalam menuturkan kisah kemenangan Nabi Daud a.s. atas Kota Al-Quds (Yerusalem) sebagai kemenangan keadilan atas kezaliman, sebuah pesan umum disampaikan berkenaan dengan hukum keseimbangan antarmanusia: *Jika tidak karena Allah menolak manusia sebagian terhadap sebagian yang lain, maka pasti hancurlah bumi. Tetapi Allah mempunyai kemurahan kasih sayang kepada seluruh alam* (Q., 2: 251). Karena itu pula, maka tujuan peperangan yang adil dan benar, selain untuk membela dan mempertahankan diri, ialah memelihara keseimbangan antarmanusia sehingga pranata-pranata hidup sosial-budaya manusia, khususnya pranata-pranata keagamaan, terjaga keutuhannya. Allah berfirman (ketika menyatakan memberi izin perang kepada Nabi Saw. dan kaum beriman),

Sesungguhnya Allah membela orang-orang beriman, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap pengkhianat lagi banyak menentang.

Diizinkan (berperang) bagi mereka yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa untuk membela mereka.

Yaitu, orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman me-

reka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: “Pangeran kami hanyalah Allah.” Dan sekiranya Allah tidak menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pastilah dirobohkan orang biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog, dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti membela orang yang membela-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Maha-perkasa.

Yaitu, mereka yang apabila Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya menegakkan sembahyang, menunaikan zakat, menganjurkan kepada kebaikan, dan mencegah dari kejahatan. Kepada Allahlah kembali segala urusan (Q., 55: 38-41).

Jika dalam firman yang diterjemahkan di atas itu disebutkan berbagai lembaga keagamaan, seperti biara, gereja, sinagog, dan masjid yang harus dijaga keutuhan dan kelestariannya, sebabnya ialah karena dalam lembaga-lembaga tersebut berlangsung kegiatan menegakkan nilai-nilai keagamaan (“di dalamnya banyak disebut nama Allah”) yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup sosial manusia.

END

DOSA SYIRIK

Dalam Islam ditegaskan bahwa perbuatan zalim yang paling besar adalah apabila seseorang melakukan perbuatan syirik atau menyembah selain Allah Swt. Perbuatan syirik dengan sendirinya juga telah menjatuhkan derajat manusia ke derajat paling rendah, yakni melakukan penghambaan atau tunduk kepada selain Allah Swt.—bertentangan dengan ajaran tauhid.

Dosa syirik dinyatakan sebagai dosa yang tidak diampuni oleh Allah Swt., sebagaimana difirmankan, *Allah tidak memberi ampun jika sesuatu dipersekutukan kepada-Nya; tetapi Ia mengampuni yang selainnya, kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa mempersekutukan Allah, ia telah berbuat dosa yang besar* (Q., 4: 48).

Manusia terjerumus ke dalam dosa di antaranya karena manusia menyukai hal-hal yang cepat atau dalam istilah sekarang yang serba-instan. Dalam Al-Quran disebutkan, *Manusia diciptakan (dijadikan [bertabiat]—NM) tergesa-gesa ...* (Q., 21: 37). Karenanya manusia itu suka potong kompas, suka hal-hal atau tujuan jangka pendek, kurang mampu melihat jangka panjang, atau mengetahui akibat dari perbuatannya.



DRAMA KEJATUHAN ADAM

Dalam Al-Quran, digambarkan adanya drama kosmis atau peristiwa kejatuhan Adam dari surga ke bumi yang diistilahkan dengan *al-hubûth*. Dikisahkan bahwa Adam, sebagai simbol manusia pertama, dikeluarkan dari surga, tempat yang digambarkan di dalamnya dipenuhi berbagai macam kenikmatan dan kemudahan, di antaranya berbagai macam makanan dari jenis buah-buahan. Sebagaimana direkam dalam Al-Quran, setelah Adam bersama Hawa—sebagai nenek moyang manusia—diciptakan, mereka berdua kemudian diizinkan tinggal di dalam surga. Dikisahkan bahwa Allah Swt. berfirman kepada mereka berdua, “*O Adam! Tinggallah kau dan istrimu dalam Taman, dan makanlah dari sana apa yang kamu sukai. Tetapi jangan kamu dekati pohon ini ...*” (Q., 2: 35).

Meski Adam dan Hawa, seperti yang dikisahkan Al-Quran, telah diberkahi kenikmatan yang banyak dan melimpah serta dilengkapi segala kemudahan, seperti kelapangan memakan buah-buahan apa saja, namun pada akhirnya, sebagai simbol manusia, mereka ternyata tidak mampu menahan dorongan dan godaan berlaku tamak untuk tidak memakan hanya satu macam buah yang dilarang oleh Allah Swt.

Menurut penafsiran beberapa ulama salaf, buah yang dimaksud-

kan dalam ayat tersebut adalah buah kekekalan. Dalam Al-Quran disebut *syajarat al-khuld*—yang kalau dimakan justru akan mengingkari hakikat kemanusiaannya sendiri—sehingga keduanya digelincirkan dan dijatuhkan oleh setan dari surga ke muka bumi ini sebagai hukuman atas pelanggaran tersebut.

Dari kasus tersebut, dapat dipahami bahwa sesungguhnya pada diri manusia—sebagaimana disimbolisasikan dalam diri Adam dan Hawa yang mengalami kejatuhan dari surga—terdapat dorongan dan kecenderungan berlaku tamak. Potensi ini jika tidak dapat dikendalikan secara baik dan benar, akan dapat mengarahkan dan mendorong manusia pada kehancuran, yakni kehancuran moral dan spiritual.

Berkenaan dengan ilustrasi ketamakan manusia, amat menarik untuk direnungkan, sebagaimana diingatkan oleh Nabi Muhammad Saw., bahwa ketamakan manusia itu tiada batas. Kalau saja diberi satu ladang yang berisi emas, maka niscaya manusia akan terus mencari ladang emas yang kedua. Kalau manusia diberi dua ladang emas, maka dia tetap akan mencari ladang emas yang ketiga dan seterusnya.

Hal ini menggambarkan betapa ketamakan manusia itu tidak akan pernah terpenuhi kecuali kalau dia sudah makan tanah atau mati.



DRAMA PENCARIAN *SHAKHRAH*

Di bawah kekhalfahan ‘Umar, umat Islam telah menaklukkan Yerusalem. Singkat cerita, ‘Umar pun datang ke Yerusalem dan menyepakati sebuah perjanjian yang disebut “Perjanjian Aelia”.

Ada peristiwa yang menarik setelah perjanjian itu, yaitu ketika ‘Umar mau shalat dan bertanya kepada seorang Patriak:

‘Umar: Patriak, di mana saya harus shalat?

Patriak: Shalatlah di situ (maksudnya di Gereja Kiamat)!

‘Umar: Tidak, saya tidak mau shalat di situ.

Kemudian ‘Umar turun sedikit ke anak tangga, lalu shalat sendirian di gerbangnya, mungkin shalat syukur, karena telah bisa menaklukkan Yerusalem. Setelah selesai shalat terjadi dialog lagi:

‘Umar: Patriak, tahukah Anda kenapa saya tidak mau shalat di dalam gereja Anda?

Dan tidaklah manusia itu mempunyai sesuatu kecuali yang dia usahakan.

(Q., 53: 39)

Patriak: Tidak, memangnya kenapa?

‘Umar: Kita ‘kan dalam suasana perang, kalau saya shalat di dalam gereja Anda, Anda nanti akan kehilangan gereja, karena orang-orang Islam itu akan mengira bahwa gereja ini telah menjadi Masjid.

Atas peristiwa itu, Gereja Kiamat sampai sekarang masih tetap bertahan. Hanya, di depannya kemudian didirikan masjid kecil. Ini sesuai dengan wasiat ‘Umar, “Di sini boleh dijadikan tempat untuk shalat, tetapi tidak boleh ada jamaah dan tidak boleh ada azan.” Meskipun kecil, masjid tersebut dibuat tinggi sekali supaya bisa lebih tinggi dari gereja. Secara simbolik, berarti orang Islam tidak boleh kalah. Itulah yang disebut masjid ‘Umar. Tetapi yang lebih penting ketika itu ialah pertanyaan ‘Umar kepada Patriak, “Patriak, menurut Nabi Muhammad Saw., Nabi Sulaiman dulu pernah membuat masjid, dan Nabi Muhammad pernah berkunjung ke situ, di mana bekas masjidnya Nabi Sulaiman itu?”

Pada mulanya, Patriak takut menjawab karena kalau nanti ‘Umar tahu pasti akan marah, sebab sudah menjadi tempat pembuangan sampah. Konon, Patriak selalu menunjukkan tempat yang bagus-bagus tetapi ‘Umar selalu menolak. Akhirnya, terpaksa ‘Umar dibawa ke tempat velbak. Dan benar bahwa ‘Umar

sangat marah. Ibn Taimiyah melukiskan sebagai berikut, “‘Umar pun masuk ke dalam kompleks masjid itu dan di atas *Shakhrab* didapatinya tumpukan sampah yang mengunung yang diletakkan di sana oleh orang Kristen sebagai penghinaan kepada orang Yahudi.” ‘Umar kemudian memerintahkan kepada Patriak itu untuk memimpin membersihkan velbak dan diberi bagian yang paling kotor, yaitu kotoran manusia. Tetapi setelah itu ‘Umar sendiri menyingsingkan lengan baju dan turut membersihkan sampah itu sampai bersih. Dan ketika *Shakhrab* terlihat, Umar berkata, “Inilah yang dilukiskan oleh Nabi kepada kami.” Dia merasa yakin bahwa inilah yang dia cari. Kemudian ‘Umar bertanya kepada Ka’ab, salah seorang sahabat Nabi bekas seorang Yahudi, “Hai Ka’ab, sekarang kita harus shalat, di mana sebaiknya kita harus shalat?” “Di sini, dari titik *Shakhrab*, ke sebelah Utara (maksudnya sekaligus menghadap *Shakhrab* dan Ka’bah di Makkah),” jawab Ka’ab. ‘Umar berkata sambil marah, “Kamu ini masih Yahudi juga, masa kita disuruh menyembah *Shakhrab*”.

‘Umar kemudian memilih tempat sebelah selatan, membelakangi *Shakhrab* dan menghadap Ka’bah. Inilah yang kelak akan didirikan masjid oleh Ibn Abdul Malik. Sedangkan di atas *Shakhrab* didirikan sebuah monumen yang sampai

sekarang masih megah berdiri dan termasuk bangunan yang paling indah di muka bumi, yaitu *Qubbat Al-Shakbrah (The Dome of the Rock)* oleh Abdul Malik ibn Marwan, kurang lebih pada abad ke-7, jadi lebih tua sedikit dari Borobudur.

Sekarang, mengapa Nabi Muhammad pergi ke Yerusalem dalam Isra? Jelas itu semacam kunjungan kehormatan, karena memang sebagian besar nabi-nabi yang kita hafal namanya adalah tokoh-tokoh Palestina, kecuali yang bukan adalah—kalau kita urut—Adam, Idris, Nuh, Shaleh, Hud dan Ibrahim, karena waktu itu orang Yahudi belum ada. Tetapi setelah Ibrahim, mulai dengan Isma'il, Ishaq dan Ya'qub, itu hampir semuanya adalah tokoh-tokoh Yerusalem sampai dengan Nabi Isa Al-Masih.

Jadi Nabi itu menunjukkan bahwa beliau telah datang untuk mengakhiri deretan semua Nabi, maka terjadilah shalat dan beliau menjadi imam. Dan lagi mereka itu adalah sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Para nabi itu adalah “misanan” dengan Nabi Muhammad Saw. Ketika Nabi Isma'il lahir kemudian disusul oleh Nabi Ishaq, Allah Swt. memang mengatakan bahwa perjanjian-Nya kepada Ibrahim akan melalui Ishaq, maksudnya perjanjian untuk melahirkan nabi-nabi. Melalui Isma'il, akan ada hanya satu Nabi, tetapi keturunannya

akan menjadi bangsa yang besar sekali. Dari keturunan Nabi Isma'il itu hanya Muhammad Saw. yang menjadi nabi, sementara dari keturunan Ishaq ada banyak sekali. Meskipun demikian, karena fungsinya sebagai penutup dari semua nabi, maka bangsa yang dipimpin Muhammad itu akhirnya menjadi besar sekali dan menguasai seluruh Timur Tengah sekarang ini sampai ke Spanyol dan India di sebelah Timur. Jadi janji Allah Swt. kepada Ibrahim ternyata benar.

Kalau ada orang yang tidak percaya pada kejadian Isra-Mi'raj, biasanya hanya karena waktu itu secara fisik masjid Nabi Sulaiman tidak ada dan sebagainya. Padahal alasan itu tidak relevan.



DRAMA PENCIPTAAN MANUSIA

Iblis kurang lebih adalah nenek moyang setan. Tetapi terdapat semacam hal yang tidak simetris karena ada yang menafsirkan bahwa mula-mula iblis adalah kepala malaikat yang sekarang digantikan oleh Jibril. Dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam, Jibril dipercaya sebagai kepala para malaikat (*The Ark Angel to Gabriel*). Dalam bahasa Ibrani, *gabriel* berarti utusan Allah, yaitu utusan untuk membawakan wahyu. Kedudukan ini dulu ditempati oleh iblis, sampai akhirnya ia

menjadi jahat karena peristiwa yang dilukiskan dalam suatu drama kosmis mengenai ditunjuknya Adam sebagai khalifah di bumi.

Dalam menciptakan Adam, Allah menyatakan bahwa Adam akan ditunjuk sebagai khalifah, pengganti Allah di bumi, sebab Allah tidak akan menciptakan segala-galanya. Maka penciptaan Adam dimaksudkan agar manusia dapat menciptakan hal bermanfaat bagi dirinya dari bahan-bahan yang sudah tersedia. Misalnya Allah tidak menciptakan mobil, tetapi mobil harus kita ciptakan sendiri dengan bahan-bahan yang telah disediakan oleh Tuhan. Oleh karena itu para malaikat kemudian protes, “*Engkau akan menempatkan (orang) yang akan merusak di sana, yang akan membuat pertumpahan darah?*” (Q., 2: 30). Lahirnya protes ini karena dalam prediksi para malaikat, Adam dan keturunannya adalah makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan akan banyak menumpahkan darah.

Prediksi para malaikat yang demikian, menurut para ahli tafsir, didasarkan pada asal kejadian Adam yang diciptakan dari tanah, sesuatu yang tidak begitu suci. Dengan asal yang tidak begitu suci, maka akan membawa kepada hal-hal yang tidak suci pula, yaitu aktivitas jahat yang dilukiskan sebagai merusak dan menumpahkan darah. Dari sini

jelas bahwa kerusakan yang ada di bumi lebih banyak disebabkan oleh manusia. Memang ada bencana-bencana alam yang dahsyat seperti Krakatau yang memisahkan Sumatera dari Jawa, Gunung Fisuvius yang menimbun sama sekali Kota Bombay, tetapi itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kerusakan-kerusakan akibat Perang Dunia Kedua, apalagi kalau masalahnya adalah manusia yang menjadi korban. Dari orang Yahudi yang dibunuh oleh Jerman saja mencapai enam juta jiwa, sementara korban mati akibat gunung Krakatau meletus hanya puluhan ribu jiwa, begitu juga korban yang tertimbun oleh Gunung Fisuvius. Dari sini diketahui, prediksi malaikat bahwa manusia akan membuat kerusakan di bumi dan akan banyak menumpahkan darah adalah benar.

Protes para malaikat diteruskan dengan “... *padahal kami bertasbih memuji-Mu*” (Q., 2: 30). Secara implisit seolah malaikat mengatakan “kenapa tidak kami yang suci ini yang ditunjuk sebagai khalifah?” Tetapi Tuhan membantah karena untuk menjadi khalifah tidak ada kaitannya dengan kesucian. Kemudian ada proses pengajaran ilmu pengetahuan, *Dan Ia mengajarkan kepada Adam sifat-sifat semua benda* (Q., 2: 31). Seolah Tuhan mengatakan “yang relevan untuk men-

jadi khalifah adalah ilmu, bukan kesucian”; bahwa yang bisa mengurus dunia adalah orang berilmu dan bukan orang yang hanya banyak ibadah. Dan nama-nama yang diajarkan kepada Adam merupakan simbolisasi dari ilmu pengetahuan. Memang terdapat perselisihan dalam masalah ini; ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah *al-asmâ’ al-husnâ* (Nama-nama Tuhan yang indah), ada yang mengatakan nama-nama yang ada di langit, dan



ada yang mengatakan itu merupakan proses manusia berbahasa sebab manusia adalah satu-satunya makhluk yang berbahasa. Tetapi yang lebih masuk akal adalah bahwa yang dimaksud dari diajari seluruh nama-nama adalah diberikan kapasitas untuk mengenali lingkungan dan memahaminya serta kemudian memanfaatkannya. Inilah kelebihan Adam atau umat manusia dibandingkan malaikat.

Dengan kelebihan yang dimiliki Adam, para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepadanya. Sujud di sini juga metafora, yaitu mengakui keunggulan Adam. “... mereka pun sujud; tidak demikian iblis (Q., 2: 34). Berdasarkan ini,

kemudian iblis menjadi tokoh utama dari kekuatan jahat, yang dalam masyarakat disebut setan.

Mengatakan iblis sebagai bekas kepala malaikat sebenarnya terdapat persoalan teologis, karena malaikat tidak beranak dan beristri, tidak makan dan minum, dan tidak mati.

Dalam masalah tidak mati memang ada kesamaan antara malaikat dengan iblis, tetapi iblis beranak dan beristri serta makan dan minum. Maka dalam tafsiran yang lebih

metaforis, terutama umum di kalangan kaum sufi dan para filsuf, malaikat sebenarnya adalah simbolisasi dari kekuatan baik, sedangkan setan adalah simbolisasi dari kekuatan jahat. Kedua kekuatan tersebut tidak akan lepas dari manusia; di dalam manusia terdapat malaikat dan setan sekaligus. Pandangan demikian didukung ayat suci, *Katakanlah, “aku berlindung kepada Tuhan yang mengurus manusia. Raja (atau Penguasa) bagi manusia. Tuhan (atau Hakim) bagi manusia. Dari jahatnya pembisik (setan), yang menarik diri (setelah berbisik). Yang berbisik dalam hati manusia. Dari golongan jin dan manusia”* (Q., 114: 1-6). Dari sini jelas terdapat

indikasi bahwa sumber kejahatan adalah juga diri kita sendiri. Artinya, selain secara konvensional kita membayangkan adanya setan sebagai entitas tersendiri di luar kita, tetapi juga terdapat indikasi bahwa setan adalah bagian dari kedirian kita sendiri, yaitu berupa dorongan-dorongan kejahatan.



DUA ASPEK IBADAH

Sebetulnya ibadah itu memiliki dua aspek, yakni aspek lahir dan aspek batin. Di sini penulis ingin membawa kepada renungan yang lebih mendalam kepada shalat, karena pada kenyataannya Tuhan masih mengutuk orang yang shalat, *Celakalah orang-orang yang shalat itu!* (Q., 107: 4). Itu berarti ada persoalan lahir dan batin, formali dan maknawi. Berkenaan dengan ayat tadi maka bisa ditarik kesimpulan dalam konteks keseluruhan firman itu, bahwa yang diharapkan dari shalat adalah memerhatikan anak yatim, orang miskin, dan sebagainya. Bahkan bahasanya keras sekali, *Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? (yukadzdzib bi al-dîn [Q., 107: 1]). Yukadzdzib* itu lebih aktif daripada *yakdzib*, yakni tidak berdusta dalam agama, tetapi mendustakan agama. Siapa orang itu? Yaitu, *Mereka yang menghardik*

anak yatim (yadu'u al-yatîm), dan tidak peduli dengan nasibnya orang miskin (yahudldlu 'alâ tha'âm al-miskîn) (Q., 107: 2-3)

Sesungguhnya perkataan *yahudldlu* itu artinya “membela dengan keras, dengan kuat sekali (*strongly*).” Kemudian dilanjutkan, *Maka celakalah orang yang shalat itu, yaitu mereka yang lupa atas shalat mereka sendiri (Q., 107: 4-5)* Ayat ini agak menipu (*tricky*), karena yang dimaksud bukanlah lupa shalat, namun bahwa kita setiap hari shalat tapi tidak memiliki efek kepada pembentukan karakter atau kepribadian. Kita lupa kepada shalat itu sendiri. Shalat yang kita lakukan adalah untuk *riya*, untuk kepentingan yang sifatnya ke samping (*horizontal*), misalnya untuk lobi bisnis, supaya terlihat orang, dan sebagainya.

Kemudian dalam akhir ayat itu ada penegasan, *Dan berkorban sedikit saja tidak mau (Q., 107: 7)*. Kita dianjurkan untuk berkorban. Korban hendaknya dipilih binatang yang gemuk dan sehat untuk nanti dibagikan kepada orang miskin. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa yang sampai kepada-Nya itu bukan daging atau darah kurban itu sendiri, melainkan ketakwaan dalam diri kita. Sebab takwa ini ditunjukkan dengan perhatian kepada orang lain. Memberi daging kepada orang miskin dengan penuh kasih sayang

dan sebagainya adalah takwa, sehingga itu yang dihitung. Banyak sekali contoh mengenai hal ini, di antaranya Haji. Karena haji itu telah berjalan sekian ribu tahun maka kemudian mengalami perubahan. Kalau menurut kitab-kitab, semua nabi itu pernah haji ke Makkah. Tentu saja hal itu diingkari agama-agama lain termasuk agama-agama yang paling dekat ke Islam, yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Tapi dalam kitab Mazmur 84 ayat 567, disebutkan mengenai Isma'il yang tinggal di dekat rumah Tuhan yang sebelahnya ada air, dan kota itu disebut Bakkah.

Jadi artinya haji itu sudah berjalan lama sebelum Nabi Muhammad. Kalau Islam mengatakan bahwa haji dimulai sejak Nabi Ibrahim, berarti 2500 tahun sebelum Nabi Muhammad. Kalau Nabi Ibrahim itu lahirnya sama dengan Nabi Isa, maka kita harus menunggu 500 tahun untuk datangnya Nabi Muhammad. Bayangkan!



DUA DOSA

Dosa itu ada dua, dosa hak Allah dan dosa hak manusia. Dosa kepada Allah urusannya dengan Allah, sedang dosa kepada manusia harus minta maaf dulu kepada orang yang bersangkutan. Sekarang misalnya korupsi, itu dosa kepada

siapa? Kepada seluruh rakyat! Oleh karena itu ada sedikit masalah. Di dalam mencuri sudah jelas siapa yang beruntung dan siapa yang menjadi korban. Yang “beruntung” ialah pencurinya, sedang yang menjadi korban ialah orang yang kecurian. Karena jelas maka hukumannya juga jelas, potong tangannya! Tapi kalau korupsi itu kurang jelas siapa yang dirugikan, karena korupsi itu adalah hasil dari suatu proses atau mekanisme akibat tradisi suap-menyuap, yang masuk kategori *risywah*. Maka, tidak ada hukumannya dalam Al-Quran, tapi hukumannya ialah laknat Allah; “*Allah melaknat orang-orang yang menyuap dan yang menerima suap serta yang menjadi perantara.*”

Memang, sulit sekali, sehingga kita lihat bagaimana orang yang mencuri ayam dihukum, tapi orang mencuri miliaran tidak. Sebabnya jelas sekali: mencuri ayam ada yang menjadi korban dan ada yang beruntung, tapi kalau korupsi yang menjadi korban adalah seluruh rakyat. Dan karena terbagi rata sekian ratus juta, maka masing-masing orang merasa tidak dirugikan, padahal sangat dirugikan; maka hukuman korupsi ialah laknat Allah.

Dalam ibadah puasa pun disebutkan bahwa hikmah berpuasa itu mendidik kita untuk tidak korup, yaitu firman Allah dalam deretan ayat puasa. *Janganlah kamu mema-*

kan harta sesamamu dengan cara yang tidak benar, kemudian kamu bawa kepada para ahli hukum, supaya kamu dapat dibenarkan memakan harta orang lain secara dosa (Q., 2: 188). Artinya korupsi itu bisa dilindungi oleh hukum. Karenanya sekarang ini banyak sekali ahli hukum yang “panen”. Kemudian terusan ayat itu, “Padahal kamu sendiri tahu.” Nah, semua koruptor tahu bahwa sebenarnya dia itu jahat.

Jadi kenapa sampai sekarang membuktikan korupsi itu sulit sekali, karena memang ada “perlindungan hukum” persis seperti yang dimaksudkan Al-Quran di atas. Maka, salah satu obatnya ialah mendidik untuk jujur pada diri sendiri. Kita jujur kepada Allah Swt., yaitu iman di dalam kegaiban, baru kemudian jujur kepada sesama manusia. Itulah puasa. Mengapa kita di dalam keadaan lapar dan haus sendirian di kamar dan ada kulkas tetapi tidak minum, karena kita tahu Allah melihat. Semuanya ini harus diperluas kepada seluruh kehidupan kita. Puasa adalah mengingkari diri sendiri. Dalam bahasa Sanskerta, puasa artinya “menunda kesenangan”. Memang dalam jangka pendek seperti sengsara, tetapi akibat jangka panjang puasa, kita bahagia. Kalau orang semuanya begitu, masyarakat akan makmur. Ini seperti dibuktikan oleh negeri-negeri yang bersih seperti Singa-

pura, Finlandia, dan sebagainya. Akhirnya seluruh rakyat jadi bahagia. Finlandia itu luar biasa sampai tidak ada lagi masalah. Sebab kalau ada warga yang kena salah sedikit saja, mereka bunuh diri. Karena terlalu makmur dan adilnya, Finlandia seperti tidak memiliki masalah. Begitu merasa tidak tahan dengan masalah, akan bunuh diri.



DUA JENIS KIAI

Kiai itu ada dua, kiai zahir dan kiai mastur. Kiai zahir adalah lahirnya memang kiai. Semua orang menghormatinya; ia memiliki kharisma, pengikut, dan sebagainya. Tapi ada juga kiai mastur, yaitu kiai tersembunyi. Kiai mastur itulah yang disebut pasak bumi, di dunia ini kira-kira jumlahnya sekitar 40-an. Tapi mereka ada di setiap zaman. Berarti setiap ada yang mati, ada yang mengganti. Mereka unggul terhadap orang lain bukan karena lebih banyak shalat atau lebih banyak puasa, tapi karena memiliki budi pekerti yang tinggi dan cinta kepada Allah. Oleh karena itu mereka tidak kelihatan seperti orang biasa. Hadis Nabi yang mengatakan bahwa dunia ini dijaga oleh empat puluh orang yang disebut *awsath al-ardl*, ciri-cirinya adalah seperti itu.



DUA KEBAIKAN IJTIHAD

Ada peringatan dalam Kitab Suci bahwa sungguh besar dosanya di sisi Allah jika kita mengatakan sesuatu (termasuk mengatakan menganut sistem ajaran tertentu), namun tidak melaksanakannya (Q., 61: 3). Maka Islam, yang menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat, akan mewujudkannya hanya jika Islam sepenuhnya dilaksanakan. Tentu saja kemampuan manusia melaksanakan suatu ajaran tergantung kepada keadaan masing-masing. Sejarah menunjukkan tidak adanya suatu masa atau periode pelaksanaan Islam dalam masyarakat yang bebas sama sekali dari kekurangan, termasuk dalam masalah yang disebut “Zaman Keemasan”. Penglihatan ini mendapatkan landasannya dalam Kitab Suci, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepada-Nya “sedapat mungkin” (Q., 64: 16), dan bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya (Q., 2: 286). Oleh karena itu, yang menjadi perhitungan tentang amal perbuatan manusia

Keinginan untuk berkumpul dengan sesama (le desire d'être ensemble) adalah naluri manusia sebagai makhluk sosial. Keinginan berkumpul juga merupakan keinginan untuk menyatakan pendapat dan mewujudkannya secara bersama.

ialah timbangan mana yang lebih berat, kebaikannya atautkah kejahatannya (Q., 101: 6-9).

Tetapi justru dalam pengertian “sedapat mungkin” dan “sesuai dengan kemampuan” tersebut terdapat pesan agar manusia, dalam melaksanaka-

kan ajaran Tuhan, tidak bersikap sekadarnya saja, melainkan berusaha dengan sungguh-sungguh sampai kepada puncak kemungkinan dan kemampuannya yang tertinggi.

Ini adalah hakikat *ijtihâd*, suatu bentuk tanggung jawab moral seseorang kepada kewajiban melaksanakan ajaran yang diyakininya. Sebagai suatu tanggung jawab moral, *ijtihâd* mengandung kebaikannya (*merit*) sendiri, sehingga ia tetap mendapatkan pahala sekalipun ternyata menghasilkan sesuatu yang salah atau kurang tepat. Dan jika ternyata hasil *ijtihâd* itu tepat, maka *merit*-nya menjadi ganda: *pertama* karena adanya pelaksanaan tanggung jawab moral melakukan *ijtihâd* itu sendiri, dan *kedua* karena pelaksanaan yang tepat dari ajaran itu. Karena itu Nabi Saw. menegaskan bahwa orang yang berijtihad dan tepat akan mendapatkan dua

pahala, dan orang yang berjihad namun keliru, maka ia masih mendapatkan satu pahala.



DUA KUBU FIQH: HIJAZ DAN IRAK

Di bawah pimpinan Khalifah Mu'awiyah (masa kekhalifahannya disebut Ibn Taimiyah sebagai permulaan masa “kerajaan dengan rahmat”—*al-mulk bi al-rahmah*) kaum Muslim dapat dikatakan kembali pada keadaan seperti zaman Abu Bakar dan 'Umar (zaman *al-syaykhân*, “Dua Tokoh”) yang amat dirindukan orang banyak termasuk para “aktivis militan” yang membunuh 'Utsman (dan yang kemudian [ikut] mensponsori pengangkatan 'Ali namun akhirnya berpisah dan menjadi golongan Khawarij). Apa pun kualitas kekhalifahan Mu'awiyah itu, namun dalam hal masalah penegakan hukum mereka tetap sedapat mungkin berpegang dan meneruskan tradisi para khalifah di Madinah dahulu, khususnya tradisi 'Umar. Karena itu ada semacam “koalisi” antara Damaskus dan Madinah (tetapi suatu koalisi yang tak pernah sepenuh hati, akibat masalah keabsahan kekuasaan Bani Umayyah itu). Tapi “koalisi” itu mempunyai akibat cukup penting dalam bidang fiqh, yaitu tumbuhnya orientasi hukum (Islam) kepada

Hadis atau Tradisi (dengan “T” besar) yang berpusat di Madinah dan Makkah serta mendapat dukungan langsung atau tak langsung dari rezim Damaskus.

Sementara banyak tokoh Madinah sendiri tetap mempertanyakan keabsahan rezim Umayyah itu, Irak dengan kota-kota Kufah dan Bashrah adalah kawasan yang selalu potensial menentang Damaskus secara efektif. Ini kemudian berdampak pada tumbuhnya dua orientasi dengan perbedaan yang cukup penting: Hijaz (Makkah-Madinah) dengan orientasi hadisnya, dan Irak (Kufah-Bashrah) dengan orientasi penalaran pribadinya (*ra'y*). Penjelasan menarik tentang hal ini diberikan oleh Syaikh Ali Al-Khafif:

“Pada zaman itu (zaman *tâbi'in*), dalam *iftâ* (pemberian fatwa) ada dua aliran: aliran yang cenderung pada kelonggaran dan bersandar atas penalaran, *qiyâs*, penelitian tentang tujuan-tujuan hukum dan alasan-alasannya sebagai dasar ijtihad. Tempatnya ialah Irak. Dan aliran yang cenderung tidak pada kelonggaran dalam hal tersebut, dan hanya bersandar kepada bukti-bukti *âtsâr* (peninggalan atau “petilasan”, yakni tradisi atau Sunnah) dan nas-nas. Tempatnya ialah Hijaz. Adanya dua aliran itu merupakan akibat yang wajar dari situasi masing-masing, Hijaz dan Irak.

Hijaz adalah tempat tinggal kenabian. Di situ Rasul menetap, menyampaikan seruannya, kemudian para sahabat beliau menyambut, mendengarkan, memelihara sabda-sabda beliau dan menerapkannya. Dan (Hijaz) tetap menjadi tempat tinggal banyak dari mereka (para sahabat) yang datang kemudian sampai beliau wafat. Kemudian mereka ini mewariskan apa saja yang mereka ketahui kepada penduduk (berikut)-nya, yaitu kaum *tâbi'in* yang bersemangat untuk tinggal di sana.

Sedangkan Irak telah mempunyai peradabannya sendiri, sistem pemerintahannya, kompleksitas kehidupannya, dan tidak mendapatkan bagian dari Sunnah kecuali melalui para sahabat dan *tâbi'in* yang pindah ke sana. Dan yang dibawa pindah oleh mereka itu pun masih lebih sedikit daripada yang ada di Hijaz. Padahal peristiwa-peristiwa (hukum) di Irak itu, disebabkan masa lampau, adalah lebih banyak daripada yang ada di Hijaz; begitu pula kebudayaan penduduknya dan terlatihnya mereka itu kepada penalaran, adalah lebih luas dan lebih banyak. Karena itu, keperluan mereka kepada penalaran lebih kuat terasa, dan penggunaannya juga lebih banyak. Penyandaran diri kepadanya juga lebih jelas tampak mengingat sedikitnya Sunnah pada mereka itu tidak memadai un-

tuk semua tuntutan mereka. Ini masih ditambah dengan kecenderungan mereka untuk banyak membuat asumsi-asumsi dan perincian karena keinginan mendapatkan tambahan pengetahuan, penalaran mendalam dan pelaksanaan yang banyak.”

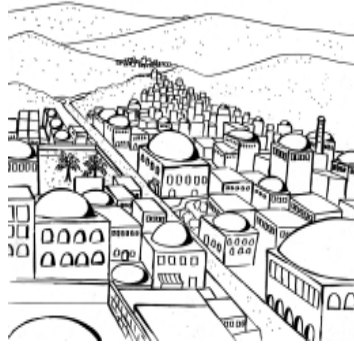
Jika dikatakan bahwa orang-orang Hijaz adalah *ahl al-riwâyah* (“kelompok riwayat”, karena mereka banyak berpegang pada penuturan masa lampau, seperti hadis, sebagai pedoman) dan orang-orang Irak adalah *ahl al-ra'y* (“kelompok penalaran”, dengan isyarat tidak banyak mementingkan “riwayat”), sesungguhnya itu hanya karakteristik gaya intelektual masing-masing daerah itu. Sedangkan pada tingkat individu, cukup banyak dari masing-masing daerah yang tidak mengikuti karakteristik umum itu. Maka, di kalangan orang-orang Hijaz terdapat seorang sarjana bernama Rabi'ah yang tergolong “kelompok penalaran”, dan di kalangan para sarjana Irak, kelak tampil seorang penganut dan pembela “kelompok riwayat” yang sangat tegar, yaitu Ahmad ibn Hanbal. Di samping itu, membuat generalisasi bahwa sesuatu kelompok hanya melakukan satu metode penetapan hukum, apakah itu penalaran atau penuturan riwayat, adalah tidak tepat. Terdapat persilangan antara keduanya, meskipun masing-masing tetap

dapat dikenali ciri utamanya dari kedua kategori tersebut. Ini semakin memperkaya pemikiran hukum zaman *tâbi`în*.



DUA PENGHAYATAN KEAGAMAAN

Sebagai sistem ajaran keagamaan yang lengkap dan utuh, Islam memberi tempat kepada jenis penghayatan keagamaan eksoterik (*zhâ-hirî*, lahirî) dan esoterik (*bâthinî*, batini) sekaligus. Tapi, meskipun tekanan yang berlebihan kepada salah satu dari kedua aspek penghayatan itu akan menghasilkan kepincangan yang menyalahi prinsip equilibrium (*tawâzun*) dalam Islam, namun kenyataannya banyak kaum Muslim yang menghayati keislamannya lebih mengarah kepada yang lahiriah (lalu disebut *Ahl Al-Zhawâhir*) dan banyak pula yang lebih mengarah kepada yang batini (dan disebut *Ahl Al-Bawâthin*). Kaum syariat, yaitu mereka yang lebih menitikberatkan perhatian kepada segi-segi syariat atau hukum, sering juga disebut kaum lahirî. Sedangkan kaum *tha-*



riqah, yaitu mereka yang berkecimpung dalam amalan-amalan “tarekat”, dinamakan kaum batini. Seperti dikatakan oleh Al-Randi, seorang ahli kesufian dan pemberi syarah kitab *Al-Hikam*, sebuah buku teks tentang tasawuf yang terkenal, bahwa kaum Muslim dalam ibadahnya terbagi menjadi dua: satu kelompok lebih menitikberatkan kepada “ketentuan-ketentuan luar” (*ahkâm al-zhawâhir*, yakni segi-segi lahiriah)

dan satu kelompok lagi lebih menitikberatkan kepada ketentuan-ketentuan “dalam” (*al-dlâmâ`ir*, yakni segi-segi batiniyah).

Dalam sejarah pemikiran Islam, antara kedua orientasi penghayatan keagamaan itu sempat terjadi ketegangan dan polemik, dengan sikap saling menuduh bahwa lawannya adalah penyeleweng dari agama dan sesat, atau penghayatan keagamaan mereka tidak sempurna. Dari banyak usaha merekonsiliasi antara keduanya itu yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali adalah yang terbesar dan paling berhasil. Maka melalui pemikiran Al-Ghazali, syariat dan tarekat mengalami perpaduan, dengan hubungan antara keduanya yang saling menunjang.

Ajaran *tharîqah* yang terpadu secara baik dengan ajaran syariat diakui sebagai *mu'tabarah* (absah), dan yang tidak memenuhi kriteria itu dinyatakan sebagai *ghayr mu'tabarah* (tidak absah). Organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) memerhatikan masalah ini, dan membentuk badan yang dinamakan *Jam'iyah Tharîqah Mu'tabarah* (Perkumpulan Tarekat Mu'tabarah). Mukhtar NU di Situbondo 1984 menetapkan bahwa salah satu ketentuan tentang paham Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamaah ialah, dalam bidang tasawuf, mengikuti tarekat *mu'tabarah* dengan berpedoman kepada ajaran Imam Al-Ghazali, di samping kepada ajaran para tokoh kesufian Sunni yang lain.



DUNIA BARAT

Kawasan luas dunia Islam sekarang ini, khususnya Timur Tengah, sebagian besar adalah bekas daerah-daerah Kristen. Beberapa kawasan di antaranya, seperti Syria dan Mesir, juga Turki Eropa, adalah bekas pusat-pusat Kristen yang amat menentukan dalam masa-masa paling formatif agama itu. Sekarang Dunia Kristen lebih banyak diwakili oleh dunia Barat. Dunia Barat sekarang ini lebih merupakan kawasan budaya gabungan antara unsur-unsur

Yunani-Romawi kuno dan Yahudi-Masehi (yang oleh Simon van den Berg dilukiskan sebagai dunia "*Maria sopra Minerva*"), yakni kultus kepada Maria, ibunda Isa Al-Masih, sebagai kelanjutan mitologi dewi Minerva dari kepercayaan Romawi kuno, yang sepadan dengan dewi Athena dari kepercayaan Yunani kuno). Walaupun begitu, dunia Barat tidak pelak lagi melihat dirinya sebagai wakil agama Kristen, khususnya dalam menghadapi dunia Islam. Tentu saja contoh yang paling baik ialah peristiwa Perang Salib di Timur Tengah, juga perang penaklukan kembali di Semenanjung Iberia.

Maka, sebelah lain dari keping uang itu ialah adanya pandangan yang sangat umum di kalangan Islam bahwa dunia Barat masih terus menunjukkan permusuhannya kepada Islam dalam semangat Perang Salib. Meskipun kini sekularisme telah menggantikan konsep-konsep kenegaraan teokratis Kristen dan membawa Barat ke tingkat pencerahan yang jauh lebih tinggi dan berkemanusiaan yang lebih adil dan beradab, namun masih banyak kasus hubungan sengit antara dunia Islam dan dunia Barat yang ditafsirkan sebagai kelanjutan permusuhan keagamaan tadi. Hubungan sengit itu tidak hanya terdapat pada dataran politik, tetapi juga dalam bentuk-bentuk sikap ofensif da-

lam kebudayaan. Kejadian beberapa waktu yang lalu, yaitu peristiwa buku *Ayat-Ayat Setan* yang sangat merendahkan martabat Nabi oleh Salman Rushdi, sungguh menjengkelkan umat Islam. Tetapi sesungguhnya yang lebih menjengkelkan ialah sikap Barat yang penuh semangat membela buku itu atas nama kebebasan, yang dalam hal ini Barat dirasakan oleh kaum Muslim bertindak dengan standar ganda. Kita akan mampu memperoleh pengertian yang sedikit lebih seimbang mengenai masalah ini jika kita menyempatkan diri melihat bagaimana kalangan orang Barat sendiri, yang mencoba untuk objektif (meskipun tidak berarti selalu simpatik), memandang Nabi.



DUNIA DAN AKHIRAT

Seorang Muslim diajari untuk mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan ganda itu dilambungkan dalam doa yang paling banyak dibaca sehari-hari, terambil dari rangkaian firman Allah, *Maka di antara manusia ada yang berkata, "Hai Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia."* Dan tiadalah untuknya suatu bagian apa pun di akhirat. Dan di antara mereka ada yang berkata, *"Hai Tuhan kami, berilah kami di dunia kebaikan dan*

di akhirat kebaikan, serta lindungilah kami dari azab neraka." Itulah mereka yang mendapat bagian (kebaikan) dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah Mahacepat dalam perhitungan (Q., 2: 200-202).

Sebenarnya firman itu berada dalam rangkaian ketentuan tentang ibadah haji. Sebelumnya, didahului dengan firman, *Tidak ada larangan atas kamu untuk mencari kemurahan dari Tuhanmu ...* (Q., 2: 198). Jadi ditegaskan bahwa pada musim ibadah haji seseorang tidak dilarang melakukan kegiatan ekonomi seperti berdagang dan mencari keuntungan sebagai kemurahan Tuhan, sambil melakukan ibadah. Ini merupakan pembatalan adat Arab Jahiliyah yang melarang orang berdagang di musim haji.

Sekalipun begitu kemudian diisyaratkan bahwa hendaknya orang tidak hanya mengejar tujuan hidup kebaikan dunia semata, sebab kelak di akhirat ia akan tidak mendapatkan suatu bagian apa pun. Sebaliknya, diisyaratkan hendaknya orang mengejar kebaikan di dunia dan di akhirat sekaligus, disertai harapan semoga terhindar dari azab kesengsaraan. Ini dinyatakan dalam doa yang kemudian paling banyak dibaca oleh kaum Muslim.

Maka tersurat maupun tersirat dari firman itu menunjukkan bahwa dunia dan akhirat adalah dua hal yang berbeda; suatu pandangan

hidup Islam yang jelas. Di situ ditegaskan bahwa orang yang mengejar dunia semata, di akhirat tidak memperoleh suatu apa pun. Dengan kata lain, dunia dapat diperoleh secara tersendiri, tanpa dikaitkan dengan akhirat.

Di pihak lain, orang yang mengejar akhirat belaka mempunyai kemungkinan melupakan nasibnya di dunia sehingga terbengkalai. Terdapat peringatan dalam Kitab Suci, *Dan carilah kampung (kehidupan) akhirat dalam apa yang Allah telah karuniakan kepadamu, namun jangan kamu lupa nasibmu dari (kehidupan) dunia ...* (Q., 28: 77).

Ini menunjukkan bahwa seseorang yang menginginkan kebahagiaan ukhrawi tidak dengan sendirinya akan sekaligus memperoleh kebahagiaan duniawi. Kedua-duanya harus dijadikan program hidup serentak dengan perhatian dan kesadaran yang seimbang.

Jadi, sekali lagi, terdapat perbedaan yang jelas antara dunia dan akhirat. Masalahnya lebih lanjut ialah, apakah perbedaan itu menghasilkan hubungan dikotomis atau terpisah—malah mungkin bertentangan, atautkah sebenarnya hanya menghasilkan suatu bentuk kontinuitas tertentu, berbeda namun tidak terpisah—apalagi bertentangan, dan yang pertama (dunia) merupakan persiapan bagi yang kedua (akhirat)? Perkara penting ini harus

diperjelas, karena akan mempunyai pengaruh kepada pandangan dan sikap hidup kita yang lebih menyeluruh. Sumber untuk mendapatkan kejelasan itu cukup banyak, baik dalam Kitab Suci dan Sunnah Nabi, maupun kitab-kitab para ulama. Tinggal kita harus menelaahnya secara teliti.



DUNIA DAN AKHIRAT: SEBUAH KONTINUITAS

Kita ketahui bersama bahwa ada kontinum antara hukum-hukum ketentuan Tuhan dalam kehidupan manusia yang dapat dipahami manusia secara empiris dan induktif dan menghasilkan “ilmu-ilmu sosial” di satu pihak, dan hukum-hukum ketentuan yang diajarkan Tuhan kepada manusia lewat para nabi dan rasul di lain pihak. Hal itu kiranya memperjelas bahwa “urusan dunia” dan “urusan akhirat” bukanlah dua hal yang terpisah, meskipun berbeda. “Urusan dunia” tidak lain adalah segi lebih praktis dari kebulatan hidup manusia, yang segi itu mengandung makna perbuatan dalam hidup itu dalam jangka pendek dan segera.

Ini mencocoki makna etimologis kata-kata Arab *dunyâ*, bentuk feminim dari kata-kata *adnâ*, yang artinya “lebih dekat”. Juga mencocoki

makna etimologis kata-kata *ûlâ* (istilah Arab lain untuk *dunyâ*), bentuk feminin dari *awwal*, yang artinya “pertama”. Adakalanya “dunia” ini disebut *âjilah* (dengan huruf ‘ayn), yang berarti “segera” (Q., 75: 16).

Oleh karena itu, “urusan dunia” merupakan persiapan menuju “urusan akhirat”. Sebab “urusan akhirat” itu, berdasarkan uraian di atas, tidak lain adalah segi tujuan ideal, jangka panjang, berkenaan dengan akibat atau hasil yang bakal terjadi di kemudian hari,

bahkan menyangkut yang “final”. Jika kita tilik dari makna asal kata-kata *âkhirah* (akhirat), pengertian ini tampak jelas. Sebagai bentuk feminin dari *âkhir* (akhir), perkataan akhirat itu mengandung arti dasar “yang kemudian”, yakni, sesuatu yang akan terjadi di belakang hari. Maka akhirat juga dinyatakan dalam istilah lain, yaitu *âjilah* (dengan huruf hamzah), yang artinya ialah “yang terjadi kemudian”. Dalam segi kebaikannya, Kitab Suci juga menggunakan istilah-istilah *‘âqibatu ‘l-dâr* dan *‘uqbâ ‘l-dâr*, yang keduanya itu mempunyai arti asal “kampung di belakang hari”.

Karena itu kesadaran ukhrawi atau keakhiratan adalah tidak lain

kesadaran tentang akibat atau konsekuensi dalam jangka panjang dari perbuatan seseorang. Yaitu kesadaran moral dan etis, yang diwujudkan dalam tingkah laku dan sikap penuh tanggung jawab kepada nilai intrinsik suatu tindakan, nilai yang terkait dengan usaha melindungi dan

mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan sebagai tujuan hidup bersama.

Dalam dimensinya yang final, kesadaran moral dan etis itu disangkutkan dengan orientasi hidup yang di-

jiwai dan disemangati oleh tujuan mencapai ridla Allah Yang Mahabener dan Mahabaik. Karena itu dalam bahasa yang lebih khusus, kesadaran itu disebut takwa. Dengan melihat hubungan logis antara “urusan dunia” dan “urusan akhirat” dalam artian aspek jangka pendek dan jangka panjang kegiatan hidup manusia itu, maka kita dapat memahami banyaknya janji dalam Kitab Suci bahwa sukses yang utuh dan sejati akan diberikan Allah kepada mereka yang bertakwa. Yaitu, orang yang mempunyai kesadaran, mendalam tentang apa yang akan menjadi akibat bagi segala kegiatan dan amal perbuatan-

Banyaknya simbol-simbol keagamaan di Indonesia akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kematian budaya. Sebenarnya tidak perlu dirisaukan. Sebab, agama sendiri sebenarnya dapat beradaptasi dengan budaya setempat, sedangkan budaya tidak akan mati selama memiliki autentisitas dan keabsahan.

nya jauh di belakang hari kelak, dan yang kemudian menjalankan tindakan dan amal perbuatan itu dengan penuh tanggung jawab kepada Allah dan kepada sesama manusia. *Dan bahwasanya barangsiapa bertakwa dan sabar, maka sesungguhnya Allah takkan menghilangkan ganjaran yang berbuat baik* (Q., 12: 90); *Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, maka ia akan menciptakan baginya jalan keluar (dari setiap kesulitannya), dan akan memberinya karunia dari arah yang tidak ia duga* (Q., 65: 2); *Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan membuat mudah baginya segala urusannya* (Q., 65: 4); terakhir *Dan pastilah kampung di kemudian hari itu lebih baik untuk mereka yang bertakwa, "Apakah kamu tidak pernah memikirkannya?"* (Q., 6: 32).

Seharusnya bagi kita tidak sulit memahami makna firman-firman itu jika kita mengetahui bahwa jaminan untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidup ini memang lebih banyak dipunyai oleh mereka yang memiliki kesadaran jangka panjang daripada mereka yang terkurung oleh perhitungan jangka pendek belaka. Jika kita hanya mengejar jangka pendek, maka dengan sendirinya yang jangka panjang tidak akan tercapai. Tetapi, sebaliknya, jika kita mengejar jangka panjang, maka yang jangka pendek

akan tercapai, meskipun mungkin tertunda sebentar, secara lebih mantap. Maka kita akan mendapatkan kedua-duanya, *Barangsiapa menghendaki ganjaran dunia maka (hendaknya diketahui) bahwa di sisi Allah ada ganjaran dunia dan akhirat, dan Allah itu Maha Mendengar dan Maha Melihat* (Q., 4: 134).



DUSTA: PANGKAL SEGALA DOSA

Sebuah hadis Rasulullah yang sering kita dengar mengingatkan bahwa sesungguhnya bohong atau dusta adalah titik tolak atau pangkal seluruh perbuatan dosa, "*Pangkal segala dosa adalah dusta*".

Berkenaan dengan masalah dusta ini, ada gambaran karikatural. Diceritakan bahwa ada seorang Arab Badui datang menghadap kepada Rasulullah dan ingin memeluk Islam. Ia mengungkapkan segala perilakunya dengan penuh kejujuran dan keterbukaan. Dikatakan kepada Rasulullah Saw. bahwa dirinya sulit meninggalkan perbuatan tercela atau tidak bermoral dan berakhlak, seperti mencuri, main perempuan, dan tidak segan-segan membunuh. Orang Badui tadi berharap bahwa Rasulullah Saw. memberi nasihat yang panjang lebar atau banyak agar dapat membimbingnya ke jalan yang benar. Tetapi, di luar dugaannya, ternyata

Rasulullah Saw. hanya berpesan sederhana, sangat pendek, yakni beliau hanya memintanya untuk tidak berdusta. Orang Badui tadi, setelah menghadap Rasulullah kemudian kembali, berpikiran bahwa alangkah ringannya perintah dan persyaratan Rasulullah Saw. ini: dua patah kata saja, “jangan berdusta”.

Namun anehnya, setelah itu, setiap kali akan melakukan perbuatan dosa, ia selalu teringat permintaan Rasulullah yang singkat, jangan berdusta. Di dalam hatinya selalu terbetik, kalau saya berbuat dosa, kemudian bertemu Rasulullah dan beliau bertanya tentang perbuatan saya, bagaimana saya harus menjawab? Padahal, beliau meminta saya agar tidak berdusta. Meski begitu, setelah melakukan usaha yang keras, akhirnya orang Badui tersebut berhasil mencapai keimanan dengan meninggalkan dusta.

Ternyata, hakikat keimanan jauh dari itu. Seseorang yang melakukan dosa karena dusta, sebagaimana dikatakan bahwa pangkal dosa adalah dusta, menurut para ulama salaf, adalah sama saja dengan kafir. Hal yang demikian paralel dengan sebuah hadis yang sangat populer di kalangan salaf bahwa seseorang yang beriman, tidaklah beriman ketika ia melakukan kejahatan, baik mencuri, berzina, maupun mabuk-mabukan dan sebagainya. Ini karena, saat melakukan kejahatan, dengan sendiri-

nya ia *kufur*, yakni menutup kesadaran dirinya bahwa Allah Swt. ada dan selalu mengawasi serta mengetahui segala perbuatan kita.

Dengan begitu, secara otomatis, siapa saja yang melakukan dosa dan kemudian mati pada saat sedang melakukan dosa, maka ia akan mati dalam keadaan kafir. Orang mencuri, kemudian meninggal, dapat dikatakan kafir. Orang yang melakukan korupsi kemudian mati, maka ia kafir, dan seterusnya.

Kafir artinya pengingkaran atau tidak mengakui bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan Maha Mengetahui dan Mendengar. Dengan berbuat dosa, meski orang beriman, ia dikatakan kafir karena saat melakukan dosa tersebut dengan sendirinya ia berkeyakinan bahwa Tuhan tidak melihatnya; Tuhan tidak mendengar. Maka, kita terus dianjurkan oleh Rasulullah Saw. agar selalu berdoa kepada Allah Swt. sebagaimana tercantum dalam surat Al-Fâtiḥah, *Tunjukilah kami jalan yang lurus* (Q., 1: 6).

✽

